

**PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH HIDAYATUL MUHSININ
LABULIA KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TESIS

Oleh

**MUHLIS RAISIN
NIM. I2K013033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
2015**

**PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERENCANAAN PENDIDIKAN
DI MADRASAH ALIYAH HIDAYATUL MUHSININ
LABULIA KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan pada Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Program Pascasarjana Universitas Mataram

Oleh

MUHLIS RAISIN
NIM. I2K013033

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MATARAM
2015

PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS UNTUK DIUJIKAN

Tesis yang berjudul : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan di
Madrasah Aliya Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan
Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

yang ditulis oleh :

Nama : Muchlis Raisin
NIM : I2K013033

telah disetujui oleh Tim Pembimbing Tesis untuk diujikan.

Mataram, Agustus 2015

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D.
NIP. 19631018 199403 1 001

Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si.
NIP. 19610328 198803 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Administrasi Pendidikan

Dr. Sudirman Wilian, MA
NIP: 195905051985021001

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

yang ditulis oleh :

Nama : Muchlis Raisin
NIM : I2K013033

telah diujikan dan dipertahankan pada hari rabu tanggal 02 september 2015, disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Tesis.

Mataram, September 2015

Tim Penguji Tesis
Ketua

Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D.
NIP. 19631018 199403 1 001

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si.
NIP. 19610328 198803 1 002

Dr. Sudirman, M.Pd.
NIP.196412311989031347

Mengetahui,

Prodi Magister Administrasi Pendidikan
Ketua

Program Pascasarjana Universitas Mataram
Direktur

Dr. Sudirman Wilian, MA .
NIP: 195905051985021001

Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr.,Ph.D.
NIP. 195703081983031002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muchlis Raisin

Nim : I2K01303

Program Studi : Magister Administrasi Pendidikan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah” ini seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya.

Mataram, Juni 2015
Yang membuat pernyataan

Muchlis Raisin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-nya hingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang diharapkan. Tesis ini mengangkat judul “Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”.

Proses penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya banyak bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Mataram.
2. Ir. I Gede Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Mataram.
3. Bapak Dr. Sudirman Wilian, MA dan Bapak Dr. Hamidsyukrie ZM, M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Mataram yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D selaku dosen pembimbing 1 yang memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini, sehingga dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

5. Bapak Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan mental, dan motivasi yang kuat bagi penulis sehingga penulis dapat menyusun Tesis ini.
6. Para Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Mataram yang telah banyak memberi dukungan dan sumbangsi pemikiran.
7. Bapak Murahadi, S.Pd.I, selaku Kepala Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan izin penelitian pada sekolah tersebut hingga penulis dapat menyusun Tesis ini.
8. Bapak dan Ibu guru beserta seluruh staf tata usaha di Lingkungan Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan sumbangsinya baik tenaga maupun pikiran dan motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan Tesis ini.
9. Semua sahabat, kerabat, dan teman-temanku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas masukan dan sarannya selama penyusunan Tesis ini.

Mataram, Juni 2015

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kejar mimpi dan cita-cita mu
Walau berjuta rintangan menghalangi mu
Karena setiap rintangan yang engkau temui
Adalah kunci dan petunjuk menuju impian dan cita-cita mu

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku tercinta
(M. Luthfi Landa, S.Pd & Mahani, S.Pd)
“Yang dengan ikhlas dan penuh kasih sayang telah merawat, membesarkan,
mendidik, dan membiayaiku selama ini hingga aku bisa seperti sekarang ini”.*

*Kepada ketiga kakak-kakakku tersayang
(Emilia Meylan L.R, Skep. Ners, Ade Surya M.S & Marlinda Rahmatullah, S.Pd)
“Aku sangat menyayangi kalian semua, dan terimakasih atas do’a dan motivasi
yang kalian berikan padaku hingga Tesis ini dapat selesai”.*

*Buat keponakanku (Alfan Syahid Akbar & Fahrizan Khan Islami Saputra)
“Aku sangat menyayangimu karena kau selalu memberikanku senyuman saat
lelah dan letihku dalam proses penyusunan Tesis ini”.*

*Semua keluarga besarku baik yang ada di Bima, Sumbawa, Lombok dan lainnya
“Terimakasih atas do’a dan dukungannya selama ini”*

*Buat semua Sahabat-sahabatku
“Kalian semua adalah sahabat terbaikku sampai kapanpun, karena berkat kalian
semua hari-hariku selalu terasa indah hingga hidup yang aku jalani terasa
begitu mudah untuk dilalui demi mencapai keberhasilan dan kesuksesan”*

*Buat semua teman-temanku dimanapun kalian semua berada, terimakasih atas
do’anya dan salam sukses selalu untuk kita semua”.*

*Buat semua pihak yang ada di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
“Terimakasih telah memberikan izin penelitian pada sekolah tersebut dan telah
memberikan motivasi selama penelitian hingga penyusunan Tesis ini”.*

*Buat Kampusku tercinta Universitas Mataram (UNRAM) dan almamaterku yang
selalu aku banggakan,
“Semoga terus berkiprah dan mencetak generasi-generasi penerus yang handal,
tanggap, cermat, bermutu, berakhlak mulia, dan profesionalisme”.*

ABSTRAK

Muchlis Raisin, 2015 : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Pembimbing I : Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D.

Pembimbing II : Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si.

Penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu : (1) pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (2) anggota masyarakat yang berpartisipasi, (3) bentuk partisipasi masyarakat, (4) faktor yang menunjang partisipasi masyarakat, dan (5) faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebelum dan sesudah dikembangkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian pengembangan yang dimulai dari tahap studi awal, pengembangan, pengukuran akhir, dan membandingkan hasil studi awal dengan hasil pengukuran akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan : (1) wawancara mendalam, (2) observasi berperan serta, dan (3) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan : mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis data diperoleh temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, ada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Kedua, pengambilan keputusan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa, kepala dusun, guru dan staf, kepala sekolah, pihak yayasan dan komite. Tetapi, dalam perencanaan pendidikan mereka tidak pernah dilibatkan. Ketiga, bentuk atau cara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang terungkap dari penelitian ini adalah (1) menghadiri rapat di sekolah, (2) menyepakati keputusan berdasarkan suara terbanyak, dan (3) dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah. Namun bentuk partisipasi dalam perencanaan pendidikan tidak terungkap karena masyarakat tidak pernah dilibatkan. Upaya pengembangan partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang sama dengan hasil studi awal, dan masyarakat telah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Keempat, hasil studi awal menunjukkan lima faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum terungkap karena masyarakat tidak pernah dilibatkan. Setelah pengembangan terungkap dua puluh faktor penunjang partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan. Kelima, hasil studi awal tercatat tiga faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan saja. Setelah pengembangan, ditemukan sebelas faktor yang menghambat partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan di sekolah.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

ABSTRACT

Muchlis Raisin, 2015 : Participation Society Performance Removal Decisions and Planning of Education in MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat of Central Lombok

Advisor I : Drs. Untung Waluyo, MA., Ph.D.
Advisor II : Dr. Muhammad Zulfikar Syuaib, M.Si.

This study focused on several issues, namely, (1) how the public's understanding of participation in planning and removal decision education before and after in developed, (2) any member of the community who participate, (3) how the form of community participation, (4) factors which support community participation and (5) factors that inhibit public participation in decision making and planning of education before and after development. The method in this research methods in was with a qualitative approach to research design development. Development research done by conducting initial study, the development, the final measurement, data collection techniques are (1), in-depth interviews, (2), participating observation, and (3), documentation study, the used of technique data analysis are: reducing , data presentation, and conclusion, while the data validation techniques based on four criteria, namely: (1) credibility, (2) transpermabilitas, (3) dependability (4), and komfirmabilitas. From the analysis of research on participation society performance removal decisions and planning education in MA Hidayatul Muhsinin Labulia Central Lombok Obtained The Following Findings. First the are so many society has naver listen the Participation of Society Performance Removal Decisions and Planning of Education. Second, early studies show that members of the public who are often involved in the decision are the parents of students, alumni, community leaders, religious leaders, youth leaders, village heads, village heads, teachers, the foundations and committees. Third, shape or plan of public participation in removal decision was attending a meeting at school. While the form of participation in educational planning, is still visible because they never involved the community. Fourth initial study results showed that the factors that demonstrate community participation in decision-making, there were five factor, mine while in education planning factors have not to know the patron of community in participation because they have not been involved. Fifth, the results of the initial study, there were three factors that impede people's participation in decision-making in school. Mine while in education planning factor barrier has not appeared for public participation because the public has not been involved.

Key Words : Society Partisipaties, Removal Decisions, and Planning of Education

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING UNTUK DI UJIKAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoritis	13
2. Kegunaan Praktis	13
E. Definisi Operasional Variabel.....	14
1. Definisi Konseptual.....	14
2. Definisi Operasional	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Yang Relevan	17
B. Kajian Teori	24
1. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.....	24
2. Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan.....	48
3. Perencanaan Pendidikan	57
C. Kerangka Berpikir.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	72
1. Penelitian Kualitatif	72
2. Jenis Pengembangan	73
B. Desain Penelitian.....	76

C. Setting Penelitian	82
D. Informan Penelitian.....	83
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
1. Observasi Berperan Serta (Participant Observation)	85
2. Wawancara Mendalam (In Depth Interview).....	88
3. Dokumentasi	90
F. Teknik Pengabsahan Data.....	92
1. Kredibilitas Data	92
2. Dependabilitas Data	97
3. Konfirmabilitas Data.....	98
4. Transferabilitas Data.....	99
G. Teknik Analisa Data.....	99
1. Reduksi Data.....	101
2. Display Data.....	101
3. Verifikasi Data dan Simpulan	103

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Studi Awal	105
1. Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	105
2. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	141
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	146
4. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	155
5. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	164
B. Tahap Pengembangan	173
1. Penjelasan Singkat Kepada Kepala Sekolah.....	175
2. Teori/Konsep Pengembangan	186
C. Hasil Pengukuran Akhiri (Studi Akhir)	211
1. Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	211
2. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	244
3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	254
4. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam	

Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	262
5. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	275
D. Perbandingan Hasil Studi Awal dengan Hasil Pengukuran Akhiri (Studi Akhir)/Hasil Pengembangan	283
1. Perbandingan Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	284
2. Perbandingan Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	309
3. Perbandingan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	311
4. Perbandingan Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	315
5. Perbandingan Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	322

BAB V. PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	328
B. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	334
C. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	336
D. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	339
E. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan.....	340

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	342
B. Saran-saran	344

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Tabel Keadaan Guru dan Staf MA Hidayatul Muhsinin	82
3.2 Tabel Informan Penelitian	84
4.1 Perbandingan Pemahaman Orang Tua tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	287
4.2 Perbandingan Pemahaman Alumni tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	291
4.3 Perbandingan Pemahaman Tokoh Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	294
4.4 Perbandingan Pemahaman Tokoh Agama tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	297
4.5 Perbandingan Pemahaman Kepala Dusun tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	300
4.6 Perbandingan Pemahaman Dewan Guru tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	303
4.7 Perbandingan Pemahaman Komite Sekolah tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	307
4.8 Perbandingan Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	310
4.9 Perbandingan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	313
4.10 Perbandingan Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	317
4.11 Perbandingan Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	323

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gerak Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Perubahan	42
2.2 <i>Poverty As Lack Of Access to Bases Of Social Power</i>	43
2.3 Tingkat pengendalian Masyarakat dalam Pendidikan	45
2.4 Kerangka Berpikir Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan	69
3.1 Gambar Siklus Hubungan <i>Foundation, Learning, Loop</i> dan <i>Forwarding-the-Action</i>	75
3.2 Gambar Langkah-langkah Penelitian Pengembangan	76
4.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Awal).....	140
4.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Akhir/Tahap Pengukuran Akhir).....	243
5.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Awal).....	332
5.2 Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Akhir/Tahap Pengukuran Akhir).....	333

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pedoman Wawancara.....	351
2 Pedoman Observasi.....	355
3 Daftar Nama Informan.....	357
4 Hasil Wawancara	359
5 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.....	422
6 Surat Rekomendasi Penelitian dari Pascasarjana.....	435
7 Surat Ijin Penelitian dari Balai Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP)	436
8 Surat Ijin Penelitian dari Kepala MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.....	437
9 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah	438
10 Kartu Konsultasi Tesis	439
11 Daftar Riwayat Hidup	440

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, sekolah tidak bisa lepas dari peran serta dan partisipasi masyarakat sekitarnya. Sekolah berada dan dikelilingi oleh masyarakat sehingga mau tidak mau akan terjalin interaksi diantaranya yang mengarah kepada bekerjasama dalam menyukseskan program-program sekolah. Interaksi antara sekolah dan masyarakat akan menghasilkan output sekolah. Dalam hal ini prestasi atau kualitas output menjadi kebanggaan sekolah dan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, kegagalan sekolah merupakan kegagalan masyarakat juga. Hal ini dikarenakan sebagai sistem terbuka, sekolah tidak dapat menghasilkan sesuatu secara sendiri. Oleh karenanya, interaksi antar sistem terbuka akan menghasilkan karakteristik kebaruan atau *emergent property*. Dengan kata lain output sekolah merupakan *emergent property* interaksi antara sekolah dan masyarakat. Mutu outputnya akan tergantung dari kualitas interaksi atau kerjasama antara kedua belah pihak.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab IV Pasal 8 dan 9 juga menjelaskan tentang hak peran serta masyarakat dalam pendidikan yang menyebutkan bahwa :

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Serta masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dari ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, jelas terlihat bahwa dalam sistem pendidikan di Indonesia, masyarakat memiliki hak untuk turut serta dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi program-program pendidikan terutama secara langsung di sekolah-sekolah. Selain itu juga, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan, seperti menyediakan tenaga pengajar yang dibutuhkan suatu sekolah.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat penting dalam melibatkan masyarakat dalam mencapai kemajuan sekolah sehingga mampu menghasilkan output yang diharapkan. Karena masyarakat memiliki potensi berupa nilai-nilai atau values, budaya, pengaruh, teknologi, properti, dan sebagainya yang dibutuhkan dan sangat berpengaruh serta berperan penting bagi keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut.

Dukungan masyarakat terhadap sekolah sesungguhnya sangat besar dan penting yaitu kepedulian, perhatian, kerja sama dan tanggung jawab. Masyarakat yang sudah menyadari pentingnya pendidikan akan merasa bahwa sekolah itu adalah juga miliknya, yaitu milik bersama. Karena menjadi milik bersama, maka masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kegiatan pendidikan di sekolah sebab tanpa adanya lembaga pendidikan atau sekolah, mereka yakin bahwa putera-puteri dan keluarganya tidak akan bisa maju dan mencapai cita-cita serta tujuan masa depannya. Oleh karenanya, mereka akan aktif dalam berpartisipasi dan berperan serta dalam segala kegiatan

pendidikan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Dalam konsep manajemen berbasis sekolah, partisipasi dan peranan masyarakat dalam pendidikan secara optimal sangat diperlukan. Karena sekolah memerlukan dan membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan sehingga tidak hanya cenderung konservatif, akan tetapi sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut, agar dapat melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik.

Indikator penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Selanjutnya hal itu direalisasikan melalui partisipasi atau peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Peran serta itu tidak hanya terbatas pada mobilitas sumbangan dana saja, tetapi lebih substansial pada fungsi-fungsi manajemen di sekolah (Rodliyah, 2013: 5).

Selain itu, keterlibatan masyarakat di sekolah sangat diperlukan dan dibutuhkan seiring dengan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana serta pembiayaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan di sekolah dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang dan bentuk. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi, kemampuan dan kesempatan masyarakat, jadi partisipasi tidak

selalu identik dengan dana, karena sekolah tidak saja membutuhkan dukungan dana tetapi juga membutuhkan dukungan dorongan, partisipasi, penyemangat, tenaga, pikiran, dan materi lainnya.

Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi sekolah yang membutuhkan dukungan, motivasi, masukan dan saran dari masyarakat guna menentukan arah dan kebijakan serta langkah strategis yang harus diambil dalam menjalankan fungsi organisasinya, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang merupakan hal terpenting bagi organisasi sekolah tersebut. Pentingnya pengambilan keputusan dalam organisasi sekolah dan perencanaan pendidikan di sekolah tentunya akan menentukan arah tujuan pendidikan di sekolah, yang akan memberikan dampak pada kemajuan dan keberhasilan sekolah dalam melaksanakan tugas mulia untuk mencetak generasi penerus bangsa yang sesuai dengan harapan bangsa dan negara serta sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pengambilan keputusan pasti ada sebuah rencana yang disepakati dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diambil untuk mencapai tujuan. Perencanaan pendidikan mengandung rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan rencana strategis sekolah, penentuan metode-metode dan prosedur-prosedur serta penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Untuk itu, perencanaan pendidikan di sekolah memerlukan suatu pendekatan sosial dan dukungan masyarakat yang dapat membantu keberlangsungan

pendidikan di sekolah tersebut demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Sekarang dapat dilihat bahwa sekolah bukanlah lembaga pendidikan yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan para siswa, melainkan bekerjasama dengan masyarakat. Kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapat dilaksanakan karena sebagian besar masyarakat sadar akan fungsi dan manfaat pendidikan sebagai modal utama membangun bangsa termasuk masyarakat. Namun terkadang banyak masyarakat yang belum menyadari makna pendidikan, masyarakat tidak mudah untuk diajak bekerjasama dalam menangani pendidikan di sekolah. Kondisi yang kurang menguntungkan ini merupakan tugas bagi lembaga pendidikan untuk memberikan penerangan secara bertahap-tahap. Oleh karenanya, sekolah membutuhkan hubungan timbal balik yang kuat dan erat dengan masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan.

Partisipasi masyarakat yang terbatas pada membayar iuran komite sekolah (SPP) tidaklah cukup untuk membuat sekolah mampu melaksanakan programnya dengan baik guna meningkatkan prestasi sekolahnya agar dapat maju dan melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Zamroni, ditemukan bahwa masyarakat termasuk orang tua peserta didik yang peduli dengan sekolah anaknya dapat meningkatkan prestasi putera-puterinya di sekolah (Zamroni, 2000).

Kepedulian orang tua di sini memiliki makna yang luas. Salah satu makna kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya adalah memberikan

perhatian terhadap proses pendidikan yang dijalani anaknya baik ketika anak berada di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan anaknya dapat dimaknai sebagai kesediaan orang tua untuk ikut berperan serta dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan untuk anak-anaknya di sekolah. Dengan adanya keikutsertaan orang tua terhadap lembaga pendidikan, akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi orang tua karena ikut terlibat dalam menentukan keberlangsungan masa depan dan pendidikan anak-anaknya.

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan bagi anak-anak mereka akan menjadikan mereka merasa dihargai dan dihormati sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Dengan demikian, maka sekolah akan merasa beruntung dengan adanya partisipasi masyarakat karena akan memberikan kemudahan bagi sekolah dalam menentukan kebijakan yang akan dijalani sekolah kedepannya. Orang tua siswa pun akan merasa bertanggungjawab terhadap sekolah maupun keberlangsungan pendidikan anaknya karena memahami pentingnya partisipasi yang harus mereka laksanakan dan mereka benar-benar dilibatkan dalam kegiatan di sekolah sebagai wujud pelaksanaan program MBS.

Namun dari kenyataan yang ada, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan saat ini masih belum terlihat secara maksimal, akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting partisipasinya dalam pendidikan. Masyarakat menganggap bahwa peranan mereka hanya cukup dengan

membayar iuran komite sekolah putra-puterinya saja. Berdasarkan pengalaman peneliti di lapangan atau di MA Hidayatul Muhsini Labulia tempat peneliti mengajar sekaligus sebagai lokasi penelitian, selama ini terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam dunia pendidikan hanya sebatas pada bentuk partisipasi melalui pembayaran iuran komite atau pembayaran SPP dan pembangunan saja.

Bentuk keterlibatan masyarakat yang lain juga terlihat pada kehadiran mereka dalam rapat wali murid, kegiatan pembagian raport siswa-siswi, pengumuman kelulusan siswa-siswi Kelas XII dan dalam kegiatan lepas pisah atau perpisahan Kelas XII. Ini berarti bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang lainnya masih belum nampak, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Karenanya, masyarakat masih belum memahami bagaimana proses dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, karena memang masyarakat masih jarang sekali terlihat dalam berbagai kegiatan penting sekolah terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya, bagaimana proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Ketua Komite MA Hidayatul Muhsinin yakni Bapak Awir, S.Pd yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan masih sangat jarang dilakukan. Bentuk partisipasi

masyarakat yang paling dominan hanya terbatas pada pembayaran iuran komite dan rapat wali murid, dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa. Bentuk keterlibatan seperti ini terlihat pada sebagian besar sekolah-sekolah yang berada di desa-desa, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta termasuk di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti juga terlihat bahwa partisipasi dan peran serta keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan sekolah ke arah yang lebih baik masih kurang, sebagaimana hasil wawancara dan pengalaman peneliti. Sehingga dibutuhkan sosialisasi dan partisipasi dari pihak-pihak sekolah untuk meminta dukungan, dorongan dan kerja sama serta partisipasi masyarakat guna melaksanakan perubahan bagi sekolah menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan oleh masyarakatnya yang cenderung bersikap dan bersifat konvensional. Mereka merasa bahwa pendidikan bagi anak-anak adalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan semata. Apalagi dengan adanya pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) para orang tua siswa merasa bahwa sekolahlah yang memiliki peranan dan tanggung jawab penting dalam mengurus segala keperluan anak-anaknya terkait dengan kebutuhan pendidikannya. Orang tua siswa hanya beranggapan bahwa mereka hanya tinggal mengantar dan menyerahkan anak-anak mereka pada sekolah yang diinginkan dan selebihnya hanyalah tinggal urusan sekolah. Masyarakat juga menjadi pasif dan hanya

menunggu dari sekolah baik yang berkaitan dengan input, proses, maupun output.

Kenyataan ini membutuhkan upaya sekolah untuk membuat masyarakat menyadari dan memahami tanggungjawabnya sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Sehingga mereka akan menyadari dan memahami bahwa pelaksanaan pendidikan pada sekolah tersebut juga membutuhkan dukungan, peranan, dorongan dan partisipasi mereka agar mampu memajukan lembaga pendidikan anak-anak mereka dan melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik demi masa depan putera-puterinya. Hal ini juga akan menjadikan masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan masa depan putera-puterinya, hingga mereka akan tergerak untuk bertanggungjawab terhadap sekolah dan merasa bahwa sekolah merupakan milik bersama masyarakat sekitar yang harus dijaga dan dikelola bersama demi kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tersebut perlu dikembangkan dan dikaji secara mendalam, terutama pada sekolah yang partisipasi masyarakatnya masih rendah seperti di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang masih beranggapan bahwa bentuk partisipasi yang harus dilakukan masyarakat hanya sebatas pada pembayaran iuran komite sekolah atau pembayaran SPP, rapat wali murid dan rapat akhir tahun serta kegiatan kelulusan siswa-siswi

saja, tanpa melihat bahwa partisipasi penting yang harus dilakukan juga terletak pada berbagai bidang partisipasi khususnya pada bagian pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah demi memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sedikitnya ada 6 keunikan penelitian pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah ini dilakukan, yakni: (1) pendidikan masyarakat di sekitar sekolah masih relatif rendah, (2) pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan masih rendah, (3) sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang paling banyak diminati para peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan, (4) sekolah ini merupakan sekolah yang besar dengan fasilitas yang cukup memadai tetapi siswanya tidak dipungut iuran apapun kecuali iuran semester, (5) sekolah ini merupakan sekolah yang lebih banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan orang tua siswa, dan (6) pengembangan partisipasi masyarakat khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah belum pernah dikembangkan dan dikaji secara mendalam.

Berkenaan dengan permasalahan dan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji dan melakukan penelitian guna mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

khususnya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian penelitian pengembangan disini berarti penelitian bekerjasama dengan kepala sekolah mengembangkan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas sehingga menjadi lebih baik dan lengkap. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan keputusan dan Perencanaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan “Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”. Fokus penelitian ini selanjutnya dijabarkan menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Anggota masyarakat mana saja yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah ?

3. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah ?
4. Faktor apa saja yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah ?
5. Faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendeskripsikan :

1. Pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah.

3. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah .
4. Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah.
5. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kabupaten Lombok Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Temuan penelitian ini secara konseptual dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan serta memperkaya teori tentang pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah dan teori-teori manajemen pendidikan secara umum.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan gambaran tentang pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, sehingga dapat dijadikan acuan bagi kepala sekolah secara umum

dalam mengambil kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

- b. Dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik penelitian yang sama ataupun memiliki keterkaitan pada latar dan konteks sosial yang berbeda tetapi memiliki tipologi yang sejenis atau sederajat.

E. Definisi Operasional Variabel dan Keterbatasan Penelitian

Agar tidak terjadi salah penafsiran pada judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan tentang judul dan maksud variable-variabel yang terdapat dalam fokus penelitian. Definisi operasional variable tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Definisi Konseptual

- a. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program (Rodliyah, 2013 : 33-34).
- b. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi (Rohaety 2010:152).

- c. Perencanaan pendidikan itu adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut (Sa'ud dan Makmun, 2011: 11-12).

2. Definisi Operasional

- a. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun pasif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik dan berusaha memajukan sekolah dengan sumbangsi berupa pikiran, tenaga, dana dan sumbangsi lainnya serta memikul beban dan tanggung jawab sekolah guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.
- b. Pengambilan keputusan adalah proses memilih dan menentukan suatu alternatif mengenai suatu cara bertindak dan menjalankan suatu kegiatan dengan metode yang efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang dihadapi agar apa yang telah ditetapkan merupakan sebuah keputusan yang memang benar-benar telah dipertimbangkan dan benar-benar dirasa akan dapat memberikan kemajuan pendidikan yang diharapkan.
- c. Perencanaan pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses pemilihan, penentuan dan penetapan tujuan-tujuan,

strategi, kebijakan, program, metode, sistem, anggaran, standar, dan sumber yang dibutuhkan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan seefektif dan seefisien mungkin dan memajukan sekolah ke arah yang lebih baik serta mampu berdaya saing dengan sekolah-sekolah lainnya.

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian inipun terdapat pembatasan ruang lingkup penelitian yang meliputi :

1. Penelitian pengembangan ini hanya dilakukan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Penelitian ini hanya mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Sekolah Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Fathurrohman tahun 2004

Penelitian ini mengangkat judul tentang “Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan di SMA Negeri 1 Praya Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pengembangan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, pengusaha dan komite sekolah dengan jumlah sebanyak 28 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdiri dari orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, dan komite sekolah pada awalnya kurang memahami partisipasi dalam pendidikan. Mereka memahami partisipasi sebagai pembayaran iuran komite sekolah dan memberikan sekedar bantuan materi. Akan tetapi setelah dilakukan penelitian pengembangan, pemahaman mereka tentang partisipasi menjadi lebih berkembang. Masyarakat sudah bisa memahami bahwa partisipasi selain memberikan sejumlah dana juga merupakan keterlibatan atau

kerjasama masyarakat dan sekolah dengan memberikan berbagai bantuan baik berupa dana, pikiran, tenaga dan materi lainnya secara ikhlas sesuai dengan peran, posisi dan kemampuannya. Pada awalnya bentuk partisipasi masyarakat pada mulanya hanya satu, yaitu komite sekolah dan bidang partisipasi masyarakat hanya pada bidang keuangan, Namun setelah dilakukan pengembangan bentuk partisipasi masyarakat yang semulanya hanya satu, yaitu komite sekolah saja telah berkembang menjadi tiga, yaitu komite sekolah, organisasi alumni (Smansa), dan ikatan alumni paskib. Masyarakat juga sudah mulai terlibat dalam bidang kurikulum dan bidang kegiatan kesiswaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman ini memiliki cakupan yang cukup luas karena penelitian ini ingin mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Ini berarti bahwa pengembangan yang akan dilakukan meliputi berbagai bidang yang ada dalam pendidikan, baik bidang penyampaian informasi, bidang pengambilan keputusan, bidang perencanaan, bidang pengawasan, bidang keuangan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang hubungan dengan masyarakat, bidang pelaksana kegiatan, bidang pengawasan dan evaluasi, maupun bidang yang lainnya. Akan tetapi dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa pengembangan yang dilakukan hanya meliputi bidang pengambilan keputusan, bidang keuangan, bidang kesiswaan dan bidang kurikulum saja. Sehingga seharusnya dilakukan pembatasan fokus

pengembangan dan batasan masalah maupun ruang lingkup penelitian agar terjalin kesesuaian antara tujuan penelitian dengan hasil penelitian.

Demikian pula halnya dengan hasil penelitian terkait dengan cara masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Hasilnya antara tahap studi awal dengan tahap pengukuran akhir memperlihatkan hasil yang sama. Sehingga tidak nampak jelas adanya pengembangan yang dilakukan didalamnya. Seharusnya memperlihatkan adanya perbedaan dan perubahan sebagai hasil pengembangan yang telah dilakukan.

2. Penelitian Lalu Muhammad Syubki tahun 2005

Judul penelitiannya adalah “Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri 1 Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pengembangan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, orang tua siswa, alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengusaha dan komite sekolah dengan jumlah sebanyak 23 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa wujud partisipasi masyarakat yang aktif pada saat studi awal hanyalah komite sekolah. Setelah dikembangkan, selain komite sekolah juga bentuknya berupa organisasi alumni ‘Smanja’, ikatan alumni paskib, organisasi bela diri dan olahraga prestasi. Cara masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan pada studi awal

dengan menghadiri rapat, berkomunikasi dengan surat dan lewat tokoh masyarakat. Namun setelah dikembangkan, cara masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan adalah dengan berkunjung ke sekolah menghadiri rapat, berkomunikasi dengan surat, menyampaikan masukan melalui tokoh masyarakat dan komite. Bidang partisipasi masyarakat awalnya hanya bidang pengambilan keputusan dan bidang pengawasan. Setelah dikembangkan, meliputi bidang pengambilan keputusan, bidang pengawasan, bidang kurikulum dan bidang kesiswaan. Bidang keuangan mula-mula sumbangan dan iuran sangat kecil, setelah dilakukan pengembangan naik sekitar lima puluh persen (50%).

Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Syubki ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman di atas. Cakupan penelitian ini juga memiliki cakupan yang cukup luas karena penelitian ini ingin mengembangkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. Ini berarti bahwa pengembangan yang akan dilakukan meliputi berbagai bidang yang ada dalam pendidikan, baik bidang penyampaian informasi, bidang kebudayaan, bidang pengembangan bakat, bidang sarana prasarana, bidang pengambilan keputusan, bidang perencanaan, bidang pengawasan, bidang keuangan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum, bidang hubungan dengan masyarakat, bidang pelaksana kegiatan, bidang pengawasan dan evaluasi, maupun bidang yang lainnya. Akan tetapi dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa pengembangan yang dilakukan hanya meliputi bidang

pengambilan keputusan, bidang keuangan, bidang kesiswaan, bidang pengawasan dan bidang keuangan saja. Sehingga seharusnya dilakukan pembatasan fokus pengembangan dan batasan masalah maupun ruang lingkup penelitian agar terjalin kesesuaian antara tujuan penelitian dengan hasil penelitian.

3. Hasil penelitian Ariani tahun 2006

Judul penelitian ini adalah “*Manajemen Partisipasi pada Pelaksanaan PSG di SMK Kabupaten Banjar*” tahun 2006. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Simpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) manajemen partisipasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan sosialisasi Pendidikan Sistem Ganda (PSG), sinkronisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian Pendidikan Sistem Ganda, seluruh tahapan telah mampu dikelola dengan optimal; (2) bentuk-bentuk partisipasi umumnya bersifat finansial, pemikiran, dan kontribusi bentuk tenaga. Sekolah kurang memberdayakan pemerintah daerah untuk diajak berpartisipasi dalam program yang sama.

Hasil penelitian dari Ariani telah menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan manajemen partisipasi pada pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di seluruh SMK se-Kabupaten Banjar karena pelaksanaan kegiatan PSG ini telah mampu dilaksanakan dan dikelola secara optimal dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan, sampai pada tahap evaluasi dan tahap penilaian PSG. Hanya saja kekurangan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah masih kurang memberdayakan pemerintah daerah setempat untuk diajak terlibat dan berpartisipasi dalam program dan kegiatan tersebut. Padahal seharusnya memang harus ada keterlibatan dan peran serta dari pemerintah daerah untuk membantu mengontrol dan mengawasi kegiatan tersebut. Selain itu untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan PSG bagi sekolah SMK. Bagaimanapun juga selalu diperlukan adanya kerjasama, pengetahuan, sumbangsi, keterlibatan dan pengawasan dari pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas pelaksanaan PSG melalui bantuan, masukan, saran, kerjasama dan pengontrolan dari pemerintah daerah setempat.

4. Penelitian Abdul Manaf Tahun 2008

Penelitian ini mengangkat judul “Pengambilan Keputusan Partisipatif (Studi Kasus Pelaksanaan Pengambilan Keputusan di SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin)” tahun 2008. Pendekatan penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa (1) proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin dilaksanakan secara demokratis; (2) sumber daya manusia yang ada dalam pengambilan keputusan partisipatif telah berperan dengan aktif dan efektif, dikarenakan mereka dilibatkan secara langsung oleh

kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada berbagai hal dan kegiatan mengenai manajemen sekolah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manaf ini telah mampu meningkatkan dan mengefektifkan proses pengambilan keputusan dengan cara demokratis. Hal ini tentunya akan mampu menjaga dan memelihara serta dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dirasa adil dan tidak menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Selain itu peran serta ataupun partisipasi masyarakat secara aktif dan efektif dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam memutuskan berbagai persoalan dan kebijakan yang akan ditetapkan. Sehingga hasil keputusan yang diperoleh merupakan hasil kesepakatan bersama yang matang dan tidak bisa dibantah maupun diganggu gugat. Apabila terjadi kegagalan dari keputusan yang dijalankan maka masyarakat tidak bisa menuntut dan menyalahkan pihak sekolah karena masyarakat yang terlibat langsung dalam memutuskan dan membuat sebuah keputusan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman dan Lalu Muhammad Syubki mengarah pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang partisipasi dalam pendidikan guna mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik. Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani, memfokuskan penelitiannya pada bidang Manajemen Partisipasi pada Pelaksanaan PSG di SMK. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manaf, memfokuskan penelitian

pada bentuk studi kasus dalam proses Pengambilan Keputusan Partisipatif di Sekolah Dasar. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan pada partisipasi masyarakat pada bidang dan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Namun tentunya memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh keempat peneliti tersebut.

B. Kajian Teori

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya (Santoso dalam Dwiningrum, 2011: 50).

Menurut Canter (dalam Amransyah, 2012 : 21) partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap

program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Demikian pula dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna menentukan program kerja sekolah agar mampu mengembangkan dan memajukan pendidikan pada sekolah tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rodliyah (2013: 33-34) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) dalam penyelenggaraan pendidikan dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi sebuah program kegiatan maupun kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa tenaga, dukungan dana, barang, penyampaian saran, kritikan dan pendapat serta kemauan. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat

dalam berbagai kegiatan dan program di sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses dan pelaksanaan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebagai variabel yang ingin diteliti dalam penelitian ini.

b. Prasyarat Partisipasi Masyarakat

Untuk melaksanakan kegiatan partisipasi di dalam dunia pendidikan oleh masyarakat tentunya tidak terjadi dengan sendirinya dan terjadi begitu saja tanpa memerlukan prasyarat-prasyarat tertentu yang dapat mendukung hal tersebut. Partisipasi masyarakat dapat berhasil apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Tersedianya waktu yang cukup untuk mengadakan partisipasi,
- 2) Pembiayaan partisipasi hendaknya memperhatikan segi-segi penghematan,
- 3) Subjek partisipasi harus relevan dengan orang yang berpartisipasi dalam organisasi,
- 4) Peserta partisipasi harus mempunyai kemampuan khusus sehingga efektif untuk dipartisipasikan,
- 5) Pelaku partisipasi harus dapat berhubungan secara timbal balik,
- 6) Tidak ada satu kelompok pun yang merasa bahwa posisinya terancam dengan adanya partisipasi, dan
- 7) Partisipasi akan lebih efektif jika didasarkan asas kebebasan bekerja (Davis dalam Suryosubroto, 2001: 78-79).

Sementara itu, menurut Sihombing yang dikutip oleh Jalal dan Supriadi (2001: 193) menyatakan bahwa partisipasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan didasari oleh:

- 1) Kebersamaan atau *Togetherness*,
- 2) Saling bisa merasakan atau *Emphaty*,
- 3) Bersikap dewasa atau *Maturity*,
- 4) Kemauan untuk saling memberi dan saling mengerti atau *Willingness*,
- 5) Tertata dan terkelola dengan baik atau *Organization*,
- 6) Saling menaruh rasa hormat atau *Respect*, dan
- 7) Suatu niat dan iktikad yang baik atau *Kindness*, dilakukan dengan baik dan dilakukan untuk hal-hal yang baik, bermakna bagi masing-masing pihak.

Dari penjelasan mengenai prasyarat partisipasi di atas, dapat disimpulkan bahwa prasyarat terjadinya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan adalah : tersedianya waktu yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi, orang yang berpartisipasi harus mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, adanya komunikasi antar partisipan, tersedianya biaya yang cukup, tidak merugikan pihak lain, adanya kebebasan dalam berpartisipasi dan memiliki *teamwork* yang didasari kebersamaan dan rasa saling

pengertian, terorganisir dengan baik dan bermakna bagi masing-masing pihak, serta keterikatan dengan tujuan yang akan dicapai.

c. Masyarakat yang Berpartisipasi

Pendidikan dan lembaga pendidikan berada di dalam dan dikelilingin oleh masyarakat, dan terjadi interaksi diantaranya. Unsur-unsur masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah sering disebut pemangku kepentingan di sekolah (Hardjoesoedarmo, 2001). Dan mereka inilah sebagai pelanggan di sekolah yang harus dipenuhi keinginan dan kebutuhannya (Sallis, 2012). Secara khusus masyarakat yang berkepentingan dengan sekolah adalah orang tua siswa dan masyarakat disekitar sekolah seperti alumni, kalangan pemerhati pendidikan termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan industri, pengusaha, serta masyarakat pada umumnya.

1) Orang tua siswa

Orang tua adalah pihak yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anaknya, yang kemudian meminta bantuan kepada sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua meminta bantuan kepada sekolah karena mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang relatif sempurna kepada anaknya (Pidarta, 1997). Oleh karenanya, antara sekolah dengan orang tua siswa yang meminta bantuan kepada sekolah dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anaknya

harus terjalin harmonisasi dan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak.

Disamping itu, menurut Tilaar (1999) sekolah yang benar adalah sekolah yang hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat, termasuk orang tua siswa. Dengan demikian, kerjasama antara sekolah dengan orang tua mutlak diperlukan dan harus dibangun serta dilaksanakan dengan baik. Bekerja sama dengan orang tua siswa dalam merancang dan melaksanakan program sekolah sangatlah penting. Dengan keterlibatan tersebut berarti mereka paham bagaimana pola pembelajaran yang diterapkan dan apa yang harus diperankan mereka guna mendukung pembelajaran anak-anaknya.

Dari pendapat di atas, nampak bahwa kesuksesan anak dalam pembelajaran di sekolah tidak bisa tercapai hanya dengan bantuan para guru di sekolah saja, namun peran dan keterlibatan orang tua atau rumah tangganya juga sangat besar pengaruhnya. Keterlibatan orang tua hampir dalam setiap bentuknya, dapat memperbaiki prestasi akademik siswa. Lebih dari itu, keterlibatan orang tua siswa dalam berbagai kegiatan pendidikan berarti mendidik mereka. Mereka perlu dididik agar mengerti tentang keikutsertaannya dalam pendidikan (Tilaar, 1999). Sebab ada diantara orang tua yang belum memahami apa dan bagaimana berpartisipasi di sekolah.

2) Masyarakat di sekitar sekolah

Masyarakat di sekitar sekolah, seperti alumni, pengusaha atau perguruan tinggi, kalangan pemerhati pendidikan termasuk tokoh masyarakat, dan komite sekolah berkepentingan dengan pendidikan di sekolah (Pidarta, 1997). Alumni berkepentingan tentunya untuk menjaga citra almamaternya agar semakin baik dan jaya, karena berpengaruh terhadap citra para alumni.

Kalangan pengusaha dan perguruan tinggi secara tidak langsung juga berkepentingan dengan sekolah, karena nantinya mereka akan berperan sebagai *users* lulusan sekolah. Apabila mutu sekolah itu baik, maka tenaga kerja atau mahasiswa yang akan didapatkan juga baik. Bagi perusahaan, tenaga kerja yang bermutu tentunya akan dapat meningkatkan produktivitas perusahaannya.

Kalangan pemerhati pendidikan termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki kepentingan dengan sekolah. Secara formal memang tidak memiliki hubungan dengan sekolah, namun mereka memiliki peranan dan tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karenanya, mereka sering berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah melalui pemikiran, tenaga dan bahkan dengan fasilitas untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dari pemaparan di atas, sudah jelas bahwa masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berpartisipasi di sekolah adalah orang tua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah, seperti alumni, pengusaha atau perguruan tinggi, kalangan pemerhati pendidikan termasuk tokoh masyarakat, dan komite sekolah berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Keterlibatan para pemangku kepentingan di atas, dapat dilakukan secara individual maupun secara organisatoris. Keterlibatan secara individual dapat dilakukan misalnya dengan datang ke sekolah berdiskusi/berkonsultasi serta menyampaikan saran-saran untuk kemajuan sekolah. Sedangkan keterlibatan secara organisatoris dilakukan melalui komite sekolah yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Di sekolah yang menangani masalah keterlibatan masyarakat dalam pendidikan adalah wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat atau Waka Humas.

d. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan terwujud dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan khususnya peningkatan mutu sekolah, maka kepala sekolah sudah seharusnya aktif untuk menggugah perhatian masyarakat, tokoh masyarakat, alumni, pengusaha, orang tua siswa dan sebagainya untuk bersama-sama bertukar pikiran dan berdiskusi untuk memecahkan dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan dan permasalahan yang ada.

Bentuk kerjasama antara lembaga pendidikan dengan masyarakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah
- 2) Menyediakan fasilitas belajar di rumah maupun di sekolah dan membimbing putra-putrinya agar belajar dengan penuh motivasi dan perhatian.
- 3) Berusaha melunasi SPP dan bantuan pendidikan lainnya.
- 4) Ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti sarana, prasarana, kegiatan, keuangan, program kerja dan sebagainya.
- 5) Membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhan sekolah dalam memajukan proses pembelajaran.
- 6) Bersedia menjadi tenaga pelatih/narasumber bila diperlukan oleh sekolah.
- 7) Memberi layanan/penjelasan kepada siswa yang sedang belajar di masyarakat.
- 8) Bagi para pemangku kepentingan kiranya bersedia untuk membangun dan memajukan sekolah.
- 9) Mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan.
- 10) Ikut mengontrol jalannya pendidikan (control sosial).
- 11) Bagi tokoh-tokoh masyarakat bersedia menjadi partner manajemen pendidikan dalam mempertahankan dan memajukan lembaga pendidikan.
- 12) Ikut memikirkan dan merealisasikan kesejahteraan personalia pendidikan (Rodliyah, 2013: 35-36).

Batasan lain menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Bab III pasal 4, partisipasi masyarakat dapat berbentuk :

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah di semua jenjang pendidikan, kecuali jenjang kedinasan;
- 2) Pengadaan dan pemberian tenaga kependidikan;
- 3) Pemberian bantuan tenaga ahli;

- 4) Pengadaan dana dan pemberian bantuan berupa wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis;
- 5) Pengadaan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan pemerintah;
- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- 7) Pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan bekerja kepada anak didik;
- 8) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
- 9) Pemberian pelatihan manajemen bagi penyelenggara pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
- 10) Pemberian bantuan berupa pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
- 11) Pemberian bantuan dan pelaksanaan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- 12) Pemberian kesempatan untuk berperan dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan pemerintah di dalam dan atau di luar negeri (Depdiknas, 2002: 610).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan berupa pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, pengadaan dan pemberian tenaga

kependidikan, pengadaan dana dan pemberian bantuan, pengadaan penyelenggaraan program pendidikan, pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan, pemberian pelatihan manajemen bagi penyelenggara pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional, mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah bagi para orang tua, menyediakan fasilitas belajar di rumah dan membimbing putra-putrinya agar belajar dengan penuh motivasi dan perhatian, bersedia datang ke sekolah bila diundang atau diperlukan oleh sekolah, ikut berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan seperti sarana, prasarana, kegiatan, keuangan, program kerja dan sebagainya, ikut memperlancar komunikasi pendidikan, mengajukan usul-usul untuk perbaikan pendidikan, dan ikut mengontrol jalannya pendidikan.

e. Bidang Partisipasi Masyarakat

Berbagai bidang partisipasi masyarakat yang esensial dalam pendidikan dapat dimasuki oleh masyarakat dalam rangka partisipasi aktifnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara rinci bidang-bidang partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan secara khusus berupa bidang kerjasama antar sekolah dengan masyarakat yang meliputi :

- 1) Bidang pendidikan mental. Dilakukan dengan mengatasi kondisi-kondisi yang mengganggu mental siswa selama mengikuti pendidikan.

- 2) Bidang pengembangan bakat. Anak mungkin memiliki bakat yang dapat dikembangkan di sekolah. Guru dan orang tua siswa dapat bersama-sama membina dan mengembangkan bakat tersebut.
- 3) Bidang pengajaran. Orang tua seharusnya membantu menjelaskan hal-hal yang belum diketahui anak dari tugas yang diberikan guru.
- 4) Bidang kebudayaan. Permasalahan yang ditekankan dalam bidang kebudayaan adalah penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Oleh karena itu, orang tua harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar situasi rumah dan sekolah sama.
- 5) Bidang pengawasan. Dilakukan dengan keterlibatan masyarakat didalam pengambilan keputusan, perencanaan, penentuan kebutuhan, penarikan manfaat, dan pengevaluasian program.
- 6) Bidang sarana dan prasarana. Dilakukan dengan menyediakan lahan tempat membangun sekolah, menyumbangkan bangku, meja, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
- 7) Bidang keuangan dan tenaga. Partisipasi nyata yang diberikan masyarakat kepada dunia pendidikan adalah keuangan melalui dana BP3/ iuran SPP serta penyediaan tenaga-tenaga pengajar yang dibutuhkan sekolah khususnya pengajar keahlian tertentu yang dimiliki oleh suatu masyarakat dimana sekolah itu berada.
- 8) Bidang manajemen. Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan dengan sekolah berupa bantuan dalam administrasi pendidikan (Syubki, 2005: 20-22).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang partisipasi masyarakat secara umum meliputi delapan bidang partisipasi. Bidang partisipasi masyarakat yang relevan dengan penelitian ini adalah terletak pada bidang pengawasan, bidang manajemen, bidang sarana dan prasarana, dan pada bidang keuangan dan tenaga karena dalam bidang ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Sesuai dengan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, sehingga ketiga bidang tersebut membutuhkan partisipasi masyarakat guna membantu memutuskan maupun merencanakan program yang terkait dengan ketiga bidang tersebut.

Selain bidang-bidang yang telah dijelaskan di atas, tidak menutup kemungkinan juga bahwa partisipasi masyarakat dilakukan pada bidang-bidang partisipasi lainnya yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan sekolah maupun perkembangan masyarakat di sekitar sekolah itu sendiri. Seperti pada bidang kesehatan yang sangat dibutuhkan sekolah untuk menjaga dan membina jasmani para peserta didik, terutama bagi sekolah pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama yang memiliki kegiatan yang jauh lebih padat dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya yang tidak memiliki sistem dan proses pembelajaran seperti madrasah dan pondok pesantren.

f. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Ada bermacam-macam tingkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurut Prayitno dalam Rodliyah (2013: 45-46) menyatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diklasifikasikan dalam tujuh tingkatan, yang dimulai dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi. Adapun tingkatan tersebut terinci sebagai berikut :

- 1) Peran serta dengan menggunakan jasa yang tersedia. Jenis peran serta ini merupakan jenis paling umum. Masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah.
- 2) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang dan atau tenaga.
- 3) Peran serta secara aktif. Artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh komite sekolah, misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhi.
- 4) Peran serta melalui adanya konsultasi. Orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.

- 5) Peran serta dalam pelayanan. Orang tua/ masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi banding, kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya.
- 6) Peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/ dilimpahkan. Misalnya, sekolah meminta orang tua/ masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dan lain sebagainya.
- 7) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah dimulai dari peran serta dengan menggunakan jasa yang tersedia, peran serta dengan memberikan kontribusi dana dan tenaga, peran serta secara aktif, peran serta melalui adanya konsultasi, peran serta dalam pelayanan, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan/ dilimpahkan, sampai ke tingkat tertinggi yakni partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Semua tingkat partisipasi masyarakat di atas, mutlak dibutuhkan setiap sekolah demi menyelenggarakan dan memajukan sekolah ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya tugas sekolah adalah selalu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka untuk berpartisipasi di sekolah, agar masyarakat menyadari bahwa keterlibatannya di sekolah sangat

dibutuhkan dan sangat menentukan arah perkembangan dan kemajuan sekolah kedepannya.

g. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Sebuah lembaga pendidikan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri dalam membina pertumbuhan dan perkembangan putra-putri bangsa, melainkan merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang luas, dan bersama masyarakat membangun dan meningkatkan segala upaya untuk memajukan sekolah.

Oleh sebab itu, banyak faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurut Slameto dalam Rodliyah (2013: 56-58) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis kelamin. Partisipasi yang diberikan oleh seorang pria akan berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh wanita. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban.
- 2) Usia. Dalam masyarakat terdapat perbedaan kedudukan dan derajat atas dasar senioritas, sehingga memunculkan golongan tua dan golongan muda yang berbeda-beda dalam hal tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan.

- 3) Tingkat Pendidikan. Faktor pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat, karena dengan latar belakang pendidikan yang diperoleh, seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar dan cepat tanggap terhadap inovasi pendidikan serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas pendidikan.
- 4) Tingkat Penghasilan. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan
- 5) Mata Pencarian (Pekerjaan). Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan tingkat penghasilan dan mempengaruhi waktu luang seseorang yang dapat digunakan dalam berpartisipasi dalam pendidikan.

Sedangkan menurut Syubki (2005: 27) menyatakan bahwa faktor yang menunjang dan menghambat partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Faktor politik dan kebijakan pemerintah yang masih bersifat *top down* dengan sistem perencanaan dari atas dan kurang memberikan ruang dan peluang bagi perencanaan dari bawah.
- 2) Faktor kebudayaan dan kebiasaan masyarakat yang masih memandang perbedaan gender sebagai kendala dalam mengikuti pendidikan.
- 3) Faktor rendahnya tingkat perekonomian masyarakat akan menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan pendidikan.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan ekonomi, dan mata pencaharian. Sedangkan faktor yang menunjang dan menghambat partisipasi masyarakat adalah faktor politik dan kebijakan pemerintah, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat, dan faktor ekonomi.

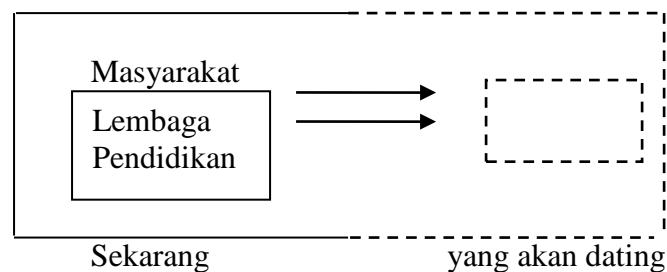
Maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor di atas. Oleh sebab itu sebuah lembaga pendidikan bukan hanya menyelenggarakan pendidikan dan melibatkan masyarakat begitu saja. Tetapi sebuah lembaga pendidikan harus benar-benar memahami situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya agar mampu meningkatkan peran serta masyarakatnya dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengancam keberlangsungan lembaga pendidikan itu sendiri.

h. Konsep Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk atau paradigma. Menurut Tilaar (2002: 179) dalam masyarakat pendidikan, hubungan antara orang tua murid dan guru harus bersifat kooperatif. Karena masyarakat merupakan *stakeholders* pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan

sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat juga.

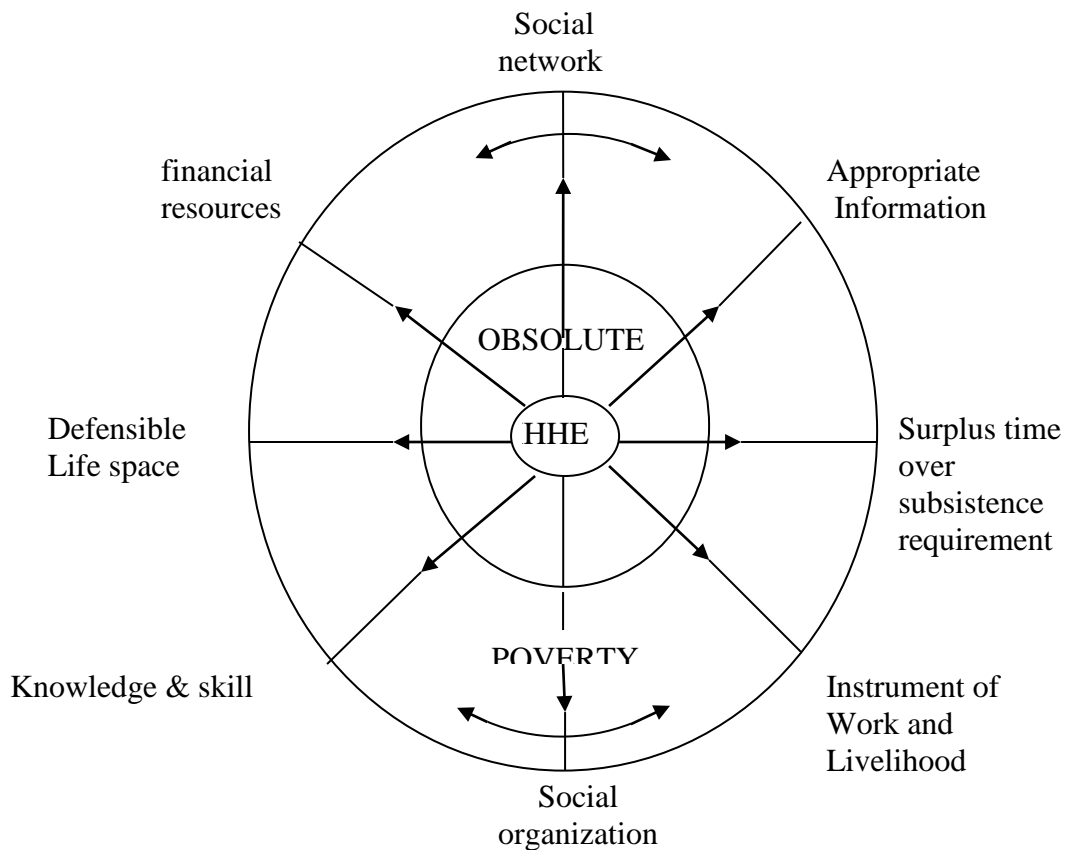
Dipertegas oleh Pidarta (2005: 6) bahwa lembaga pendidikan tidak boleh mengabaikan keinginan masyarakat sekitar, sebab ia merupakan salah satu bagian dari masyarakat. Lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, ia harus toleran dengan masyarakat. Ini berarti lembaga pendidikan harus mengikuti perubahan-perubahan masyarakat. Gerak perubahan lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat digambarkan dalam sistem berikut :



Gambar 2.1. Gerak Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Perubahan (Pidarta, 2005: 7)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat harus bergerak atau berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat untuk mencapai program baru, tujuan baru, kegiatan baru, dan mampu meraih kemajuan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, sekolah seharusnya menjadi agen, motivator, dan innovator pembaharuan dalam perkembangan masyarakat yang terus bergerak.

Selain itu, Friedman (1992: 67) mengemukakan model pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi sebagai berikut.



Gambar 2.2. *Poverty as lack of access to bases of social power* (Friedmann, 1992: 67)

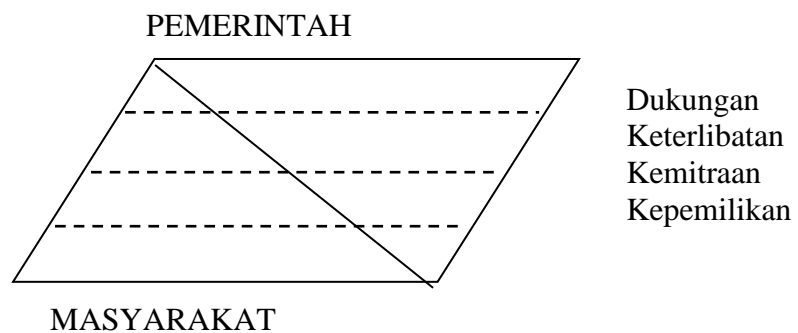
Dari model pemberdayaan di atas, dapat peneliti uraikan prasyarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pemberdayaan sosial (*social power*) yaitu :

- 1) *Defensible life space*, yaitu memiliki basis wilayah perekonomian dalam rumah tangga, termasuk tempat tinggal dimana rumah tangga tersebut melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari berkenaan dengan kerumahtanggaannya.

- 2) *Surplus time*, yaitu waktu luang atau waktu yang cukup yang tersedia di luar waktu yang dipergunakan untuk kepentingan perekonomian rumah tangga cukup banyak untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan.
- 3) *Knowledge and skill*, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai prasyarat pemberdayaan masyarakat yang berupa tingkat pendidikan, dan berbagai jenis keterampilan yang dimiliki oleh anggota dalam rumah tangga.
- 4) *Appropriate information*, yaitu informasi yang rasional dan akurat dibutuhkan untuk menampilkan kualitas kehidupan dalam pemberdayaan dan kegiatan berpartisipasi.
- 5) *Social organization*, yaitu tersedianya organisasi sosial baik organisasi sosial formal maupun informal yang dapat dimasuki oleh anggota keluarga seperti arisan PKK, Balai Pengembangan Desa (BPD), remaja masjid, karang taruna, kelompok tani, ikatan alumni sekolah, komite sekolah dan yang lainnya yang dapat memberikan pengalaman dan kegunaan bagi rumah tangga.
- 6) *Social network*, maksudnya terdapat hubungan atau jaringan sosial yang bersifat horizontal dengan rumah tangga yang akan memberikan berbagai kemudahan berkomunikasi, berinteraksi dan bekerjasama dalam menjalankan berbagai kegiatan dan partisipasi sosial mereka.

- 7) *Instrument of work and livelihood*, yaitu tersedianya alat-alat dan sarana penunjang untuk menjalankan berbagai kegiatan dan bekerja serta memproduksi yang mendukung aktifitas pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi.
- 8) *Financial resources*, yaitu tersedianya sumber keuangan dan pendanaan yang memadai, termasuk dari pengaturan kredit baik formal maupun informal guna menunjang kemampuan dalam berpartisipasi.

Cara lain yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam dunia pendidikan dikemukakan oleh Nelson seperti yang dikutip oleh Jalal dan Supriadi (2002: 178) adalah dengan memetakan pendidikan berbasis masyarakat dalam bentuk paradigma berikut.



Gambar 2.3. Tingkat Pengendalian Masyarakat dalam Pendidikan (Nelson dalam Jalal dan Supriadi, 2002: 178)

Menurut gambar di atas, dapat diuraikan bahwa semakin besar tingkat dukungan yang diberikan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka semakin kecil kepemilikan

masyarakat atas pendidikan itu. Sebaliknya, semakin kecil tingkat dukungan yang diberikan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan, maka semakin besar kepemilikan masyarakat atas pendidikan. Sehingga hal ini akan memacu masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan dalam pendidikan dan mereka akan merasa bahwa lembaga pendidikan adalah milik dan tanggung jawab masyarakat juga. Oleh karenanya akan terjalin interaksi dan kerjasama sama anatar sekolah dengan masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan pendidikan.

Walapunu demikian, dalam pembangunan pendidikan diperlukan adanya keterlibatan dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat secara seimbang dalam bentuk kemitraan yang sejalan. Sehingga pembangunan pendidikan dapat berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan gambaran itu pula dapat dijelaskan secara lebih spesifik terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan secara langsung sebagai berikut.

- 1) Dukungan orang tua dan anggota masyarakat lainnya (Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Alumni, Pengusaha, dan Pemerhati Pendidikan) memberikan sumbangan dana, tenaga, dan pikiran.
- 2) Keterlibatan orang tua dan anggota masyarakat lainnya terlibat atau memberikan bantuan dalam hal pengambilan keputusan.

- 3) Keterlibatan orang tua dan masyarakat lainnya akan memberikan bantuan dalam hal merencanakan program pendidikan.
- 4) Kemitraan orang tua dan anggota masyarakat lainnya menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, misalnya program, alokasi dana, dan ketenagaan
- 5) Memberikan kesempatan bagi para alumni untuk membentuk ikatan alumni yang nantinya akan ikut berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan sekolah dan ikut terlibat dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adik-adik kelasnya agar penyelenggaraan pendidikan selanjutnya jauh lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan pengalaman para alumni selama bersekolah.
- 6) Kepemilikan penuh para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan tentang program.

Dapat dikemukakan pula bahwa dalam pelaksanaannya, pemerintah sebagai mitra harus dapat memacu partisipasi masyarakat serta merangsang kontribusi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. bila partisipasi masyarakat besar berarti tingkat kepemilikan atau rasa memiliki yang berupa tanggung jawab atas pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan itu menjadi besar pula. Untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan format kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam dunia

pendidikan yang mengedepankan kesejajaran yang saling mendukung secara sinerjik.

Dari ketiga gambaran konsep pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep pengembangan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan harus dilakukan searah dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat harus memperhatikan sejumlah prasyarat dalam berpartisipasi agar lebih efektif serta terjalin kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam dunia pendidikan di lembaga pendidikan yang bersifat sejajar dan seimbang serta saling membantu.

2. Pengambilan Keputusan dalam Pendidikan

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengertian pengambilan keputusan ialah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi (Rohaety, 2010: 152). Pendapat lain menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi (Salusu, 1996: 13).

Dalam Ensiklopedia Administrasi yang disusun oleh The Liang Gie dkk, dikemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah kegiatan dalam manajemen berupa pemilihan di antara berbagai

kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan, pertentangan, dan atau keraguan yang timbul dalam proses penyelesaian kerjasama (Rodliyah, 2013: 60).

Pengambilan keputusan ialah proses memilih sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan penting bagi administrator pendidikan karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan perubahan organisasi. Setiap level administrasi sekolah mengambil keputusan secara hierarkis. Keputusan yang diambil administrator berpengaruh terhadap pelanggan pendidikan terutama peserta didik. Oleh karena itu, setiap administrator pendidikan harus memiliki keterampilan mengambil keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien (Usman, 2010: 392).

Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang selalu kita jumpai dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Bahkan dapat juga dikatakan, bagaimana cara pengambilan keputusan yang dilalukan oleh seorang pemimpin menunjukkan bagaimana gaya kepemimpinannya. Dengan demikian, pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri (Purwanto, 2006: 67)

Ada 5 dasar kekuatan (power) untuk mengambil keputusan. Kekuatan itu adalah: (1) paksaan, (2) hadiah, (3) referensi, (4) peraturan/ hukum, dan (5) *ekspert* (Pidarta, 2005: 52). Fungsi dari

pengambilan keputusan yaitu: (1) pangkal permulaan dari semua aktifitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun kelompok, baik institusional maupun organisasional, (2) sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan (Rohaety, 2010: 152).

Pengambilan keputusan merupakan bakat bawaan manusia yang dalam perkembangannya bakat tersebut harus terus diasah melalui pendalaman atau ilmu dan seninya. Sebagai makhluk pembuat keputusan, kegagalan dalam menguasai ilmu dan seni tersebut akan mengakibatkan sulitnya kita menyeimbangkan antara pencapaian tujuan yang diinginkan, dengan perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan. Masalah tentang penyeimbangan dua tujuan ini merupakan pekerjaan rumah terberat bagi kajian pengambilan keputusan (Dermawan, 2013: 4).

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi pengambilan keputusan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah hasil akhir atau keputusan final dari suatu pemecahan masalah, jawaban dari berbagai pertanyaan dan persoalan, dan merupakan pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat dari berbagai alternatif-alternatif yang tersedia guna menetapkan suatu kesepakatan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengambilan keputusan yang efektif dan melibatkan banyak kalangan yang memiliki keterkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan tentunya

akan menghasilkan sebuah keputusan yang matang dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Faktor-faktor Pengambilan Keputusan

Dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kedudukan kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah dan bertanggung jawab atas jalannya pendidikan.
- 2) Masalah yang diputuskan apakah masalah yang di dalam sekolah ataukah masalah di luar sekolah seperti kebijakan pemerintah.
- 3) Melihat situasi di dalam dan di luar sekolah sehingga keputusan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk.
- 4) Kondisi yang memungkinkan keputusan itu dikeluarkan dengan melihat faktor-faktor yang ada.
- 5) Tujuan dari pengambilan keputusan diperhitungkan dampak internal dan eksternal sekolah (Rohaety, 2010: 157).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pendidikan adalah kedudukan kepala sekolah, masalah yang hendak diputuskan, situasi, kondisi baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan, dan tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Kesemua faktor ini merupakan faktor-faktor yang akan selalu dihadapi dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga pendidikan. sehingga dalam proses pengambilan keputusan harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut.

c. Langkah-langkah dalam Pengambilan Keputusan

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menurut Rohiat, (2010: 20) sebagai berikut:

- 1) Menganalisis adanya suatu masalah
- 2) Memikirkan alternatif pemecahan masalah
- 3) Menganalisis alternative keputusan yang menguntungkan dengan resiko yang paling minimal
- 4) Menentukan alternatif yang baik
- 5) Menetapkan keputusan.

Sedangkan menurut Herbert A. Simon dalam Rohaety (2010: 165), langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan sebagai berikut.

- 1) Intelegensi yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi mengambil keputusan, data mentah diperoleh, diproses, dan diperiksa untuk petunjuk yang dapat mengidentifikasi masalah.
- 2) Rancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang mungkin dilakukan. Hal ini mencakup proses memahami masalah, membangkitkan cara pemecahan, dan menguji pemecahan untuk mengetahui mungkin tidaknya dilaksanakan.
- 3) Pilihan, yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara-cara yang telah diperoleh, suatu pilihan diambil dan dilaksanakan.
- 4) Implementasi, yaitu pelaksanaan tindakan setelah memperoleh pilihan atas berbagai alternatif kegiatan yang telah ditentukan.

Dari pemaparan di atas, dalam proses pengambilan keputusan hendaknya harus memperhatikan langkah-langkah penting dalam proses pengambilan keputusan sebagai bahan acuan dan pedoman dalam memutuskan berbagai kepentingan, kebijakan, dan kebutuhan serta program sekolah. Pemerhatian dan penerapan yang baik terhadap langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut tentunya akan dapat

memberikan hasil yang memuaskan dalam proses pengambilan keputusan.

d. Dimensi-Dimensi Pengambilan Keputusan di Sekolah

Dalam konsep pengambilan keputusan ada tiga dimensi yang harus diperhatikan menurut Lipham ,dkk dalam Rodliyah (2013: 63), yaitu:

- 1) Dimensi isi, mencakup program-program pembelajaran, bawahan, sumber tenaga dan dana serta hubungan-hubungan yang bersifat organisasional.
- 2) Dimensi proses, mencakup identifikasi masalah, definisi masalah, memformulasikan dan menimbang alternatif, implementasi keputusan, dan penilaian keputusan.
- 3) Dimensi keterlibatan, berkaitan dengan individu yang berpartisipasi dan tingkat partisipasi mereka. Tingkat keterlibatan dimaksud dikelompokkan menjadi: membuat keputusan, mengusulkan alternatif-alternatif, membantu merumuskan alternatif-alternatif, memberikan informasi-informasi guna penyusunan, dan tidak ada keterlibatan sama sekali.

Dari uraian di atas, dapat dipastikan bahwa dimensi dalam proses pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan adalah dimensi isi, dimensi proses dan dimensi keterlibatan. Pemahaman terhadap ketiga dimensi ini akan memberikan efek kemudahan bagi lembaga pendidikan atau sekolah dalam proses pengambilan keputusan dalam

perencanaan pendidikan yang ingin diselenggarakan. Dengan demikian akan memberikan dampak kemaguan program dan proses pelaksanaan program di lembaga pendidikan guna memajukan lembaga pendidikan tersebut.

e. Model-Model Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan hal terpenting yang menjadi daya pendorong kegiatan operasional sebuah organisasi maupun lembaga pendidikan. Ada banyak model pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan. Adapun model-model pengambilan keputusan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Model Pengambilan Keputusan Menurut Dua Pandangan

Para pengambil keputusan selalu dihadapkan pada dua jenis keputusan: terprogram/ terstruktur dan tidak terprogram/ tidak terstruktur. Proses pengambilan keputusan terprogram memiliki *standard operational procedures* (SOP). Sedangkan pengambilan keputusan yang tidak terprogram merupakan proses penentuan dan pemilihan alternatif solusi yang benar-benar baru dan tidak terstruktur serta tidak memiliki standar SOP.

2) Model Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pandangan Rasional

Model pengambilan keputusan secara rasional ini berangkat dari tiga langkah yang meliputi: *pertama*, pengambilan keputusan mengidentifikasi sejumlah masalah yang harus diselesaikan. *Kedua*, harus menentukan sejumlah alternatif solusi terhadap masalah. *Ketiga*, pemilihan solusi atas masalah dan mengimplementasikan solusi tersebut

3) Model Pengambilan Keputusan Berdasarkan Pandangan Rasionalita yang Dibatasi

Model yang dibangun atas tesis *bounded rationality*. Pengambilan keputusan dibatasi (*bounded*) mewakili ide tentang keterbatasan kemampuan manusia, bahwa pengambilan keputusan dibatasi (*bounded*) kemampuan rasionalitasnya oleh sejumlah keterbatasan/hambatan kala melakukan proses pengambilan keputusan menurut pilihan.

4) Model Pengambilan Keputusan yang Tidak Terstruktur

Model ini membalikkan proses awal pengambilan keputusan. Proses yang pada umumnya dimulai dari sisi penentuan masalah yang harus dipecahkan, menjadi proses yang dimulai dari sisi penentuan solusi. Artinya pengambil keputusan dapat mengajukan sejumlah solusi terhadap masalah yang sesungguhnya tidak (belum) muncul. (Dermawan, 2013: 97-112).

Dari pemaparan di atas, model-model pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi maupun lembaga pendidikan terbagi dalam empat model, yaitu model pengambilan keputusan menurut dua pandangan, model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasional, model pengambilan keputusan berdasarkan pandangan rasionalita yang dibatasi, dan model pengambilan keputusan yang tidak terstruktur.

f. Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Dalam proses pengambilan keputusan untuk kemajuan sekolah, sekolah hendaknya melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Pelibatan masyarakat termasuk orang tua siswa dalam proses pengambilan keputusan, akan memberikan kemudahan dalam prosesnya sehingga memberikan hasil keputusan yang efektif.

Hal ini tentunya dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maka yang bersangkutan akan lebih merasa memiliki keputusan itu, sehingga yang bersangkutan juga akan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan tersebut. Namun harus diingat, bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus

mempertimbangkan keahlian, batas kewenangan, dan relevansinya dengan tujuan pembuatan keputusan sekolah (Depdiknas, 2000: 48).

Masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (1) kelompok yang terdiri dari semua orang yang berkepentingan dengan suatu situasi masalah tertentu seperti masyarakat sekitar lingkungan sekolah, (2) panitia atau pihak sekolah sebagai penyelenggara yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan (3) kelompok kerja yang akan menyusun dan mengawasi pelaksanaan dari hasil keputusan yang akan dilaksanakan (Tilaar, 1993: 120).

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individual dan secara organisatoris. Keterlibatan secara individual, misalnya dilakukan apabila keputusan yang akan diambil berkenaan dengan kepentingan individual. Selain itu, mereka dapat menyampaikan saran-saran, masukan, dan usulan untuk kemajuan sekolah. Sementara pengambilan keputusan secara organisatoris dilakukan melalui komite sekolah dalam berbagai kegiatan komite di sekolah (Fathurrohman, 2004 : 28)

Dengan demikian, berarti jelas bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah hendaknya melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk turut serta dalam memutuskan sebuah keputusan atas sebuah kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan pelibatan ini akan memberikan hasil keputusan

yang efektif, karena didasarkan pada kesepakatan banyak pihak yaitu masyarakat yang akan melaksanakan kebijakan yang diputuskan tersebut. Selain itu, pelibatan masyarakat juga akan menjadikan masyarakat merasa bertanggung jawab atas keutusan yang telah dibuat, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan akan menuntut kesadaran masyarakat agar benar-benar menjalankannya.

3. Perencanaan Pendidikan

a. Pengertian Perencanaan Pendidikan

Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat organisasi tetap berdiri tegak dan maju sebagai satu sistem dalam tenunan suprasistem yang tetap berubah (Pidarta, 2005: 3). Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (Rodliyah, 2013: 101) .

Perencanaan menurut Sarbini dan Lina (2011: 13) adalah usaha untuk menggali pihak yang bertanggung jawab terhadap berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Sa'ud dan Makmun (2011: 3) perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan

apa yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya).

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi terhadap suatu kegiatan atau aktifitas guna menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan demi mencapai tujuan bersama ke depannya nanti. Dari definisi ini dapat dinyatakan bahwa unsur penting dalam menyusun suatu perencanaan adalah bahwa perencanaan harus memuat unsur (1) sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, (2) seperangkat kegiatan, (3) proses yang sistematis, dan (4) hasil serta tujuan tertentu yang hendak dicapai.

Sedangkan pengertian perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan (Fattah, 2001: 93). Pendapat lain menyatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya (Coombs dalam Sarbini dan Lina, 2011: 8).

Menurut Rodliyah (2013: 101) bahwa perencanaan pendidikan sekolah adalah penyusunan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Sedangkan menurut Sa'ud dan Makmun (2011: 11-12) perencanaan pendidikan itu adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut.

Dari beberapa definisi tentang perencanaan pendidikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses dan kegiatan dengan melihat masa depan guna menentukan kebijakan dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi (taat asas) internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain.

Hal terpenting dari perencanaan pendidikan adalah bertujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakatnya. Secara konseptual, bahwa perencanaan pendidikan itu sangat ditentukan oleh cara, sifat, dan proses pengambilan keputusan, sehingga

nampaknya dalam hal ini terdapat banyak komponen yang ikut memproses di dalamnya. Sedangkan perencanaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini terfokus pada beberapa bidang perencanaan, seperti pada bidang keuangan, bidang sarana prasarana, bidang hubungan dengan masyarakat, bidang kurikulum dan bidang pembangunan yang membutuhkan peran serta masyarakat di dalamnya agar proses penyelenggaraan pendidikan dapat direncanakan dengan matang oleh pihak sekolah bersama masyarakat.

b. Pentingnya Perencanaan Pendidikan

Perencanaan dianggap penting dan sangat diperlukan bagi sebuah lembaga pendidikan dikarenakan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- 2) Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dari resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya.
- 5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi, termasuk pendidikan (Sa'ud dan Makmun, 2011: 33).

Apa yang telah dijelaskan di atas merupakan pentingnya perencanaan bagi sebuah organisasi maupun lembaga pendidikan dalam menentukan arah dan kebijakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang telah direncanakan. Ini berarti bahwa memang perencanaan pendidikan sangat dibutuhkan proses perencanaan yang matang karena menentukan maju mundurnya sebuah sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan.

c. Prinsip Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan harus memiliki prinsip-prinsip yang diperlukan sebagai pegangan dan pedoman baik dalam proses penyusunan rancangan maupun dalam proses implementasinya.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perencanaan itu interdisipliner, karena pendidikan itu sendiri sesungguhnya interdisipliner terutama dalam kaitannya dengan pembangunan manusia
- b) Perencanaan itu fleksibel, dalam arti tidak kaku tapi dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan.
- c) Perencanaan itu objektif rasional, dalam arti untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan subjek sekelompok masyarakat saja.
- d) Perencanaan itu tidak dimulai dari nol tapi dari apa yang dimiliki.
- e) Perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir, dalam arti segala kekuatan dan modal dasar perlu dihimpun secara terkoordinasikan untuk digunakan secermat mungkin bagi kepentingan pembangunan pendidikan.
- f) Perencanaan itu disusun dengan data, perencanaan tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan.

- g) Perencanaan itu mengendalikan kekuatan sendiri, tidak bersandarkan pada kekuatan orang lain, karena perencanaan yang bersandarkan kepada kekuatan bangsa lain akan tidak stabil dan mudah menjadi objek politik bangsa lain.
- h) Perencanaan itu komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup seluruh aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan (Sa'ud dan Makmun, 2011: 14-15).

Pemaparan di atas telah menjelaskan bahwa sebuah perencanaan pendidikan hendaknya memiliki prinsi-prinsip yang akan dijadikan sebagai pegangan dalam proses penyusunan perencanaan dan dalam proses implementasinya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa prinsip yang harus ada dalam perencanaan pendidikan adalah bahwa perencanaan itu interdisipliner, perencanaan itu fleksibel, perencanaan itu objektifrasional, perencanaan tidak dimulai dari nol tapi dari apa yang dimiliki, perencanaan sebagai wahana menghimpun kekuatan secara terkoordinir, perencanaan itu disusun dengan data, perencanaan out mengendalikan kekuatan sendiri, dan perencanaan itu komprehensif dan ilmiah.

d. Tahapan Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam proses perencanan harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sarbini dan Lina (2011: 63-64) menjelaskan bahwa ada lima tahapan yang harus dilalui dalam perencanaan pendidikan yang meliputi :

- 1) *Pra-Perencanaan* (analisis keadaan masalah) terdiri atas kegiatan diagnosis keadaan system (masalah dan kebutuhan), formulasi, tujuan, perkiraan sumberdaya dan dana, perkiraan target, dan identifikasi kendala.
- 2) *Formulasi rencana*, yaitu menuliskan secara singkat, lengkap dan padat tentang rencana yang diusulkan, alasan pengusulan dan cara pelaksanaan usulan.
- 3) *Elaborasi rencana*, yaitu perincian setiap unit organisasi sehingga menjadi jelas. Langkahnya terdiri atas programming, identifikasi, dan formulasi proyek.
- 4) *Implementasi rencana*, yaitu dimulainya pelaksanaan proyek saat proses perencanaan bergabung dengan proses manajemen.
- 5) *Evaluasi dan perencanaan ulang*, berguna untuk memberikan gambaran kelemahan-kelemahan dan dapat dipergunakan untuk memperbaiki sisa rencana, dan sebagai alat diagnosis dalam membuat perencanaan ulang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam proses perencanaan pendidikan terdiri atas lima tahapan, yaitu tahap pra-perencanaan, tahap formulasi rencana, tahap elaborasi rencana, tahap implementasi rencana, dan tahap evaluasi dan perencanaan ulang. Dengan menjalankan tahapan di atas, maka sebuah lembaga pendidikan akan memperoleh sebuah hasil perencanaan yang matang jika pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang telah menetapkan perencanaan tersebut.

e. Macam-macam Perencanaan Pendidikan di Sekolah

Perencanaan pendidikan di sekolah ada berbagai macam yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: berdasarkan jangka waktu, luas jangkauannya, dan di lihat dari telaahnya. Adapun

macam perencanaan di sekolah tersebut secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Jangka Waktu
 - a) *Perencanaan jangka panjang*, adalah perencanaan program sekolah yang meliputi kurun waktu 10, 20 atau 25 tahun. Parameter atau ukuran keberhasilannya bersifat sangat umum, global dan tidak terperinci.
 - b) *rencanaan jangka menengah*, adalah perencanaan program sekolah yang di laksanakan dalam kurung waktu 4 – 7 tahun, dan merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang.
 - c) *Perencanaan jangka pendek*, merupakan perencanaan program sekolah yang di laksanakan dalam kurun waktu 1 – 3 tahun, dan merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah.
- 2) Berdasarkan luas jangkauannya
 - a) *Perencanaan makro*, adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh (umum) dan bersifat nasional.
 - b) *Perencanaan mikro*, merupakan perencanaan yang memiliki ruang lingkup terbatas, hanya untuk satu institusi.
- 3) Berdasarkan telaahnya
 - a) *Perencanaan strategis*, berkaitan dengan kegiatan menetapkan tujuan, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan sekolah.
 - b) *Perencanaan manajerial*, yang ditujukan untuk menggerakkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program sekolah agar tujuan yang telah di tetapkan dapat di capai secara efektif dan efisien.
 - c) *Perencanaan operasional*. Ini merupakan rencana program apa yang akan di kerjakan dalam tingkat pelaksanaan di sekolah. Perencanaan ini bersifat konkret dan spesifik serta berfungsi memberikan petunjuk teknis mengenai aturan, prosedur serta ketentuan-ketentuan lain yang bersifat teknik dan tidak memerlukan lagi penafsiran-penafsiran karena di dasarkan pada data kuantitatif yang dapat di ukur (Harjanto, 2000).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan di sekolah ada berbagai macam yang dapat dilihat dari beberapa segi yaitu: (1) berdasarkan jangka waktu (perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek); (2) berdasarkan luas jangkauannya (perencanaan makro dan perencanaan mikro) dan; (3) dilihat dari teladinya (perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional).

f. Dimensi-dimensi Perencanaan di Sekolah

Dimensi perencanaan di sekolah merupakan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pendidikan. Menurut Sa'ud dalam Rodliyah (2013: 108-109) bahwa dimensi perencanaan pendidikan di sekolah meliputi berikut ini :

- 1) Signifikansi; merupakan tingkat kekuatan atau pengaruh serta ketergantungan antara tujuan pendidikan dengan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan.
- 2) Fleksibilitas; maksudnya bahwa dalam perencanaan pendidikan harus disusun dengan pertimbangan realitas baik yang berkaitan dengan sumber-sumber pembiayaan serta pertimbangan-pertimbangan lainnya yang bersifat realistik untuk dicapai.

- 3) Relevansi; maksudnya konsep ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan pendidikan di sekolah memungkinkan penyelesaian masalah-masalah secara spesifik dan mendetail.
- 4) Kepastian; konsep ini mengarahkan agar dalam perencanaan pendidikan perlu mempertimbangkan dan memilih hal-hal yang pasti dan dapat dilaksanakan, untuk meminimumkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian.
- 5) Ketelitian; prinsip utama dalam ketelitian ialah agar perencanaan pendidikan disusun dalam bentuk sederhana.
- 6) Adaptabilitas; maksudnya perencanaan pendidikan di sekolah harus dirancang fleksibel atau *adaptable*.
- 7) Waktu; faktor yang berkaitan dengan waktu harus diperhatikan, baik untuk prediksi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 8) Monitoring; merupakan proses mengembangkan kriteria untuk menjamin berbagai komponen perencanaan pendidikan berjalan dan dapat dikembangkan secara efektif dengan berbagai variasi.
- 9) Isi perencanaan; merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan.

Sedangkan menurut Sa'ud dan Makmun (2011: 53-54) menyatakan bahwa dimensi perencanaan meliputi hal-hal berikut.

- 1) *Significance*, yaitu tingkat kebermaknaan yang tergantung dari kepentingan sosial dari tujuan pendidikan yang diusulkan.
- 2) *Feasibility*, yaitu kekayaan teknis dan perkiraan biaya merupakan aspek yang harus dilihat secara realistik.
- 3) *Relevance*, yaitu konsep relevan mutlak perlu bagi implementasi rencana pendidikan.
- 4) *Definitiveness*, yaitu penggunaan teknik simulasi untuk menjalankan rencana dengan menggunakan data modal buatan.
- 5) *Parsimoniousness*, yaitu perencanaan haruslah digambarkan secara sederhana.
- 6) *Adaptability*, yaitu perencanaan pendidikan haruslah dinamis dan dapat berubah sesuai informasi sebagai umpan balik sistem.
- 7) *Time*, yaitu siklus alamiah pokok bahasan pada perencanaan, kebutuhan untuk merubah situasi yang tidak dapat dipikul, keterbatasan perencanaan pendidikan dalam meramalkan masa depan merupakan beberapa faktor berkaitan dengan waktu.
- 8) *Monitoring*, yaitu melibatkan penegakan kriteria pendidikan untuk menjamin berbagai komponen rencana bekerja secara efektif
- 9) *Subject matter*, yaitu pokok-pokok bahasan yang direncanakan yang terdiri atas sasaran dan tujuan, program dan pelayanan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, penganggaran, struktur pemerintahan, dan konteks sosial.

Dalam merancang perencanaan pendidikan, hendaknya sekolah harus memperhatikan berbagai dimensi perencanaan di atas, agar proses perencanaan pendidikan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu, perencanaan pendidikan juga harus memperhatikan dan memikirkan efek dari perencanaan yang akan dijalankan, sehingga dengan perhatian yang baik terhadap dimensi perencanaan tersebut akan mampu memberikan

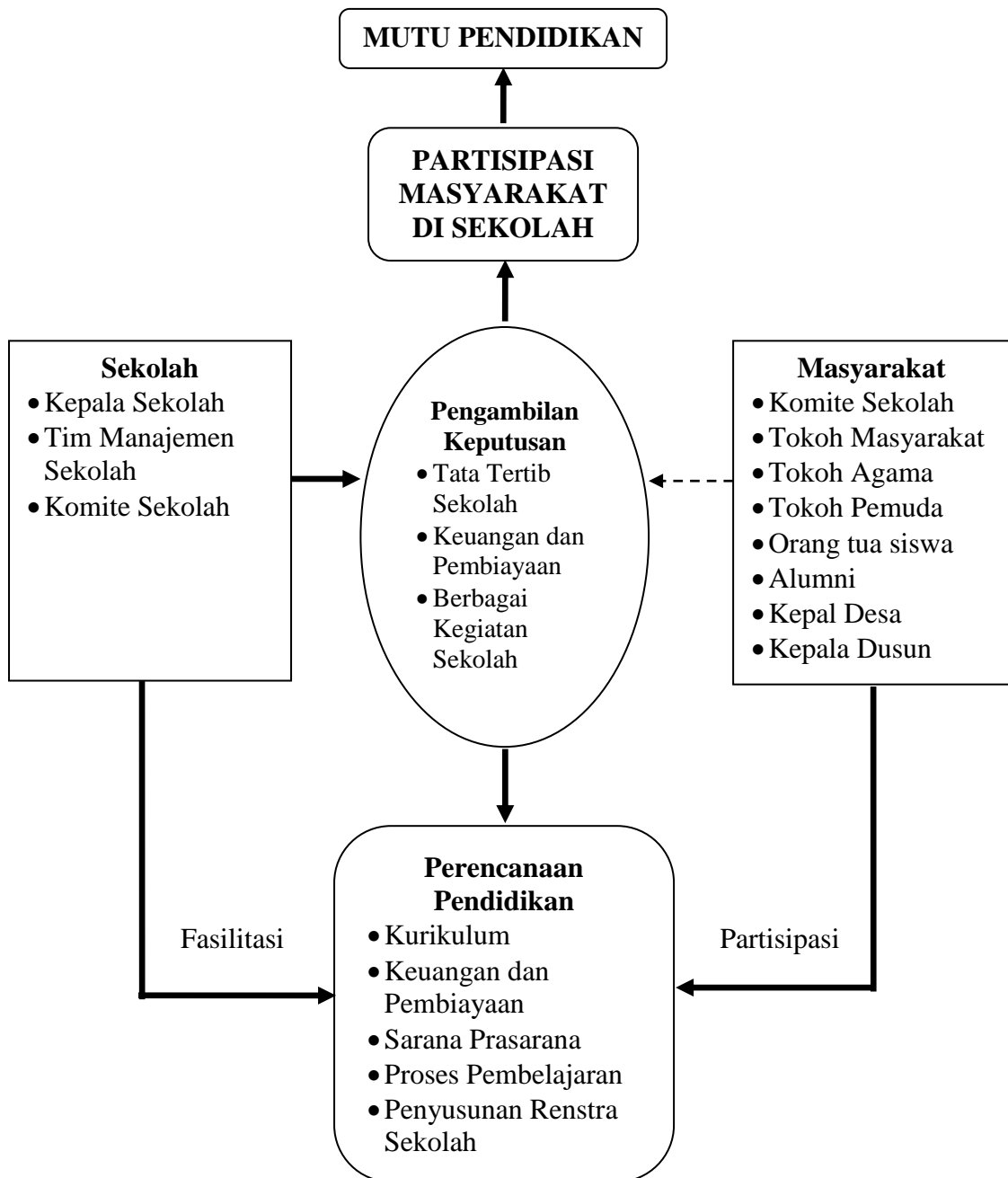
pemahaman kepada pihak sekolah agar dapat merancang sebuah perencanaan yang matang bagi sekolah demi kemajuannya.

Dalam perencanaan pendidikan, seluruh komponen yang ada di lembaga pendidikan maupun komponen masyarakat yang memiliki kepentingan dengan sekolah harus turut berperan serta atau terlibat dalam proses tersebut. Keterlibatan semua pihak akan memberikan kemudahan dalam proses perencanaan dan membantu menghasilkan sebuah perencanaan pendidikan yang matang dengan adanya berbagai saran, masukan, ide-ide maupun pendapat dari pihak-pihak yang dilibatkan dalam sebuah perencanaan. Hal ini akan berdampak pada pertumbuhan sekolah atau lembaga pendidikan ke arah yang lebih baik demi keberlangsungan sekolah kedepannya.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dirancang sebagai bahan untuk membangun sebuah konsep pemikiran yang akan menentukan arah dari kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Demikian pula dalam penelitian ini yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dapat menjelaskan kerangka berfikirnya sebagai berikut.

Gambar 2.4
 Gambar Kerangka Berpikir Partisipasi Masyarakat
 dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan



Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sangat diperlukan guna menentukan arah kebijakan pendidikan agar mampu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan serta mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Keterlibatan masyarakat ini dibutuhkan karena pendidikan dan lembaga pendidikan berada di dalam dan dikelilingin oleh masyarakat, sehingga mengharuskan terjadinya interaksi diantaranya. Dan mereka inilah sebagai *customers* sekolah yang harus dipenuhi keinginan dan kebutuhannya.

Secara khusus masyarakat yang berkepentingan dengan sekolah adalah orang tua siswa dan masyarakat disekitar sekolah seperti alumni, kalangan pemerhati pendidikan termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan industri, pengusaha, serta masyarakat pada umumnya. Namun dari kenyataan yang ada, dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pendidikan yang berperan penting adalah kepala sekolah, tim manajemen sekolah dan komite sekolah tanpa melibatkan masyarakat yang seharusnya turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal ini menjadi faktor penghambat yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Oleh karenanya, penelitian ini ingin melakukan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan guna mengetahui secara pasti tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan terutama dalam hal pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan baik sebelum dilakukan pengembangan maupun setelah dilakukan pengembangan partisipasi masyarakatnya. Perbedaan hasil sebelum dan sesudah dilakukan pengembangan akan memperlihatkan tingkat keberhasilan dan pencapaian sekolah apabila masyarakat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini memerlukan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan rinci. Jenis pendekatan yang paling sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan studi pengembangan. Dalam hal ini peneliti mengkaji setiap peristiwa yang terjadi dan konsep-konsep pemikiran tentang peristiwa dan kegiatan masyarakat dalam pendidikan untuk mengembangkan fokus yang diteliti serta mengungkapnya secara mendetail.

Sebagai konsekuensi logis penerapan pendekatan kualitatif, maka ciri-ciri penelitian kualitatif tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini adalah : (1) mempunyai latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, dan peneliti menjadi instrument kunci (*the key instrument*), (2) bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan situasi dan pandangan tentang dunia secara deskriptif, (3) lebih mementingkan proses daripada hasil semata, (4) cenderung menganalisis data secara induktif, dan (5) makna merupakan hal yang esensial (Bodgan dan Biklen, 1998: 107).

Alasan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan maksud agar dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang proses pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Jenis Pengembangan

Penelitian pengembangan merupakan suatu pengkajian sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi program, proses, dan produk pembelajaran serta program-program sekolah yang harus memenuhi kriteria validitas, praktikalitas dan efektifitas. Dengan kata lain, Penelitian pengembangan adalah penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan dan mengembangkan keadaan riil pada saat tertentu sehingga nantinya menjadi lebih lengkap dan lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Seals dan Richey (1994), Borg and Gall (1983: 772) dan Sujadi (2003:164) tentang penelitian pengembangan dan Sentyasa (2009) tentang karakteristik penelitian pengembangan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan biasa. Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan cara mengukur keadaan nyata saat tertentu (studi awal), kemudian mengembangkannya. Pengembangan ini dilakukan bersama oleh peneliti dan kepala sekolah. Setelah pengembangan dilaksanakan maka dilakukan pengukuran akhir. Proses terakhir adalah membandingkan antara hasil studi awal dengan

hasil pengukuran akhir atau keadaan setelah dikembangkan. Dengan demikian penelitian pengembangan di sini berarti penelitian bekerjasama dengan kepala sekolah mengembangkan partisipasi masyarakat yang sangat terbatas sehingga menjadi lebih baik dan lengkap.

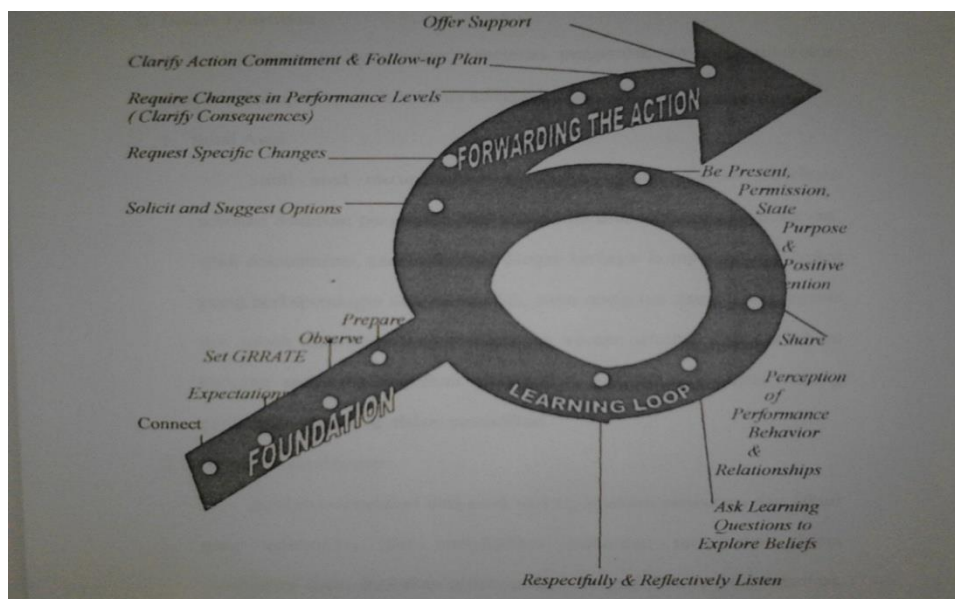
Ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan penelitian pengembangan. Alasan-alasan itu dapat disebutkan sebagai berikut. Alasan pokok, berasal dari pendapat bahwa pendekatan penelitian “tradisional” (misalnya penelitian survei, korelasi, eksperimen) dengan fokus penelitian hanya mendeskripsikan pengetahuan, jarang memberikan preskripsi yang berguna dalam pemecahan masalah-masalah rancangan dan desain dalam pembelajaran atau pendidikan. Alasan lain, adanya semangat tinggi dan kompleksitas tentang sifat kebijakan reformasi pendidikan. Sedangkan tujuan penelitian pengembangan adalah ingin menilai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu (Akker dalam Setyosari, 2013: 224).

Dari konsep penelitian pengembangan yang telah diuraikan di atas mengacu pada paradigma *transformational coaching* dalam mengukur tahapan kemajuan atau perkembangan dari suatu kegiatan yang meliputi:

- a. *Solicit and suggest option* (memberikan saran dan penjelasan-penjelasan)
- b. *Regues specific changes* (permintaan untuk melakuakn perubahan secara khusus)

- c. *Require changes in performance levels and clarify consequences* (meminta perubahan pada level tingkah laku dan kejelasan akan konsekuensinya)
- d. *Clarify the action commitment and follow-up plan* (menjelaskan komitmen tindakan dan merencanakan tindak lanjut)
- e. *Offer support* (menawarkan dukungan) (Chrane, 2002: 48-50).

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan merupakan kegiatan berangkai secara sistematis dan berkesinambungan sebagaimana yang dijelaskan dalam transformatonal coaching bahwa kegiatan dasar atau pondasi dikembangkan melalui pembelajaran yang sungguh-sungguh seperti melalui penjelasan/ pelatihan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dalam bentuk memacu tindakan sebagaimana disederhanakan dalam gambar berikut :



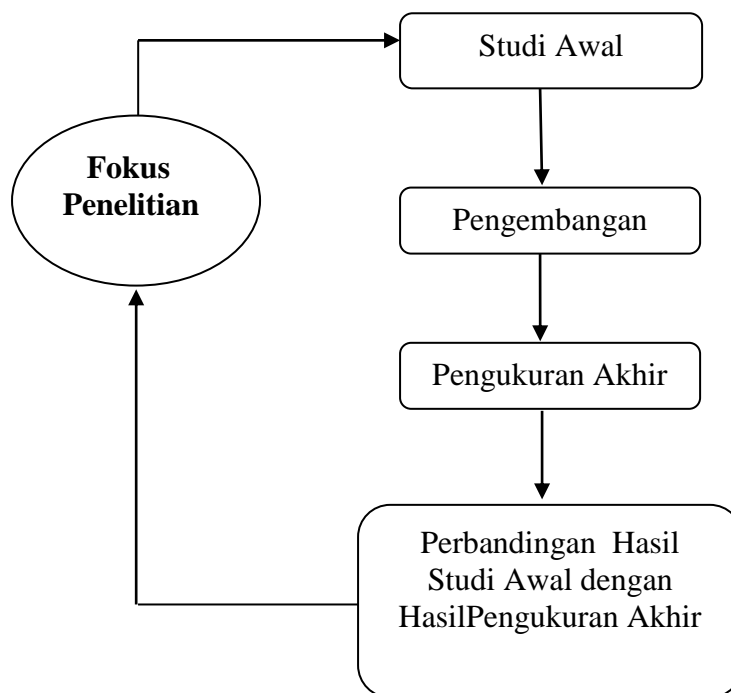
Gambar 3.1
Siklus Hubungan *Foundation, Learning, Loop dan Forwarding-the-Action*
(Sumber : Crane dan Patrick, 2002 : 84).

Selanjutnya sebagai proses akhir dari penelitian pengembangan adalah membandingkan antara hasil studi awal dengan hasil pengukuran akhir atau keadaan setelah dikembangkan. Dengan demikian dalam penelitian pengembangan ini berarti peneliti menjalin kerjasama dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan komponen masyarakat lainnya dalam melakukan pengembangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Gambar 3.2
Langkah-langkah Penelitian Pengembangan



1. Studi awal

Studi awal merupakan suatu kajian tentang subjek penelitian sebelum diadakan pengembangan. Studi awal dilakukan dengan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan berbagai komponen masyarakat yang berkepentingan dengan sekolah, yaitu orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha dan komite sekolah. Studi awal ini bertujuan untuk mendapatkan situasi (gambaran) riil awal tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. apakah masyarakat pada studi awal ini dilibatkan atau tidak oleh kepala sekolah dan tim manajemen sekolah untuk ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah dan telah dilaksanakan secara efektif dan maksimal atau tidak. Oleh karenanya, pelaksanaan studi awal ini akan menentukan bagaimana keadaan riil pada sekolah tersebut terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebelum dikembangkan.

2. Pengembangan

Setelah melakukan studi awal dan telah mengetahui potret awal keadaan partisipasi masyarakat dalam, maka dilakukan proses pengembangan. Proses pengembangan dalam penelitian ini diawali dengan menyampaikan kepada kepala sekolah partisipasi masyarakat yang diperoleh peneliti dalam studi awal dengan maksud kepala sekolah mengetahui keadaan riil partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolahnya, dalam hal ini di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsini Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Kemudian peneliti menunjukkan kepada kepala sekolah teori-teori atau konsep-konsep tentang cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sehingga peneliti dan kepala sekolah memiliki kesamaan pandangan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah tersebut.

Sesudah peneliti dan kepala sekolah memiliki kesamaan pandangan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, barulah peneliti bersama kepala sekolah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, bagaimana bentuk, bagaimana bidang, serta bagaimana cara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan melalui sosialisasi.

Proses sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dilakukan secara bertahap dan secara individual dan kelompok. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Tahap pertama, sosialisasi dan konsultasi dilakukan kepada komite sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah secara berkelompok. Peneliti bersama kepala sekolah menjelaskan hasil studi awal yang

diperoleh peneliti. Selanjutnya peneliti menjelaskan proses pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar komite sekolah memahami tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan bagaimana cara berpartisipasi dalam pendidikan dan juga mengetahui kejelasan dan tujuan penelitian yang akan dikembangkan oleh peneliti guna memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian nantinya, karena komite sekolah merupakan informan penelitian yang akan memberikan banyak informasi seputar masalah yang diteliti oleh peneliti.

- b) Tahap kedua, sosialisasi dan konsultasi dilakukan kepada tokoh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dilakukan di sekolah dan luar sekolah. Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran terhadap proses penelitian pengembangan yang akan dilakukan peneliti. Tokoh masyarakat selalu menjadi penengah antara masyarakat dengan sekolah karena tokoh masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi, masukan, dan keluhan masyarakat terhadap sekolah. Oleh karenanya tokoh masyarakat akan dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian yang akan memberikan bantuan bagi peneliti untuk menemukan

orang-orang yang dapat memberikan informasi akurat dan data lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti.

- c) Tahap ketiga, sosialisasi dilakukan kepada orang tua siswa dan masyarakat umum maupun pengusaha di sekitar sekolah. Tujuannya juga sama guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka di sekolah dan bagaimana cara berpartisipasi atau berperan serta dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu juga menjelaskan tentang konsep pengembangan yang akan dilaksanakan peneliti agar masyarakat memahami bagaimana cara mereka berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti. Karena keterbatasan tempat, maka tidak semua orang tua siswa dan anggota masyarakat di sekitar sekolah dapat mengikuti kegiatan itu, tetapi ditentukan secara purposive sehingga diperoleh wakil-wakil masyarakat yang dapat hadir mewakili untuk kegiatan ini.

Penelitian pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, mulai pada minggu kedua bulan Maret 2015 dan berakhir pada minggu kedua bulan Juni 2015 atau selama satu semester yakni selama semester genap tahun ajaran 2014/2015 ini berlangsung.

3. Pengukuran akhir

Pengukuran akhir merupakan kebalikan dari studi awal. Kalau studi awal dilakukan sebelum kegiatan pengembangan, maka pengukuran akhir dilakukan setelah pengembangan dilakukan. Pengukuran akhir dilakukan dengan mengamati atau melakukan kegiatan observasi terhadap berbagai kegiatan komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, mewawancarai informan dari berbagai komponen masyarakat dan melakukan studi dokumentasi dari photo, SK kepala sekolah, notulen rapat, dan daftar hadir rapat atau kegiatan masyarakat dalam pendidikan. Pengukuran akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara studi awal dengan pengukuran akhir guna mengungkap peningkatan partisipasi masyarakat secara naratif sebagai hasil dari proses pengembangan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan.

4. Perbandingan hasil studi awal dengan hasil pengukuran akhir

Perbandingan hasil dalam penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara hasil studi awal dengan hasil pengukuran akhir/pengembangan dengan memaparkan data secara naratif, bukan dengan angka-angka. Perbandingan dilakukan dengan membuat tabel perbandingan partisipasi masyarakat, yang berisi variabel yang diukur, hasil studi awal, dan hasil pengukuran akhir/hasil pengembangan. Dengan demikian peneliti dan pembaca dapat melihat apakah terjadi peningkatan atau tidak setelah dilakukan pengembangan.

C. Setting Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. Madrasah Aliyah ini merupakan madrasah yang telah cukup lama, berdiri tahun 1995 dan sudah menamatkan siswa sebanyak dua belas (12) kali. Dalam perjalanannya, madrasah ini banyak mengalami kemajuan secara akademik, non akademik dan fisik, namun partisipasi masyarakat dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan sekolah dalam menjalankan programnya. Saat ini Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin memiliki tenaga pendidik sebanyak 28 yang terdiri dari 21 orang guru tetap yayasan (GTY) dan 7 orang guru tidak tetap (GTT) serta 4 orang tenaga administrasi yang kesemuanya merupakan pegawai tetap yayasan (PTY). Secara lengkap kondisi tenaga pendidika dan tata usaha di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin dapat dijabarkan dalam bentuk table berikut:

Tabel 3.1
Keadaan Guru dan Tata Usaha MA Hidayatul Muhsinin

Pendidikan	J u m l a h			
	GTY	GTT	PTY	PTT
S2		1	-	-
S1	15	8 *)	2	-
D3	-	-	-	-
D2/D1	-	-	-	-
SMA	-	-	2	-
SMP	-	-	-	-
SD	-	-	-	-
J u m l a h	15	9	4	0

Sumber : Tata Usaha MA Hidayatul Muhsinin, 2015

Catatan : *1 orang sedang menyelesaikan S2

Dalam table 3.1 di atas, telah tergambar keadaan guru dan tata usaha di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini meliputi : orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, wakil kepala sekolah dan dewan guru, tata usaha dan komite sekolah. Cara penentuan informan adalah dengan menggunakan tehnik *non random sampling* dengan jenis metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011: 85).

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa metode *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Hanya mereka yang ahli yang patut memberikan pertimbangan untuk pengambilan sampel yang diperlukan (Riduwan, 2013: 63). Dengan demikian metode *purposive sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel dengan memilih orang yang dapat memberikan penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Penentuan informan juga ditempuh dengan menggunakan *snowball sampling* (teknik bola salju), yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2011: 85). Penentuan informan dengan *snowball sampling* juga selaras dengan pendapat Riduwan (2013: 64).

Dengan demikian, Penentuan informan yang ditempuh dengan menggunakan *snowball sampling* (teknik bola salju) adalah penentuan

informan kunci yang menunjukkan orang-orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan menjelaskan masalah yang akan diteliti yaitu tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, selanjutnya orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan masih belum memadai, sampai pada akhirnya keterangan yang diperoleh telah dirasakan cukup dan memadai.

Berikut ini adalah tabel informan penelitian.

Tabel 3.2
Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Orang Tua Siswa	10 Orang
2.	Alumni	5 Orang
3.	Tokoh Masyarakat	2 Orang
4.	Tokoh Agama	2 Orang
5.	Kepala Dusun	5 Orang
6.	Kepala Tata Usaha	1 Orang
7.	Wakil Kepala Sekolah dan Guru	8 Orang
8.	Komite Sekolah	2 Orang
	J u m l a h	35 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diungkapkan pada bagian rumusan masalah dari suatu penelitian ilmiah, maka perlu dikumpulkan sejumlah data yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi Berperan Serta (*Participant Observation*)

Pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam melakukan penelitian kualitatif, karena data atau “kata-kata” tidak selamanya equivalent dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun yang di observasi dalam penelitian kualitatif adalah situasi sosial yang setidak-tidaknya mempunyai tiga elemen utama yakni:

- a. Lokasi atau keadaan fisik tempat situasi sosial tersebut berlangsung,
- b. Manusia-manusia atau actors yang menduduki status atau posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan
- c. Aktifitas para pelaku pada lokasi berlangsungnya suatu situasi sosial (Raojanna, 2008: 53).

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyanto (2003: 96) dan Gulo (2010: 116).

Sedangkan yang dimaksud dengan observasi berperan serta (*participant observation*) adalah proses pengamatan dengan berperan langsung terlibat dengan informan dikancah. Pada saat observasi terjalinlah interaksi sosial yang insentif antara peneliti dengan subyek yang berada di dalam kancah penelitian. Sebenarnya inilah ciri khusus dari penelitian kualitatif (Riyanto, 2007: 26). Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Sugiyono (2011: 145)

Observasi berperan serta digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci melalui pengamatan yang seksama dengan terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti. Jadi di sini pengamatan bukan proses pasif dimana kita mencatat apa yang terjadi, seakan-akan peneliti berada di luar dan terpisah dari proses partisipasi masyarakat. Mengadakan observasi adalah proses aktif. Peneliti ikut terlibat aktif dan memilah tempat, kegiatan, dan informan yang sesuai dengan fokus penelitian. Sehingga yang menjadi sasaran observasi dalam penelitian ini adalah komponen masyarakat dan *stakeholders*, dan kegiatan *stakeholders* yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan baik yang terjadi di sekolah maupun luar sekolah.

Dalam kegiatan observasi berperan serta ini, yang dilakukan peneliti adalah berusaha berada dalam situasi sehari-hari di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin guna ikut terlibat secara langsung dan melihat secara langsung situasi pendidikan di sekolah, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di sekolah pada saat studi awal, kemudian pada proses pengembangan, dan sampai pada proses pengukuran akhir dan perbandingan antara studi awal dengan pengukuran akhir.

Hasil studi awal peneliti sampaikan kepada kepala sekolah guna menyamakan persepsi dan pandangan serta konsep selanjutnya yang akan dilakukan peneliti bersama kepala sekolah dalam kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan

pendidikan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami tentang partisipasi dan cara berpartisipasi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sehingga dalam proses pengembangan yang dilakukan akan terlaksana secara efektif dan memperoleh hasil pengukuran akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Hasil dari kegiatan observasi dituangkan dalam bentuk catatan lapangan. Proses pencatatan dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Ada dua jenis catatan lapangan yang dihasilkan, yakni catatan lapangan deskriptif dan catatan lapangan reflektif (Bog dan Biklen dalam Raojanna, 2008: 55). Dengan catatan lapangan deskriptif peneliti dapat melakukan pencatatan tentang gambaran situasi dan kondisi subyek yang diteliti. Sedangkan dengan catatan reflektif akan diuraikan pemahaman tentang hal-hal yang terjadi, merasakan dan melihat yang muncul, melakukan interpretasi tuturan dan hal-hal penting lainnya yang muncul berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Sementara Riyanto (2007: 26) menjelaskan bahwa secara metodologis, perilaku peneliti dalam proses observasi adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan yang ada di dalam kancah, akan tetapi tidak terikat secara pribadi.
- b. Menekankan tugasnya dengan mengobservasi kancah.
- c. Melakukan observasi secara sistematis terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat kancah.
- d. Peneliti yang telah terlatih, dalam melakukan observasi dan menganalisis data seperti orang yang telah mengenal dan memahami tugasnya.

Dengan demikian, untuk memperoleh data tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan melalui observasi, maka peneliti berusaha untuk berada dalam situasi sehari-hari di MA Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

2. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Riduwan, 2013: 102). Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini juga sesuai dengan teknik wawancara yang dijelaskan oleh Gulo, 2010: 119) dan Riyanto (2001: 83).

Dengan demikian wawancara mendalam adalah percakapan antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan melakukan tanya-jawab dalam hubungan bertatap muka langsung dengan responden agar memperoleh data yang akurat dan tepat.

Sementara itu, Faisal dalam Raojanna (2008: 59) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara biasanya digunakan sebagai cara utama untuk mengumpulkan data atau informasi. Hal ini disebabkan:

- a. Dengan wawancara peneliti tidak hanya dapat menggali apa saja yang diketahui dan alami oleh seseorang atau subyek yang diteliti

melainkan juga yang tersembunyi jauh dari diri subyek penelitian (*explicit knowledge* maupun *tacit knowledge*), dan

- b. Apa yang dinyatakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa mendatang.

Jadi wawancara mendalam ini akan digunakan oleh peneliti untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, pengusaha, dan komite sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, anggota masyarakat yang berpartisipasi, bentuk, bidang, serta cara partisipasi masyarakat.

Jenis wawancara ada bermacam-macam, antara lain wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tanpa berencana (*unstandardized interview*). Wawancara tanpa berencana terbagi atas : (1) wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) yang meliputi wawancara terarah (*directed*) dan tak terarah (*nondirected*), dan (2) wawancara berstruktur (*structure interview*), dan (3) wawancara panel (*Panel interview*) (Kuntjaraningrat, 1987: 138-140).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, artinya dalam setiap wawancara peneliti tidak menggunakan instrument yang terstandar, namun cukup menyediakan garis besar wawancara sebagai pedoman yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Penggunaan wawancara tak berstruktur ini dimaksudkan agar

peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dapat secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Disamping itu wawancara dapat berlangsung luwes, arahnya bisa lebih terbuka sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih banyak, pembicara tidak terlalu terpaksa, sehingga menjenuhkan kedua pihak.

Dalam proses wawancara, peneliti secara langsung tanpa perantara mewawancarai informan penelitian yang dituju guna mencari informasi yang dibutuhkan. Peneliti berkunjung secara langsung ke lokasi tempat informan penelitian yang dituju dalam proses mengumpulkan informasi. Selain itu juga, peneliti berupaya mengumpulkan masyarakat yang dijadikan sebagai informan penelitian di sekolah untuk melakukan studi wawancara dalam upaya mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara, antara lain pada saat mencari informasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi berperan serta dan wawancara mendalam, maka dilakukan studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data non instansi yang dapat berupa dokumen dan rekaman tentang partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi merupakan sarana pembantu bagi peneliti dalam proses pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya (Sarwono, 2006: 225). Metode pencarian data ini sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Peneliti akan mempelajari dokumen-dokumen tersebut untuk dapat mengenal obyek yang diteliti. Penggunaan metode dokumentasi ini sesuai dengan pandangan Arikunto (2006) dan Riyanto (2001:83) tentang penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tehnik dokumentasi adalah suatu tehnik penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah berlangsung melalui sumber-sumber dokumen dalam menggali suatu data. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, surat-surat, dan data yang relevan penelitian.

Dalam penelitian ini dokumen yang dijadikan sumber data adalah buku daftar hadir rapat, notulen surat, surat keputusan kepala sekolah, buku tamu, dan photo kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut setelah diperoleh, dibaca, dan dianalisis, kemudian dibuatkan ringkasan pada lembar ringkasan dokumen.

F. Teknik Pengabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang sangat penting di dalam menentukan validitas data penelitian kualitatif yang dilakukan atas dasar kriteria-kriteria tertentu. Keabsahan dapat meliputi: (1) kredibilitas (*credibility*), (2) transperabilitas (*transferability*), (3) dependabilitas (*dependability*), dan (4) konfirmabilitas (*confirmability*) (Moleong, 1990: 302).

Kriteria-kriteria keabsahan data tersebut secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Kredibilitas

Dengan kriteria ini data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang informan yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung (Riyanto, 2007: 17).

Menurut (Riyanto, 2007: 17-20) untuk memperoleh keabsahan data atau data yang valid, merasa cukup dengan enam teknik saja (minus negative case analysis) dalam standar kredibilitas ini, yaitu: (1) memperpanjang waktu observasi (*prolonged observation*), (2) pengamatan yang terus-menerus (*persistent observation*), (3) triangulasi (*triangulation*), (4) membicarakannya dengan teman sejawat (*predebriefing*), (5) menggunakan bahan referensi (*referential adequacy checks*), dan (6) mengadakan pengecekan anggota (*member checks*).

Dari tujuh enam teknik yang dikemukakan oleh Riyanto, peneliti hanya menggunakan 4 (empat) cara yang dianggap perlu dan penting bagi peneliti dalam penelitiannya agar penelitian ini dapat dipercaya, yaitu: (1) triangulasi (*triangulation*), (2) membicarakannya dengan teman sejawat (*predebriefing*), (3) menggunakan bahan referensi (*referential adequacy checks*), dan (4) mengadakan pengecekan anggota (*member checks*) yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Keempat cara tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Triangulasi (*triangulation*)

Menggunakan triangulasi/multiangulasi metode berarti mengecek dan membandingkan tingkat kepercayaan atau kebenaran suatu informasi/data yang diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan/observasi dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan hasil wawancara dengan dengan isi dokumen.

Triangulasi/multiangulasi sumber dilakukan dengan cara menggali sumberdata/informan lain, membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan data yang diperoleh dengan menggunakan sumber atau informan yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengecek dan menanyakan kembali data-data penting yang diperoleh dari seorang informan kepada informan lain.

Trianggulasi/multianggulasi data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sejenis dari informasi atau sumber yang berbeda. Selama dalam pelaksanaan penelitian, trianggulasi sumber data dilakukan khusus pada hal yang menjadi fokus perhatian peneliti, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Trianggulasi/multianggulasi sumber data dilakukan dengan bertanya pada kepala sekolah, guru, komite, orang tua siswa, tokoh masyarakat, alumni, pengusaha dan masyarakat lainnya. Untuk mencocokkan persoalan data ini, maka peneliti melakukan trianggulasi/multianggulasi sumber data dengan menempuh cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang dilakukan dengan responden,
 - 2) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen terkait yang diperoleh di sekolah,
 - 3) Membandingkan perspektif seorang kepala sekolah dan guru lainnya dengan pendapat dan pandangan komite sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, pengusaha dan alumni.
- b. Membicarakan dengan teman sejawat (*predepbriefing*)

Ini dilakukan oleh peneliti dengan jalan meminta kepada kolega/teman sejawat yang tidak ikut meneliti. Kolega itu dapat membicarakan, menanyakan berbagai hal termasuk metode yang

digunakan, kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh peneliti serta kemungkinan adanya bias-bias yang disebabkan oleh peneliti. Dan bahkan teman sejawat tersebut dapat mengkritik dan memberi masukan segala proses dan hasil penelitian. Kolega tersebut tentunya dipilih yang betul-betul mengerti penelitian kualitatif atau mengerti hal-hal yang berhubungan dengan substansi yang diteliti.

Diskusi dengan teman sejawat dalam penelitian ini dilakukan dengan membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan kepada teman-teman sejawat, seperti teman kerja di bidang pendidikan, teman kuliah, bahkan dosen pembimbing. Pembicaraan dengan teman sejawat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kritik, saran, masukan, pertanyaan-pertanyaan tajam/kritis yang menantang tingkat kepercayaan akan kebenaran hasil penelitian.

c. Menggunakan bahan referensi (*referential adequacy checks*)

Melacak kesesuaian semua hasil analisis data, semakin sesuai maka semakin terpercaya hasil penelitiannya. Dalam hal ini yang dilakukan termasuk mengecek pengarsipan data yang dikumpulkan selama penelitian lapangan. Arsip-arsip ini akan digunakan sebagai bahan referensi untuk mengecek apakah menyangsikan atau tidak. Apabila ada kesesuaian antara

data/informasi dan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikatakan bahwa kesimpulan ini dapat dipercaya.

Referensi yang dipakai antara lain bahan dokumentasi, catatan-catatan lapangan yang tersimpan, peneliti gunakan untuk mengecek apakah menyangsikan atau tidak antara data informasi dengan kesimpulan hasil penelitian. Jadi referensi sebagai bahan pemeriksaan guna meningkatkan kepercayaan akan kebenaran data. Bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data secara tertulis yang diperoleh dari lapangan berupa hasil rapat, SK kepala sekolah tentang partisipasi masyarakat, buku-buku yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

d. Pengecekan anggota (*member checks*)

Mengecek kesesuaian rekaman informasi/data, interpretasi dan simpulan-simpulan hasil penelitian dengan jalan meminta kepada mereka untuk mereviu dan mengecek kebenarannya. Teknik ini juga sangat penting dilakukan dengan upaya untuk menguji atau memeriksa keabsahan data yang telah diperoleh. Para informan yang terlibat dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dan pandangan mereka terhadap data yang telah dikumpulkan peneliti.

Member checks sebaiknya terus dilakukan selama penelitian, baik secara formal maupun tidak formal. Jadi tujuannya adalah supaya informasi dan data yang diperoleh benar-benar sesuai

dengan apa yang dimaksud oleh informan. Dengan demikian, tidak ada rekayasa data atau manipulasi data. Dalam *member checks* ini peneliti tidak melibatkan semua informan atau semua subyek, melainkan hanya kepada mereka yang oleh peneliti di anggap representatif. *Member checks* dalam penelitian ini dilakukan dengan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, dan dosen pembimbing.

2. Dependabilitas

Dependabilitas adalah kriteria untuk penelitian kualitatif apakah proses penelitian bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan proses penelitian yang benar ialah dengan audit dependabilitas guna mengkaji kegiatan yang dilakukan penelitian. Konsistensi mulai dari proses pengumpulan data, menginterpretasikan temuan, dan melaporkan hasil penelitian sangat penting untuk dilakukan. Semakin konsisten seorang peneliti dalam keseluruhan proses penelitiannya, maka semakin memenuhi standar dependabilitas (Riyanto, 2007: 20)

Untuk menilai apakah proses penelitian yang dilaksanakan bermutu atau tidak diperlukan dependabilitas. Dependabilitas ini digunakan untuk menilai proses yang telah peneliti tempuh yang dilakukan oleh dependent auditor, diantaranya dosen pembimbing dan dewan penguji. Untuk itu proses penelitian yang akan diaudit oleh auditor independen guna mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilakukan peneliti,

maka dalam penelitian ini auditor independennya adalah Bapak Drs. Untung Waluyo, MA., P.hD (selaku pembimbing pertama) dan Bapak Dr. Muhammad Zulfikar Syaib, M.Si. (selaku pembimbing kedua).

3. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan penelusuran dan pelacakan catatan/rekaman data lapangan dan koherensinya dalam interpretasi dan simpulan hasil penelitian yang dilakukan auditor. Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan tersebut, perlu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti hasil rekaman, hasil analisis data, dan catatan tentang proses penelitian. Untuk penilaian kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh auditor independen.

Untuk melakukan audit konfirmabilitas ini dapat dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan audit dependabilitas. Sehingga jika hasil audit tersebut menunjukkan adanya konfirmabilitas, maka hasil penelitian kualitatifnya bisa diterima dan diakui.

Dalam penelitian ini, dilakukan audit konfirmabilitas dengan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data mentah (catatan lapangan dan transkrip wawancara), hasil rekaman (dokumen dan photo partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan), hasil analisis data, dan catatan tentang proses yang digunakan dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

4. Transferabilitas

Artinya bahwa penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer pada konteks lain. Dalam penelitian ini menggunakan uraian rinci agar terungkap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan yang telah diperoleh peneliti. Jadi, untuk memenuhi kriteria ini cara yang paling tepat dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan secara rinci dan komprehensif tentang latar/konteks yang menjadi fokus penelitian.

Dengan teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitian yang menggambarkan konteks penelitian dengan mengacu pada fokus penelitian, yaitu persepsi masyarakat tentang partisipasi, anggota masyarakat yang berpartisipasi, bentuk partisipasi, cara masyarakat berpartisipasi dan faktor penunjang dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dengan uraian rinci ini terungkap bagaimana peneliti mencapai hasil penelitian ini sekaligus menyajikan segala yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti. Sehingga pembaca atau pemakai melihat ada sesuatu yang cocok dengan situasi yang dihadapinya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang direkam dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini peneliti menginterpretasikan, dan menafsirkan data. Tahap ini

dimaksud untuk mengetahui sejauh mana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Tandek Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiyono (2011: 245) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

Secara garis besar analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menelaah catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta catatan reflektif, kemudian memisahkan data yang penting untuk keperluan penelitian dari yang tidak penting,
2. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk penelaah lebih lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian,
3. Menelaah deskripsi data dan membandingkannya dengan teori yang menjadi acuan peneliti, termasuk merevisi teori, dan
4. Membuat analisis akhir dan menerangkannya dalam laporan untuk kepentingan penulisan thesis.

Berdasarkan sifat-sifat dan karakteristik data yang telah dikumpulkan peneliti, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik deskriptif yang dilakukan melalui tiga alur, yaitu : (1) Reduksi data, (2) Display data, dan (3) Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman dalam Riyanto (2007: 32-34) adalah sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dengan begitu, dalam reduksi ini ada proses *living in* dan *living out*, maksudnya data yang terpilih adalah *living in* dan data yang terbuang (tidak terpakai) adalah *living out*.

Dalam penelitian ini reduksi data dilaksanakan dengan cara: (1) membuat ringkasan kontak, (2) mengembangkan kategori pengkodean, (3) membuat catatan refleksi, dan (4) pemilahan data. Keempat teknik-teknik reduksi data ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung dan diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih tajam, mendalam dan terpercaya.

2. Display Data

Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat, naratif, table, matrik, dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Ada

Sembilan model penyajian data menurut Milles dan Huberman dalam Riyanto (2007: 33-34) yaitu :

- a. Model untuk mendeskripsikan data penelitian, seperti dalam bentuk organigram, peta geografis dan lainnya.
- b. Model yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian yang disebut dengan check list matriks. Karena matriks itu berupa tabel dua dimensi, maka pada barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya, dan pada kolomnya disajikan kurun waktunya, atau penelitiannya. Isi check list hanyalah tanda-tanda singkat apakah data dan atau tidak, data sudah terkumpul atau perlu dan sebagainya.
- c. Model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Model ini pada kolomnya disajikan kurun waktunya sebagaimana model dua di atas, bedanya pada model tiga ini setiap segmen bukan sekedar tanda check tetapi deskripsinya verbal dengan satu kata atau phrase.
- d. Model keempat ini berupa matriks tata peran. Berguna untuk mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeran seperti siswa, guru atau kepala sekolah.
- e. Model kelima adalah matriks konsep terklaster. Keterhubungan variable dapat tampak ketika diberi penjelasan atau diberi kriteria pengklasteran. Model ini terutama untuk meringkaskan berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda.

- f. Model keenam adalah matriks tentang efek atau pengaruh. Model ini hanya mengubah fungsi kolom-kolomnya, diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan.
- g. Model ketujuh adalah matriks lokasi. Melalui model ini diungkap dinamika lokasi untuk berubah. Pada barisnya diisi tentang komponen atau fungsi, sedangkan pada kolomnya efek jangka pendek, jangka panjang atau barisnya diisi dengan hambatan atau kesulitan.
- h. Model kedelapan adalah menyusun daftar kejadian. Daftar kejadian dapat disusun kronologis atau diklasterkan.
- i. Model kesembilan adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang ditelitinya.

3. Verifikasi dan Simpulan

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Mengambil simpulan merupakan proses penarikan intisari dari data-data yang terkumpul dalam bentuk pernyataan kalimat yang tepat dan memiliki data yang jelas. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentatif yang masih perlu diperbaiki. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir yang lebih bermakna dan lebih jelas.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dan penarikan simpulan merupakan rangkaian kegiatan analisis data yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Rangkaian kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sebelum, selama, dan sesudah pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dilaksanakan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Studi Awal

Pada sub bab ini peneliti memaparkan hasil studi awal tentang partisipasi masyarakat (orang tua siswa, alumni, guru, tata usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, dan unsur komite sekolah) dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat dalam studi awal ini dijabarkan menjadi lima anak sub, yaitu : (1) pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (2) anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (3) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (4) faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Studi awal dalam penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015.

1. Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apa yang diketahui dan dipahami oleh komponen masyarakat terhadap keterlibatan dan keikutsertaannya di sekolah dalam kegiatan

pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Jadi peneliti akan memaparkan potret awal terhadap apa yang diketahui dan dipahami masyarakat (unsur komite sekolah, orang tua siswa, alumni, guru, tata usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepala dusun) kaitannya dengan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, khususnya di sekolah lokasi penelitian yakni di MA Hidayatul Muhsinin Labulia selama studi awal dilakukan.

Dari hasil pengamatan dan studi dokumentasi, dapat dikemukakan bahwa masyarakat yang terdiri dari komite sekolah, orang tua siswa, alumni, guru, tata usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun, sebagian besar bertempat tinggal di Desa Labulia yang terdiri dari Dusun Labulia, Dusun Tandek, Dusun Tomber, Dusun Dasan Tuan, Dusun Dasan Sebeleq, dan Dusun Sulin yang termasuk wilayah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Jadi basis siswa Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin adalah berada di Desa Labulia itu sendiri. Selebihnya berasal dari Desa Batu Tulis, Desa Kuripan Utara, dan desa lainnya yang jarak tempuhnya menuju sekolah MA Hidayatul muhsinin tidak begitu jauh.

a. Pemahaman Orang Tua Siswa

Hasil studi awal menunjukkan bahwa orang tua siswa belum banyak terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Mereka pada umumnya datang ke sekolah hanya untuk menghadiri rapat jika ada undangan rapat dari pihak sekolah, datang untuk menghadiri acara

kelulusan dan wisuda kelas XII bagi wali murid kelas XII dan ikut terlibat dalam kegiatan pembagian rapor siswa-siswi. Para orang tua siswa ini juga merasa enggan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu dan mendukung kegiatan sekolah guna memajukan sekolah kecuali membayar iuran komite, biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, dan sumbangan lainnya.

Orang tua siswa juga masih banyak yang belum memahami tentang partisipasi masyarakat dan bagaimana cara berpartisipasi dalam pendidikan karena masih kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan hal tersebut. Sehingga pemahaman masyarakat tentang partisipasi maupun keterlibatan dan keikutsertaan mereka di sekolah hanya sebatas terlibat dalam kegiatan rapat dan pembayaran iuran komite sekolah, biaya semester, biaya ujian dan sumbangan pembangunan saja. Sedangkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, masyarakat terutama orang tua juga belum memahami hal tersebut karena partisipasi masyarakat dalam pendidikan secara umum saja belum dapat mereka pahami seutuhnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan yang dituturkan oleh Bapak Tamaf, selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1 :

Kami memang tidak pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sehingga kami masih belum memahami sepenuhnya tentang apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Tetapi jika kami ditanya terkait dengan keterlibatan di sekolah, kami sebagai orang tua sering terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah

seperti menghadiri rapat wali murid terkait dengan besarnya sumbangan pembangunan, dan rapat pembayaran semester. Terkait partisipasi dalam proses pengambilan keputusan kami memang sering diundang pihak sekolah untuk terlibat dalam menentukan besarnya sumbangan pembangunan, dan biaya semester, tetapi partisipasi dalam perencanaan pendidikan kami tidak pernah terlibat sama sekali dan kami tidak tau apa itu partisipasi dalam perencanaan pendidikan.

Ungkapan Bapak Tamaf di atas menyatakan bahwa orang tua siswa belum memahami partisipasi dalam pendidikan terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dilihat dari bahasa pengungkapan Bapak Tamaf belum pernah mendapatkan pembelajaran maupun sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sehingga dia tidak tahu apa dan bagaimana cara untuk berpartisipasi dan membantu sekolah selain dengan ikut menghadiri rapat jika diundang pihak sekolah dan membantu keuangan sekolah dalam hal sumbangan pembangunan, iuran semester dan biaya ujian sampai kelulusan dan wisuda anaknya.

Pendapat Bapak Tamaf di atas dibenarkan dan disetujui oleh beberapa orang tua siswa lainnya yang menyatakan ketidakpahaman tentang partisipasi dalam pendidikan, yang diantaranya adalah Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII.IPA, Ibu Fatma selaku orang tua Lia kelas XII.IPA, dan Bapak Har orang tua dari Diko kelas X.A. Selain itu, Bapak Siba orang tua dari Aris kelas XII.IPS dan Ibu Munah orang tua dari Dayah kelas XI.IPS 2 juga menunjukkan ketidakpahamannya tentang partisipasi

dalam pendidikan, apalagi terkait dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Ketidaktahuan dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan, disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Labulia khususnya tingkat pendidikan para orang tua siswa dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana berpartisipasi dalam pendidikan di sekolah. Sehingga arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan belum dapat dipahami oleh para orang tua siswa.

Orang tua siswa di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Lombok Tengah memang banyak yang masih awam. Namun masih ada juga sebagian orang tua siswa yang cukup memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan walaupun tidak pernah terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan partisipasi di sekolah, terutama dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Elah orang tua dari Nisa kelas X.C :

Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keikutsertaan orang tua dan masyarakat lainnya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun saya pribadi jarang sekali terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah seperti rapat wali murid, gotong royong dan pembagian raport siswa karena saya tidak ada di rumah dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Selama ini baru beberapa kali saja saya ikut menghadiri rapat dan kegiatan sekolah ketika saya pulang mudik saja. Tapi saya

memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Terkait dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengambil kesimpulan seperti masalah biaya semester, sumbangan pembangunan, dan sumbangan lainnya sehingga masyarakat sering diikutsertakan dalam proses itu. Akan tetapi dalam hal perencanaan pendidikan setahu saya masyarakat tidak pernah diikutsertakan. Dan saya juga tidak paham tentang hal itu.

Penjelasan dari Ibu Elah mengisyaratkan bahwa ia cukup memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, akan tetapi jarang terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah karena kehadirannya sebagai wali murid selalu digantikan oleh saudaranya karena ia selama ini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yang diketahui Ibu Elah hanya sebatas pada kegiatan rapat wali murid dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Sedangkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat sering diikutsertakan terkait dengan pengambilan keputusan dalam menentukan besarnya biaya semester, sumbangan pembangunan dan sumbangan lainnya. Namun partisipasi dalam perencanaan pendidikan, masyarakat tidak pernah diajak sehingga masyarakat belum tahu apa dan bagaimana berpartisipasi dalam merencanakan pendidikan di sekolah.

Orang tua siswa yang juga memahami tentang istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan selain Ibu Elah adalah Ibu Hani yang merupakan orang tua dari Topik kelas XII.IPA. Berikut penuturannya :

Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah ikutserta dalam berbagai kegiatan di sekolah demi kemajuan sekolah. Kegiatan yang sering diikuti adalah seperti kegiatan rapat wali murid, kegiatan gotong royong disekolah, dan kegiatan lainnya. Sedangkan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya pahami adalah proses mengambil keputusan terhadap sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah, dan saya sering terlibat dalam pengambilan keputusan ketika rapat penentuan biaya semester, sumbangan pembangunan dan biaya ujian sekolah siswa-siswi. Namun partisipasi dalam perencanaan pendidikan belum pernah saya dengar dan saya tidak tahu apa itu partisipasi dalam perencanaan pendidikan, karena memang pihak sekolah dan kepala sekolah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan dan juga masyarakat tidak pernah diajak dalam kegiatan perencanaan pendidikan.

Menyikapi penuturan Ibu Hani di atas, dapat dikemukakan bahwa ia cukup memahami tentang partisipasi dalam pendidikan. Sebab dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, apa yang disampaikan oleh Ibu Hani menunjukkan bahwa ia telah memahami arti partisipasi masyarakat dalam pendidikan. selain itu, Ibu Hani juga memahami tentang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, namun keikutsertaannya dalam proses pengambilan keputusan hanya sebatas dalam kegiatan rapat wali murid untuk mengambil keputusan terkait dengan besarnya iuran pembayaran uang semester, biaya ujian, dan sumbangan pembangunan saja. Pengambilan keputusan dalam bidang-bidang lainnya belum pernah diikutsertakan baik dirinya pribadi maupun masyarakat lainnya.

Dalam hal perencanaan pendidikan juga Ibu Hani dan masyarakat lainnya tidak pernah diikutsertakan, baik dalam

perencanaan kurikulum, program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, dan bidang-bidang yang lainnya karena selama ini yang terlibat hanya internal sekolah saja. Selain itu juga, masyarakat sekitar Desa Labulia yang merupakan basis terbesar sumber murid sekolah MA Hidayatul Muhsinin tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pihak sekolah hanya sering melakukan sosialisasi pada awal tahun ajaran baru saja guna mencari sumber murid untuk bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin ini. Meskipun demikian, namun Ibu Hani cukup memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Suatu hal yang membanggakan adalah adanya orang tua siswa yang menyadari dan memahami kewajibannya untuk menyekolahkan anaknya dan mengawasi pendidikan anaknya baik di rumah maupun di sekolah. Kesadaran mereka ini tentunya dilatarbelakangi oleh nilai ajaran agama yang dianutnya. Meskipun orang tua siswa belum memahami tentang partisipasi dalam pendidikan di sekolah, namun mereka telah menyadari kewajibannya untuk menyekolahkan anak dan membiayai segala pembayaran yang ditentukan oleh sekolah. Hal ini merupakan sinyal positif yang dapat dijadikan sebagai salah satu penggerak dalam mengembangkan partisipasi orang tua di sekolah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan selama proses studi awal menunjukkan bahwa masih banyak orang tua siswa yang belum memahami tentang partisipasi dalam pendidikan. Meskipun ada juga masyarakat yang cukup memahami tentang partisipasi dalam pendidikan, namun jumlahnya tidaklah banyak. Untuk itu, sekolah perlu mengadakan pembelajaran kepada orang tua siswa dan masyarakat lainnya sehingga mereka memahami tentang apa dan bagaimana partisipasi yang harus dilakukan masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Pemahaman yang baik tentang pendidikan anak merupakan suatu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat di sekolah demi keberhasilan dan kemajuan sekolah.

Dari pemaparan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang tua siswa yang tidak memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Para orang tua siswa memahami partisipasi dalam pendidikan hanya sebatas pada keikutsertaannya dalam rapat wali murid baik dalam rapat penentuan biaya semester, biaya ujian, dan sumbangan pembangunan saja. Selain itu, keikutsertaan masyarakat juga dalam hal ikut serta dalam kegiatan gotong royong pembangunan lokal baru jika sekolah sedang melakukan pembangunan dan ikut serta

dalam kegiatan pembagian raport siswa dan acara lepas pisah atau wisuda kelas XII. Namun ada juga orang tua siswa yang sudah memahami pentingnya partisipasi dalam pendidikan. Bahkan beberapa diantara mereka itu memiliki kesadaran yang cukup dalam mendidik dan mengawasi pendidikan putera-puterinya.

b. Pemahaman Alumni

Selain orang tua siswa, peneliti juga mendapatkan informasi terkait dengan fokus penelitian dari para alumni. Alumni yang berhasil peneliti wawancarai sejumlah lima orang yang diantaranya adalah saudara Roni, Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd., Hardi, S.Pd., dan Saudari Ani, S.Pd. Para alumni ini merupakan lulusan MA Hidayatul Muhsinin yang mengabdikan dirinya pada yayasan tersebut se usai menyelesaikan perkuliahan mereka. Kecuali Saudara Roni tidak mengabdikan diri karena memiliki profesi lain dan memilih menjadi karyawan pada sebuah perusahaan barang.

Para alumni ini ada yang sudah memahami arti penting partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dan ada juga yang belum memahami hal tersebut meskipun secara tidak langsung mereka telah ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Sebagaiman penuturan dari Roni yang belum memahami apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Berikut penuturannya :

Saya tidak tahu apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan karena saya tidak pernah mendengar istilah

tersebut. Tetapi jika ditanya tentang keterlibatan masyarakat di sekolah, saya bisa menjawab bahwa keterlibatan masyarakat di sekolah itu merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah dan ikut membantu menjaga lingkungan sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan saja saya baru dengar sekarang, apalagi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sama sekali saya tidak pernah mendengar dan tidak saya tahu karena saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan saudara Roni memeberikan gambaran bahwa dia sama sekali tidak tahu dan tidak memahami istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan terlebih partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal ini tentunya dilandasi oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat di sekolah sehingga mereka menjadi tidak paham bagaimana cara berpartisipasi dalam membantu dan mendukung kegiatan sekolah.

Selain Roni, alumni yang juga belum memahami istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah Saudari Ani, S.Pd., padahal ia mengajar dan mengabdikan diri di MA Hidayatul Muhsinin. Akan tetapi hal itu tidak menjadi tolak ukur baginya untuk memahami istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Penuturan saudari Ani menyatakan bahwa dirinya tidak tahu dan belum mengerti tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan menurutnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan hanya sebatas pada keikutsertaan dalam kegiatan rapat,

pembagian raport dan acara wisuda dan lepas pisah kelas XII. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan menurutnya tidak pernah dilakukan karena masyarakat tidak pernah diajak untuk ikutserta dalam kegiatan tersebut.

Ternyata masih banyak alumni yang memang masih bingung dan tidak paham tentang apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara untuk ikut serta dalam membantu memajukan sekolah dan memajukan almamaternya. Pemahaman mereka tentang partisipasi hanya masih sebatas pada keikutsertaan dalam kegiatan rapat yang berkaitan dengan masalah biaya dan keuangan sekolah dan turut serta dalam menghadiri kegiatan pembagian raport dan wisuda dan pelepasan kelas XII saja. Sedangkan partisipasi dalam bidang-bidang lain tidak mereka ketahui, apalagi partisipasi dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sama sekali tidak mereka pahami.

Lain halnya dengan Saudara Masrah, S.Pd.I dan Awan, S.Pd (sekarang menjadi tenaga pengajar pada M.Ts Hidayatul Muhsinin Labulia) memiliki pemahaman yang berbeda dengan kedua temannya di atas. Masrah, S.Pd.I mengemukakan :

Partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam mengembangkan pendidikan di sekolah dan ikut serta dalam berbagai kegiatan di sekolah. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah

dengan menggerakkan para orang tua agar mengarahkan anak-anak mereka untuk bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti partisipasi dalam bentuk ikut serta mengambil sebuah keputusan terkait dengan kebijakan yang ingin ditetapkan oleh sekolah. Dan keterlibatan kami selama ini hanya ikut dalam rapat bersama komite tentang sumbangan pembangunan gedung baru. Akan tetapi kalau partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program-program sekolah. Namun selama ini keterlibatan masyarakat hanya dalam proses pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat belum pernah diikutsertakan, terlebih-lebih kami sebagai alumni tidak pernah dilibatkan karena perencanaan pendidikan hanya dilakukan oleh internal sekolah saja.

Sedangkan penuturan dari Saudara Awan, S.Pd juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Masrah, S.Pd.I. Pendapat kedua alumni ini juga sejalan dengan pendapat dari Saudara Toni, S.Pd yang juga merupakan alumni MA Hidayatul Muhsinin. Mereka sebagai alumni yang pernah mengenyam pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin tentunya sudah pernah merasakan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di MA tersebut. Mereka juga tentunya telah menyaksikan bagaimana keterlibatan masyarakat terkait dengan partisipasinya dalam pendidikan, khususnya keterlibatan orang tua mereka sebagai wali murid yang bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka selama bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin tersebut.

Hasil wawancara yang peneliti peroleh dari Saudara Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd dan Hardi, S.Pd menunjukkan bahwa mereka telah memahami arti penting partisipasi masyarakat dalam

pendidikan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Akan tetapi, keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut masih minim sekali. Keterlibatan mereka selama ini hanya dalam bidang pengambilan keputusan berupa rapat pengambilan keputusan bersama dewan komite sekolah untuk menentukan besarnya jumlah sumbangan pembangunan gedung baru yang dibebankan kepada wali murid. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat maupun alumni tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Meskipun demikian, suatu hal yang membanggakan juga dapat terlihat dari adanya beberapa alumni yang menjadi tenaga pengajar sebagai bentuk berpartisipasi di sekolah yang pernah mereka jadikan sebagai tempat untuk mengenyam pendidikan yakni di MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Sehingga mereka telah memberikan sumbangsi dan partisipasi secara langsung dan nyata sebagai bentuk balas jasa kepada sekolah yang telah memberikan pendidikan padanya. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang menarik dan menyorot perhatian dari masyarakat khususnya orang tua siswa agar mau menyekolahkan anak-anak mereka pada madrasah tersebut karena beberapa alumni yang pernah bersekolah pada madrasah ini juga telah menjadi orang yang sukses dan berpartisipasi dengan menjadi tenaga pengajar pada madrasah tersebut.

Dari data atau informasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa alumni yang diwawancarai terlihat masih adanya banyak alumni yang belum memahami sepenuhnya tentang apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Meskipun juga terdapat beberapa alumni yang sudah memahami dengan baik arti penting partisipasi masyarakat dalam pendidikan terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

c. Pemahaman Tokoh Masyarakat

Informan yang dituju oleh peneliti selanjutnya setelah mendapatkan data atau informasi dari orang tua siswa dan alumni adalah tokoh masyarakat. Peneliti merasa perlu untuk mendapatkan informasi dari tokoh masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, karena memang tokoh masyarakat sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Pandangan tokoh masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sudah cukup baik namun variatif.

Tokoh masyarakat yang peneliti kunjungi guna mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dari Bapak Neng yang merupakan tokoh masyarakat Desa Labulia. Hasil wawancara dengan beliau menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah bagaimana mereka (masyarakat) mau menyekolahkan anaknya pada MA Hidayatul Muhsinin. Selain itu juga masyarakat mau memberikan sumbangsi kepada sekolah baik berupa

pemikiran, moril, materil dan tenaga. Partisipasi juga merupakan dukungan masyarakat untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada dasarnya masyarakat sering diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di bidang agama, adat istiadat, dan pembangunan karena memang hal itu harus diputuskan bersama-sama dengan masyarakat. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan masyarakat masih belum banyak yang tau bagaimana seharusnya ikut serta dalam perencanaan pendidikan karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Penjelasan Bapak Neng sebagai tokoh masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sedikit berbeda dengan beberapa anggota masyarakat sebelumnya di atas. Menurut Bapak Neng partisipasi masyarakat bukan hanya ikut membantu berbagai kegiatan di sekolah saja, tetapi bagaimana memberikan masukan kepada masyarakat agar mau menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Selain itu juga, masyarakat juga harus dilibatkan dalam bidang agama dan adat istiadat sebagai bentuk bahwa sekolah madrasah benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat sehingga sekolah mampu menjalankan berbagai programnya dengan baik dan terkontrol dengan memegang teguh nilai agama dan budaya tersebut.

Bapak Neng juga menyadari bahwa pengambilan keputusan memang penting untuk dilakukan dan keikutsertaan masyarakat juga mutlak diperlukan, terutama pengambilan keputusan dalam bidang agama dan adat istiadat karena sekolah berada ditengah-tengah

lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk aturan yang ada di lingkungan sekolah harus memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di sekitar lingkungan masyarakat.

Menambah penjelasan Bapak Neng di atas, Ust. Waiz juga selaku tokoh masyarakat dan wakil kepala sekolah urusan hubungan dengan masyarakat MA Hidayatul Muhsinin menyatakan penjelasannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut saya adalah bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Bagaimana masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap sekolah, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar anak di sekolah maupun di rumah ataupun dalam hal pengadaan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Namun, jika masalah partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan memang sering melibatkan masyarakat terutama dalam hal membahas soal pembangunan gedung baru dan membuat tata tertib sekolah. Misalnya dalam hal pembangunan, masyarakat harus tahu berapa jumlah dana yang harus disediakan sekolah untuk membangun gedung kelas baru sehingga masyarakat bisa memutuskan besarnya sumbangan yang harus dikeluarkan guna membantu kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu dalam membuat tata tertib sekolah juga masyarakat harus dilibatkan karena aturan ini berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh penentuan awig-awig sekolah. Jika ada siswa yang menikah di usia sekolah maka bagaimana bentuk sanksi dan hukuman yang harus diberikan harus diputuskan bersama masyarakat dan tidak boleh ditentukan sendiri oleh pihak sekolah. Sedangkan terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, saya rasa masyarakat masih belum sering dilibatkan.

Hasil wawancara dengan Ust. Waiz selaku tokoh masyarakat Desa Labulia dan Waka Humas MA Hidayatul Muhsinin

menambahkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Karena penjelasan yang diberikan oleh Ust. Wais tidak hanya menyatakan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam pendidikan saja, tetapi bagaimana tingkat kepedulian masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap sekolah tidak hanya dalam proses kegiatan belajar saja, akan tetapi dalam hal pengadaan sarana prasarana penunjang sekolah dan lain-lain.

Masyarakat juga sering dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan. Berbeda halnya dengan masyarakat lainnya yang menyatakan bahwa keterlibatannya dalam pengambilan keputusan hanya sebatas dalam hal penentuan biaya semester, biaya ujian dan sumbangan pembangunan saja. Menurut Ust. Waiz keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan awig-awig (tata tertib) bagi sekolah. Seperti halnya membuat keputusan sanksi dan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan sekolah dan menikah di usia sekolah harus ditentukan oleh masyarakat. Karena sekolah berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat, sehingga harus memperhatikan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam membuat awig-awig tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tokoh masyarakat terhadap partisipasi dalam pendidikan sudah cukup bagus, karena mereka telah memahami arti penting

partisipasi dalam pendidikan tersebut. Namun yang masih menjadi persoalan adalah bahwa partisipasi dalam hal perencanaan pendidikan masih belum pernah dilakukan oleh sekolah karena belum adanya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut sehingga pemahaman masyarakat masih sangat minim. Sedangkan selama ini keterlibatan masyarakat hanya dalam bidang pengambilan keputusan saja sehingga mereka sudah sedikit memahami tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengambilan keputusan tersebut hanya berkaitan dengan masalah keuangan, pembangunan dan penetapan awig-awig atau tata tertib sekolah saja. Namun paling tidak masyarakat sudah mampu sedikit memahami apa itu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.

d. Pemahaman Tokoh Agama

Pencarian informasi juga peneliti lakukan dengan menggali informasi atau data kepada tokoh agama guna mengetahui pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pemahaman tokoh masyarakat tentang partisipasinya dalam dunia pendidikan yang terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan tokoh masyarakat, meskipun bervariasi. Sebagaimana penuturan dari Bapak H. Kemal selaku salah satu tokoh agama yang ada di Desa Labulia adalah sebagai berikut :

Saya memang pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pendidikan di sekolah, tetapi saya masih belum memahami arti partisipasi masyarakat tersebut. Dan keterlibatan saya di sekolah hanya dalam kegiatan rapat mengenai masalah biaya semester, sumbangan pembangunan dan masalah biaya ujian dan lepas pisah serta wisuda kelas XII. Selain itu juga saya sering datang untuk silaturahmi di sekolah dan hadir ketika gotong royong pembangunan di sekolah. Namun jika masalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, saya sering terlibat dalam rapat untuk memutuskan besarnya biaya semester karena masalah SPP tidak ada kami dipungut bayaran lagi. Selain itu terlibat juga dalam memutuskan besarnya biaya ujian kelas XII dan besarnya jumlah sumbangan pembangunan ataupun sumbangan lainnya di sekolah. Sedangkan keterlibatan dalam perencanaan pendidikan, saya tidak tahu dan tidak pernah terlibat.

Pemahaman H. Kemal tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih sangat minim, karena dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperlihatkan bahwa H. Kemal belum memahami sepenuhnya istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, apalagi mendapatkan pembelajaran tentang partisipasi masyarakat karena yang dia pahami hanya keterlibatannya di sekolah sebagai wali murid dan tokoh agama yang ada di Desa Labulia hanya dalam mengikuti kegiatan rapat, silaturahmi ke sekolah dan kegiatan gotong royong jika ada kegiatan pembangunan di sekolah.

Minimnya pemahaman H. Kemal tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan membuatnya juga tidak memahami sepenuhnya arti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Akan tetapi ketika ditanya keterlibatannya dalam turut serta memutuskan berbagai kebijakan sekolah, H. Kemal

mampu memahami dan menjawab keterlibatannya dalam pengambilan keputusan sering dilakukan pada saat ia terlibat dalam rapat memutuskan besarnya biaya semester, sumbangan pembangunan dan biaya ujian anak kelas XII. Namun ketika ditanyakan keterlibatannya dalam kegiatan perencanaan pendidikan, H. Kemal sama sekali tidak paham apa itu partisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan dan belum pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berbeda halnya dengan penuturan Ust. Al-Hakimi, S.Pd yang juga merupakan tokoh agama yang ada di Desa Labulia sekaligus sebagai Wakil kepala sekolah bidang Kurikulum di MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Pemahaman Ust. Al-Hakimi, S.Pd tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sudah sangat baik sebagaimana penuturannya berikut :

Yang saya ketahui tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu adalah bagaimana masyarakat mau terlibat di sekolah dengan menyarankan anaknya untuk bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Selain itu juga masyarakat mau memberikan sumbangsi kepada sekolah baik berupa pemikiran, moril, materil dan tenaga. Partisipasi juga merupakan dukungan masyarakat untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada dasarnya masyarakat sering diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembiayaan dan keuangan di sekolah, masalah sumbangan dan kegiatan pembangunan, rapat wali murid terkait masalah biaya semester dan ujian, dan pembuatan tata tertib atau awig-awig di sekolah karena memang hal itu harus diputuskan bersama-sama dengan masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada siswa yang

menikah di usia sekolah maka sanksi dan hukuman tidak bisa langsung diberikan oleh sekolah tanpa ada persetujuan dari masyarakat karena sekolah adalah milik masyarakat dan berada di lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan masyarakat masih belum banyak yang tau bagaimana seharusnya ikut serta dalam perencanaan pendidikan karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Hasil wawancara dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd memperlihatkan pemahamannya yang cukup bagus terhadap partisipasi masyarakat. Penuturan yang telah disampaikan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat sering terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Dalam hal pengambilan keputusan masyarakat selalu diikutsertakan karena memang keberhasilan sekolah kedepannya tergantung pada keputusan masyarakat karena masyarakat merupakan faktor penting yang mendukung kemajuan sekolah. Selain itu, sekolah berada di lingkungan masyarakat, sehingga berbagai kegiatan dan kebijakan yang akan ditetapkan sekolah memang harus mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Ust. Al-Hakimi juga tidak menyangkal bahwa masyarakat memang hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, namun dalam hal perencanaan pendidikan memang masyarakat belum pernah dilibatkan atau diikutsertakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masih ada tokoh agama yang belum memahami partisipasi dalam pendidikan terlebih dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal ini disebabkan karena tidak pernah dilakukannya

sosialisasi terkait dengan masalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sehingga mereka belum bisa memahami sepenuhnya meskipun mereka sering hadir dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah.

Meskipun demikian, ada juga tokoh agama yang telah memahami dengan baik sepenuhnya arti penting partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam hal perencanaan pendidikan. Hal ini didukung oleh tingkat pendidikan yang disandang oleh tokoh agama tersebut. Selain itu, profesi yang digelutinya juga berada di dalam dunia pendidikan, sehingga memberikan efek pemahaman yang luar biasa terhadap masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Akan tetapi, partisipasi yang telah banyak melibatkan masyarakat sesuai dengan fokus penelitian ini adalah partisipasi dalam proses pengambilan keputusan saja. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan sama sekali belum pernah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

e. Pemahaman Kepala Dusun (Perangkat Desa).

Untuk memperoleh informasi atau data terkait dengan fokus penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, peneliti melanjutkan pencarian informasi dengan melanjutkan studi wawancara pada para wakil kepala desa di setiap dusun yang ada di Desa Labulia. Para

wakil kepala desa ini diantaranya adalah Kepala Dusun Tandek, Kepala Dusun Tomber, Kepala Dusun Sulin, Kepala Dusun Labulia, dan Kepala Dusun Olor Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala Dusun, menyatakan bahwa ada beberapa kepala dusun yang belum memahami istilah partisipasi dalam pendidikan. bahkan belum pernah mendengar istilah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Dusun yakni Bapak Yar selaku Kepala Dusun Tandek adalah sebagai berikut :

Saya memang pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tetapi saya tidak memahami sepenuhnya apa itu partisipasi masyarakat. Yang saya tahu partisipasi itu adalah keterlibatan kita di sekolah untuk membantu segala urusan sekolah. Bentuk keterlibatan saya di sekolah selama ini hanya ikut dalam rapat ketika saya diundang oleh sekolah. Rapat yang sering saya ikuti adalah rapat wali murid dan rapat penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah. Partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan, saya tidak pernah terlibat kecuali penetapan denda bagi siswa yang menikah itu saja. Untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan soal pembangunan gedung baru pun saya tidak pernah terlibat. Itu merupakan urusan komite sekolah dan saya tidak menjadi anggota komite, sehingga tidak pernah terlibat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan saya juga tidak pernah terlibat, dan saya juga baru mendengar istilah itu.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Yar selaku Kadus Tandek menyatakan dirinya yang masih belum memahami sepenuhnya masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang ia tahu keterlibatannya di sekolah hanya dalam kegiatan rapat wali murid dan rapat penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia

sekolah. Hanya keterlibatan itu saja yang menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang ia ketahui dan ia pahami untuk menjelaskan arti partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan pun belum banyak ia pahami, apalagi partisipasi dalam perencanaan pendidikan belum ia pahami sama sekali karena tidak pernah terlibat dalam hal tersebut.

Pendapat Bapak Yar juga sejalan dengan pendapat Bapak Lalu Budin selaku Kadus Tomber dan Bapak Sman selaku Kadus Sulin. Dalam hasil wawancaranya Bapak Lalu Budin menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana pemahamannya terhadap partisipasi masyarakat tersebut. Jangankan pemahaman partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, partisipasi masyarakat secara umum pun ia belum pernah mendengar istilah semacam itu. Sehingga merupakan hal yang wajar apabila Bapak Lalu Budin masih sangat minim pemahamannya ketika ditanyakan bagaimana pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Sedangkan Penuturan Bapak Sman menyatakan ketidakpahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, karena ia tidak pernah mendengar istilah tersebut. Selain itu, ia juga sama sekali tidak pernah diundang untuk berpartisipasi di

sekolah untuk mengikuti kegiatan rapat, kegiatan pembangunan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Padahal Dusun Sulin ini adalah Dusun yang merupakan lokasi tempat tinggal kepala sekolah MA Hidayatul Muhsinin, sehingga menjadi suatu hal yang mengherankan jika Bapak Sman selaku Kadus Sulin tidak pernah diajak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah.

Hal yang lebih mengherankan lagi dari penuturan Bapak Sman adalah banyaknya anak-anak Dusun Sulin yang bersekolah ke Desa Kuripan dari pada ke sekolah MA Hidayatul Muhsinin yang berada di Desa Mereka sendiri. Jumlah anak yang bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin hanya beberapa orang saja, sedangkan jumlah anak yang bersekolah ke Desa Kuripan cukup banyak. Padahal lokasi tempat tinggal kepala sekolah terletak di Dusun Sulin yang merupakan wilayah Desa Labulia juga. Akan tetapi ternyata tidak menjadi sebuah patokan yang membuat anak-anak Dusun Sulin untuk bersekolah ke MA Hidayatul Muhsinin meskipun tempat tinggal kepala sekolah berada di Dusun tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memotivasi dan mengarahkan orang tua siswa dan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MA Hidayatul Muhsinin, sebagai bentuk partisipasi mereka sebagai warga Desa Labulia yang memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sekolah yang ada di desa

mereka sendiri. Seharusnya keberadaan kepala sekolah di sana memberikan kemudahan bagi sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi di sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata tidak demikian. Oleh karenanya dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan yang baik dari kepala sekolah dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik agar masyarakat memahami pentingnya partisipasi mereka dalam dunia pendidikan dan demi meningkatkan partisipasi mereka di sekolah tersebut.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kadus Olor Agung yang lokasi wilayahnya paling dekat dengan MA Hidayatul Muhsini. Adapun penuturan Bapak Zuki selaku Kadus Olor Agung yang sejalan juga dengan pendapat Kadus Labulia atas nama Bapak Idi adalah sebagai berikut :

Keterlibatan saya di sekolah sebagai bentuk partisipasi di sekolah banyak dan sering sekali. Tidak hanya dalam undangan rapat wali murid saja, tetapi juga dalam acara pembagian raport, rapat sumbangan pembangunan, rapat biaya semester dan ujian ketika anak saya sekolah di sana, dan ketika ada acara lepas pisah dan wisuda kelas XII di sekolah, bahkan setiap tahun selalu diundang. Keterlibatan lain juga pada saat ada kegiatan gotong royong untuk pembangunan gedung baru di sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan saya juga sering berpartisipasi karena sering diundang untuk hadir. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam hal menentukan besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan orang tua dan masyarakat seperti biaya semester, ujian dan sumbangan pembangunan. Terkait dengan masalah perencanaan pendidikan, saya sering terlibat dalam perencanaan program sekolah dan perencanaan pembangunan, tetapi jika perencanaan pembelajaran, kurikulum, dan lainnya tidak pernah terlibat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zuki memberikan kebanggaan kepada peneliti karena hasil wawancara memberikan informasi atau data yang lebih lengkap dari pada Kadus Labulia dan kadus-kadus lainnya. Informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Zuki memperlihatkan pemahamannya yang baik terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam proses pengambilan keputusan, Bapak Zuki selalu dilibatkan dan diikutsertakan oleh pihak sekolah. Sedangkan dalam hal perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, dan lainnya memang Bapak Zuki tidak pernah terlibat, akan tetapi dalam hal perencanaan program sekolah dan perencanaan pembangunan gedung baru ia selalu dilibatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa atau para Kadus yang ada di desa Labulia menunjukkan bahwa dari lima Kadus tersebut hanya Kadus Olor Agung yang memiliki keterlibatan dan pemahaman yang baik terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sedangkan Kadus-kadus yang lain masih minim dalam memahami arti partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan bahkan lebih banyak yang masih belum memahami dan mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Ketidakhahaman para Kadus terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini menuntut adanya sosialisasi dan pembelajaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, karena bagaimana pun para Kadus ini merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di setiap dusun tersebut. Oleh karenanya, para Kadus ini harus memahami masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, guna membantu pihak sekolah menyampaikan kepada masyarakat apa dan bagaimana seharusnya keterlibatan mereka di sekolah sebagai bentuk partisipasinya. Selain itu, jika para Kadus memiliki pemahaman yang baik tentang partisipasi masyarakat di sekolah, akan memberikan kemudahan kepada mereka untuk menyampaikan informasi dari sekolah kepada masyarakat dan mampu menjelaskan kepada masyarakat yang ingin bertanya seputar masalah pendidikan di sekolah yang terkait dengan partisipasi masyarakat di sekolah. terutama dalam hal proses dan hasil pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

f. Pemahaman Dewan Guru

Guru merupakan salah satu komponen yang berada dalam lingkungan internal sekolah. Sedikit tidak para guru yang ada di sekolah mengetahui bagaimana situasi dan kondisi sekolah dalam menjalani tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti juga mencari data atau informasi terkait dengan

partisipasi masyarakat di sekolah selama ini, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dari para guru dengan menjadikannya sebagai informan dalam penelitian ini.

Wawancara pertama dengan dewan guru peneliti lakukan dengan Bapak Lalu Artha selaku guru seni budaya sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Penjelasan Bapak Lalu Artha tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah :

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya di madrasah kita ini merupakan keaktifan dan peran serta masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Turut serta orang tua siswa di sekolah dan dirumah untuk mengawasi dan membantu pembelajaran anak juga merupakan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur seperti gotong royong dan pembangunan juga merupakan partisipasi masyarakat. Masyarakat juga mempunyai wadah berupa komite sebagai wakil masyarakat untuk mewakili partisipasi mereka di sekolah. Saya memang domisili saya bukan di Desa Labulia, tapi saya asli orang Batu Tulis. Akan tetapi saya juga tahu sebagaimana partisipasi masyarakat di sekolah kita karena saya memang menjadi staf mengajar di sini sehingga saya telah berpartisipasi juga di sekolah ini. Dalam kegiatan pengambilan keputusan juga masyarakat sering dilibatkan seperti kegiatan pembagian raport, kegiatan pemondokan siswa sebelum ujian, masalah kegiatan pembangunan, dan kegiatan lepas pisah atau wisuda kelas XII masyarakat sering dilibatkan dalam penentuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat juga sering dilibatkan tapi melalui wadahnya tadi yaitu melalui komite sekolah sebagai wakil masyarakat di sekolah.

Penjelasan dari Bapak Lalu Artha memberikan gambaran yang memperlihatkan bahwa ia telah memahami dengan baik masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan baik dalam proses

pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan. Terkait dengan masalah pengambilan keputusan, masyarakat selalu dilibatkan seperti dalam kegiatan pembagian raport, kegiatan pemondokan siswa sebelum ujian, masalah kegiatan pembangunan, dan kegiatan lepas pisah atau wisuda kelas XII masyarakat sering dilibatkan dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaannya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, Bapak Lalu Budiarta juga mengatakan bahwa masyarakat sering dilibatkan, namun melalui wadah partisipasi yaitu komite sekolah sebagai wakil dari orang tua siswa dan masyarakat di sekolah.

Lain halnya dengan penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut beberapa dewan guru lainnya yang memiliki kesamaan pendapat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Icha, S.Pd sebagai seorang guru biologi. Dia menjelaskan pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebagai berikut :

Setahu saya partisipasi masyarakat di sekolah itu adalah ikut mendukung dan mensosialisasikan sekolah kita yaitu Hidayatul Muhsinin ini ke masyarakat Labulia. Karena yang kita serap tentunya masyarakat Labulia, sehingga kalau siswa-siswi sekitar Labulia ini bisa kita serap maka jumlah murid kita akan banyak dan mempermudah kita untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan setahu saya sering dilibatkan terutama masalah keuangan dan masalah semua yang berkaitan dengan wali murid maka akan mengajak masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga ketika ada kegiatan pemondokan

sebelum ujian, masyarakat ikut untuk penentuan atau pengambilan keputusan sebelum pelaksanaan kegiatan pemondokan tersebut. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan untuk membahas program sekolah, kurikulum, dan lainnya saya rasa masyarakat tidak pernah dilibatkan karena memang guru saja jarang diundang kecuali dalam rapat pembagian tugas dan rapat kurikulum baru atau K13 kemaren yang membutuhkan pembahasan bersama dengan dewan guru.

Hasil wawancara dengan Ibu Icha, S.Pd juga sejalan dengan penuturan yang disampaikan oleh guru-guru lainnya seperti Bapak H. Denan, S.Pd.I selaku guru bahasa arab, Ibu Hamah, S.Pd selaku guru sosiologi, dan Ibu Herma, S.Pd.I selaku guru Sejarah. Mereka memiliki kesamaan pendapat dengan Ibu Icha, S.Pd. Hasil wawancaranya menggambarkan tentang pemahamannya yang cukup baik terhadap masalah partisipasi masyarakat di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan dewan guru, maka dapat disimpulkan bahwa para guru yang ada di MA Hidayatul Muhsinin telah memiliki pemahaman yang cukup bagus terkait masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dalam hal pengambilan keputusan, dewan guru menyatakan bahwa masyarakat selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang harus diputuskan bersama. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat memang secara langsung belum pernah diikutsertakan, namun melalui wadah partisipasi masyarakat yang terbentuk melalui dewan komite sebagai wakil orang tua siswa dan masyarakat di sekolah.

g. Pemahaman Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan *partner* kerja sekolah yang selalu membantu sekolah terkait dengan masalah keuangan dan iuran komite di sekolah. Dari hasil wawancara dengan komite sekolah, ditemukan pemahaman komite sekolah tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Walaupun tidak begitu lengkap, tapi pemahaman komite sekolah nampaknya lebih terarah dengan fokus penelitian ini. Informasi atau data yang lebih jelas tentang pemahaman komite sekolah terhadap masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, peneliti peroleh dengan mewawancarai ketua komite sekolah yakni Bapak Awir, S.Pd. Penjelasannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut :

Partisipasi masyarakat di sekolah dapat mengandung arti yang luas. Bisa berupa partisipasi dalam bentuk materi dan non materi. Partisipasi dalam bentuk materi adalah seperti pembayaran iuran komite sekolah berupa biaya semester sebesar Rp. 20.000 per semester, biaya ujian sampai dengan penebusan ijazah siswa sebesar Rp. 400.000 dan sumbangan pembangunan jika sekolah akan melakukan pembangunan. Sedangkan partisipasi dalam bentuk non materi bisa berupa kehadiran masyarakat dalam rapat, kegiatan-kegiatan sekolah dan juga bisa berupa sumbangsi dalam bentuk kritikan, saran dan masukan yang membangun bagi sekolah. Jika ditanya seputar partisipasi dalam pengambilan keputusan, tentunya masyarakat selalu dilibatkan terutama dalam membahas masalah keuangan dan komite maka kami selaku komite selalu mengajak masyarakat untuk membahasnya dalam rapat guna menemukan sebuah keputusan yang baik. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, saya kurang tahu keterlibatan masyarakat itu

karena sepertinya keterlibatan masyarakat dalam prosesnya belum nampak.

Penjelasan Bapak Awir, S.Pd menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan begitu banyak. Bukan hanya terkait dengan materi yang meliputi masalah keuangan dan sumbangan kepada komite, tetapi juga berupa non materi yang dapat dikategorikan dalam bentuk tenaga dan pikiran. Komite memang merupakan wakil-wakil dari orang tua siswa dan masyarakat, sehingga peranan komite di sekolah sangat penting guna membantu sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terutama terkait dengan masalah keuangan, peran komite sangatlah penting, karena dengan komite sekolah dan masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi terkait dengan masalah keuangan yang diperlukan oleh sekolah. Hanya komite yang bisa menjadi penyambung lidah antara orang tua siswa dan masyarakat dengan pihak sekolah.

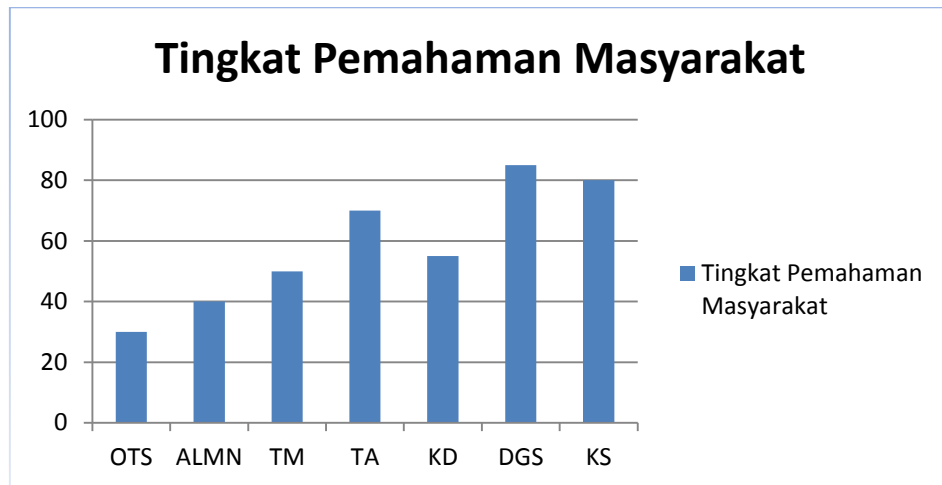
Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa pemahaman komite sekolah tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan cukup bervariasi, tetapi masih dalam lingkup peran dan fungsi komite. Komite sekolah lebih menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan kerjasama antara sekolah dengan komite terutama masalah iuran komite dan sumbangan pembangunan. Karena komite memang merupakan wakil-wakil orang tua siswa dan masyarakat yang menjadi jembatan

penghubung dalam berkomunikasi diantara sekolah dan masyarakat, dan juga sebagai akses jalur informasi dari sekolah kepada masyarakat.

Meskipun demikian, komite sekolah juga memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan bukan hanya terkait dengan masalah keuangan semata yang tergolong sebagai kategori materi, tetapi mereka juga memahami bahwa partisipasi masyarakat yang lain juga bisa berupa non materi seperti sumbangan tenaga dan pikiran. Sedangkan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, komite sekolah menuturkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan terutama jika berkaitan dengan masalah keuangan dan pembiayaan serta masalah pembangunan maupun pengadaan gedung kelas baru. Namun dalam masalah perencanaan pendidikan di sekolah, masyarakat tidak pernah dilibatkan karena bagi mereka itu merupakan urusan internal sekolah saja. Tetapi jika dalam perencanaan pembangunan masyarakat sering diajak terutama para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Desa Labulia.

Dari hasil wawancara tahap studi awal dengan semua informan dalam penelitian ini terkait pemahaman mereka terhadap partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, maka persentase pemahaman tersebut dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Gambar 4.1
Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam
Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Awal)



Keterangan:

OTS : Orang Tua Siswa
 ALMN : Alumni
 TM : Tokoh Masyarakat
 TA : Tokoh Agama
 KD : Kepala Dusun
 DGS : Dewan Guru dan Staf
 KS : Komite Sekolah

Dari grafik di atas, terlihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan masih rendah. Dimana pemahaman orang tua siswa hanya 40 %, alumni 40 %, tokoh masyarakat 50 %, tokoh agama 70 %, kepala dusun 55 %, dewan guru dan staf 85 %, dan komite sekolah 80 %. Sehingga perlu dilakukannya pengembangan partisipasi masyarakat agar tingkat pemahaman masyarakat jauh lebih baik demi kelancaran partisipasinya di sekolah.

2. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Untuk mengetahui siapa saja pihak yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dapat dilihat dari berbagai kehadiran komponen masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama ini dan hasil wawancara yang diperoleh, diketahui bahwa komponen masyarakat yang terlihat berpartisipasi selama ini adalah orang tua siswa, para alumni, para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dewan guru, komite sekolah, dan anggota masyarakat lainnya.

Keterlibatan komponen masyarakat yang telah disebutkan di atas sesuai dengan hasil wawancara terhadap salah satu orang tua siswa atas nama Ibu Hani selaku orang tua dari M. Topik yang juga disetujui dan dibenarkan oleh beberapa orang tua siswa lainnya. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut.

Selama saya mengikuti berbagai kegiatan di sekolah terutama dalam kegiatan rapat masalah biaya semester, biaya ujian anak saya, dan besarnya sumbangan pembangunan, yang saya sering lihat hadir dan terlibat selain orang tua siswa adalah komite sekolah jika berkaitan dengan masalah keuangan, para tokoh masyarakat dan kepala dusun serta tokoh agama juga jika berkaitan dengan masalah sumbangan pembangunan. Karena dalam proses pengambilan keputusan soal pembangunan tidak bisa hanya diputuskan oleh orang tua siswa saja, tetapi para tokoh-tokoh dalam masyarakat juga harus terlibat.

Informasi atau data yang peneliti peroleh dari Ibu Hani sama halnya dengan informasi yang diperoleh dari beberapa orang tua siswa

lainnya. Komponen masyarakat yang sering terlibat dalam partisipasinya di sekolah adalah orang tua siswa, guru, dewan komite, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pernyataan ini dibenarkan oleh orang tua siswa lainnya yang diantaranya adalah Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI.IPA, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII.IPA, Bapak Siba selaku orang tua dari Aris kelas XII.IPS, Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 2, dan Bapak H. Kemal selaku tokoh agama serta orang tua dari Amir kelas XI.IPA dan Titin kelas X.A.

Setelah merasa cukup dalam memperoleh informasi atau data tentang pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah dari orang tua siswa, maka peneliti mencoba untuk mencari informasi atau data dari para responden lainnya. Responden berikutnya yang peneliti kunjungi adalah para alumni yang sekaligus menjadi dewan guru pada yayasan tersebut. Berikut penuturan Bapak Masrah, S.Pd.I dan Awan, S.Pd sebagai alumni yang pernah bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin dan kini menjadi tenaga pengajar pada M.Ts Hidayatul Muhsinin Labulia menyatakan :

Setahu kami selama kami bersekolah di sini sampai dengan sekarang setelah kami menjadi guru di sini, masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah terlebih dalam kegiatan pengambilan keputusan itu adalah para wali siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun dan kepala desa meskipun jarang sempat untuk hadir serta dewan guru beserta staf, komite sekolah dan pihak yayasan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka semua ini mungkin tidak dilibatkan karena itu hanya berkaitan dengan internal sekolah.

Menurut Bapak Masrah, S.Pd.I dan Awan, S.Pd bahwa masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan selain dari para wali siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun dan kepala desa, penjelasan dari alumni ini juga menyebutkan adanya keterlibatan dari pihak yayasan dalam kegiatan pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka semua ini mungkin tidak dilibatkan karena itu hanya berkaitan dengan internal sekolah. Pendapat kedua alumni yang kini menjadi tenaga pengajar di M.TS Hidayatul Muhsinin Labulia ini dibenarkan oleh para alumni lainnya diantaranya adalah Saudara Roni, Saudara Toni, S.Pd, dan Saudari Ani, S.Pd. Selain itu pendapat kedua alumni di atas juga dibenarkan dan disetujui oleh para guru MA Hidayatul Muhsinin Labulia yang diantaranya adalah Bapak Lalu Arta, S.Pd selaku guru seni budaya sekaligus menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, Bapak H. Denan, S.Pd.I selaku guru bahasa arab, Ibu Hamah, S.Pd.I selaku guru sosiologi, Bapak Herman selaku guru TIK sekaligus kepala tata usaha, Ibu Lale Aini selaku guru SKI, Bapak Hardi selaku guru bahasa inggris dan Ibu Icha, S.Pd selaku guru biologi.

Sedikit berbeda dengan informasi yang peneliti peroleh dari ketua komite sekolah yakni Bapak Awir, S.Pd. Informasi yang peneliti peroleh dari ketua komite ini lebih lengkap dan detail jika dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh responden-responden sebelumnya.

Adapun informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Awir, S.Pd adalah sebagai berikut :

Pihak-pihak yang sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama yang berkait dengan masalah keuangan yakni orang tua siswa semuanya baik kelas X, XI, maupun XII guna membahas masalah biaya semester. Jika masalah biaya ujian tentunya hanya orang tua siswa kelas XII saja. Namun, jika berkaitan dengan pengambilan keputusan masalah sumbangan pembangunan dan perencanaan pembangunan, maka yang diundang selain orang tua siswa adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota yayasan, kepala desa, kepala dusun, dan kami selaku komite sekolah tentunya beserta pihak sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan setahu saya yang biasa terlibat yaaa... hanya dewan guru, komite sekolah, ketua yayasan dan kepala sekolah saja, jika masyarakat saya rasa tidak pernah dilibatkan.

Informasi yang diberikan oleh Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite sekolah, memberikan kebanggaan bagi peneliti karena informasi yang disampaikan sesuai dengan fokus penelitian yang peneliti ingin ketahui terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Meskipun informasi yang telah diperoleh peneliti mendekati fokus penelitian ini, namun tidak menghentikan peneliti untuk mencari informasi tambahan demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Selanjutnya peneliti mencoba melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat sekaligus menjadi wakil kepala sekolah urusan hubungan dengan masyarakat di MA Hidayatul Muhsinin atas nama Bapak Ust. Waiz, S,Pd.I. Adapun hasil wawancaranya adalah :

Kegiatan yang sering mengikutsertakan masyarakat adalah kegiatan rapat baik rapat wali murid, rapat pembangunan, dan rapat sosialisasi ujian nasional. Selain itu juga, dalam berbagai

kegiatan-kegiatan sekolah seperti pembagian raport, kegiatan pembangunan, dan kegiatan lepas pisah kelas XII yang dirangkai dengan prosesi wisudanya. Kemudian pihak yang sering dilibatkan adalah kepala sekolah, orang tua siswa, alumni, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru beserta staf, anggota yayasan dan dewan komite sekolah. Dan mereka inilah yang juga sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah. Namun, dalam perencanaan pendidikan memang masyarakat tidak pernah dilibatkan karena selama ini yang bekerja hanya internal sekolah saja.

Penjelasan yang telah disampaikan oleh Ust. Wais, S.Pd.I memberikan tambahan informasi bahwa selain komponen masyarakat yang telah disebutkan oleh para orang tua siswa, dewan guru dan komite di atas, Ust. Waiz juga menyebutkan adanya keterlibatan tokoh pemuda dalam kegiatan pengambilan keputusan. Sedangkan dalam hal perencanaan pendidikan tetap sama dengan hasil wawancara bersama komponen masyarakat lainnya bahwa masyarakat belum pernah dilibatkan dalam hal perencanaan pendidikan. Hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I juga dibenarkan oleh Bapak H. Kemal selaku tokoh masyarakat, Bapak Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I selaku tokoh agama Desa Labulia, Bapak Yar Selaku Kadus Tandek, Bapak Zuki Selaku Kadus Olor Agung, Bapak Lalu Budin Selaku Kadus Tomber, dan Bapak Idi selaku Kadus Labulia.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota masyarakat yang sering berpartisipasi atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kepala desa, kepala dusun, para guru

beserta staf tata usaha, dan komite sekolah. Sedangkan pada proses perencanaan pendidikan, yang aktif terlibat hanya internal sekolah saja seperti para guru beserta staf tata usaha, komite sekolah, kepala sekolah dan pihak yayasan saja, karena masyarakat lainnya belum pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan tersebut.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dimaksud dalam fokus penelitian adalah bagaimana cara masyarakat ikut serta atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Untuk mengetahui cara berpartisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan pada studi awal ini, peneliti melakukan pengamatan dan studi wawancara dengan komponen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tersebut.

Dari hasil pengamatan peneliti, terlihat bahwa masyarakat hanya sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi dalam proses perencanaan pendidikan masyarakat masih belum diikutsertakan. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat yang nampak masih hanya dalam proses pengambilan keputusan saja. Sebagaimana pengakuan dari wali murid atas nama Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI. IPA berikut :

Dalam pengambilan keputusan, saya sering diajak untuk memutuskan besarnya biaya semester yang harus dibayarkan oleh anak saya. Selain itu juga saya pernah diajak untuk memutuskan besarnya sumbangan pembangun yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa pada saat sekolah melakukan pembangunan gedung baru. Dan biasanya caranya dilakukan dengan mengajak rapat dan memutuskan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Hasil keputusan disampaikan lagi pada masyarakat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, saya tidak pernah dilibatkan. Jadi saya tidak tahu apa yang harus kita kerjakan.

Penuturan Bapak Yani dibenarkan oleh sesama orang tua siswa atau wali murid baik dari kelas X maupun kelas XI, yakni Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.C, Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI. IPS 1, dan Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C. Para orang tua siswa ini menuturkan bahwa mereka memang sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak sekolah, tentunya yang berkaitan dengan masalah besarnya biaya semester yang harus dibayar oleh mereka. Cara yang dilakukan dalam mengambil keputusan adalah dengan mengajak rapat dan memutuskan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Hasil keputusan disampaikan lagi pada masyarakat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan, mereka juga mengakui tidak pernah ikut serta atau terlibat dalam kegiatan tersebut.

Berbeda halnya dengan informasi yang peneliti peroleh dari para wali murid atau orang tua siswa kelas XII. Mereka menambahkan penjelasan bahwa selain terlibat dalam pengambilan keputusan terkait besarnya biaya semester dan sumbangan pembangunan, para orang tua

kelas tiga ini juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan besarnya biaya ujian yang harus dikeluarkan oleh siswa kelas XII menjelang ujian. Kesemua kegiatan ini dilakukan dengan cara rapat atau pertemuan orang tua siswa, beserta komite dan komponen masyarakat lainnya dengan pihak sekolah. Meskipun dalam hal perencanaan pendidikan, mereka mempunyai jawaban yang sama bahwa belum pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana penuturan orang tua wali dari Topik atas nama Ibu Hani yang dibenarkan oleh orang tua wali dari kelas XII lainnya yakni Bapak Sam selaku orang tua wali dari Uyun kelas XII.IPA dan Bapak Siba selaku orang tua wali dari Aris kelas XII.IPS. Berikut penjelasan Ibu Hani :

Para orang tua siswa sering diundang dalam rapat-rapat di sekolah. Dan kami selalu hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Dalam rapat pengambilan keputusan, orang tua siswa selalu dilibatkan untuk mengambil keputusan terkait dengan biaya semester anak, biaya ujian, dan juga sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan orang tua siswa. Semua kegiatan itu selalu mengundang orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah dan masyarakat lainnya untuk memutuskan besarnya biaya yang harus dikeluarkan terutama masalah sumbangan pembangunan. Sehingga sekolah tidak menentukan sendiri besarnya biaya itu, melainkan memutuskan bersama-sama dengan masyarakat. Hasil keputusan disampaikan lagi pada masyarakat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, kami tidak pernah dilibatkan selama ini, jadi kami tidak tahu bagaimana cara terlibat dalam kegiatan itu karena kami tidak pernah diajak.

Penuturan para orang tua wali dari kelas XII ini menambahkan penjelasan dan informasi yang diberikan oleh para orang tua wali dari siswa kelas X dan XI. Karena orang tua siswa kelas XII sudah bukan

hanya terlibat dalam rapat biaya semester dan sumbangan pembangunan saja, tetapi mereka juga pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah besarnya biaya ujian yang harus dikeluarkan oleh siswa kelas XII. Pengakuan para orang tua siswa ini juga dibenarkan oleh para alumni MA Hidayatul Muhsini yang diantaranya adalah Saudara Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd, dan Toni, S.Pd.

Sedangkan penuturan salah seorang alumni atas nama Roni yang dibenarkan oleh alumni atas nama Mariani, menyatakan bahwa mereka sebagai alumni tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan di sekolah. Untuk lebih jelasnya, berikut hasil wawancara peneliti dengan kedua alumni tersebut :

Selama ini para alumni tidak pernah diajak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. sehingga saya tidak tahu bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selama ini yang saya tahu yang banyak terlibat dalam kegiatan di sekolah itu hanya orang tua siswa saja. Selain orang tua siswa juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun yang sering diundang ketika rapat.

Penuturan hasil wawancara dengan kedua alumni di atas, menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan. sehingga kedua alumni ini mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lengkap dan gambaran tentang bagaimana proses dan cara berpartisipasi masyarakat dalam ikut serta mengambil sebuah keputusan maupun dalam merencanakan berbagai kegiatan perencanaan pendidikan.

Selama pengamatan peneliti dalam studi awal ini, peneliti tidak menemukan adanya rapat pengambilan keputusan terkait dengan masalah pembayaran iuran komite (SPP), karena sekolah MA Hidayatul Muhsinin tidak memungut iuran komite dari siswa semenjak pemerintah mengeluarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Siswa dijamin mendapatkan pendidikan gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun untuk masalah iuran komite. Oleh karenanya, para orang tua siswa hanya melakukan pembayaran untuk masalah biaya semester dan biaya ujian kelas XII serta biaya sumbangan pembangunan. Biaya pembangunan ini pun hanya diminta ketika sekolah akan melaksanakan pembangunan gedung baru saja.

Terkait dengan hal di atas, ketua komite sekolah atas nama Bapak Awir, S.Pd memberikan informasi berikut :

Selama saya menjabat sebagai ketua komite di sekolah ini, keterlibatan masyarakat di sekolah banyak sekali bentuknya. Namun dalam hal pengambilan keputusan terkait masalah keuangan, masyarakat yang terlibat tergantung pada konteks rapat yang dibahas. Cara masyarakat berpartisipasi juga hanya melalui kegiatan rapat atau pertemuan saja. Dan hasil rapat di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Contohnya, dalam rapat masalah pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya biaya semester, maka yang diundang hanya orang tua siswa saja dari kelas X sampai kelas XI beserta komite dan kepala sekolah. Dalam penentuan besarnya biaya ujian, juga hanya mengundang orang tua siswa kelas XII saja. Rapat komite dengan orang tua siswa hanya memnahas seputar masalah biaya semester dan biaya ujian saja, karena biaya SPP tidak dipungut setelah sekolah mendapatkan BOS. Kemudian, dalam menentuka besarnya sumbangan pembangunan dan kegiatan pengambilan keputusan lainnya, selain orang tua siswa juga diundang, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat lainnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan

setahu saya masyarakat belum pernah dilibatkan, sehingga saya tidak bisa memberikan informasi terkait cara masyarakat berpartisipasi dalam hal tersebut.

Cara pengambilan keputusan yang telah dijelaskan oleh Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite MA Hidayatul Muhsinin dibenarkan oleh anggota komite lainnya yaitu Ibu Lulu, S.Pd, Bapak H. Kemal dan Bapak Neng selaku tokoh agama. Selain itu juga dibenarkan oleh dewan guru beserta staf tata usaha karena hasil wawancara memperlihatkan hasil yang sama dengan Bapak Awir, S.Pd terkait dengan cara partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dewan guru yang dimaksud adalah Bapak Lalu Artha, S.Pd selaku guru seni budaya, Bapak H. Denan, S.Pd.I selaku guru bahasa arab, Ibu Hamah, S.Pd.I selaku guru sosiologi, Bapak Herman selaku guru TIK sekaligus kepala tata usaha, Ibu Lale Aini selaku guru SKI, Bapak Hardi selaku guru bahasa inggris dan Ibu Icha, S.Pd selaku guru biologi.

Pencarian informasi atau data guna melengkapi hasil studi awal ini terus peneliti lanjutkan sampai dengan mengunjungi dan mewawancarai para wakil-wakil kepala desan di setiap dusun, yakni para kepala dusun (kadus) yang ada di Desa Labulia. Terkait masalah cara berpartisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, Kadus Olor Agung atas nama Bapak Zuki menuturkan :

Oh ya.... Saya sering diundang oleh pihak sekolah untuk menghadiri berbagai kegiatan dan rapat-rapat di sekolah. dalam kegiatan pembagian rapot siswa, kegiatan lepas pisah kelas XII, kegiatan pembangunan, dan lainnya saya selalu diundang oleh

pihak sekolah. Dalam hal pengambilan keputusan juga saya sering diundang seperti masalah biaya semester, biaya ujian, dan terutama pengambilan keputusan dalam masalah uang pembangunan saya selalu dilibatkan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dari masyarakat yang hadir, sehingga yang memutuskan adalah masyarakat bukan sekolah. Hasil rapat di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Sekolah juga meringankan masyarakat dalam memberikan sumbangan pembangunan tersebut, bahwa sumbangan pembangunan itu bisa dicicil selama dua kali. Kalau dalam perencanaan pendidikan saya belum pernah terlibat, tetapi kalau perencanaan pembangunan saya sering dilibatkan.

Penuturan Bapak Zuki terkait masalah cara berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini menunjukkan bahwa keterlibatannya juga hanya dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, namun dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum pernah terlibat sebagaimana hasil wawancara dengan berbagai komponen masyarakat yang telah dijelaskan dan dipaparkan di atas. Penuturan Bapak Zuki didukung dan dibenarkan oleh Kepala Dusun Labulia yaitu Bapak Idi selaku Kadus Labulia, Bapak Yar selaku Kadus Tandek dan Bapak Budin selaku Kadus Tomber yang memiliki pendapat yang sama seputar cara berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Selain informasi atau data yang peneliti peroleh dari orang tua siswa, alumni, komite, dewan guru, dan kepala dusun, informasi yang berbeda untuk melengkapi data terkait masalah cara berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan juga peneliti peroleh dari salah seorang tokoh agama Desa Labulia yakni

Ust. SAI-Hakimi, S.Pd sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di MA Hidayatul Muhsinin. Hasil wawancara dengan Ust. Al-Hakimi didukung dan dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat atas nama Ust. Wais, S.Pd.I sekaligus orang tua dari Firda kelas XII.IPA. berikut penuturannya :

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering dilibatkan. Jika pengambilan keputusan yang urusannya berkaitan dengan masyarakat, kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dusunnya. Kemudian jika berkaitan dengan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, MTR dan KUA juga kita libatkan untuk menentukan besarnya denda, disamping tokoh adat, agama, tokoh masyarakat dan kepala dusun dimana sumber murid kita berasal. Dan semua hasil keputusan bersama itu kita SK-kan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak hasil keputusan itu. Bidang partisipasi masyarakat lainnya juga di bidang agama, adat, dan bidang pembangunan. Kesemuanya mengajak masyarakat untuk memutuskan secara bersama-sama berdasarkan suara terbanyak dari hasil rapat. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan untuk menentukan program sekolah, bidang kurikulum, sarana prasarana dan program lainnya, sekolah hanya melibatkan komite, tokoh pengurus, dan tokoh agama yang bisa memberikan andil di madrasah. Sedangkan wali murid dan masyarakat lainnya hanya cukup kita sosialisasikan saja hasil perencanaan pendidikan yang telah dibuat.

Informasi yang peneliti peroleh dari Ust. Al-Hakimi sedikit berbeda dengan informasi yang peneliti peroleh dari para responden lainnya. Namun, itu menjadi pelengkap bagi hasil penelitian yang dibutuhkan peneliti terkait dengan cara berpartisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. penjelasan dari responden-responden sebelumnya menjelaskan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan banyak dilakukan dalam kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya

biaya semester, biaya ujian, biaya pembangunan dan ijin ppondokan. Sedangkan informasi dari Ust. Al-Hakimi memberikan informasi yang berbeda sebagai pelengkap data yang dibutuhkan. Infomasi itu berupa keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan di bidang agama, adat dan juga berupa pengambilan keputusan terkait dengan awig-awig (tata tertib sekolah di masyarakat) dan denda bagi siswa yang menikan di usia sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berupa keterlibatan masyarakat dalam rapat untuk memutuskan hal-hal seperti menentukan dan memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan, ijin ppondokan siswa pada masyarakat setempat menjelang ujian, pembentukan awig-awig atau tata tertib sekolah di masyarakat, dan penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah. Semua ini melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat sebagai bentuk partisipasi mereka di sekolah. Pengambilan keputusan dilakukan dengan rapat untuk mengambil sebuah keputusan dengan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir, sehingga yang memutuskan adalah masyarakat bukan sekolah. Hasil rapat di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Sedangkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan pendidikan sama sekali tidak ada, karena masyarakat belum pernah

dilibatkan dalam kegiatan tersebut kecuali komite, pengurus dan tokoh agama yang bisa memberikan andil di madrasah atau internal sekolah.

4. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Observasi awal yang telah dilakukan peneliti di MA Hidayatul Muhsinin menunjukkan bahwa sekolah ini meskipun merupakan sekolah swasta tetapi cukup diminati oleh siswa yang mendaftarkan diri untuk masuk pada sekolah tersebut. Hal ini terlihat dari rombongan belajarnya yang tidak pernah kurang dari delapan rombongan belajar setiap tahunnya, mulai dari kelas X hingga kelas XII. Hal ini menunjukkan bahwa animo atau minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah ini cukup tinggi. Sebagaimana pengakuan dari guru olahraga sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atas nama Bapak Pian, S.Pd, menyatakan :

Alhamdulillah selama ini sekolah kita masih cukup diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sini. Jumlah rombongan belajarnya juga tidak pernah kurang dari delapan rombongan belajar setiap tahunnya. Karena memang setiap menjelang tahun ajaran baru, sekolah ini melakukan sosialisasi dan pendataan bagi siswa-siswi yang tamat SMP/M.Ts untuk diajak bersekolah di sekolah kita. Dan rata-rata memang anak-anak sekitaran Desa Labulia ini bersekolah ke sekolah kita. sisanya ya... masuk sekolah negeri di Jonggat dan juga ke sekolah di Kuripan.

Penjelasan Bapak Pian, S.Pd ini menunjukkan bahwa sekolah MA Hidayatul Muhsinin tidak pernah kekurangan rombongan belajar sesuai dengan jumlah ruang kelas yang tersedia. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendataan bagi siswa-siswi yang tamat

SMP/M.Ts sekitar untuk diajak bersekolah di sekolah ini. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang cukup terkenal yang ada di antara 5 desa yaitu Desa Labulia, Desa Kuripan, Desa Berambang, Desa Sukarare dan Desa Batu Tulis.

Disamping itu, para orang tua juga mengaku bahwa mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah negeri yang membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dari pada sekolah ini. Sehingga mereka menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah ini dengan alasan yang penting anak-anak mereka bisa bersekolah. Sebagaimana pengakuan salah seorang wali murid atas nama Bapak Yani selaku wali murid dari Yuli kelas XI.IPA, menyatakan :

Saya sebagai orang tua berusaha agar anak-anak Saya bisa bersekolah, agar tidak seperti saya yang tidak tamat SMP karena tidak bersekolah. Saya juga tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anak saya ke sekolah negeri, karena pasti bayarannya lebih mahal. Tapi di sekolah ini anak-anak kami tidak membayar iuran komite, cukup membayar uang semester saja dan sumbangan pembangunan. Itu yang membuat kami bersyukur karena ada keringanan biaya sehingga anak-anak saya tetap bisa bersekolah. Selain itu jarak sekolah ini juga dekat dengan rumah, sehingga bisa memudahkan saya sebagai orang tua untuk ikut mengawasi proses belajar anak saya.

Pengakuan Bapak Yani memberikan gambaran bahwa faktor ekonomi masyarakat yang umumnya adalah petani, pedagang dan buruh bangunan sehingga merasa tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada sekolah negeri yang membutuhkan biaya besar. Selain itu juga, jarak sekolah ini juga dekat dengan rumah, sehingga bisa memudahkan para orang tua untuk ikut mengawasi proses belajar anak di

sekolah. Faktor ekonomi ini sebagai penunjang partisipasi masyarakat di sekolah. Pengakuan Bapak Ahmad Yani juga sama dengan pengakuan beberapa orang tua siswa lainnya, seperti pengakuan Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1, Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII.IPA, Ibu Fatma selaku orang tua Lia kelas XII.IPA, dan Bapak Har orang tua dari Diko kelas X.A. Selain itu, Bapak Siba orang tua dari Aris kelas XII.IPS dan Ibu Munah orang tua dari Dayah kelas XI.IPS 2

Selain faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pendidikan di atas, faktor utama yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah rasa tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. sebagaimana penuturan dari Ust. Waiz, S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Labulia sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan dengan masyarakat yang menyatakan bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan bukan hanya rasa memiliki saja, tetapi juga rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah yang memang ada di lingkungan sekitar mereka. Berikut penjelasan selengkapnya yang dituturkan oleh Ust. Wais, S.Pd :

Faktor pendukung masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan baik dalam kegiatan pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan adalah karena adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah ini yang memang satu-satunya sekolah yang dianggap berperan penting di Desa Labulia dan Desa sekitarnya. Dalam

pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan guna memutuskan suatu kebijakan yang harus ditetapkan sekolah agar mendapatkan hasil keputusan yang efektif, karena walau bagaimanapun masyarakat ini merupakan mitra kerja sekolah yang harus dilibatkan. Tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap sekolah. Salah satu contoh pada saat sekolah harus memutuskan besarnya denda bagi siswa kita yang menikah di usia sekolah membutuhkan keputusan dari masyarakat juga, karena ini urusannya berkaitan dengan masalah adat yang ada dimasyarakat yang harus disesuaikan oleh sekolah. Begitu juga dengan pengambilan keputusan-keputusan lainnya harus melibatkan masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut belum ada, sehingga faktor penunjangnya belum bisa saya sampaikan.

Penjelasan dari Ust. Wais, S.Pd menyatakan bahwa faktor penunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah rasa tanggung jawab dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Sehingga kehadiran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat dibutuhkan, dan masyarakatpun siap untuk hadir apabila diundang untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum bisa dipastikan apa yang menjadi faktor penunjang partisipasi masyarakat, karena dalam kegiatan tersebut masyarakat belum pernah diikutsertakan.

Hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I dibenarkan oleh Ibu Hani selaku orang tua dari M. Topik kelas XII. IPA, Bapak Neng selaku tokoh masyarakat dan H. Kemal selaku tokoh agama. Selain itu juga pandangan para alumni tidak jauh berbeda dengan pendapat para alumni

atas nama Saudara Roni, Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd.I, Toni, S.Pd.I dan Ani, S.Pd.I.

Berbeda halnya dengan penjelasan dari Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung yang menjelaskan tentang faktor penunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Penjelasan Bapak Zuki tersebut adalah sebagai berikut :

Saya sangat sering diundang untuk ikut dalam berbagai kegiatan rapat di sekolah dalam hal untuk mengambil keputusan soal besarnya biaya semester, biaya ujian, dan besarnya sumbangan pembangunan yang harus diberikan masyarakat terutama orang tua siswa kepada sekolah. Dalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut dilakukan bersama dengan pihak sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang terpenting adalah komite sekolah. Hal yang membuat saya tidak keberatan untuk hadir adalah guna mengetahui bagaimana proses dan hasil keputusan yang telah disepakati bersama demi kemajuan sekolah. Karena sebagai kepala dusun tentunya masyarakat akan banyak bertanya tentang hasil keputusan tersebut kepada saya, sehingga ada jadi bahan saya untuk menyampaikan ke masyarakat nantinya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan saya kurang tahu karena belum pernah dilibatkan kecuali dalam perencanaan pembangunan saja.

Penjelasan Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung yang jaraknya paling dekat dengan sekolah menyatakan bahwa faktor penting sebagai penunjang partisipasinya dalam pengambilan keputusan adalah agar bisa mengetahui proses dan hasil keputusan yang diputuskan bersama dengan komponen masyarakat lainnya. Bagi Bapak Marzuki proses dan hasil keputusan tersebut sangatlah penting sebagai bahan informasi bagi masyarakat yang bertanya nantinya seputar hasil keputusan yang disepakati, karena tidak semua masyarakat hadir dalam

kegiatan tersebut. Oleh karenanya kehadirannya sangat penting dalam kegiatan pengambilan keputusan tersebut. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan Bapak Zuki memiliki kesamaan pandangan dengan Ust. Wais, S.Pd bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan belum terlibat sehingga sulit untuk menjelaskan faktor penunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan.

Berbeda halnya dengan informasi atau data yang peneliti peroleh dari salah seorang guru seni budaya atas nama Bapak Lalu Artha, S.Pd sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Ia menyatakan faktor penunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah :

Kalau menurut saya faktor yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pendidikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena masyarakat menyadari bahwa keterlibatannya di sekolah sangat dibutuhkan. Pihak sekolah juga sering menyampaikan dalam berbagai kegiatan di sekolah bahwa masyarakat terutama orang tua merupakan mitra kerja sekolah, sehingga kehadiran, sumbangsi dan keikutsertaan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah. Oleh karena itu, para masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan guna meyakinkan masyarakat akan rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat karena masyarakat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan sekolah.

Informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Lalu Artha menyatakan bahwa faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena

adanya kepedulian dari pihak sekolah terhadap masyarakat. Kepedulian ini berupa kemauan sekolah dalam mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dengan demikian masyarakat merasa diperhatikan dan dibutuhkan partisipasinya oleh pihak sekolah, sehingga mereka siap untuk ikut terlibat dan berpartisipasi di sekolah. Selain itu, sekolah juga mengetahui bahwa masyarakat adalah mitra sekolah yang harus diperhatikan dan selalu diajak untuk bekerja sama agar tercapai tujuan yang diharapkan dan dicita-citakan sekolah. Oleh karenanya, pihak sekolah harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kerja sama yang harus terjalin antara sekolah dengan masyarakat. Apabila masyarakat telah memahaminya, maka dengan mudah untuk melibatkan dan mengajak mereka untuk berpartisipasi di sekolah, khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Informasi dari Bapak Lalu Artha, S.Pd dibenarkan oleh beberapa guru lainnya yang diantaranya Bapak H. Denan, S.Pd.I, Bapak Hardi, S.Pd, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, Ibu Hamah, S.Pd.I dan Ibu Icha, S.Pd.

Informasi lengkap seputar faktor penunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan juga peneliti peroleh dari salah seorang tokoh agama Desa Labulia yang sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di

MA Hidayatul Muhsinin. Tokoh agama yang dimaksud adalah Bapak

Ust. Al-Hakimi, S.Pd. Berikut penuturannya :

Faktor yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi di sekolah baik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun bidang yang lain adalah lebih kepada kesadaran masyarakat untuk terlibat di sekolah. sebagai contoh, orang tua menyekolahkan anaknya di MA Hidayatul Muhsinin, berarti mereka merasa ikut bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka dan ikut mengawasi jalannya proses pembelajaran di sekolah. Dalam pengambilan keputusan memang pihak sekolah selalu mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat seperti keputusan besarnya denda bagi anak yang menikah di usia sekolah. Itu harus diputuskan dengan masyarakat sehingga tidak ada penolakan lagi dari hasil keputusan itu. Dan itu semua kita SK-kan sebagai hasil keputusan bersama dengan masyarakat. Begitu juga dalam bidang pengambilan keputusan lainnya seperti bidang agama, adat, kebudayaan, keuangan dan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting sekali. Dalam perencanaan pendidikan juga faktor penunjangnya tidak jauh berbeda dengan proses pengambilan keputusan, hanya saja selama ini memang sekolah belum pernah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah kecuali komite dan internal sekolah saja. akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penunjang partisipasi dalam pengambilan keputusan juga sebagai faktor penunjang partisipasi dalam perencanaan pendidikan bila melibatkan masyarakat.

Informasi atau data yang peneliti dapatkan dari Bapak Ust. Al-Hakimi, S.Pd menyatakan bahwa faktor terpenting yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah lebih kepada kesadaran masyarakat. Dengan adanya kesadaran masyarakat tentunya akan menjadikan mereka memahami pentingnya keterlibatan atau partisipasi mereka di sekolah. Apalagi sekolah selama ini selalu mengikutsertakan masyarakat dalam

berbagai kegiatan sekolah terutama dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sekolah yang akhirnya akan mengarahkan masyarakat untuk selalu berpartisipasi di sekolah. sedangkan dalam perencanaan pendidikan memang belum dapat dipastikan secara jelas faktor penunjangnya.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah (1) rasa memiliki dari masyarakat karena sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, (2) rasa tanggung jawab masyarakat terutama orang tua siswa terhadap sekolah yang telah mendidika anak-anak mereka, (3) rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat dengan selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan ditetapkan, (4) rasa ingin tahu masyarakat terhadap proses dan hasil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasinya di sekolah khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Faktor penunjang partisipasi masyarakat ini memang lebih dominan terlihat dalam proses pengambilan keputusan saja, karena dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, faktor penunjangnya belum dapat terlihat

secara pasti. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini juga merupakan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan di sekolah.

5. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Selain mencari faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, peneliti juga ingin mengetahui dan mencari tahu faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, terlihat bahwa masyarakat sangat antusias dan siap hadir setiap kali diundang oleh pihak sekolah dalam menghadiri berbagai kegiatan sekolah. Kehadiran masyarakat di sekolah tentunya sering terlihat pada acara-acara rapat yang digelar dan dilaksanakan oleh sekolah, baik rapat yang sifatnya memberikan informasi dan sosialisasi maupun rapat yang sifatnya meminta persetujuan dan keputusan masyarakat terkait dengan masalah aturan maupun kebijakan dan kewajiban yang harus dibebankan pada masyarakat khususnya orang tua. Selama ini terlihat masyarakat selalu menghadiri setiap undangan berbagai kegiatan sekolah. Meskipun yang dominan terlihat hadir adalah para ibu-ibu dengan alasan para suaminya sibuk bekerja dan sebagian lagi banyak yang menjadi tenaga kerja luar negeri Indonesia (TKI).

Hal ini menunjukkan bahwa antusias dan semangat partisipasi masyarakat cukup tinggi, baik dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun dalam bidang partisipasinya yang lain. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat ini tentunya menandakan besarnya tingkat kepedulian, perhatian, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah. Dengan kehadiran dan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam berbagai partisipasinya di berbagai kegiatan sekolah, memperlihatkan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan terletak pada ketidakbisaan masyarakat untuk hadir karena ada kesibukan yang bersamaan dengan kegiatan dan undangan sekolah serta tidak menerima undangan dari pihak sekolah untuk ikut berpartisipasi di sekolah dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan di bidang partisipasi masyarakat yang lainnya.

Sebagaimana pengakuan salah seorang Kepala Dusun Olor Agung Desa Labulia atas nama Bapak Zuki, yang menyatakan :

Saya sangat sering diundang oleh sekolah untuk hadir dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan juga saya sering diminta untuk hadir, dan saya selalu siap untuk hadir kecuali memang ada kegiatan yang jadwalnya samaan dengan kegiatan atau undangan di sekolah yang tidak bisa saya tinggalkan yang membuat saya tidak hadir. Tapi selama saya bisa untuk hadir, saya tetap hadir untuk memenuhi undangan dari sekolah. Jadi itu saja alasan yang membuat saya tidak bisa ikut hadir disekolah sehingga kadang mengirimkan wakil.

Pengakuan Bapak Zuki menyatakan bahwa faktor yang menghambat partisipasinya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan selama ini adalah hanya karena jadwal undangan kegiatan di sekolah terkadang bersamaan dan berbenturan dengan undangan kegiatan lainnya. Jika masalah kesiapan untuk hadir, selalu siap asalkan jadwalnya tidak bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengakuan Bapak Marzuki dari hasil wawancara dengan peneliti juga diperkuat dengan hasil wawancara yang sama yang dijelaskan oleh kepala dusun lainnya seperti Kepala Dusun Tandek atas nama Bapak Yar, Kepala Dusun Sulin atas nama Bapak Sman dan Kepala Dusun Labulia atas nama Bapak Idi.

Sama halnya dengan pengakuan dari para orang tua siswa yang menyatakan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena ada kesibukan maupun kegiatan lain dari para orang tua siswa yang membuat mereka tidak bisa berpartisipasi. Para orang tua yang terdiri dari Bapak Har, Bapak Sam, Bapak Tamaf, Bapak Yani, Ibu Elah, Ibu Fatma, Ibu Munah, dan Ibu Hani. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu orang tua siswa yang mewakili orang tua siswa lainnya, atas nama Ibu Hani selaku orang tua dari Topik kelas XII. IPA. Berikut penjelasannya :

Saya tidak pernah tidak hadir untuk berbagai kegiatan di sekolah jika saya diundang. Saya selalu berusaha untuk ikut terlibat dan hadir dalam berbagai kegiatan untuk mengetahui informasi di sekolah secara langsung. Termasuk dalam kegiatan pengambilan

keputusan seperti rapat penentuan biaya semester, rapat biaya ujian, dan rapat sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan. Selama ini saya sebagai orang tua sering diundang untuk kegiatan-kegiatan sekolah, dan saya tetap hadir kecuali kalau memang ada kesibukan lain yang membuat saya tidak bisa ikut dan jika tidak menerima undangan dari sekolah. Dalam perencanaan pendidikan saya tidak pernah diundang jadi saya tidak tahu mau memberikan informasi apa.

Penjelasan para orang tua siswa dalam hasil wawancara studi awal peneliti dengan beberapa orang tua siswa yang diwakili oleh hasil wawancara dengan Ibu Hani menerangkan bahwa alasan ketidakhadiran mereka dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan di sekolah adalah apabila mereka tidak diundang dan ada kesibukan lain yang membuat mereka tidak bisa hadir untuk berpartisipasi. Kedua alasan inilah yang menjadi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Namun kehadiran para orang tua siswa ini hanya terlihat dalam proses pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah mereka mengaku belum pernah diikutsertakan atau diajak, sehingga mereka tidak tau bagaimana proses pelaksanaan perencanaan pendidikan dan faktor apa saja yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan tersebut.

Berbeda halnya dengan pengakuan alumni atas nama Roni yang disetujui oleh alumni atas nama Ani, S.Pd, menyatakan bahwa mereka tidak pernah diundang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di

sekolah termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Berikut hasil wawancara dengan Roni :

Saya tidak pernah diajak dan diundang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, apalagi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Jadi saya nggak tahu apa yang menjadi penghambat ketidakhadiran saya untuk ikut dalam kegiatan itu. Selama ini yang sering diundang hanya wali murid, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun dan yang lainnya. Sedangkan para alumni selama ini nggak pernah diundang oleh sekolah.

Hasil wawancara dengan alumni atas nama Roni yang disetujui oleh alumni atas nama Ani, S.Pd memberikan informasi atau data yang berbeda dengan para responden lainnya. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah diundang dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sehingga mereka tidak mengetahui apa dan bagaimana bentuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Selain itu, mereka juga tidak dapat menjelaskan apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah karena alasan tidak pernah terlibat tersebut.

Hasil wawancara dengan kedua alumni di atas sedikit berbeda dengan hasil wawancara dengan alumni atas nama Masrah, S.Pd dan Awan, S.Pd. Kedua alumni ini sekarang mengabdikan diri pada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin tempat mereka bersekolah dulu dengan menjadi tenaga pengajar pada lembaga M.Ts Hidayatul Muhsinin. Mereka menyatakan bahwa mereka sering diundang dalam

berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan sehingga mereka bisa menyampaikan dan memberikan informasi terkait dengan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah yakni di MA Hidayatul Muhsinin. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka tidak pernah diundang jadi tidak bisa memberikan informasi apa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan.

Berikut hasil wawancara dengan Masrah, S.Pd dan Awan, S.Pd, menyatakan :

Kami selama berpartisipasi di sekolah tidak menemukan adanya hambatan yang krusial dalam keterlibatan kami di sekolah, kecuali karena memang ada kesibukan lain dan tidak mendapatkan undangan kegiatan sekolah. Begitu juga dalam proses pengambilan keputusan, kami sebagai alumni juga sering diundang tetapi tidak menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tersebut. Masyarakat juga sering datang untuk hadir jika diundang dalam berbagai kegiatan di sekolah, kecuali ada halangan yang membuat mereka tidak bisa hadir. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan kami tidak bisa menjelaskan ada atau tidaknya hambatan dalam kegiatan tersebut karena kami tidak pernah diundang atau diajak terlibat. Karena yang melaksanakan perencanaan pendidikan hanya pihak internal sekolah saja.

Informasi atau data yang peneliti peroleh dari alumni atas nama Masrah, S.Pd.I dan Awan, S.Pd memang berbeda dengan kedua alumni sebelumnya yakni Roni dan Ani. Dimana Masrah dan Awan menyatakan bahwa mereka sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan. Meskipun dalam kegiatan perencanaan pendidikan mereka tidak pernah dilibatkan. Sedangkan

menurut Roni dan Ani, mereka sebagai alumni tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dirasa oleh Masrah, S.Pd.I dan Awan, S.Pd selama terlibat dalam proses pengambilan keputusan adalah karena alasan tidak diundang dan tidak sempat hadir karena ada kegiatan lainnya yang tidak bisa ditinggalkan yang bertepatan dengan undangan dari pihak sekolah.

Pencarian data atau informasi terkait dengan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah terus peneliti lakukan. Proses wawancara terus berjalan dengan mewawancarai para guru di MA Hidayatul Muhsinin, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Labulia. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi atau data yang sama dengan para responden sebelumnya, bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah karena tidak diundang oleh pihak sekolah dan karena ada kegiatan lain atau kesibukan lain dari masyarakat yang waktunya bersamaan dengan undangan di sekolah sehingga mereka tidak bisa hadir dan terlibat. Selain itu, diperoleh satu faktor tambahan yang menghambat partisipasi masyarakat yakni karena alasan sakit.

Dari sekian responden yang berhasil peneliti kunjungi dan wawancarai, terdapat salah satu responden yang memberikan informasi atau data yang lengkap seputar faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Informasi itu peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama Desa Labulia atas nama Ust. Al-Hakimi, S.Pd yang juga sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum di MA Hidayatul Muhsinin. Informasi dari Ust. Al-Hakimi disetujui oleh Ust. Wais, S.Pd.I selaku tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai wakil kepala sekolah urusan hubungan dengan masyarakat. Berikut penuturannya :

Dalam pengambilan keputusan selalu kita mengundang masyarakat. Terutama pengambilan keputusan yang sifatnya berkaitan dengan masyarakat, maka pasti masyarakat kita undang karena segala sesuatu berupa kebijakan yang akan ditetapkan sekolah harus melibatkan dan diputuskan bersama masyarakat. Begitu juga dengan bidang-bidang partisipasi yang lainnya seperti bidang agama, budaya dan adat. Sebagai contoh penetapan besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah harus diputuskan dengan masyarakat karena berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Dan hasil keputusan itu di SK-kan oleh kepala sekolah sehingga tidak ada yang membantah hasil keputusan tersebut. Selama proses pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan sekolah selama ini memang ada saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, seperti ketidakhadiran dengan alasan tertentu dan karena tidak mendapat undangan dari pihak sekolah ataupun karena sakit. Karena tidak mungkin semua masyarakat kita undang, kecuali yang ada hubungannya dengan sekolah seperti orang tua siswa, komite, guru-guru, staf TU, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun setempat. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan memang belum pernah melibatkan masyarakat, tetapi melihat partisipasi masyarakat selama ini dalam proses pengambilan keputusan, maka faktor

penghambatnya sepertinya tidak akan jauh berbeda dalam kegiatan perencanaan pendidikan apabila sekolah melibatkan masyarakat.

Meskipun penjelasan yang diberikan oleh Ust. Al-Hakimi, S.Pd terkait masalah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan informasi atau data yang diperoleh dari responden lainnya, akan tetapi penjelasan Ust. Al-Hakimi mampu menjelaskan lebih rinci dan mendetail serta mampu merangkum semua penjelasan dari responden lainnya. Bagi Ust. Al-Hakimi dalam proses pengambilan keputusan tentunya ada saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, seperti ketidakhadiran karena alasan tertentu dan apabila masyarakat tidak diundang untuk terlibat karena alasan sakit. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat memang belum dilibatkan, akan tetapi faktor yang menghambat partisipasi masyarakat apabila dilibatkan dalam perencanaan pendidikan jika dilihat dari kehadiran masyarakat selama ini dalam proses pengambilan keputusan nampaknya faktor penghambatnya tidak akan jauh berbeda.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh terkait masalah faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah karena faktor ketidakhadiran masyarakat jika undangan pihak sekolah bertepatan dengan kesibukan dan kegiatan

masyarakat lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, faktor lain penghambat partisipasi masyarakat juga adalah karena alasan tidak mendapatkan undangan dari pihak sekolah untuk ikut terlibat dan karena alasan sakit.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat ini masih hanya terlihat pada proses pengambilan keputusan saja, karena masyarakat sering dilibatkan dalam memutuskan berbagai persoalan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum dapat dipastikan apakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut sama dengan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah.

B. Pengembangan

Dalam sub bab pengembangan ini, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana cara mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kepala sekolah. Jadi peneliti tidak hanya sekedar mengamati dan memperhatikan saja, akan tetapi ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan. Sehingga peneliti akan sering melakukan proses diskusi dengan kepala sekolah.

Peneliti akan sering keluar masuk dan berada di lingkungan sekolah MA Hidayatul Muhsinin dan di lingkungan masyarakat sekitar sekolah sebagai lokasi penelitian yakni di Desa Labulia. Di Sekolah, keberadaan peneliti secara terus menerus bertujuan untuk mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan berbagai komponen masyarakat guna membicarakan apa dan bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Sedangkan di lingkungan luar sekolah atau di lingkungan masyarakat, peneliti juga mengamati dan mewawancarai masyarakat yang menjadi responden penelitian guna mengetahui efek kemajuan yang ditimbulkan oleh proses pengembangan yang dilaksanakan di sekolah. Selain itu, peneliti juga memberikan penjelasan dan informasi secara langsung kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat di sekolah, terutama yang berkaitan dengan bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Secara lebih rinci dan lengkap, peneliti akan mendeskripsikan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, yaitu : (1) menginformasikan kepada kepala sekolah terkait data dan informasi yang telah diperoleh peneliti selama proses studi awal dan (2) teori atau konsep pengembangan yang dilaksanakan bersama-sama antara peneliti dengan kepala sekolah.

1. Penjelasan Singkat Kepada Kepala Sekolah

Sebelum peneliti mengadakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, langkah pertama yang peneliti lakukan terlebih dahulu adalah menceritakan kepada kepala sekolah terkait data atau informasi yang telah peneliti peroleh dari hasil studi awal yang dilakukan selama satu bulan. Tujuannya adalah agar kepala sekolah mengetahui kondisi nyata partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah MA Hidayatul Muhsinin Labulia dan apa saja yang perlu dikembangkan. Sehingga nantinya peneliti dan kepala sekolah memiliki kesamaan konsep dalam melakukan proses pengembangan. Kepala sekolah juga dapat dengan mudah membantu peneliti karena sudah memahami bagaimana keadaan riil hasil studi awal dan bagaimana cara membantu peneliti melakukan proses pengembangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah tersebut.

a. Pemahaman masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Orang tua siswa yang dominan berprofesi sebagai petani , buruh dan dagang di Desa Labulia mempunyai pemahaman tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang masih konvensional dan bervariasi. Pemahaman mereka tentang partisipasi dalam pendidikan di sekolah masih hanya

pada sebatas memberikan sejumlah dana berupa pembayaran iuran komite, biaya semester, biaya ujian dan sumbangan pembangunan saja kepada sekolah. Sehingga partisipasi orang tua siswa belum berkembang dengan baik.

Sedangkan pemahaman orang tua siswa tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan mereka dalam memutuskan sebuah keputusan yang harus diambil terkait kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. Masyarakat sudah memiliki pemahaman meskipun masih minim terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga harus tetap dikembangkan karena keterlibatan orang tua masih pada pengambilan keputusan tentang biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, dan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah saja. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang lain masih belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal oleh sekolah dan masyarakat. Sedangkan partisipasi orang tua dalam perencanaan pendidikan, masih belum dipahami sepenuhnya oleh orang tua siswa karena mereka belum pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, hal ini harus dikembangkan secara maksimal.

Rendahnya pemahaman orang tua terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin disebabkan oleh beberapa

hal yaitu : (1) rendahnya tingkat pendidikan orang tua, (2) kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi di sekolah, (3) kurangnya sosialisasi oleh pihak sekolah terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat di sekolah, (4) ketidakpahaman orang tua siswa tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) masih rendahnya tingkat kemauan sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan terutama dalam perencanaan pendidikan.

Berbeda halnya dengan pemahaman para alumni, mereka ada yang belum memahami sepenuhnya istilah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka juga mengaku tidak pernah diajak oleh pihak sekolah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, apalagi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Namun pengakuan dari para alumni yang kini mengabdikan diri di Yayasan Hidayatul Muhsinin yakni di M.Ts Hidayatul Muhsinin, mengaku bahwa mereka sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah MA Hidayatul Muhsinin. Akan tetapi dalam perencanaan pendidikan, mereka tidak pernah diajak dan dilibatkan karena menurut mereka hal yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan merupakan urusan internal

sekolah. Oleh karenanya, mereka tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Sementara itu, pemahaman tokoh masyarakat terhadap partisipasi dalam pendidikan sudah cukup bagus, karena mereka telah memahami arti penting partisipasi dalam pendidikan tersebut. Namun yang masih menjadi persoalan adalah bahwa partisipasi dalam hal perencanaan pendidikan masih belum pernah dilakukan oleh sekolah karena belum adanya keterlibatan masyarakat dalam hal tersebut sehingga pemahaman tokoh masyarakat masih sangat minim. Sedangkan selama ini keterlibatan masyarakat hanya dalam bidang pengambilan keputusan saja sehingga mereka sudah sedikit memahami tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun pengambilan keputusan tersebut hanya berkaitan dengan masalah keuangan, pembangunan dan penetapan awig-awig atau tata tertib sekolah saja. Namun paling tidak masyarakat sudah mampu sedikit memahami apa itu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.

Sedangkan informasi yang selanjutnya peneliti ceritakan kepada kepala sekolah adalah terkait dengan pemahaman tokoh agama terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Informasi yang disampaikan peneliti kepada kepala sekolah menyatakan bahwa masih ada tokoh agama yang belum memahami partisipasi dalam pendidikan terlebih dalam

proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal ini disebabkan karena tidak pernah dilakukannya sosialisasi terkait dengan masalah tersebut.

Meskipun demikian, ada juga tokoh agama yang telah memahami dengan baik sepenuhnya arti penting partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam hal proses pengambilan keputusan maupun dalam hal perencanaan pendidikan. Tokoh agama yang memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan menuturkan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikut mengambil sebuah keputusan yang akan ditetapkan sekolah dan ikut terlibat dalam merencanakan program pendidikan yang akan dilaksanakan sekolah. Meskipun selama ini pelibatan masyarakat hanya dalam proses pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam perencanaan pendidikan masih belum pernah melibatkan masyarakat.

Informasi selanjutnya yang peneliti ceritakan kepada kepala sekolah adalah terkait dengan pemahaman para wakil kepala desa di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Labulia, yakni pemahaman para kepala dusun. Dari lima Kadus yang ada tersebut hanya Kadus Olor Agung yang memiliki pemahaman yang baik terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sedangkan Kadus-kadus

yang lain masih minim dalam memahami arti partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan bahkan lebih banyak yang masih belum memahami dan mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Ketidakhahaman para Kadus terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini menuntut adanya sosialisasi dan pembelajaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, karena bagaimanapun para Kadus ini merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat yang ada di setiap dusun tersebut. Oleh karenanya, para kadus ini harus memahami masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, guna membantu pihak sekolah menyampaikan kepada masyarakat apa dan bagaimana seharusnya keterlibatan mereka di sekolah sebagai bentuk partisipasinya, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Sedangkan pemahaman para guru yang peneliti sampaikan kepada kepala sekolah, bahwa para guru yang ada di MA Hidayatul Muhsinin telah memiliki pemahaman yang cukup bagus terkait masalah partisipasi masyarakat dalam pendidikan terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam ikut memutuskan dan membuat keputusan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan sekolah dan ikut merencanakan program pendidikan kedepannya

merupakan bentuk pemahaman para guru terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Dalam hal pengambilan keputusan, dewan guru menyatakan bahwa masyarakat selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang harus diputuskan bersama. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat memang secara langsung belum pernah diikutsertakan, namun melalui wadah partisipasi masyarakat yang terbentuk melalui dewan komite sebagai wakil orang tua siswa dan masyarakat di sekolah sudah berjalan dengan baik. Oleh karenanya, pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan membutuhkan proses pengembangan yang maksimal agar masyarakat bisa terlibat secara langsung demi kesempurnaan berbagai kegiatan dan program sekolah kedepannya.

Terakhir adalah pemahaman dari dewan komite sekolah. pemahaman komite sekolah tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan cukup bervariasi, tetapi masih dalam lingkup peran dan fungsi komite. Komite sekolah lebih menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan kerjasama antara sekolah dengan komite terutama masalah iuran komite dan sumbangan pembangunan. Karena komite memang merupakan wakil-wakil orang tua siswa dan masyarakat yang menjadi jembatan penghubung

dalam berkomunikasi diantara sekolah dan masyarakat, dan juga sebagai akses jalur informasi dari sekolah kepada masyarakat.

Meskipun demikian, komite sekolah juga memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan bukan hanya terkait dengan masalah keuangan semata yang tergolong sebagai kategori materi, tetapi mereka juga memahami bahwa partisipasi masyarakat yang lain juga bisa berupa non materi seperti sumbangan tenaga dan pikiran. Sedangkan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah, komite sekolah menuturkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan terutama jika berkaitan dengan masalah keuangan dan pembangunan. Namun dalam masalah perencanaan pendidikan masyarakat tidak pernah dilibatkan, karena bagi mereka itu merupakan urusan internal sekolah saja. Tetapi jika dalam perencanaan pembangunan masyarakat sering diajak terutama para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Desa Labulia.

b. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dapat dilihat dari kehadiran berbagai komponen masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah yang terkait dengan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Komponen yang sering berpartisipasi atau terlibat dalam proses pengambilan

keputusan adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, para guru beserta staf tata usaha, pihak yayasan dan komite sekolah. Sedangkan pada proses perencanaan pendidikan, yang aktif terlibat hanya internal sekolah saja seperti para guru beserta staf tata usaha, komite sekolah, kepala sekolah dan pihak yayasan saja, karena masyarakat lainnya belum pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses perencanaan pendidikan tersebut.

c. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Berdasarkan hasil studi awal yang telah peneliti lakukan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berupa keterlibatan masyarakat dalam bentuk rapat pengambilan keputusan untuk memutuskan hal-hal seperti menentukan dan memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan, izin pemondokan siswa pada masyarakat setempat menjelang ujian, pembentukan awig-awig atau tata tertib sekolah di masyarakat, dan penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah. Dalam rapat ini, untuk memutuskan hasil rapat dilakukan dengan cara votting atau mengambil suara terbanyak. Semua ini melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat sebagai bentuk partisipasi mereka di sekolah. Kemudian hasil rapat dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat.

Sedangkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan pendidikan sama sekali tidak ada, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut kecuali komite, tokoh pengurus, dan tokoh agama yang bisa memberikan andil di madrasah serta pihak internal sekolah saja dan pihak yayasan.

d. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Dari hasil wawancara dan observasi pada tahap studi awal, terlihat bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah : (1) rasa memiliki dari masyarakat karena sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, (2) rasa tanggung jawab masyarakat terutama orang tua siswa terhadap sekolah yang telah mendidika anak-anak mereka, (3) rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat dengan selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan ditetapkan, (4) rasa ingin tahu masyarakat terhadap proses dan hasil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasinya di sekolah khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Faktor penunjang partisipasi masyarakat ini memang lebih dominan terlihat dalam proses pengambilan keputusan saja, karena dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, faktor penunjangnya belum dapat terlihat secara pasti. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini juga merupakan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan di sekolah apabila melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi.

e. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Hasil observasi dan studi wawancara dalam tahap studi awal guna mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, menyatakan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah karena faktor ketidak hadiran masyarakat jika undangan pihak sekolah bertepatan dengan kesibukan dan kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, faktor lain penghambat partisipasi masyarakat juga adalah karena alasan tidak mendapatkan undangan dari pihak sekolah untuk ikut terlibat dan alasan sakit..

Sama halnya dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat, bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat hanya

terlihat dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, karena masyarakat sering dilibatkan dalam memutuskan berbagai persoalan dan kebijakan yang ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum dapat dipastikan apakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut sama dengan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah.

2. Teori/Konsep Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Secara umum, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan itu dapat diterapkan dalam mengembangkan kelima fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Pendekatan tersebut adalah : (1) *market efficiency*, (2) *political legitimacy*, dan (3) *professional expertise*.

a. Market Efficiency

Sekolah berusaha dapat memuaskan pelanggannya (masyarakat) melalui pemenuhan keinginan dan kebutuhan pendidikan. artinya bahwa sekolah dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dalam proses penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Sehingga nantinya sekolah dapat menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Demikian juga dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, jika mampu memberikan pelayanan dan kesempatan yang baik pada masyarakat, maka akan menghasilkan sebuah keputusan dan perencanaan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain itu, *market efficiency* juga diperlukan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat, agar masyarakat memahami dan mengetahui situasi dan kondisi serta karakteristik sekolah. Bagaimana masyarakat mau membantu sekolah kalau pihak yang dibantu tidak dikenal oleh pihak yang diharapkan membantu. Artinya bahwa masyarakat mengenal dan memiliki kesan yang baik dan positif terhadap sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus berusaha memperkenalkan diri sebaik mungkin kepada pihak-pihak yang diajak berpartisipasi.

Agar sekolah dapat mempromosikan diri dan memberikan pelayanan yang memuaskan, ada beberapa cara yang dilakukan :

- 1) Melaksanakan program-program kemasyarakatan

Mengadakan program-program kemasyarakatan yang bermanfaat dan berdampak positif, sehingga membuat masyarakat memiliki kesan yang baik terhadap sekolah. Program-program kemasyarakatan dapat dikaitkan dengan mata pelajaran, kelas, perpustakaan, dan sekolah secara menyeluruh.

Beberapa contoh program yang dimaksud antara lain : program kebersihan lingkungan di sekitar sekolah dan pemberian baju layak pakai kepada sekolah dan madrasah yang membutuhkan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah dan terutama dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Semua program-program tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat.

- 2) Mengundang tokoh masyarakat sebagai pembicara atau konsultan

Sekolah dapat dan perlu memanfaatkan dan menggerakkan potensi keahlian dan kemahiran masyarakat di sekitar sekolah. dengan mengundang tokoh masyarakat ahli dalam kegiatan tertentu di sekolah, maka sekolah akan mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus. Pertama, membuat tokoh masyarakat bersangkutan menerima informasi tentang kebutuhan sekolah secara baik. Kedua, menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekolah mampu bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, sekolah akan memperoleh saran-saran tentang penyempurnaan program sekolah atau penyelenggaraan sekolah secara umum.

b. *Political Legitimacy*

Melakukan pendekatan dengan pemimpin formal dan pemimpin informal. Pemimpin formal seperti Kepala Desa Labulia, semua Kepala Dusun yang ada di Desa Labulia, Camat Jonggat, dan Kapolsek Kecamatan Jonggat Lombok Tengah untuk memanfaatkan wewenangnya. Sedangkan pemimpin informal seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat Desa Labulia maupun tokoh-tokoh yang lain untuk memanfaatkan ketokohnya dan wibawanya dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan di sekolah. Termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, sehingga sekolah cukup dekat dengan para pemimpin masyarakat. Oleh karenanya, program sekolah mendapatkan dukungan dan legitimasi masyarakat sekitarnya.

Sekolah dapat berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin masyarakat dan komponen masyarakat yang lain, karena sekolah dapat membangun komunikasi yang efektif. Berikut beberapa cara membangun komunikasi yang efektif dengan pemimpin (tokoh) masyarakat dan berbagai komponen masyarakat yang lainnya.

1) Mengidentifikasi orang-orang kunci

Dalam setiap kelompok masyarakat di Desa Labulia terdapat orang-orang kunci, yaitu orang yang karena

kemampuan, pengaruhnya, dan ketokohnya mampu mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, untuk membangun hubungan dengan mereka, langkah pertama adalah mengetahui siapa tokoh kunci di antara mereka.

Tokoh kunci itu diajak berdiskusi, konsultasi dan diminta bantuannya untuk mempengaruhi orang lain, untuk berpartisipasi dalam program yang dirancang secara bersama-sama terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tokoh kunci itu dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat di lingkungannya sehingga dapat diikuti oleh masyarakat di sekitarnya.

2) Melibatkan orang kunci dalam kegiatan sekolah

Setelah tokoh kunci berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dan mengajak mereka membahas program sekolah, terutama yang berkaitan dengan fokus penelitian ini yakni di bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Tentu saja pelibatangannya disesuaikan dengan bidang keahlian atau minat tokoh yang bersangkutan. Selain itu pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh lainnya disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang mereka miliki karena pada umumnya mereka adalah orang yang tentunya memiliki banyak kesibukan.

Selain membangun komunikasi yang efektif dengan tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya, kepala sekolah yang dibantu oleh peneliti memanfaatkan alumni. Bagaimana pun alumni juga memiliki potensi dan pengalaman selama melaksanakan pendidikan di sekolah tersebut. Kepala sekolah juga mengoptimalkan peran dan fungsi komite sekolah. Sebab komite sekolah selain peran dan fungsinya cukup strategis, juga merupakan satu-satunya wadah partisipasi masyarakat yang aktif di sekolah dan merupakan wakil masyarakat terutama orang tua siswa di sekolah yang aktif di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah.

c. *Professional Expertise*

Sekolah yang dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan para staf tata usaha berusaha untuk memperbaiki sekolah dengan cara melakukan peningkatan *permormance* masing-masing. Peningkatan *performance* dilakukan dengan mendisiplinkan tenaga pengajar dan para staf tata usaha baik pada saat datang maupun pada saat pulang. Selain itu, peningkatan *performance* guru dilakukan oleh kepala sekolah dengan mengaktifkan kembali kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di sekolah. MGMP ini diadakan di sekolah sebulan sekali yang diikuti oleh guru mata pelajaran. Kepala sekolah juga terus menerus menghimbau agar para guru dapat memanfaatkan nara sumber dari masyarakat. Nampaknya

berbeda guru sudah dapat memanfaatkan nara sumber dari masyarakat, yaitu guru ekonomi dan agama. Pemanfaatan nara sumber dilakukan dengan dua cara : yaitu mendatangkan nara sumber tersebut ke sekolah, dan berkunjung ke tempat usahanya.

Prinsip *professional expertise* yaitu sekolah memiliki mutu yang baik dan mampu menunjukkan prestasi, transparansi, dan akuntabilitas agar masyarakat tidak sulit untuk diajak berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah yang belum nampak secara optimal. Terlebih-lebih dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Berikut cara mengembangkan partisipasi masyarakat secara detail mulai dari pemahaman masyarakat terkait partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Cara-cara mengembangkan kelima fokus penelitian di atas, dirincikan menurut masing-masing fokus. Namun masih dapat berkaitan satu dengan yang lain, sebab yang dikembangkan masih seputar partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

1) Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan masih minim sekali, bahkan ada sebagian masyarakat yang mengaku belum pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Meskipun juga terdapat beberapa anggota masyarakat yang memang sudah memahami istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Hal ini terbukti dari hasil studi awal yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang awam dan belum memahami arti partisipasi dalam pendidikan. Namun jika masyarakat ditanyai seputar keterlibatannya di sekolah, mereka mampu menjelaskan bahwa keterlibatannya berupa keikutsertaan mereka dalam berbagai kegiatan di sekolah

Selama ini pemahaman masyarakat seputar partisipasi di sekolah hanya sebatas pada pembayaran iuran komite, biaya semester, biaya ujian kelas XII, dan sumbangan pembangunan saja yang berupa materi. Sedangkan yang non materi berupa keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan seperti rapat, gotong royong, acara pembagian raport, acara lepas pisah dan wisuda kelas XII, dan pertemuan komite sekolah dengan para

wali murid. Pemahaman masyarakat yang masih minim ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak sekolah dengan masyarakat tentang partisipasi di sekolah. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat sekitar Desa Labulia masih rendah, dan profesi masyarakatnya dominan sebagai petani, buruh, dan pedagang.

Dalam kegiatan pengambilan keputusan juga masyarakat mengaku tidak semua bidang pengambilan keputusan selalu mengikutsertakan masyarakat. Mereka hanya sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, dan besarnya sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain itu, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang agama dan budaya adalah memutuskan awig-awig atau tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar sekolah dan penentuan denda bagi siswa-siswi yang menikah di usia sekolah. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan, masyarakat mengaku bahwa mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan, karena memang bagi mereka hal tersebut merupakan urusan internal sekolah sehingga mereka tidak merasa keberatan dan protes meskipun tidak dilibatkan. Hal ini terbukti dari hasil studi awal yang menunjukkan bahwa dari semua responden yang

diwawancarai mengaku bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan belum nampak.

Melihat kondisi ini tentunya memang perlu dilakukan proses pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh sebab itu, peneliti bersama kepala sekolah terus berupaya memberikan pembelajaran dan informasi dengan mengadakan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat di sekolah maupun di luar sekolah serta sering berkomunikasi dengan masyarakat.

Sosilaisasi seputar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dilakukan dengan berbagai cara antara lain : melalui rapat, pertemuan sekolah dengan komite dan dewan guru, pertemuan sekolah dengan komite dan wali murid, kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII, kegiatan evaluasi pembelajaran sekolah, dan melalui kegiatan *home visit* sekolah ke masyarakat.

a) Kegiatan Rapat

Dalam kegiatan rapat seperti rapat biaya ujian kelas XII pada bulan Maret 2015 dan rapat biaya semester pada bulan Mei 2015 yang dihadiri oleh pihak sekolah dan komite beserta masyarakat (orang tua siswa dan tokoh masyarakat) dimanfaatkan peneliti bersama kepala sekolah

untuk mengadakan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

b) Pertemuan Sekolah dengan Komite dan Dewan Guru

Pertemuan pihak sekolah dengan komite dan dewan guru guna membahas masalah biaya ujian dan pelaksanaan ujian kelas XII yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 telah dimanfaatkan oleh peneliti dan kepala sekolah dalam sosialisasi seputar masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh kepala sekolah dan seluruh dewan guru, staf tata usaha, para wakil kepala sekolah, dan anggota komite sekolah.

c) Pertemuan Sekolah dengan Komite dan Wali Murid

Selain melakukan sosialisasi dalam kegiatan rapat dan pertemuan sekolah dengan komite dan dewan guru, peneliti juga mengajak kepala sekolah untuk mengadakan dan melakukan sosialisasi dalam kegiatan pertemuan pihak sekolah dengan komite sekolah dan wali murid. Dalam pertemuan silaturahmi dan juga membahas masalah pelaksanaan semester bagi kelas X dan XI dan pemberitahuan kepada orang tua terkait acara lepas pisah dan wisuda siswa-siswi kelas XII pada tanggal 15 Mei

2015, disampaikan juga sosialisasi terkait masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

- d) Pertemuan Pihak Sekolah dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

Karena merasa perlunya adanya pembelajaran dan sosialisasi dalam pertemuan pihak sekolah dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk meminta ijin penyelenggaraan pemondokan siswa kelas XII menjelang ujian nasional, maka peneliti meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk membantu peneliti dalam menyampaikan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pemberian sosialisasi ini tentunya akan sangat membantu peneliti ketika melakukan studi akhir atau pengukuran akhir terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dengan pemahaman mereka sebelum dan sesudah dilakukan pengembangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

e) Kegiatan Lepas Pisah dan Wisuda Kelas XII

Pelaksanaan sosialisasi pada saat pelaksanaan acara wisuda kelas XII MA dan kelas IX M.Ts pada tanggal 24 Mei 2015, dilaksanakan pada saat kepala sekolah MA Hidayatul Muhsinin menyampaikan kata-kata sambutannya. Acara lepas pisah dan wisuda ini merupakan acara yang besar yang dihadiri oleh berbagai kalangan seperti Kepala Dusun Se-Desa Labulia dan Batu Tulis, Kepala Desa Labulia, Kepala Desa Batu Tulis, Bapak Camat Jonggat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggat, Kepala Kantor Departemen Agama Lombok Tengah, Bapak Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan kalangan pejabat lainnya.

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh anggota komite sekolah, anggota yayasan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, alumni, dan orang tua siswa. Moment acara ini dirasa sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi seputar pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya peneliti mengajak dan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi di sela-sela sambutan yang disampaikannya.

f) Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Rapat Kenaikan Kelas

Dalam rapat evaluasi pembelajaran dan kinerja guru serta rapat kenaikan kelas, peneliti bersama kepala sekolah melakukan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, yang dilaksanakan pada awal minggu kedua bulan Juni 2015. Kegiatan sosialisasi ini memberikan pembelajaran kepada semua pihak yang terlibat di sekolah untuk memahami apa dan bagaimana partisipasi masyarakat secara umum dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tujuannya adalah agar semua pihak yang ada di sekolah mampu menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka di sekolah. Selain itu, guna membantu peneliti untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

g) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Dalam setiap kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan sekolah seperti penambahan jumlah meja dan kursi belajar siswa maupun penggantian yang rusak, pengadaan lemari, pengadaan atau

rehab gedung serta pengadaan sarana prasarana lainnya berupaya untuk melibatkan masyarakat seperti yang telah dilakukan pada tanggal 27 Mei 2015, disampaikan pula pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan agar masyarakat tergerak untuk ikut berperan serta membantu jalannya program sekolah. Sehingga kegiatan ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan bersama kepala sekolah.

h) Kegiatan Rapat Pembagian Tugas dan Perencanaan Kurikulum

Dalam kegiatan rapat pembagian tugas tanggal 16 Juni 2015 dimanfaatkan oleh peneliti sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak sekolah dan juga beberapa anggota yayasan dan masyarakat lainnya yang diundang sebagai bentuk pengembangan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembagian tugas guru dan perencanaan kurikulum. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui siapa saja dewan guru dan apa saja tugas yang akan dijalankannya. Selain itu, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran terhadap kurikulum yang akan dilaksanakan pihak sekolah kedepannya. Terutama dalam mata pelajaran muatan local

yang membutuhkan masukan dari masyarakat terkait materi apa yang patut untuk dipelajari anak didik sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar sekolah.

i) Kegiatan *Home Visit* Sekolah ke Masyarakat

Selain ketujuh cara bersosialisasi yang telah dilakukan di atas, peneliti juga melakukan proses sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dengan cara mengadakan *home visit* kepada orang tua siswa dan tokoh masyarakat tertentu. *Home visit* ini dilakukan oleh kepala sekolah dan peneliti terutama bagi mereka yang diundang ke sekolah tetapi tidak sempat hadir. Kunjungan kepala sekolah dan peneliti kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana kunjungan rumah yang telah peneliti buat pada pertengahan minggu akhir bulan maret 2015 lalu.

Kunjungan rumah kepada tokoh masyarakat dan orang tua siswa itu umumnya berhasil, artinya bahwa orang yang menjadi sasaran dapat ditemui dan memahami pentingnya kerjasama antara sekolah dengan mereka dan pentingnya keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Walaupun kecil, kendala dalam proses pengembangan ini tetap ada, yaitu kesempatan kepala sekolah yang tertunda ataupun tak bisa

ikut serta karena berbagai kegiatan lain dan orang yang menjadi sasaran tidak ada di tempat serta ada di antara mereka yang kurang merespon ajakan sekolah.

2) Anggota Masyarakat yang terlibat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Untuk mendata pihak-pihak yang dapat terlibat dalam kegiatan partisipasi di sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain : (1) kepala sekolah memerintah guru-guru yang bertempat tinggal di sekitaran Desa Labulia untuk mencatat potensi yang dimiliki masyarakat di sekitar sekolah, (2) peneliti bersama kepala sekolah memilah dan memilih masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, dan (3) mengirimkan daftar pertanyaan apakah dan dimana mereka dapat terlibat dalam kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka yang dikirim pertanyaan kesediaan adalah diutamakan bagi pihak-pihak yang tidak sempat hadir dalam kegiatan sosialisasi, tetapi ada juga yang telah mengikuti sosialisasi.

Selain cara di atas, khusus orang tua siswa, agar mereka mudah diajak terlibat aktif dalam berpartisipasi di sekolah, maka sekolah : (1) melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa dan

masyarakat menjelang tahun ajaran baru (2016/2016) guna meningkatkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke MA Hidayatul Muhsinin Labulia, (2) mengirimkan ucapan selamat bergabung dengan MA Hidayatul Muhsinin Labulia bagi orang tua siswa baru tahun pelajaran 2015/2016, (3) mengirimkan informasi tentang sekolah dan anak-anaknya secara periodik, (4) membagikan daftar personil sekolah lengkap dengan tugas pokoknya dan alamatnya, dan (5) mengundang orang tua siswa ke sekolah baik yang anaknya berprestasi maupun yang bermasalah. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang tahun ajaran baru dan pada saat tahun ajaran baru 2015/2016 tiba.

3) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang nampak selama ini berupa keterlibatan masyarakat dalam bentuk rapat pengambilan keputusan untuk memutuskan hal-hal seperti menentukan dan memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan, izin pemondokan siswa pada masyarakat setempat menjelang ujian, pembentukan awig-awig atau tata tertib sekolah di masyarakat, dan penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah. Dalam rapat ini, untuk

memutuskan hasil rapat dilakukan dengan cara voting atau mengambil suara terbanyak. Dan hasil keputusan dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah yang kemudian diedarkan kembali kepada masyarakat. Semua ini melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat sebagai bentuk partisipasi mereka di sekolah.

Sedangkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan pendidikan sama sekali tidak ada, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut kecuali komite, tokoh pengurus, dan tokoh agama yang bisa memberikan andil di madrasah atau internal sekolah saja. Oleh karenanya proses pengembangan ini harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, bukan hanya pada bidang yang telah dijelaskan di atas. Terutama yang sangat penting untuk dikembangkan adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan yang sama sekali belum pernah dilaksanakan selama ini.

Dalam hal ini, berarti masyarakat harus terlibat dalam perencanaan program kerja sekolah, perencanaan kurikulum, perencanaan keuangan, perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah, perencanaan pembangunan, penyusunan rencana anggaran pembelanjaan sekolah (RAPBS), dan perencanaan-perencanaan lainnya. Dalam berbagai kegiatan perencanaan tersebut, peneliti meminta ijin dan bantuan dari

kepala sekolah untuk melibatkan masyarakat yang terdiri dari unsur orang tua siswa, para alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, dewan komite beserta segenap keluarga besar MA Hidayatul Muhsinin untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan di sekolah sebagai bentuk pengembangan yang dilakukan. Berbagai kegiatan perencanaan pendidikan telah berhasil dilaksanakan bersama masyarakat pada bulan April – Juni 2015. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya seperti ketidakhadiran masyarakat yang diundang dan karena kesibukan lain sebagai faktor penghambat kehadiran mereka.

Dalam pengambilan keputusan, peneliti bersama dengan kepala sekolah agar selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan agar hasil keputusan yang diperoleh sesuai dengan keinginan masyarakat dan sekolah. Cara memutuskan hasil pengambilan keputusan juga tidak hanya melalui votting atau suara terbanyak, tetapi juga melalui penandatanganan surat pernyataan persetujuan anggota yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan penerbitan SK Kepala sekolah dari hasil keputusan yang diperoleh. Sebagaimana yang telah peneliti lakukan dengan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan terkait biaya semester, biaya ujian kelas XII, ijin pemondokan, dan denda siswa yang

menikah di usia sekolah. Hasil keputusan dan perencanaan berdasarkan SK kepala sekolah kemudian diedarkan kembali kepada masyarakat.

4) Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari diri masyarakat maupun yang bersumber dari luar diri masyarakat. Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah (1) rasa memiliki dari masyarakat karena sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, (2) rasa tanggung jawab masyarakat terutama orang tua siswa terhadap sekolah yang telah mendidika anak-anak mereka, (3) rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat dengan selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan ditetapkan, (4) rasa ingin tahu masyarakat terhadap proses dan hasil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasinya di sekolah khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Faktor penunjang partisipasi masyarakat ini memang lebih dominan terlihat dalam proses pengambilan keputusan saja, karena dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum melibatkan masyarakat. Dengan demikian, faktor penunjangnya belum dapat terlihat secara pasti. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini juga merupakan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan di sekolah.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses pengembangan bersama kepala sekolah dalam proses perencanaan pendidikan guna mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pengembangan itu seperti dalam perencanaan program kerja sekolah, perencanaan kurikulum, perencanaan keuangan, perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah, perencanaan pembangunan, penyusunan rencana anggaran pembelanjaan sekolah (RAPBS), dan perencanaan-perencanaan lainnya. Dalam berbagai kegiatan perencanaan tersebut di atas, dan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan peneliti melibatkan semua komponen masyarakat untuk terlibat agar memperlihatkan secara jelas faktor yang menunjang partisipasi

masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Terutama dalam hal perencanaan pendidikan yang selama ini sebelum studi awal dilakukan belum pernah melibatkan berbagai elemen masyarakat yang ada di sekitar Desa Labulia.

5) Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Selain mencari informasi terkait faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, proses pengembangan ini juga mencari informasi terkait dengan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Berdasarkan hasil studi awal bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut adalah karena faktor ketidakhadiran masyarakat jika undangan pihak sekolah bertepatan dengan kesibukan dan kegiatan masyarakat lainnya yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, faktor lain penghambat partisipasi masyarakat juga adalah karena alasan tidak mendapatkan undangan dari pihak sekolah untuk ikut terlibat dan karena alasan sakit.

Faktor penghambat partisipasi masyarakat ini masih hanya terlihat pada proses pengambilan keputusan saja, karena sama halnya dengan faktor penunjang partisipasi masyarakat

bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum dapat dipastikan apakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan sama dengan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah.

Untuk mengetahui faktor penghambat lainnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan yang belum nampak selama ini, maka peneliti juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan dalam proses pengembangan guna mencari tahu faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dalam hal pengambilan keputusan, peneliti dan kepala sekolah melakukan pengembangan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan seperti menentukan dan memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan, ijin pemondokan siswa pada masyarakat setempat menjelang ujian, pembentukan awig-awig atau tata tertib sekolah di masyarakat, dan penentuan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah.

Selama ini proses pengambilan keputusan hanya dengan rapat dan memutuskan hasil rapat dengan voting atau mendengarkan suara terbanyak. Kemudian peneliti coba melakukan pengembangan dengan cara rapat yang bukan hanya dengan pengambilan suara terbanyak, akan tetapi didukung dengan mengisi surat pernyataan dan pertanggungjawaban atas keputusan yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, menyarankan agar kepala sekolah menerbitkan SK keputusan yang telah diambil dan diedarkan kembali kepada masyarakat.

Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, peneliti melakukan proses pengembangan bersama kepala sekolah guna mengetahui lebih lanjut apa saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan yang belum nampak selama ini. Pengembangan itu seperti dalam perencanaan program kerja sekolah, perencanaan kurikulum, perencanaan keuangan, perencanaan pengadaan sarana prasarana, perencanaan pembangunan, penyusunan rencana anggaran pembelanjaan sekolah (RAPBS), dan perencanaan lainnya. Dalam berbagai kegiatan perencanaan tersebut di atas, peneliti melibatkan semua komponen masyarakat untuk terlibat agar memperlihatkan secara jelas faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan selama proses pengembangan berlangsung.

C. Pengukuran Akhir

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Dalam sub bab ini, peneliti memaparkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah dilakukan pengembangan atau setelah dikembangkan. Pemahaman masyarakat yang dimaksud di sini adalah pengungkapan oleh masyarakat terhadap apa yang diketahui atau dipahami olehnya terkait dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pemahaman masyarakat akan dirincikan menjadi beberapa kelompok-kelompok informan, yaitu orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, guru, dan komite sekolah.

a. Pemahaman Orang Tua Siswa

Partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan orang tua siswa dalam ikut serta memutuskan sebuah kebijakan yang akan ditetapkan oleh sekolah dan ikut terlibat dalam merencanakan dan mereancang rencana kerja sekolah maupun program kerja sekolah kedepannya. Dengan keterlibatan para orang tua tentunya segala keputusan dan perencanaan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan sekolah akan mendapatkan dukungan baik moril maupun materil dari para orang tua siswa. Orang tua siswa merupakan mitra kerja sekolah yang memang harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah guna memudahkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, karena orang tua siswa

pastinya siap membantu sekolah sebagai tempat bagi anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya tidak mungkin orang tua siswa tidak mau membantu sekolah yang telah mendidik dan memberikan pendidikan bagi anaknya, karena kesuksesan dan keberhasilan sekolah akan menentukan suksesnya para siswa dan suksesnya para siswa akan menjadi kebanggaan bagi setiap orang tua.

Setelah proses pengembangan dilaksanakan, pemahaman orang tua siswa tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik bila dibandingkan dengan pemahaman mereka (orang tua siswa yang menjadi informan) pada hasil studi awal. Orang tua siswa yang juga belum pernah mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan, kini telah memahami arti partisipasi dalam pendidikan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bahkan para orang tua siswa ini telah banyak dilibatkan oleh pihak sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan saat kegiatan pengembangan dilakukan. Sehingga para orang tua siswa benar-benar merasa memiliki sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus mereka jaga dan pelihara dan mereka bina demi keberlangsungan sekolah kedepannya.

Orang tua siswa sudah dapat memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan bukan hanya dari segi keuangan yang berkaitan dengan biaya semester, biaya ujian dan sumbangan

pembangunan saja. Akan tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan lain seperti pemberian ijin pemondokan bagi siswa-siswi menjelang ujian, pengambilan keputusan tentang awiq-awiq (tata tertib) sekolah dan pengambilan keputusan terkait dengan berbagai kegiatan sekolah serta berbagai program kerja dan kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. Partisipasi dalam perencanaan pendidikan juga telah dipahami oleh para orang tua siswa dan masyarakat lainnya, sehingga masyarakat mampu menjelaskan apa dan bagaimana partisipasi mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI IPA sebagai berikut :

Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya tau itu adalah bagaimana keterlibatan kami sebagai orang tua dalam ikut memutuskan berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan sekolah. Karena berdasarkan sosialisasi dari peneliti dan kepala sekolah kemarin, seperti itu yang dapat saya beritahukan. Seperti keterlibatan saya dalam mengambil keputusan masalah biaya semester, sumbangan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk menetapkan denda bagi siswa yang menikah. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan yang saya ketahui adalah keterlibatan kami sebagai orang tua untuk ikut menentukan program kerja sekolah kedepannya. Sebelumnya kami hanya diberitahukan oleh pihak sekolah tentang apa program kerja sekolah selama ini. Tapi sekarang Alhamdulillah kami sudah diajak untuk ikut dalam berbagai perencanaan di sekolah seperti perencanaan kurikulum kemarin, pengadaan sarana prasarana ketika acara wisuda siswa kelas XII. Dan perencanaan semester juga kami diundang pihak sekolah agar mempersiapkan dan membantu untuk mengontrol kegiatan belajar anak di rumah

Hasil wawancara dengan Bapak Yani di atas, dapat dikatakan bahwa dia sudah dapat memahami tentang apa dan bagaimana

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan di atas, memperlihatkan dirinya telah memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatannya dalam ikut memutuskan berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan sekolah. Berbagai kegiatan pengambilan keputusan pun telah banyak diikutinya, seperti pengambilan keputusan penentuan biaya semester, sumbangan pembangunan gedung baru menjelang tahun ajaran baru 2015/2016, sumbangan dalam rangka kegiatan wisuda kelas XII angkatan 2014/2015, dan pengambilan keputusan terkait denda siswa yang menikah di usia sekolah.

Sedangkan terkait dengan masalah partisipasi dalam perencanaan pendidikan juga telah mampu ia jelaskan dengan cukup baik. Dalam hasil wawancara pada tahap studi awal, ia belum mampu menjelaskan istilah partisipasi dalam perencanaan pendidikan. Akan tetapi setelah proses pengembangan, ia telah mampu menjelaskan dengan baik apa dan bagaimana partisipasi dalam perencanaan pendidikan. Bahkan ia mengaku telah dilibatkan oleh pihak sekolah dalam perencanaan kurikulum, perencanaan sarana dan prasarana sekolah, perencanaan pembangunan di sekolah dan diundang oleh pihak sekolah dalam perencanaan kegiatan semester guna membantu mengontrol dan mengawasi kegiatan belajar anak di rumah menjelang semester.

Selain Bapak Yani, orang tua siswa lainnya yang juga telah memahami apa dan bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah Ibu Hani selaku orang tua dari M.Topik kelas XII. IPA, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII. IPA, Bapak Siba selaku orang tua dari Aris kelas XII. IPS dan Ibu Fatma selaku orang tua dari Lia kelas XII. IPA.

Hasil wawancaranya dengan beberapa orang tua tersebut menegaskan bahwa pemahamannya terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan juga bukan hanya sekedar ikut terlibat semata, tetapi bagaimana mendukung hasil keputusan dan perencanaan pendidikan tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Penuturan para orang tua ini telah memperlihatkan perubahan pemahamannya yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pemahamannya dalam studi awal. Pada pengukuran akhir ini terlihat bahwa pemahaman mereka terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sudah mampu dijabarkan sebagaimana hasil wawancara di atas.

Selain itu, pengakuan para orang tua siswa juga mengakui bahwa setelah dilakukannya proses pengembangan dan sosialisasi oleh peneliti dengan kepala sekolah telah membuat mereka memahami apa dan bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Selama ini para orang tua hanya terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam

perencanaan pendidikan sama sekali belum pernah dilibatkan, sehingga mereka tidak tahu apa dan bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Tetapi setelah dilakukan pengembangan, mereka telah diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang telah membuatnya paham tentang apa dan bagaimana partisipasi dalam perencanaan pendidikan di sekolah.

Merasa masih membutuhkan data atau informasi dari orang tua siswa lainnya yang menjadi informan dalam penelitian ini, peneliti melanjutkan studi wawancara dengan orang tua siswa lainnya. Hasil wawancara selanjutnya yang peneliti paparkan adalah hasil wawancara dengan Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C.

Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Menurut saya partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah keikutsertaan kita sebagai orang tua untuk ikut mengambil keputusan bersama sekolah dalam rangka kemajuan pendidikan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya pernah dilibatkan setelah sosialisasi oleh pihak sekolah dan peneliti adalah pengambilan keputusan dalam memutuskan besarnya biaya semester yang bertepatan dengan acara sosialisasi dari kepala sekolah dan peneliti. Selain itu, pengambilan keputusan terkait dengan masalah sumbangan pembangunan. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan dan ikut serta merencanakan kegiatan pendidikan seperti perencanaan kurikulum, perencanaan bidang kesiswaan, dan perencanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang pernah saya ikuti kemarin bersama pihak sekolah dan masyarakat lainnya dalam rapat perencanaan kegiatan itu.

Penuturan Ibu Elah sangat membantu peneliti untuk memperlihatkan dan membuktikan bahwa setelah dilakukannya proses sosialisasi dalam tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala

sekolah, masyarakat khususnya orang tua siswa telah makin memahami apa dan bagaimana partisipasi mereka seharusnya di sekolah. Terutama partisipasi dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Ketrelibatan para orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini membuat mereka merasa dipentingkan oleh pihak sekolah sebagai bagian dari sekolah yang selayaknya memang harus membantu sekolah dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatannya demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya.

Penuturan Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C ini juga dibenarkan oleh orang tua siswa lainnya, diantaranya adalah Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1, Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.A dan Ibu Munah selaku orang tua dari Dayah kelas XI. IPS 2. Ini menandakan bahwa para orang tua siswa telah memahami apa dan bagaimana partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah proses pengembangan dilakukan. Bahkan mereka juga sudah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan yang sebelumnya berdasarkan hasil studi awal sama sekali belum pernah dilibatkan. Hal ini telah memperlihatkan kepedulian sekolah terhadap masyarakat bahwa sekolah memang membutuhkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program dan kegiatan sekolah demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa para orang tua siswa sudah mampu memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Para orang tua siswa tidak lagi hanya memahami partisipasi dalam pendidikan sebatas pada keikutsertaannya dalam rapat wali murid baik dalam rapat penentuan biaya semester, biaya ujian, dan sumbangan pembangunan saja. Tetapi kini para orang tua siswa telah memahami bahwa partisipasi dalam pendidikan banyak bentuknya terutama dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang memang membutuhkan masyarakat dan orang tua siswa sebagai komponen yang dapat membantu sekolah untuk menentukan langkah dan kegiatan sekolah kedepannya.

Para orang tua siswa yang semula belum memahami sepenuhnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, kini sudah memahaminya setelah dilakukan proses sosialisasi dan tahap pengembangan oleh peneliti dan kepala sekolah. Para orang tua siswa juga mengaku keterlibatannya tidak lagi hanya pada kegiatan pengambilan keputusan saja, sebagaimana pengakuan mereka dalam hasil wawancara pada saat studi awal dilakukan. Tapi kini mereka sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan seperti perencanaan kurikulum, perencanaan sarana parasarana, perencanaan program kerja sekolah, perencanaan

bidang kesiswaan, perencanaan kegiatan ekstrakurikuler siswa oleh sekolah, dan perencanaan kegiatan semester maupun kegiatan lepas pisah dan wisuda bagi siswa kelas XII. Hal ini telah membuktikan bahwa proses pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dan kepala sekolah telah memperlihatkan keberhasilan dalam pelaksanaannya. Sehingga keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan.

b. Pemahaman Alumni

Alumni adalah salah satu komponen masyarakat yang dapat diajak untuk bekerjasama oleh sekolah. Banyak dari mereka yang memiliki potensi yang dibutuhkan sekolah. Sebagai orang yang pernah belajar dan mengenyam pendidikan di sekolah yakni di MA Hidayatul Muhsinin, para alumni tentunya telah banyak memahami situasi dan kondisi lingkungan sekolah dan bagaimana sekolah melaksanakan berbagai kegiatannya untuk terus maju dan mengembangkan diri demi keberlangsungannya. Oleh karena itu, alumni adalah salah satu kelompok informan yang dikembangkan pemahamannya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Setelah proses pengembangan, peneliti menemukan dan mendapatkan beberapa informasi yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam penelitian ini dari para alumni yang menjadi

informan penelitian. Informan pertama yang peneliti kunjungi dan wawancarai adalah Saudara Awan, S.Pd. Dia mengungkapkan :

Menurut saya partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah keikutsertaan dalam memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Contohnya ya memutuskan biaya semester, biaya ujian, dan memutuskan masalah pemondokan bagi siswa yang akan melaksanakan ujian. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan maupun merancang apa saja yang harus dilakukan sekolah kedepannya. Dan alhamdulillah sekolah sudah banyak melibatkan masyarakat terutama kami sebagai alumni dalam membantu melaksanakan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Hasil wawancara dengan saudara Awan, S.Pd menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedepannya. Apa yang telah disampaikan oleh saudara Awan, S.Pd merupakan bentuk pemahamannya terhadap apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah proses pengembangan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh peneliti bersama dengan kepala sekolah.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Saudara Masrah, S.Pd.I. Pemahamannya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut :

Menurut saya baik sebagai alumni atau sebagai masyarakat umum bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan seperti biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan dan juga masalah yang berkaitan dengan denda nikah bagi siswa yang menikah di saat masih sekolah. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada suara terbanyak dari masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan itu adalah bagaimana masyarakat harus dilibatkan dalam merencanakan berbagai perencanaan di sekolah karena kunci kemajuan pendidikan adalah dengan terlibatnya masyarakat. Selain itu, partisipasi dalam perencanaan pendidikan juga merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program tambahan sekolah seperti masalah kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah.

Ungkapan yang disampaikan oleh Saudara Masrah, S.Pd.I sebagai alumni juga telah memperlihatkan pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dimana menurut Masrah bahwa pengambilan keputusan merupakan proses memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang harus dilakukan dengan jalan musyawarah dan memutuskan dengan suara terbanyak. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keharusan sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam merancang kegiatan perencanaan sekolah karena kunci keberhasilan dan kemajuan pendidikan di sekolah salah satunya ditentukan oleh ada tidaknya keterlibatan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan di sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan memang membutuhkan keterlibatan masyarakat.

Masyarakat merupakan bagian dari sekolah yang tidak boleh diremehkan, karena memang sekolah berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan hidup disekitar masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau sekolah harus mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Dengan melibatkan masyarakat segala urusan akan menjadi mudah dan setiap permasalahan yang datang akan mudah dipecahkan oleh sekolah dengan bersama-sama dengan masyarakat. Sebab kunci keberhasilan sebuah lembaga atau sekolah tergantung juga dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya, karena sekolah tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada dukungan dan bantuan dari masyarakat demi keberlangsungan sekolah kedepannya.

Menambah kejelasan data atau informasi para alumni di atas, peneliti terus melakukan studi akhir dengan mewawancarai saudara Ani, S.Pd, Saudara Toni, S,Pd dan Saudara Roni yang juga merupakan alumni MA Hidayatul Muhsinin. Hasil wawancara dengan ketiga alumni ini tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari kedua alumni sebelumnya. Hasil wawancara dalam tahap studi akhir ini telah memberikan gambaran yang lengkap dan jelas terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Apa yang telah disampaikan para alumni ini memperlihatkan bahwa mereka telah memahami apa dan bagaimana

seharusnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Dari hasilnya wawancara dengan beberapa alumni di atas, dapat disimpulkan bahwa para alumni telah memahami partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan itu sebagai keterlibatan mereka sebagai alumni ataupun masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan kebijakan sekolah. Sedangkan perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam membantu menyelenggarakan, merancang, dan merencanakan program kerja sekolah kedepannya, karena kunci kemajuan sekolah tergantung pada keterlibatan masyarakat.

Selain itu, para alumni juga mengakui bahwa mereka telah banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Hal ini menjadi suatu kebanggaan bagi mereka karena dapat bekerjasama dan memberikan bantuan kepada almamater dan sekolah yang telah mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka selama bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Para alumni ini juga berharap agar kerjasama dan keterlibatan mereka di sekolah akan terus menerus dan tetap berlanjut kedepannya guna membantu mengembangkan dan memajukan sekolah ke arah yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi.

c. Pemahaman Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah, sebagai bagian yang dapat membantu keberlangsungan sekolah kedepannya. Tokoh masyarakat merupakan penengah sebagai penyambung komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Perhatian tokoh masyarakat terhadap sekolah MA Hidayatul Muhsinin mengalami perubahan setelah dilakukannya berbagai pendekatan dan pertemuan serta sosialisasi dalam tahap pengembangan yang telah dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah.

Pemahaman tokoh masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan mengalami peningkatan setelah dilakukannya sosialisasi dalam tahap pengembangan yang telah dilakukan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di Desa Labulia yang telah mampu memberikan penjelasan tentang pemahamannya terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Neng sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa Labulia menjelaskan :

Dari hasil sosialisasi yang saya dapatkan dari peneliti dan kepala sekolah, dapat saya katakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan yang terkait dengan aturan, kebijakan dan kebutuhan sekolah. Termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan di sekolah. Sedangkan

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan itu merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikut merencanakan berbagai perencanaan di sekolah, seperti perencanaan pengadaan sarana prasarana, perencanaan di bidang kesiswaan, bidang hubungan dengan masyarakat, dan perencanaan pembiayaan sekolah dan lainnya. Semua itu selalu berusaha mengundang masyarakat, meskipun tidak seluruhnya tetapi perwakilannya saja.

Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Neng dibenarkan

oleh Ust. Waiz, S.Pd.I selaku tokoh masyarakat Desa Labulia. Hasil wawancara ini telah menggambarkan pemahaman tokoh masyarakat tentang apa yang dipahaminya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Menurut tokoh masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah baik yang menyangkut aturan, kebijakan maupun hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Termasuk juga keterlibatan dalam ikut memutuskan perencanaan pendidikan di sekolah agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran, ide-ide, solusi, kritikan maupun saran dalam merencanakan berbagai perencanaan pendidikan yang akan dibuat oleh sekolah.

Proses pengembangan yang telah dilakukan peneliti dengan kepala sekolah telah berhasil membuat tokoh masyarakat dapat memahami dengan baik apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Neng dan Ust. Wais, S.Pd.I yang

telah mampu menjelaskan pemahamannya yang cukup baik jika dibandingkan dengan hasil wawancara sebelum proses pengembangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para tokoh masyarakat Desa Labulia telah mampu memahami dengan baik tentang apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hasil pengembangan ini memperlihatkan pemahaman tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka dalam berbagai bidang pengambilan keputusan di sekolah dan berbagai perencanaan pendidikan yang akan dirancang dan direncanakan sekolah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sekolah juga telah memperlihatkan upayanya mengajak dan mengundang masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka terlibat secara langsung dan tahu informasi secara langsung dari sekolah dengan apa yang akan dilaksanakan sekolah kedepannya, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang menuai keraguan dan protes dari masyarakat.

d. Pemahaman Tokoh Agama

Selain tokoh masyarakat yang dilibatkan dalam setiap kegiatan dan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, tokoh agama juga mengambil peran penting dalam kegiatan tersebut. Tokoh agama juga merupakan salah satu

komponen masyarakat yang dapat berperan penting dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya, tokoh agama juga menjadi salah satu komponen masyarakat yang menjadi responden peneliti dalam penelitian ini.

Dalam hasil wawancara setelah kegiatan pengembangan dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah, tokoh agama sudah cukup baik dalam memahami tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Para tokoh agama ini mengaku dengan adanya sosialisasi dan pengembangan yang telah dilakukan membuatnya merasa makin memahami dan memang harus terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu, para tokoh agama ini merasa tergerak hatinya untuk ikut terlibat dalam berpartisipasi di sekolah jika pihak sekolah mengajaknya. Mereka juga mengakui telah banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan terhadap pemondokan siswa menjelang ujian, keputusan besarnya denda bagi siswa yang menikan di usia sekolah, keputusan pelaksanaan semester dan ujian, keputusan besarnya sumbangan pembangunan, dan pengambilan keputusan yang lainnya di sekolah.

Selain terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan, para tokoh agama ini juga mengakui keterlibatannya dalam perencanaan

pendidikan seperti perencanaan kurikulum, perencanaan sarana prasarana, perencanaan pembangunan, perencanaan program sekolah, perencanaan bidang kesiswaan, dan perencanaan-perencanaan pendidikan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang tokoh agama Desa Labulia atas nama Ust Al-Hakimi, S.Pd.I yang dibenarkan oleh H. Kemal yang juga merupakan tokoh agama Desa Labulia yang mengakui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Pemahaman saya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan upaya sekolah dengan bagaimana caranya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan seperti bidang sarana prasarana, bidang kurikulum, bidang pembangunan, bidang kesiswaan dan bidang hubungan dengan masyarakat. Selain itu partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan materi seperti biaya ujian, biaya semester, denda siswa yang menikah dan besarnya sumbangan pembangunan. Dan yang berkaitan dengan non materil seperti kegiatan pengajian dan gotong royong, semua itu harus diputuskan bersama dengan masyarakat. Sedangkan pemahaman saya terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan adalah mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan seperti perencanaan kurikulum masyarakat ikut dilibatkan, perencanaan sarana prasarana masyarakat ikut mendukung pendanaan, perencanaan bidang kesiswaan melibatkan orang tua untuk ikut mengawasi dan mengontrol pembelajaran anak baik di sekolah maupun di rumah, dan perencanaan bidang hubungan dengan masyarakat mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti dalam kegiatan PHBI dan Karnaval hari besar agama islam. Semua masyarakat kita upayakan untuk terlibat secara langsung sehingga mereka tahu apa dan bagaimana yang dilakukan sekolah dan mereka tidak bertanya kepada orang lain terkait informasi itu karena sudah mengetahuinya langsung dan bahkan langsung dilibatkan oleh sekolah.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I sangat membantu peneliti dalam melengkapi data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Apa yang telah disampaikan dalam hasil wawancara pada tahap pengukuran akhir begitu banyak dan lengkap sehingga mampu menambah dan merangkul hasil wawancara yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak H. Kemal. Penjelasan Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I menyatakan bahwa dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan dan pelibatan masyarakat dalam ikut serta merencanakan pendidikan di sekolah dalam berbagai bidang perencanaan yang akan dijalankan sekolah merupakan pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di atas, dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama juga telah memahami dengan baik apa dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah dilakukannya proses pengembangan dan dilakukan pengukuran akhir dari hasil pengembangan tersebut. Menurut pandangan para tokoh agama bahwa dengan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan dan pelibatan masyarakat dalam ikut serta merencanakan pendidikan di sekolah dalam berbagai bidang perencanaan yang akan

dijalankan sekolah seperti bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan, bidang pembangunan, bidang hubungan dengan masyarakat, dan bidang-bidang lainnya merupakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

e. Pemahaman Kepala Dusun (Perangkat Desa)

Kepala dusun merupakan salah satu komponen masyarakat yang tidak kalah pentingnya untuk terlibat dalam berpartisipasi di sekolah. Kepala dusun merupakan wakil-wakil masyarakat terutama orang tua siswa di setiap dusun untuk mewakili mereka berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Sehingga nantinya para kepala dusun ini akan menyampaikan segala macam bentuk informasi dari sekolah kepada masyarakat. Keterlibatan kepala dusun di sekolah banyak memberikan dampak positif terhadap sekolah selama ini yakni di MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Keberadaan mereka membuat peneliti merasa tepat memilih mereka sebagai responden dalam penelitian ini.

Sebelum kegiatan pengembangan dilakukan, peranan kepala dusun di sekolah telah banyak dilibatkan oleh pihak sekolah. Setelah proses pengembangan pun membuat keterlibatan mereka untuk berpartisipasi di sekolah semakin nampak dalam berbagai bidang partisipasi yang ada, tak terkecuali dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Ketika peneliti melakukan

studi wawancara dalam tahap pengukuran akhir dengan beberapa kepala dusun yang ada di Desa Labulia, diperoleh informasi atau data yang cukup untuk kebutuhan peneliti terkait dengan pemahaman mereka tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Adapun kepala dusun pertama yang peneliti wawancarai adalah Kepala Dusun Tandek atas nama Bapak Yar. Hasil wawancara dengannya menjelaskan pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebagai berikut :

Sepemahaman saya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan itu apabila pihak sekolah, guru dan pihak yang lainnya ingin memutuskan suatu ketetapan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan sekolah, mereka tidak berani mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dan melakukan musyawarah dengan masyarakat dan orang tua murid. Seperti contohnya dalam penentuan denda bagi siswa yang menikah, menetapkan besarnya biaya semester, biaya ujian, biaya wisuda dan biaya lainnya mereka tidak berani memutuskan tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat dan wali murid. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan sepengetahuan saya merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap perencanaan pendidikan di sekolah. Sebagai contoh dalam penetapan kurikulum dan pembelajaran tidak terlepas dari dukungan dan pengawasan masyarakat dan harus melalui keputusan bersama dengan masyarakat. Begitu juga dengan perencanaan lainnya di sekolah juga harus selalu melibatkan masyarakat, sebagaimana yang telah dilakukan sekolah akhir-akhir ini telah banyak dan makin mengaktifkan keterlibatan masyarakat.

Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Yar selaku Kadus Tandek memperlihatkan akan pemahamannya yang cukup baik

tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Penjelasan Bapak Yar disetujui dan dibenarkan oleh Kepala Dusun Labulia dan Kepala Dusun Tomber, yakni Bapak Idi dan Bapak Lalu Budin bahwa memang dalam setiap kegiatan di sekolah harus melibatkan masyarakat. Dalam pengambilan keputusan pun sekolah dan anggota di dalamnya tidak berani memutuskan sendiri akan kebijakan yang akan ditetapkan tanpa melibatkan masyarakat terutama para wali murid. Tak hanya itu, dalam setiap perencanaan pendidikan juga sekolah selalu berupaya melibatkan masyarakat baik dalam penetapan kurikulum, sarana parsarana, bidang kesiswaan, keuangan, pembangunan, pengawasan dan bidang lainnya.

Tak hanya Bapak Yar dan Bapak Idi beserta Bapak Lalu Budin saja yang telah memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tetapi Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung juga memperlihatkan pemahamannya yang cukup baik tentang hal yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengannya terlihat bahwa dia telah memahami partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana hasil wawancaranya berikut ini :

Menurut pemahaman saya sebagaimana sosialisasi dan kegiatan yang pernah saya ikuti di sekolah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu merupakan keterlibatan masyarakat dengan diundang untuk ikut terlibat dalam memutuskan berbagai macam kegiatan dan kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. Contohnya seperti yang

kemarin-kemarin saya diundang seperti pengambilan keputusan untuk pengadaan lokasi pembangunan gedung baru, kemudian masalah biaya semester dan biaya ujian serta biaya lepas pisah dan wisuda kemarin. Kalau partisipasi dalam perencanaan pendidikan setahu saya merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikut terlibat untuk merencanakan berbagai program kegiatan perencanaan sekolah seperti perencanaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana, perencanaan bidang kesiswaan dan perencanaan program kerja sekolah maupun perencanaan lainnya. Semua itu selalu melibatkan masyarakat dengan diundang untuk ikut terlibat memutuskan dan menentukan semuanya biar masyarakat tahu apa yang dijalankan sekolah kedepannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung juga memperlihatkan pemahamannya yang jauh lebih baik setelah dilakukannya kegiatan pengembangan oleh peneliti dengan kepala sekolah serta mengajak atau melibatkannya secara langsung dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal itu terlihat dari bahasa pengungkapannya yang sangat jelas dalam memberikan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti terkait dengan pemahamannya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa kepala dusun di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman para kepala dusun terkait dengan masalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah bagaimana pihak sekolah melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan dan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan

pendidikan. Keterlibatan masyarakat tentunya akan memberikan kemudahan bagi sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dan dalam merencanakan berbagai kegiatan sekolah dalam berbagai bidang pengambilan keputusan maupun perencanaan. Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, pihak sekolah akan mendapatkan berbagai masukan, kritikan dan saran yang membuatnya mampu untuk memilih keputusan yang terbaik dan menetapkan perencanaan yang tepat.

Apalagi setelah dilakukannya proses pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, masyarakat menjadi semakin paham tentang apa dan bagaimana seharusnya keterlibatan mereka di sekolah. Terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya mau tidak mau sekolah harus terus berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan agar tercapai sebuah ketetapan atau keputusan yang matang dan sebuah perencanaan yang mantap demi keberhasilan dan kemajuan sekolah kedepannya.

f. Pemahaman Dewan Guru

Guru merupakan warga internal sekolah yang dapat memberikan informasi tentang keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah. Setelah proses pengembangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah berhasil dilaksanakan oleh peneliti bersama kepala

sekolah, pengakuan dari beberapa dewan guru menyatakan bahwa masyarakat menjadi lebih aktif untuk terlibat dalam berbagai partisipasi di sekolah sesuai dengan undangan dan ajakan pihak sekolah. Bahkan mereka yang merupakan warga sekolah juga telah diberikan sosialisasi dalam pengembangan agar benar-benar memahami dan diharapkan mampu mengarahkan warga masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Pemahaman yang baik terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan terlihat dari hasil wawancara pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Icha, S.Pd sebagai seorang guru biologi. Dia menuturkan :

Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama sekolah. Misanya keputusan yang berkaitan dengan kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII harus diputuskan bersama dengan masyarakat. Selain itu tentang penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus diputuskan bersama masyarakat jika ada pemotongan untuk keperluan siswa di sekolah agar tidak menimbulkan berbagai tanggapan buruk dari masyarakat terutama wali murid. Dan juga dalam memutuskan masalah besarnya sumbangan pembangunan dan biaya semester anak juga harus diputuskan dengan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, maupun bidang yang lainnya termasuk dalam perencanaan dan penyusunan program kerja sekolah harus melibatkan masyarakat biar mereka tahu dan memberikan masukan serta ikut mengontrol dan mengawasi kegiatan sekolah tersebut.

Penyampaian dari Ibu Icha, S.Pd terhadap pemahamannya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah memperlihatkan adanya peningkatan pemahamannya sebelum dilakukannya proses pengembangan dengan setelah dilakukannya proses pengembangan. Hasil wawancara yang tidak jauh berbeda dengan Ibu Icha, S.Pd diperoleh juga dari beberapa dewan guru lainnya yakni Bapak Lalu Artha, S.Pd, Bapak H. Denan, S.Pd.I, Bapak Hardi, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I dan Ibu Hamah, S.Pd.I.

Menambah penjelasan pemahaman Ibu Icha, S.Pd, salah seorang guru mata pelajaran sejarah kebudayaan islam (SKI) yang juga berhasil peneliti wawancarai dalam tahap pengukuran akhir juga memberikan tambahan informasi atau data yang peneliti butuhkan. Guru yang dimaksud adalah Ibu Lale Aini, S.Pd.I. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Yang dapat saya jelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah bahwa masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan yang akan dibuat sekolah. Misalnya seperti tata tertib (menyangkut kedisiplinan guru dan murid), biaya semester, sumbangan pembangunan, dan denda siswa yang menikah, semuanya harus melibatkan masyarakat karena sekolah berada ditengah-tengah masyarakat jadi harus melibatkan masyarakat juga. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam merancang dan menentukan perencanaan kurikulum, sarana prasarana, program kesiswaan dan program lainnya agar memperoleh masukan dan saran dari masyarakat untuk hasil perencanaan yang baik. Dan alhamdulillah setelah adanya sosialisasi dalam tahap pengembangan oleh peneliti dengan kepala sekolah membuat masyarakat menjadi lebih aktif untuk ikut berpartisipasi.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Lale Aini, S.Pd.I menunjukkan bahwa pemahamannya terhadap partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah dipahami dengan baik setelah dilakukannya proses pengembangan. Selain itu, masyarakat yang juga terlibat dalam partisipasi di sekolah, terutama dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan menjadi lebih aktif dan antusias berkat telah diberikannya sosialisasi tentang apa dan bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lale Aini, S.Pd dalam hasil wawancaranya. Sehingga masyarakat telah memahaminya dengan baik dan siap untuk terlibat jika dibutuhkan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dewan guru di atas, dapat disimpulkan bahwa para guru telah mampu memahami dengan baik apa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Para guru mengaku bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah bagaimana upaya dari pihak sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan dan selalu mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pendidikan. Dari hasil wawancara juga terdapat informasi bahwa tingkat keikutsertaan atau keterlibatan dan keaktifan masyarakat dalam partisipasinya dalam

pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah mengalami peningkatan setelah dilakukannya pengembangan.

Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, telah banyak melibatkan masyarakat. Pihak sekolah juga selalu berupaya untuk terus melibatkan masyarakat. Terutama dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang memang jarang melibatkan masyarakat, kini pihak sekolah berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut setelah kegiatan pengembangan dilakukan. Hasilnya terlihat bahwa keinginan dan keterlibatan masyarakat sangat tinggi setelah pihak sekolah mencoba mengaktifkan dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam hal perencanaan pendidikan. Apalagi masyarakat telah mampu memahami apa dan bagaimana seharusnya mereka terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah adanya sosialisasi dan pembelajaran dalam kegiatan pengembangan. Dengan demikian berarti telah terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah dilakukannya tahap pengembangan.

g. Pemahaman Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam menyelenggarakan dan mensukseskan kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagai mitra sekolah dan wakil masyarakat di sekolah, komite sekolah sudah tentu memiliki pemahaman yang baik tentang

partisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Termasuk pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Hal ini didasarkan pada dipahaminya keempat peran komite sekolah oleh para pengurus dan anggotanya. Mereka pada umumnya sudah mengerti peran komite sekolah. Menurut SK Mendiknas No. 044/U/2002, peran komite sekolah meliputi : pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; pendukung, baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah; pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah; dan mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di sekolah.

Setelah proses pengembangan dilakukan dengan semua anggota komite sekolah, para anggota komite telah memahami peranannya dalam menyelenggarakan dan mensukseskan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mereka juga memahami tanggung jawab mereka dalam bekerjasama dengan pihak sekolah sebagai penghubung komunikasi sekolah dengan masyarakat. Selain itu, mereka juga dapat menjadi motivator dalam membantu sekolah untuk mengajak dan melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi di sekolah. Terutama dalam partisipasi yang terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dalam tahap pengukuran akhir setelah kegiatan pengembangan, terlihat bahwa para anggota komite telah memahami apa dan bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Para anggota komite ini juga telah mengaku lebih meningkatkan keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah adanya kegiatan sosialisasi dalam proses pengembangan yang telah dilakukan peneliti bersama kepala sekolah. Sebagaimana pengakuan Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite yang dibenarkan dan disetujui oleh Ibu Lulu, S.Pd sebagai anggota komite sekolah MA Hidayatul Muhsinin menyatakan :

Menurut pemahaman saya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat untuk perbaikan sekolah kedepannya dengan melibatkan masyarakat untuk meminta kritikan, masukan ataupun saran dari masyarakat dalam memutuskan sebuah ketetapan yang akan dijalankan sekolah. Contohnya seperti keputusan dalam bekerjasama antara komite, sekolah dan masyarakat. Selain itu juga dalam menetapkan biaya semester, biaya ujian dan ijin pemondokan, semuanya kita upayakan untuk meminta masyarakat terlibat agar hasil keputusan yang kita peroleh lebih efektif karena keputusan bersama dengan masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan pelibatan masyarakat dalam memutuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan program perencanaan sekolah karena sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga harus melibatkan masyarakat. Dan kita selalu mengupayakan agar masyarakat tetap terlibat. Apalagi setelah pengembangan ini kan masyarakat sudah mampu memahami apa dan bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, sehingga mereka mudah untuk diajak untuk terlibat dalam hal tersebut. Meskipun ada saja yang tidak bisa hadir karena berbagai alasan dan kesibukan lainnya.

Dari penjelasan Bapak Awir, S.Pd dalam hasil wawancaranya terlihat bahwa pemahamannya terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sangat baik. Apalagi setelah adanya kegiatan pengembangan, upaya sekolah dengan komite sebagai wakil masyarakat untuk mengajak dan melibatkan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan semakin meningkat. Tak hanya itu, antusiasme masyarakat untuk ikut terlibat juga cukup tinggi karena mereka telah dibekali dengan pembelajaran akan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Sehingga masyarakat mudah untuk diajak berpartisipasi di sekolah.

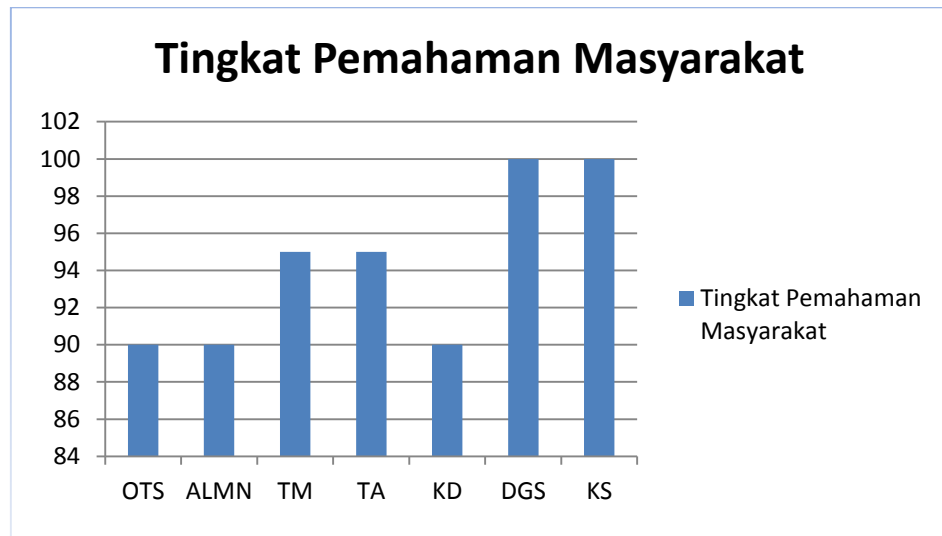
Dari hasil wawancara dengan anggota komite sekolah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para anggota komite telah memahami pentingnya mengajak dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka memahami bahwa arti partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu sebagai sebuah keterlibatan masyarakat dengan mengajak mereka untuk ikut membantu mengambil keputusan dari sebuah kebijakan yang akan ditetapkan sekolah dan ikut merencanakan berbagai kegiatan perencanaan pendidikan dalam berbagai bidang perencanaan di sekolah. Apalagi setelah adanya kegiatan pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah,

memberikan efek pemahaman yang baik bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah maupun dalam berbagai bidang dan kegiatan-kegiatan sekolah yang lainnya.

Pemahaman yang baik dari masyarakat setelah adanya kegiatan pembelajaran dan sosialisasi dalam kegiatan pengembangan juga memberikan kemudahan bagi pihak komite sekolah untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi di sekolah. Terutama dalam memutuskan dan merencanakan berbagai kegiatan pendidikan di sekolah. Hingga berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah banyak melibatkan masyarakat setelah proses pengembangan berlangsung. Hal ini tentu akan memberikan kemudahan bagi pihak sekolah dalam memutuskan dan merencanakan berbagai kegiatan pendidikan di sekolah demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya.

Dari hasil wawancara tahap studi awal dengan semua informan dalam penelitian ini terkait pemahaman mereka terhadap partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, maka persentase pemahaman masyarakat tersebut telah menunjukkan peningkatan sebagai keberhasilan tahap pengembangan yang dilakukan. Sebagaimana dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Gambar 4.2
Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam
Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan (Tahap Studi Akhir)



Keterangan:

OTS : Orang Tua Siswa
 ALMN : Alumni
 TM : Tokoh Masyarakat
 TA : Tokoh Agama
 KD : Kepala Dusun
 DGS : Dewan Guru dan Staf
 KS : Komite Sekolah

Dari grafik di atas, terlihat bahwa persentase pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan telah mengalami peningkatan setelah dilakukannya tahap pengembangan. Dimana tingkat pemahaman orang tua siswa meningkat menjadi 90 %, alumni 85 %, tokoh masyarakat 95 %, tokoh agama 95 %, kepala dusun 90 %, dewan guru dan staf 100 %, dan komite sekolah 100 %.

2. Anggota Masyarakat yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Untuk melihat anggota masyarakat yang terlibat dalam berpartisipasi pada kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan setelah dilakukannya kegiatan pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, setidaknya dapat dilihat dari kehadiran dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat di sekolah dalam kegiatan tersebut. Melihat kehadiran dan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengamatan, studi dokumentasi, dan *dicross chek* dengan melakukan wawancara terhadap berbagai komponen masyarakat dan warga sekolah.

Setelah kegiatan pengembangan, perkembangan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia dapat dikatakan lebih baik dan lebih aktif dari sebelum adanya kegiatan pengembangan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dari hasil observasi dan dokumentasi memperlihatkan bahwa cukup banyak warga masyarakat yang datang dan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di sekolah. Terutama dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Misalnya kehadiran warga masyarakat dalam rapat pengambilan keputusan mengenai besarnya biaya ujian, ijin penyelenggaraan pemondokan siswa menjelang ujian, besarnya biaya semester, denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, besarnya sumbangan pembangunan, besarnya biaya kegiatan lepas pisah

dan wisuda siswa-siswi kelas XII, dan berbagai kegiatan pengambilan keputusan lainnya.

Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan, misalnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program kerja sekolah, perencanaan pembangunan, perencanaan kurikulum terkait dengan mata pelajaran muatan lokal, perencanaan pengadaan sarana prasarana kebutuhan sekolah, perencanaan program bidang kesiswaan, perencanaan kegiatan ujian, perencanaan kegiatan semesteran, perencanaan kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII, dan perencanaan pendidikan lainnya. Semua kegiatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini selalu mengupayakan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkat keaktifan dan kehadiran masyarakat juga mengalami peningkatan setelah proses pengembangan. Hal ini tentunya disebabkan oleh karena masyarakat sudah bisa memahami apa dan bagaimana seharusnya mereka berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Pihak sekolah selalu berupaya untuk mengajak dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang ada terutama yang memiliki potensi untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang wali murid atas nama Ibu Hani selaku orang tua dari Topik kelas XII.IPA yang menyatakan bahwa anggota masyarakat yang sering

dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut :

Yang saya lihat selama ini yang selalu diundang untuk hadir dan dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah orang tua siswa pastinya, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, dan komite bersama pihak sekolah dan yayasan. Itu yang sering saya temukan untuk berpartisipasi di sekolah. Setelah kegiatan pengembangan juga yang hadir ya...mereka-mereka itu.

Pengakuan Ibu Hani menyatakan bahwa anggota masyarakat yang sering dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, dan komite bersama pihak sekolah dan yayasan. Pengakuan Ibu Hani disetujui dan dibenarkan oleh orang tua siswa lainnya yang memiliki kesamaan pendapat berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh. Adapun orang tua siswa yang dimaksud yakni Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI.IPA, Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C, Ibu Munah selaku orang tua dari Dayah kelas XI.IPS 2, Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.A, Ibu Fatma selaku orang tua dari Lia kelas XII. IPA, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII. IPAdan Bapak Tamaf selaku orang tua siswa dari Ida kelas XI.IPS 1.

Menambah data atau informasi tentang anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, peneliti juga mewawancarai tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Labulia. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang

berhasil ditemui atas nama Ust. Wais, S.Pd.I yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang hubungan dengan masyarakat menyatakan :

Selama ini yang selalu dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan, baik masalah keuangan dan pembiayaan, pembelajaran maupun aturan dan kebijakan di sekolah serta perencanaan dari berbagai kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah adalah semua anggota masyarakat yang memang memiliki potensi untuk dilibatkan akan diajak oleh pihak sekolah dalam proses tersebut. Contohnya seperti para orang tua wali, tokoh agama, tokoh pemuda, para alumni, kepala desa dan perangkat desa selain dari komite dan pihak internal sekolah yang ada. Semua itu kita upayakan untuk melibatkan mereka karena pengambilan keputusan bersama dengan masyarakat akan memberikan hasil yang lebih baik tentunya.

Pendapat Ust. Wais, S.Pd.I ini dibenarkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya seperti lainnya Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I, Bapak Neng, dan Bapak H. Kemal. Penjelasan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini juga memberikan tambahan informasi yang dibutuhkan berupa penambahan satu komponen masyarakat yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Menurut hasil wawancara dengan orang tua siswa bahwa dalam hasil wawancaranya tidak menerangkan adanya keterlibatan alumni untuk berpartisipasi. Sedangkan menurut hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama ini menerangkan adanya keterlibatan para alumni untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bahkan mereka menambahkan adanya keterlibatan dari tokoh pemuda juga dalam berpartisipasi di sekolah. Terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Untuk memastikan ada tidaknya keterlibatan para alumni dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, peneliti melakukan pencarian data atau informasi kepada beberapa alumni yang menjadi informan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah Saudara Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni, dan Saudari Ani, S.Pd. Dari hasil wawancara dengan beberapa alumni juga menyatakan bahwa mereka telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. masyarakat lainnya pun telah banyak dilibatkan dan yang selalu diundang untuk hadir adalah seperti kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komite sekolah, dewan guru dan anggota yayasan serta kami sebagai alumni tentunya.

Tahap pengukuran akhir terus peneliti lanjutkan dengan melakukan wawancara dengan beberapa kepala dusun yang ada di Desa Labulia. Bagaimana pun juga para kepala dusun ini tentunya merupakan wakil kepala desa di masing-masing dusun dan merupakan pimpinan bagi warga masyarakat yang ada di tiap dusun tersebut. Sebagai kepala dusun tentunya mereka sering diajak dan dilibatkan oleh pihak sekolah dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, karena apapun hasilnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat terutama para wali murid. Sebagaimana pengakuan dari salah seorang Kepala Dusun Olor Agung yang menyatakan bahwa ia sangat sering dilibatkan oleh pihak sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah. Apalagi setelah adanya kegiatan penegmabangan, ia sangat sering dilibatkan dalam

hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung adalah sebagai berikut :

Saya sebagai kepala dusun sangat sering diajak oleh pihak sekolah untuk ikut membantu dalam berbagai kegiatan di sekolah. termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagai contoh dalam kegiatan pembangunan kita bersama pihak sekolah mengambil keputusan tentang dimana akan dilakukan lokasi pembangunan dan berapa biaya yang dibutuhkan. Sehingga kita bisa mematok berapa besarnya sumbanagn pembangunan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membantu pihak sekolah. dalam perencanaan juga saya sering diundang terutama yang berkaitan dengan perencanaan program sekolah, keuangan, bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, maupun bidang sarana prasarana. Selain saya sebagai kepala dusun juga dalam kegiatan tersebut di sekolah juga melibatkan orang tua siswa pastinya, kemudian komite, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alumni, kepala desa dan staf desa, dan juga para pihak yayasan, dan warga sekolah tentunya.

Penjelasan hasil wawancara denagn Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung juga dibenarkan dan didukung oleh pengakuan dari kepala dusun lainnya, yakni Bapak Yar selaku Kepala Dusun Tandek, Bapak Lalu Budin selaku Kepala Dusun Tomber dan Bapak Idi selaku Kepala Dusun Labulia. Mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka sebagai kadus sudah sangat sering dan selalu dilibatkan oleh pihak sekolah dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan sekolah lainnya. Apalagi setelah dilakukannya sosialisasi dalam tahap pengembangan, membuat mereka dan anggota masyarakat lainnya seperti kepala desa, komite, orang tua siswa, para alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga lainnya

semakin sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Untuk mengetahui kepastian hasil penelitian dari berbagai komponen masyarakat di atas, peneliti melakukan *cross chek* dengan mewawancarai beberapa orang guru yang mengajar di MA Hidayatul Muhsinin guna memperjelas dan memastikan siapa saja anggota masyarakat yang sering diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Apakah benar bahwa hasil wawancara di atas memang menegaskan adanya keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang guru menyatakan bahwa pihak sekolah memang selalu mengupayakan adanya keterlibatan berbagai komponen masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Apalagi setelah adanya kegiatan sosialisasi dalam tahap pengembangan membuat pihak sekolah semakin aktif dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan tingkat keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi juga semakin aktif. Sebagaimana pengakuan salah seorang guru bahasa asing dan bahasa Inggris atas nama Bapak Hardi, S.Pd, menyatakan :

Selama ini sekolah selalu mengupayakan dan mengusahakan untuk melibatkan berbagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bahkan dalam berbagai kegiatan sekolah pun pihak sekolah selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dari awal pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, sampai

dengan tahap pelaksanaannya. Seperti yang kemarin kita laksanakan adalah kegiatan hari besar islam (HBI) terkait dengan isra mi'raj dan acara kelulusan maupun lepas pisah dan wisuda kelas XII, kita melibatkan masyarakat untuk terlibat dari awal pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, sampai dengan tahap pelaksanaannya. Dan anggota masyarakat yang sering dilibatkan adalah seperti orang tua siswa tentunya, para anggota yayasan, komite sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alumni, kepala desa, kepala dusun, dan warga lainnya yang dianggap memiliki potensi untuk terlibat. Disamping dewan guru, staf TU dan pihak yayasan beserta kepala sekolah. Karena pihak sekolah tidak mungkin bisa melaksanakan itu semua tanpa adanya bantuan dari berbagai kalangan dari masyarakat.

Pendapat dan penjelasan dari Bapak Hardi, S.Pd dibenarkan juga oleh guru lainnya, diantaranya adalah Bapak Lalu Artha, S.Pd, Ibu Icha, S.Pd, Ibu Hamah, S.Pd.I, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, dan Bapak H. Denan, S.Pd.I. Mereka menyatakan bahwa anggota masyarakat yang sering dilibatkan oleh pihak sekolah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagaimana hasil wawancara di atas. Tingkat keterlibatan dan keaktifan masyarakat juga mengalami peningkatan dengan adanya proses dan tahap pengembangan yang telah dilakukan.

Sekolah memang tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program dan kebijakannya. Mereka memang harus melibatkan berbagai komponen masyarakat agar apa yang akan dilaksanakan dapat dirancang dan direncanakan dengan matang bersama masyarakat. Sekolah juga membutuhkan masyarakat dalam banyak hal guna memajukan pendidikan di sekolah tersebut. Sekolah juga berada diantara dan ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Oleh karenanya mau tidak mau sekolah harus

mampu bekerjasama dengan masyarakat demi keberlangsungan sekolah kedepannya. Keberlangsungan sekolah tentunya ditentukan dengan tingkat pelayanan dan kerjasama yang dilakukan sekolah dalam memuaskan pelanggannya yakni masyarakat itu sendiri.

Meskipun data atau informasi yang diperoleh telah dirasa cukup oleh peneliti terkait anggota masyarakat mana saja yang sering dilibatkan oleh pihak sekolah dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, tidak membuat peneliti menghentikan studi wawancaranya. Namun peneliti tetap melanjutkan penelitian untuk melakukan wawancara dengan anggota komite sekolah sekolah, dengan harapan memperoleh data atau informasi tambahan guna melengkapi data atau informasi yang telah ada. Komite sekolah yang diwawancarai adalah Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Hasil wawancaranya menegaskan :

Saya selaku komite sekolah bersama sekolah selalu mengupayakan untuk melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Semua itu kita selalu terus dan terus berupaya melibatkan masyarakat untuk terlibat. Alhamdulillah anggota masyarakat yang selalu kami libatkan adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa seperti kepala desa dan kepala dusun, dan anggota masyarakat lainnya yang kita anggap mampu dan memiliki potensi untuk kami libatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah itu. Kalau dewan guru beserta staf tata usaha memang sudah jelas bahwa mereka harus selalu terlibat bersama dengan anggota yayasan dan kepala sekolah. Dan saya sebagai komite terus mengupayakan agar masyarakat dilibatkan dalam semua hal yang berkaitan dengan sekolah terutama yang menyangkut perencanaan pendidikan yang sebelumnya jarang melibatkan masyarakat secara langsung tetapi hanya disampaikan hasil dari perencanaan

itu saja. Kini kami upayakan untuk terlibat langsung. Alhamdulillah hasilnya dapat kita lihat dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan kemarin setelah tahap pengembangan bahwa masyarakat menjadi lebih aktif dan antusias untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah. termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tadi.

Studi wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketua komite sekolah yakni Bapak Awir, S.Pd ternyata membuahkan hasil yang membanggakan. Dari hasil wawancaranya memberikan data atau informasi yang sangat lengkap yang mampu merangkum dan merangkul semua informasi yang telah disampaikan oleh responden lainnya. Dia juga sebagai ketua komite telah mengupayakan agar semua komponen masyarakat dapat dilibatkan di sekolah guna membantu berbagai program dan kegiatan sekolah demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya. Terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Dari data dan informasi yang telah diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah orang tua siswa, para alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa seperti kepala desa dan kepala dusun, dan komite sekolah. Selain itu, keterlibatan para dewan guru beserta staf tata usaha dan anggota yayasan Hidayatul Muhsinin Labulia. Pihak sekolah juga telah mengupayakan agar masyarakat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana hasil dari tahap pengembangan yang telah dilakukan, dari hasil pengukuran akhir

menunjukkan bahwa tingkat kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan sekolah lainnya mengalami peningkatan dan menjadi lebih aktif jika dibandingkan dengan hasil studi awal sebelum dilakukan tahap pengembangan. Dari hasil pengukuran akhir juga menunjukkan bahwa masyarakat yang semula jarang dilibatkan dalam perencanaan pendidikan juga sudah dilibatkan oleh pihak sekolah setelah adanya proses pengembangan yang dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dimaksud dalam fokus penelitian adalah bagaimana cara masyarakat ikut serta atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Berdasarkan hasil pengukuran akhir setelah dilakukannya tahap pengembangan, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat semakin aktif dan mengalami banyak perubahan cara dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Semula sebelum dilakukan pengembangan, cara masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan adalah dengan menghadiri rapat dan memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian hasil keputusan itu dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis oleh pihak sekolah dengan diterbitkan melalui surat keputusan kepala

sekolah dan diinformasikan kepada masyarakat dengan diedarkan melalui surat kepada mereka.

Sedangkan dalam hal perencanaan pendidikan masyarakat sangat jarang dilibatkan. Hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah hanya disampaikan dan diinformasikan kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Namun setelah tahap pengembangan, terjadi kemajuan yang cukup baik karena masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan saja. Akan tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan pendidikan. Cara mereka berpartisipasi pun jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya tahap pengembangan. Setelah tahap pengembangan, masyarakat selalu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dengan diajak melalui undangan oleh pihak sekolah untuk hadir dalam rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Keputusan rapat disimpulkan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat. Masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut mengisi sebuah surat pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hasil dari keputusan rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dituangkan dalam sebuah pernyataan tertulis yang disahkan oleh kepala sekolah berdasarkan surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai salah seorang wali murid atas nama Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI.IPA menyatakan :

Selama saya berpartisipasi di sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, saya sedikit heran karena ternyata ada sedikit perubahan dalam prosesnya. Biasanya selama ini kita hanya diajak rapat pengambilan keputusan dengan memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian hasilnya dibuatkan surat keputusan oleh kepala sekolah dan diinformasikan kepada masyarakat. Tetapi sekarang kita disuruh mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil keputusan dan perencanaan yang telah kita sepakati. Baru kemudian dibuatkan bukti tertulis hasil kesepakatan dan di buatkan surat keputusan kepala sekolah.

Pengakuan Bapak Yani juga sejalan dengan pengakuan orang tua siswa lainnya, diantaranya adalah Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C, Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1, Ibu Hani selaku orang tua dari Topik kelas XII.IPA, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII. IPA, Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.A dan Ibu Fatma selaku orang tua dari Lia kelas XII. IPA.. Mereka mengaku cara berpartisipasi mereka sekarang berbeda dengan sebelum pengembangan. Mereka juga telah terlibat bukan hanya pada pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam perencanaan pendidikan di sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan mereka tidak hanya menghadiri rapat dan menunggu surat keputusan kepala sekolah saja, tetapi kini mereka harus mengisi surat pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil kesepakatan yang diputuskan bersama. Kemudian juga hasil keputusan dan

perencanaan tersebut dibuatkan dalam pernyataan tertulis dan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan bersurat oleh pihak sekolah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan para alumni. Dari semua alumni yang berhasil diwawancarai atas nama Saudara Roni, Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd, Toni S.Pd dan Ani, S.Pd menyatakan hal yang sama sebagaimana hasil wawancara dengan orang tua siswa lainnya. Tak hanya alumni, para tokoh agama seperti H. Kemal dan Bapak Neng serta tokoh masyarakat seperti Ust Waiz, S.Pd.I dan Ust. Al-Hakimi juga memberikan pengakuan yang sama seperti yang disampaikan oleh para orang tua siswa dan alumni seputar cara masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. sebagaimana hasil wawancara dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I yang menjelaskan :

Sekarang ini kita akan benar-benar mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Biar masyarakat tahu bagaimana yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak sekolah dalam mensukseskan pendidikan di sekolah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah banyak melibatkan masyarakat yang kita anggap berpotensi untuk dilibatkan, biar para anggota masyarakat ini ikut merasa bertanggung jawab terhadap sekolah. Karena sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga membutuhkan partisipasi dari masyarakat berupa ide-ide, masukan, kritikan dan saran untuk kemajuan sekolah kedepannya. Dan biasanya bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah dengan terlibat langsung dalam rapat dan ikut memutuskan dan merencanakan pendidikan berdasarkan suara terbanyak. Hasil keputusan dibuat tertulis dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui surat. Disamping itu anggota masyarakat yang hadir harus mengisi

lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari hasil keputusan dan perencanaan. Kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah biar tidak ada masyarakat yang protes kembali dari hasil keputusan dan perencanaan bersama yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan kedua tokoh masyarakat dan tokoh agama di atas, memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebelum tahap pengembangan adalah dengan menghadiri undangan rapat yang disampaikan kepala sekolah. Kemudian memutuskan dengan berdasarkan pada suara terbanyak dari masyarakat. Hasil kesepakatannya dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah biasanya. Sedangkan setelah pengembangan bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan terlibat langsung dalam rapat. Ikut memutuskan dan merencanakan pendidikan berdasarkan hasil keputusan dari suara terbanyak masyarakat. Hasil keputusan dibuat tertulis dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui surat. Disamping itu anggota masyarakat yang hadir harus mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari hasil keputusan dan perencanaan. Kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah.

Merasa perlu memperoleh informasi dari kepala dusun, peneliti juga melakukan pengukuran akhir dengan mewawancarai beberapa kepala dusun yang ada di Desa Labulia. Salah satunya adalah Kepala

Dusun Tandek atas nama Bapak Yar. Dia memberikan informasi yang sangat ringkas namun cukup jelas terkait dengan bentuk atau cara masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Berikut penjelasannya :

Setelah adanya tahap pengembangan tingkat partisipasi masyarakat menjadi meningkat dan lebih aktif. Terkait dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tentunya dengan menghadiri rapat sesuai undangan dari pihak sekolah. Dalam rapat itu kita bersama masyarakat memutuskan sebuah kesepakatan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Kemudian sesuai itu kami mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari kesepakatan yang ditetapkan terkait dengan sebuah keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan dijalankan. Kemudian kami menerima hasil tertulis dari hasil rapat, terutama kami sebagai kepala dusun diberikan itu untuk diinformasikan kepada masyarakat. Ada juga bentuk surat keputusan kepala sekolah dari hasil pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang telah disepakati.

Penjelasan Bapak Yar selaku Kepala Dusun Tandek dibenarkan dan disetujui oleh kepala dusun lainnya, yakni Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung, Bapak Idi selaku Kepala Dusun Labulia dan Bapak Lalu Budin selaku Kepala Dusun Tomber. Mereka mengakui bahwa sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bentuk keterlibatan mereka juga mengalami perubahan sebagaimana yang dialami oleh responden lainnya. Sehingga ini menunjukkan adanya perbedaan bentuk partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya tahap pengembangan.

Untuk memastikan dan meyakinkan peneliti akan hasil data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran akhir, peneliti mencoba

melakukan *cross check* dengan mengadakan wawancara bersama beberapa dewan guru di MA Hidayatul Muhsinin. Para dewan guru yang terdiri dari Bapak Lalu Artha, S.Pd, Bapak H. Denan, S.Pd.I, Bapak Hardi, S.Pd, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, Ibu Hamah, S.Pd.I dan Ibu, Icha, S.Pd membenarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, para alumni, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para kepala dusun terkait cara masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu guru tersebut yakni Ibu Icha, S.Pd menyatakan :

Setahu saya berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini setelah dilakukannya tahap pengembangan, bahwa cara masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah ketika mereka sudah diundang oleh pihak sekolah untuk terlibat, maka mereka akan hadir dalam rapat. Keputusan rapat dalam memutuskan sebuah aturan ataupun kebijakan serta perencanaan yang akan ditetapkan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Setelah itu para anggota yang hadir mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah diputuskan dan direncanakan. Kemudian dibuatkan hasil kesepakatan dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibagikan kembali kepada masyarakat dengan bersurat agar mereka mengetahui apa yang telah disepakati dan diputuskan maupun direncanakan bersama. Disamping itu juga kepala sekolah menetapkannya dalam sebuah surat keputusan kepala sekolah.

Meskipun data atau informasi yang diperoleh peneliti telah dirasa cukup, namun peneliti juga melakukan studi wawancara dengan komite sekolah guna menambah data atau informasi dan memastikan data atau informasi yang telah diperoleh di atas. Hasil wawanacara

dengan salah seorang komite sekolah atas nama Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite adalah sebagai berikut :

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah itu berupa kerjasama menurut saya. Karena dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini kami dan pihak sekolah mengupayakan agar masyarakat selalu terlibat dengan memberikan kritikan, masukan dan saran agar hasil keputusan dan perencanaan yang ditetapkan adalah hasil yang terbaik berdasarkan suara terbanyak masyarakat yang hadir dalam rapat. Selanjutnya kami meminta anggota masyarakat yang hadir untuk mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas kesepakatan yang telah ditetapkan baik dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan. Lalu kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah agar tidak ada protes lagi dari masyarakat. Dan yang terakhir hasil keputusan dan perencanaan kami buat dalam sebuah pernyataan tertulis yang kami bagikan kembali kepada masyarakat agar mereka tetap mengingat dan mengetahui hasil keputusan dan perencanaan yang telah mereka sepakati.

Apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite sekolah juga dijelaskan kembali oleh Ibu Lulu yang merupakan anggota komite sekolah. Dia membenarkan apa yang telah disampaikan oleh ketua komite tersebut. Yang pada intinya bentuk partisipasi masyarakat sebelum dikembangkan dengan setelah dikembangkan mengalami perbedaan. Selain itu, masyarakat juga sangat antusias untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah (1) mengikuti rapat atau pertemuan dengan pihak sekolah, (2) mengambil keputusan dan merencanakan pendidikan

berdasarkan suara terbanyak dari anggota masyarakat yang hadir dan terlibat, (3) mengisi surat pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban sesuai menetapkan keputusan dan perencanaan pendidikan, (4) diterbitkannya surat keputusan (SK) oleh kepala sekolah sebagai bukti memperkuat hasil pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang telah disepakati, dan (5) membuat pernyataan tertulis dari hasil keputusan dan perencanaan yang telah disepakati dan kemudian dibagikan kembali kepada masyarakat dengan bersurat oleh pihak sekolah.

4. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Pada hasil studi awal menunjukkan bahwa faktor yang menunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah (1) rasa memiliki dari masyarakat karena sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, (2) rasa tanggung jawab masyarakat terutama orang tua siswa terhadap sekolah yang telah mendidik anak-anak mereka, (3) rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat dengan selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan ditetapkan, (4) rasa ingin tahu masyarakat terhadap proses dan hasil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasinya di sekolah khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Faktor penunjang partisipasi masyarakat ini memang lebih dominan terlihat dalam proses pengambilan keputusan saja, karena dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, faktor penunjangnya belum nampak. Akan tetapi setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi dalam tahap pengembangan yang dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah, telah terjadi peningkatan dan perubahan terkait dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana pengakuan dari para responden atau anggota masyarakat yang telah peneliti kunjungi dan wawancarai menunjukkan adanya peningkatan dan perbandingan antara studi awal dengan studi akhir atau pengukuran akhir.

Berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa mereka telah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan sehingga telah nampak adanya faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan dan juga dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Elah selaku orang tua dari Nisa kelas X.C mengatakan :

Sebelumnya pada pertemuan pertama pentingnya saya hadir untuk berpartisipasi di sekolah adalah untuk mengetahui perkembangan dan informasi sekolah dan bagaimana anak saya selama bersekolah. Tapi jikalau sekarang menurut saya yang menjadi faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah kesadaran pribadi tentang pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, rasa memiliki terhadap sekolah, dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua siswa juga.

Dari pernyataan Ibu Elah terlihat bahwa setelah proses pengembangan dilakukan, ia mampu menyatakan bahwa faktor yang menunjang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan bukan hanya karena ingin mengetahui informasi dan perkembangan sekolah saja seperti hasil wawancara dalam studi awal. Akan tetapi juga karena merupakan kesadaran pribadi dari dirinya sendiri dan juga masyarakat serta rasa memiliki terhadap sekolah karena sekolah berada dilingkungan masyarakat Labulia dan ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, menurutnya juga keterlibatannya dalam berbagai kegiatan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan merupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Dari pernyataan Ibu Elah juga terlihat perkembangan pemahamannya terkait dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan antara sebelum dengan sesudah dilakukannya tahap pengembangan. Selain Ibu Elah orang tua lainnya yang juga terlihat perkembangan pemahamannya adalah Bapak Tamaf selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1, Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII. IPa, Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.A, Ibu Fatma selaku orang tua dari Lia kelas XII. IPA yang memiliki kesamaan pandangan dengan Ibu Elah terkait faktor penunjang partisipasi mereka sebagai orang tua dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Informasi lengkap juga peneliti peroleh dari Ibu Munah selaku orang tua dari Dayah kelas XI.IPS 2 yang pada studi awal menyatakan dirinya jarang hadir saat kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Namun setelah tahap pengembangan ia begitu antusias dan aktif untuk hadir dan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Menurut saya faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah karena kesadaran masyarakat itu sendiri, rasa memiliki, tanggung jawab, kewajiban kami sebagai orang tua, dan untuk mengetahui informasi sekolah bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan pada pertemuan sebelumnya (studi awal) saya tidak bisa menjelaskan banyak hal karena saya jarang terlibat meskipun diundang. Tapi setelah adanya sosialisasi kepala sekolah kemarin saya jadi tahu pentingnya berpartisipasi di sekolah. Makanya saya bisa memberikan jawaban seperti ini tentang faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Munah dalam hasil wawancaranya menegaskan dan memperlihatkan bahwa ia telah memahami pentingnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan lainnya di sekolah. Oleh karenanya ia dapat memberikan informasi yang lebih lengkap terkait masalah faktor yang menunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Penjelasan yang telah disampaikan Ibu Munah dibenarkan dan disetujui oleh Bapak Yani selaku orang tua dari Yuli kelas XI.IPA dan Ibu Hani selaku orang tua dari Topik kelas XII. IPA.

Untuk mendapatkan informasi atau data tambahan, peneliti juga melakukan wawancara dalam tahap pengukuran akhir dengan mewawancarai anggota masyarakat lainnya. Kali ini yang peneliti temui dan wawancarai selanjutnya adalah para alumni MA Hidayatul Muhsinin. Hasil wawancaranya dengan para alumni tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan orang tua siswa. Namun Salah satu alumni atas nama Saudara Masrah, S.Pd memberikan tambahan informasi atau data seputar faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sebagai berikut :

Jadi faktor yang menunjang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan selain yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya adalah karena dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sekarang ini, kegiatan dan prosesnya dimudahkan oleh sekolah sehingga pelaksanaan dari kesepakatan yang dicapai tidak rumit. Dan juga tingkat religuitas masyarakat yang tinggi karena sekolah kita berbentuk madrasah dan yang sangat mendukung adalah karena adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Penjelasan dari Saudara Masrah, S.Pd menambahkan jumlah faktor penunjang yang telah disebutkan oleh rekan-rekan alumni lainnya. Oleh sebab itu penjelasan Saudara Masrah merupakan pelengkap dari apa yang telah disampaikan alumni lainnya. Bagi para alumni ini atusiasme masyarakat yang cukup tinggi, rasa memiliki sekolah, kesadaran masyarakat, tingkat religuitas masyarakat yang tinggi serta kemauan yang tinggi dari sekolah untuk melibatkan masyarakat merupakan faktor yang

menunjang partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah.

Selain mewawancarai para alumni, peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Labulia. Hasil wawancaranya juga tidak jauh berbeda dengan para orang tua dan para alumni. Akan tetapi informasi yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat atas nama Bapak H. Kemal sedikit berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang tokoh agama Desa Labulia sebagai berikut :

Sepengetahuan saya yang menjadi faktor penunjang bagi masyarakat untuk mau terlibat ataupun turut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah untuk mengetahui hasil keputusan yang disepakati, untuk mengetahui program perencanaan yang ditetapkan sekolah, dan adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah. Saya rasa itu yang menunjang partisipasi masyarakat disamping faktor-faktor lainnya.

Melengkapi jawaban dari H. Kemal di atas, Ust Al-Hakimi, S.Pd.I yang juga selaku tokoh agama Desa Labulia yang bertempat tinggal di Dusun Tandek menyampaikan pendapatnya terkait dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah sebagai berikut :

Jadi menurut saya bahwa faktor yang menunjang masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah kita adalah karena mereka ingin melihat sekolah atau madrasah kita maju, kemudian mereka juga paham akan pentingnya pendidikan dan partisipasi dalam pendidikan sebagaimana yang telah disosialisasi kemarin oleh peneliti dengan kepala sekolah, dan kegiatan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi itu menurut saya faktor penunjangnya. Dan alhamdulillah semua faktor penunjang ini dapat nampak terlihat seiring adanya tahap pengembangan yang telah membuat sekolah berupaya untuk

selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Labulia ini memang bervariasi tapi semuanya memperlihatkan bahwa mereka telah memahami bagaimana seharusnya masyarakat berpartisipasi di sekolah. Terutama dalam hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya, mereka semua dapat memberikan jawaban atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini terkait dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Meskipun telah banyak data atau informasi yang telah diperoleh peneliti, namun bukan berarti kegiatan pengukuran akhir harus selesai. Pencarian informasi terus dilanjutkan agar semua anggota masyarakat yang menjadi responden dapat ditemui dan memberikan informasinya masing-masing. Responden selanjutnya yang dituju adalah para kepala dusun yang ada di Desa Labulia. Para kepala dusun ini merupakan pemimpin-pemimpin masyarakat yang ditugaskan oleh kepala desa untuk mewakili dan membantunya mengurus masyarakat di setiap dusun. Oleh karenanya para kepala dusun ini sering diikutsertakan oleh pihak sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan agar nantinya dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang telah diputuskan dan direncanakan bersama di sekolah.

Terkait dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, Kepala Dusun Olor Agung atas nama Bapak Zuki menyampaikan pendapatnya dalam hasil wawancaranya berikut ini :

Menurut saya ada beberapa faktor yang menunjang atau membuat masyarakat mau terlibat di sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah karena jarak tempuh masyarakat yang dekat dengan sekolah. Kedua adalah rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan masyarakat Desa Labulia yang masih sangat erat. Dan yang ketiga adalah kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tidak memberatkan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan pembiayaan. Itu menurut saya faktor yang membuat masyarakat mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Menambah penjelasan Bapak Zuki selaku Kepala Dusun Olor Agung, Bapak Yar selaku Kepala Dusun Tandek juga mengatakan bahwa selain ketiga faktor yang telah dijelaskan di atas, faktor lain yang menyebabkan masyarakat mudah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena letak sekolah yang strategis dan demi masa depan bersama masyarakat Desa Labulia nantinya. Pendapat kedua kepala dusun di atas, dibenarkan dan disetujui oleh kepala dusun lainnya, diantaranya adalah Kepala Dusun Labulia atas nama Bapak Idi, dan Kepala Dusun Tomber atas nama Bapak Lalu Budin. Mereka mengatakan hal yang sama bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara di atas.

Selanjutnya, kegiatan wawancara pada tahap pengukuran akhir peneliti lakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai para guru MA Hidayatul Muhsinin. Para guru merupakan bagian internal sekolah yang tentunya selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Oleh karenanya untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan partisipasi masyarakat dan faktor yang menunjang masyarakat untuk berpartisipasi setelah dilakukannya tahap pengembangan, maka perlu dilakukan pencarian informasi dengan mewawancarai beberapa orang guru yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Guru yang pertama kali dapat peneliti wawancarai adalah seorang guru biologi yaitu Ibu Icha, S.Pd yang mengatakan bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah :

Berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini setiap kali masyarakat hadir untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, masyarakat terlihat aktif dan persentase kehadiran mereka meningkat setelah adanya sosialisasi terkait masalah partisipasi di sekolah kemaren. Dan yang membuat masyarakat itu mau untuk terlibat atau faktor yang menunjang keterlibatan mereka adalah karena kepedulian masyarakat untuk mendukung sekolah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pendidikan, dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Selain itu juga, mereka akan mendapatkan info secara langsung dari hasil keputusan dan perencanaan yang dihasilkan dengan ikut terlibat langsung di sekolah dalam kegiatan tersebut.

Menurut penglihatan dan pengamatan Ibu Icha, S.Pd selama ini setelah tahap pengembangan, bahwa yang menjadi faktor penunjang

partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena adanya kepedulian dari masyarakat terhadap sekolah dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Selain itu, karena masyarakat ingin mengetahui secara langsung berkenaan dengan informasi hasil keputusan yang disepakati dan hasil perencanaan yang disetujui bersama antara pihak sekolah dengan masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara kedua dengan guru bahasa Inggris dan bahasa asing atas nama Bapak Hardi, S.Pd yang juga menjabat sebagai bendahara MA Hidayatul Muhsinin menyatakan bahwa faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah :

Jadi menurut saya faktor penunjang masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu karena yang pertama adalah adanya informasi atau undangan dari sekolah untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Kemudian yang kedua adalah adanya rasa atau sikap menghargai dari masyarakat terhadap sekolah sehingga mereka mau menghadiri undangan sekolah untuk berpartisipasi. Yang ketiga adalah karena kepedulian masyarakat terhadap sekolah. dan yang terakhir atau keempat adalah karena melihat tokoh pendiri yayasan yang disegani oleh masyarakat, sehingga mereka merasa tidak enak untuk tidak melibatkan diri.

Dari hasil wawancara di atas, ada empat faktor yang penunjang partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Hardi S.Pd dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Penjelasan yang disampaikan

oleh Bapak Hardi, S.Pd juga dibenarkan oleh guru lainnya, diantaranya adalah Bapak Lalu Artha, S.Pd selaku guru seni budaya, Ibu Lale Aini, S.Pd.I selaku guru SKI, dan Bapak H. Denan selaku guru bahasa arab.

Pencarian data atau informasi terakhir dalam tahap pengukuran akhir adalah dengan melakukan studi wawancara terhadap beberapa orang komite sekolah. Komite sekolah juga merupakan wakil-wakil masyarakat dan orang tua siswa di sekolah. Selain itu, komite sekolah juga sebagai penyambung komunikasi antara pihak sekolah dengan masyarakat. Sehingga mereka selalu dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan perencanaan pendidikan.

Dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, tentunya terdapat faktor yang menunjang dan menghambat masyarakat untuk berpartisipasi. Menurut ketua komite MA Hidayatul Muhsinin yakni Bapak Awir, S.Pd, mengatakan bahwa faktor yang menunjang masyarakat untuk berpartisipasi adalah

Dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan penelitian ini, sejauh ini setelah adanya tahap pengembangan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan semakin meningkat. Kerjasama antara masyarakat dengan sekolah juga semakin aktif. Nah... terkait faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan yang lain, menurut saya yang membuat mereka mau berpartisipasi adalah karena keberadaan lembaga atau sekolah yang dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terkendala dengan masalah transportasi. Kemudian kami dengan sekolah juga selalu mengupayakan agar masyarakat diajak untuk berpartisipasi di sekolah, sehingga masyarakat mau untuk hadir

karena merasa dibutuhkan oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah hasil keputusan dan perencanaan yang disepakati tidak memberatkan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan masalah keuangan.

Penjelasan dari Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite dilengkapi oleh penjelasan Ibu Lulu selaku anggota komite dengan menambahkan bahwa selain ketiga faktor yang telah disebutkan di atas, rasa memiliki dan kesadaran masyarakat untuk mau terlibat merupakan faktor utama penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Apa yang telah disampaikan oleh kedua anggota komite tersebut memperlihatkan keaktifan mereka dalam turut membantu sekolah untuk mengajak masyarakat mau berpartisipasi di sekolah. Sebagaimana pengakuan mereka bahwa tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat yang berpartisipasi semakin meningkat setelah dilakukannya tahap pengembangan.

Dari hasil wawancara dan pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah (1) kesadaran pribadi masyarakat untuk berpartisipasi, (2) rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah, (3) tanggung jawab bersama masyarakat terhadap sekolah, (4) rasa ingin tahu secara langsung masyarakat terhadap hasil keputusan dan perencanaan yang akan ditetapkan, (5) keberadaan lembaga atau sekolah yang berada ditengah-tengah masyarakat, (6) kepedulian masyarakat terhadap sekolah, (7) kewajiban masyarakat untuk membantu sekolah, (8) antusiasme masyarakat yang tinggi untuk

berpartisipasi, (9) tingkat pemahaman masyarakat yang cukup baik terhadap partisipasi, (10) hasrat dan keinginan masyarakat untuk membuat sekolah menjadi lebih maju, (11) tingginya rasa kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Desa Labulia sehingga mudah untuk diajak berpartisipasi, (12) tingkat religuitas masyarakat yang tinggi sehingga memudahkannya untuk memahami pentingnya berpartisipasi terhadap sekolah yang memang berbentuk madrasah, (13) tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah yang cukup tinggi, (14) jarak tempuh masyarakat menuju sekolah yang tidak jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi, (15) proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang tidak menyulitkan masyarakat dan hasil keputusan dan perencanaan yang tidak memberatkan masyarakat, (16) rasa terimakasih dari masyarakat dengan menghargai sekolah yang telah mendidik putra-putri Desa Labulia, (17) rasa segan dari masyarakat terhadap tokoh pendiri yayasan yang disegani oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat harus terlibat jika diajak oleh sekolah, (18) adanya upaya sekolah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi, (19) adanya kepedulian dari pihak sekolah terhadap masyarakat sehingga mengajak masyarakat untuk selalu terlibat, dan (20) adanya rasa saling membutuhkan antara sekolah dengan masyarakat. Hal inilah yang menjadi faktor yang memicu masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

5. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Disamping faktor penunjang, tentunya juga terdapat faktor penghambat yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Jika pada tahap studi awal diketahui faktor penghambat partisipasi masyarakat adalah karena ada kesibukan lain, alasan saskit, dan tidak mendapatkan undangan dari pihak sekolah. Namun dalam tahap pengukuran akhir ini banyak anggota masyarakat menyatakan hal yang sama bahwa faktor penghambat partisipasi mereka meskipun telah dilakukan tahap pengembangan masih tetap sama. Meskipun demikian, ada juga sebagian masyarakat yang menambahkan faktor penghambat partisipasi masyarakat lainnya setelah dilakukan proses pengembangan.

Sebagaimana salah seorang wali murid atas nama Bapak Yani yang merupakan wali dari Yuli kelas XI.IPA menyatakan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan baik sebelum maupun sesudah dikembangkan masih tetap sama seperti yang pernah dijelaskannya dalam hasil wawancara pada tahap studi awal. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

Saya rasa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan masih tetap sama jawabannya seperti penjelasan saya yang lalu pada pertemuan kita yang pertama (tahap studi awal), bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena ada kegiatan lain atau kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan yang bertepatan dengan undangan di sekolah sehingga saya tidak bisa hadir. Dan

juga karena tidak diundang oleh pihak sekolah dan karena sedang sakit yang membuat saya tidak hadir.

Penjelasan Bapak Yani ini dibenarkan juga oleh orang tua siswa lainnya, diantaranya adalah Ibu Elah selaku orang tua siswa dengan nama Nisa kelas X.C, Bapak Siba selaku orang tua siswa dari Aris kelas XII.IPS, Ibu Fatma selaku orang tua dari Lia kelas XII.IPA dan Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII.IPA. Meskipun demikian ada juga orang tua siswa yang memberikan tambahan faktor penghambat partisipasi masyarakat selain yang pernah diungkapkannya pada tahap studi awal lalu. Salah satunya adalah pengakuan dari Ibu Munah selaku orang tua dari Dayah kelas XI.IPS 2 yang menyatakan :

Menurut saya yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah adalah karena adanya kesibukan lain pada saat diundang, karena alasan sakit, karena lupa, karena tidak diundang oleh pihak sekolah, dan mungkin karena undangan tidak sampai.

Pengakuan Ibu Munah pada tahap pengukuran akhir berbeda dengan pengakuannya pada saat studi awal. Ketika studi awal ia menyatakan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat hanya karena ada kesibukan lain dan tidak diundang oleh pihak sekolah. Akan tetapi pada tahap pengukuran akhir ia menambahkan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat juga adalah karena sakit, lupa dan undangan tidak sampai. Pengakuan Ibu Munah ini dibenarkan juga oleh Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.A, Bapak Tamaf selaku

orang tua dari Ida kelas XI.IPS 1, dan Ibu Hani selaku orang tua dari Topik kelas XII.IPA.

Hasil wawancara dengan beberapa alumni juga menyatakan hal yang sama bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat baik sebelum maupun setelah dilakukannya tahap pengembangan masih tetap sama. Sebagaimana hasil wawancara dengan alumni atas nama Awan, S.Pd, Ani, S.Pd dan Roni. Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat adalah karena adanya kesibukan lain, undangan tidak sampai dan arena alasan sakit.

Sedangkan alumni atas nama Masrah, S.Pd.I memberikan informasi yang berbeda dari ketiga rekannya di atas. Ia menyatakan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat adalah berikut ini :

Baik, jadi menurut pemahaman saya sekarang yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, karena sekarang masyarakat juga sudah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan. Tidak seperti dulu sebelum dilakukan pengembangan. Jadi faktor penghambatnya adalah masih kurang pemahannya masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pendidikan, dan juga adanya doktrin bahwa tidak berhasilnya sekolah karena siswanya banyak menganggur setelah lulus. Jadi itu yang membuat masyarakat ragu bahkan tidak mau untuk berpartisipasi.

Penjelasan dalam hasil wawancara dengan alumni atas nama Masrah, S.Pd.I sangat berbeda dengan rekan alumninya yang lain. Penjelasan yang diberikan memberikan tambahan informasi bagi peneliti dalam menemukan faktor lain yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi di sekolah dan juga adanya doktrin bahwa sekolah tidak berhasil melaksanakan pendidikan karena siswanya menjadi pengangguran setelah lulus sekolah menjadi faktor pemicu dan penghambat partisipasi masyarakat.

Melihat adanya informasi yang berbeda dari alumni atas nama Masrah, S.Pd.I, maka peneliti tergerak untuk segera meneruskan pengukuran akhir karena ingin mengetahui apakah akan mendapatkan informasi yang sama atau berbeda saat melakukan studi wawancara selanjutnya dengan para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena yang menjadi sasaran penelitian selanjutnya adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tokoh masyarakat adalah orang yang terlebih dahulu peneliti wawancarai. Dalam hasil wawancaranya dengan tokoh masyarakat atas nama Ust. Wais, S.Pd.I ternyata diperoleh informasi yang sama seperti penjelasan para informan-informan sebelumnya.

Berbeda halnya dengan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama Desa Labulia, yakni Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I yang juga menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum MA Hidayatul Muhsinin Labulia menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut saya faktor penghambat yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, disamping juga karena ada kesibukan lain saat diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi. Kemudian juga

karena undangan tidak sampai karena biasanya untuk memudahkan pihak sekolah, undangan dititipkan kepada siswa. Dan undangan tersebut lupa disampaikan sehingga masyarakat tidak tahu dirinya diundang. Jadi hal-hal inilah yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah.

Informasi berbeda yang disampaikan oleh Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I membuat peneliti semakin tertarik untuk mencari dan menambah data atau informasi dari responden lainnya. Menurutnya faktor ekonomi yang bervariasi, adanya kesibukan lain masyarakat saat diundang, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan perihal undangan yang tidak sampai merupakan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Pencarian data atau informasi selanjutnya adalah dengan melakukan studi wawancara dengan beberapa orang kepala dusun yang ada di Desa Labulia terkait dengan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Kepala Dusun yang pertama kali dapat ditemui adalah Kepala Dusun Olor Agung atas nama Bapak Zuki. Berikut hasil wawancaranya :

Sebenarnya selama ini terutama setelah dilakukannya sosialisasi oleh peneliti bersama kepala sekolah, masyarakat jarang tidak hadir untuk berpartisipasi atau terlibat dalam berbagai kegiatan kecuali karena memang kepepet dan benar-benar tidak bisa hadir karena acara lain yang lebih penting dan mendesak sekali. Saya sendiripun tidak pernah tidak hadir selama saya diundang. Dan selama ini seingat saya hanya satu kali saja saya tidak sempat hadir karena ada permasalahan di desa sehingga semua kepala dusun disuruh hadir ke kantor desa. Kalaupun masyarakat tidak bisa hadir biasanya mereka diwakili oleh sanak saudara dan keluarga. Nah.... kalau alasan lain yang menghambat masyarakat

untuk berpartisipasi mungkin karena sakit atau lupa, karena itu hal yang lumrah.

Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Olor Agung disetujui dan dibenarkan oleh Kepala dusun lainnya yang diantaranya adalah Kepala Dusun Tandek atas nama Bapak Yar, Kepala Dusun Labulia atas nama Bapak Idi dan Kepala Dusun Tomber atas nama Bapak Lalu Budin. Kesemua kepala dusun ini mengakui tidak pernah tidak hadir karena mereka merupakan pimpinan masyarakat di setiap dusun yang nantinya akan bertanggung jawab menyampaikan informasi yang diperoleh di sekolah kepada masyarakat. Sehingga mereka selalu menyempatkan diri untuk hadir, kecuali jika ada kegiatan atau acara mendadak dan mendesak yang membuat mereka tidak sempat hadir. Dan masyarakat juga menurut para kadus ini jarang sekali mereka tidak hadir setelah adanya sosialisasi oleh peneliti bersama kepala sekolah. Malah mereka semakin antusias dan bersemangat untuk selalu terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Kecuali jika mereka tidak berkesempatan hadir pun diwakili oleh sanak saudara dan keluarga mereka.

Dalam hasil wawancara dengan para guru pun diperoleh informasi yang tidak jauh berbeda dengan informasi yang telah diberikan oleh para orang tua siswa, para alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun. Meskipun terdapat juga beberapa faktor tambahan sebagai faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana penjelasan Bapak Lalu Artha, S.Pd selaku guru seni budaya berikut ini :

Sebenarnya yang membuat masyarakat terhalang untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu adalah karena mereka sakit, lupa, undangan tidak sampai atau karena lupa diundang oleh pihak sekolah, ada kesibukan lain yang lebih penting, dan jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan, karena Desa Labulia ini cukup luas sampai ke pelosok-pelosok terdalam.

Informasi tambahan yang peneliti peroleh dari Bapak Lalu Artha S.Pd sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan selain faktor-faktor yang telah disampaikan sebelumnya adalah karena jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaran karena wilayah Desa labulia sangat luas sampai ke pelosok-pelosok terdalam desa. Hal ini tentu membuat masyarakat terkadang malas untuk berpartisipasi. Apa yang disampaikan oleh Bapak Lalu Budirtha juga disampaikan oleh guru-guru lainnya dalam hasil wawancaranya, yakni diantaranya adalah Ibu Lale Aini, S.Pd.I, Ibu Hamah, S.Pd.I, Ibu Herma, S.Pd.I, Bapak H. Denan, S.Pd.I dan Bapak Hardi, S.Pd.

Informasi terakhir peneliti peroleh dari ketua komite MA Hidayatul Muhsinin, yakni Bapak Awir, S.Pd. Informasi yang disampaikannya sedikit berbeda dari informasi sebelum-sebelumnya.

Berikut penjelasannya :

Kalau saya ditanya seputar faktor yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ataupun kegiatan lainnya, yang dapat saya jelaskan adalah masyarakat tidak bisa berpartisipasi karena

terhambat oleh adanya kesibukan atau kegiatan lain saat diajak berpartisipasi. Selain itu masyarakat tidak mau hadir jika melihat kondisi sekolah lain yang lebih maju dari segi sarana dan prasarana seperti sekolah negeri yang memiliki fasilitas yang lengkap, karena sekolah kita tidak mementingkan sarana prasarana tetapi kualitas dan output yang dihasilkan. Ini yang membuat masyarakat berfikir bahwa sekolah kita kurang lengkap. Dan terakhir karena adanya doktrin-doktrin bahwa sekolah kita tidak akan bisa maju, sehingga masyarakat ragu untuk mau berpartisipasi jadinya. Jadi itu yang dapat saya katakan sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat tersebut. Apalagi kami bersama pihak sekolah selalu berupaya mengajak masyarakat untuk terlibat terutama dalam hal perencanaan pendidikan yang sebelumnya jarang melibatkan masyarakat secara langsung, agar mereka tau situasi dan kondisi sekolah yang meskipun tidak mewah tetapi berkualitas dan menghasilkan output yang bisa dibanggakan.

Menurut Bapak Awir, S.Pd selaku ketua komite sekolah, faktor penting yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan lainnya di sekolah adalah karena masyarakat yang merasa bahwa sekolah tidak mampu maju seperti sekolah lain yang memiliki fasilitas yang lengkap, padahal belum tentu berkualitas meskipun memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian, adanya doktrin bahwa sekolah tidak mampu berkembang dan maju sehingga masyarakat ragu untuk berpartisipasi. Disamping juga karena adanya kesibukan-kesibukan lain yang membuat masyarakat tidak bisa berpartisipasi.

Dari semua hasil wawancara dalam tahap pengukuran akhir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah (1) adanya kesibukan lain yang bertepatan dengan kegiatan di

sekolah, (2) karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir berpartisipasi, (3) karena faktor lupa, (4) alasan karena tidak diundang atau tidak diinformasikan oleh sekolah, (5) undangan yang dikirim pihak sekolah tidak sampai kepada yang bersangkutan, (6) jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tinggal di dusun pedalam dan tidak memiliki kendaraan karena wilayah Desa Labulia cukup luas, (7) tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi juga membuat masyarakat terhambat untuk berpartisipasi, (8) masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan partisipasi dalam pendidikan, (9) karena masyarakat melihat sekolah lain terutama sekolah negeri yang lebih maju dibandingkan sekolah MA Hidayatul Muhsinin membuat masyarakat malas untuk berpartisipasi, (10) adanya doktrin bahwa sekolah tidak bisa maju seperti sekolah negeri dan sekolah lainnya yang memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai sehingga masyarakat merasa ragu untuk berpartisipasi, dan (11) adanya doktrin bahwa sekolah tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan karena lulusannya banyak yang menganggur dan tidak melanjutkan kuliah. Kesemua faktor yang telah disebutkan di atas, merupakan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

D. Perbandingan Hasil Studi Awal dengan Pengukuran Akhir

Pada sub bab ini peneliti menampilkan dan memaparkan perbandingan antara potret partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan pada tahap studi awal terdahulu

dengan hasil pengukuran akhir setelah dilakukannya pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Pemaparan perbandingan ini terdiri dari lima bagian, yaitu (1) pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (2) anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (3) bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, (4) faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dan (5) faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

1. Perbandingan Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Ada beberapa hal yang menjadi subjek pengamatan dan informan dalam melihat dan mempertajam hasil perbandingan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan antara hasil studi awal dengan hasil pengembangan dalam pengukuran akhir. Pembahasan ini dipertajam lagi menjadi perbandingan dalam tujuh bagian kecil, yakni : (1) pemahaman orang tua siswa, (2) pemahaman alumni, (3) pemahaman tokoh masyarakat, (4) pemahaman tokoh agama, (5) pemahaman kepala dusun (perangkat desa), (6) pemahaman guru, dan (7) pemahaman komite sekolah.

a. Pemahaman Orang Tua Siswa

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang telah dilakukan peneliti dengan para orang tua siswa ditemukan bahwa orang tua siswa di MA Hidayatul Muhsinin Labulia pada awalnya jarang sekali mendengar bahkan tidak pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Terutama partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Namun ketika para orang tua siswa ini ditanya seputar keterlibatannya untuk membantu sekolah, mereka bisa memahaminya. Akan tetapi pemahaman mereka masih sangat minim, karena yang mereka tahu keterlibatan mereka hanya dalam menghadiri rapat dan pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah dan membayar sejumlah iuran komite dan iuran lainnya yang harus dibayar sesuai ketentuan sekolah berdasarkan keputusan bersama dengan masyarakat seperti pembayaran iuran semester, biaya ujian dan sumbangan pembangunan.

Banyak masyarakat yang masih belum memahami apa dan bagaimana berpartisipasi dalam membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Meskipun demikian, ada juga sebagian orang tua siswa yang mengaku sering mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan dan sedikit memahaminya. Sehingga mereka dapat menyatakan bahwa

mereka sering dilibatkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. Terkait dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan, bagi orang siswa baik yang telah memahami maupun belum memahami hal tersebut mengaku sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan terkait besarnya biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, penentuan awiq-qwiq (tata tertib) sekolah di masyarakat, penetapan besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, dan permohonan izin pemondokan bagi siswa kelas XII menjelang ujian kepada masyarakat setempat.

Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, para orang tua siswa mengaku tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Mereka hanya diberikan informasi oleh pihak sekolah dari hasil perencanaan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh sekolah. Sehingga para orang tua siswa ini masih belum bisa memahami tentang apa dan bagaimana partisipasi dalam perencanaan pendidikan. Namun setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah dengan mengadakan sosialisasi dan pembelajaran tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, data dan informasi yang diperoleh dalam tahap pengukuran akhir menunjukkan pemahaman orang tua siswa menjadi jauh lebih baik. Orang tua siswa yang menjadi informan

tidak ada lagi yang masih belum memahami apa dan bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Mereka telah memahami dan merasakan bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan terutama dalam perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah mereka rasakan.

Adapun penyajian hasil perbandingan pemahaman orang tua siswa tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Perbandingan Pemahaman Orang Tua Siswa Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman orang tua siswa tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian orang tua siswa belum pernah bahkan tidak pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Para orang tua memahami partisipasi hanya ikut terlibat dalam berbagai rapat, pertemuan dan kegiatan yang diadakan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua orang tua siswa yang menjadi informan tidak ada lagi yang tidak pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Para orang tua siswa tidak lagi hanya memahami partisipasi dengan ikut terlibat dalam berbagai rapat, pertemuan dan kegiatan yang diadakan sekolah, serta hanya dalam bentuk

	serta partisipasi dalam bentuk membayar iuran semester, biaya ujian, dan sumbangan pembangunan saja	membayar iuran semester, biaya ujian, dan sumbangan pembangunan saja
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada juga sebagian orang tua siswa yang sering mendengar dan telah memahami partisipasi dalam pendidikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua orang tua siswa yang menjadi informan telah memahami apa dan bagaimana partisipasi dalam pendidikan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan bagi orang tua siswa yang memahaminya merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memutuskan sebuah ketetapan sekolah, sedangkan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat untuk membantu menyukseskan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua siswa memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan pelibatan masyarakat dalam ikut memutuskan kebijakan yang akan ditetapkan, sedangkan perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam membantu sekolah merencanakan pembelajaran dan program kerja sekolah kedepannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi orang tua siswa baik yang belum maupun telah memahami partisipasi, mereka mengaku hanya 	<ul style="list-style-type: none"> • Para orang tua mengakui telah banyak dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan seperti pengambilan keputusan terkait

	<p>terlibat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saja</p> <ul style="list-style-type: none"> • contoh pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua seperti pengambilan keputusan terkait besarnya biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, penetapan awiq-awiq (tata tertib) sekolah di masyarakat, penetapan besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, dan permohonan ijin pemonudukan bagi siswa kelas XII menjelang ujian kepada masyarakat setempat 	<p>besarnya biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, keputusan penerimaan BSM bagi siswa, penetapan awiq-qwiq (tata tertib) sekolah di masyarakat, penetapan besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, permohonan ijin pemonudukan bagi siswa kelas XII menjelang ujian kepada masyarakat setempat, dan pengambilan keputusan terkait dengan acara pembagian raport siswa dan acara lepas pisah sekaligus acara wisuda kelas XII</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan dalam perencanaan pendidikan para orang tua mengaku tidak pernah dilibatkan dan hanya diberikan informasi dari hasil perencanaan yang telah ditetapkan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Selain dalam kegiatan pengambilan keputusan, para orang tua juga mengaku telah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah melibatkan orang tua siswa • Kegiatan perencanaan pendidikan yang pernah melibatkan masyarakat seperti dalam perencanaan kurikulum, perencanaan sarana prasarana, perencanaan bidang kesiswaa,

		perencanaan program kerja sekolah, perencanaan pembangunan, perencanaan kegiatan ujian, kegiatan semester, dan perencanaan kegiatan lepas pisah dan wisuda siswa kelas XII.
--	--	---

b. Pemahaman Alumni

Dari hasil studi awal terlihat bahwa ada beberapa alumni yang memang belum memahami istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Namun ada juga yang mengaku memahami apa dan bagaimana partisipasi dalam pendidikan meskipun belum sepenuhnya. Bagi alumni yang telah memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan, mereka menyatakan bahwa itu merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikutserta memutuskan berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan sekolah. Dan perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi membantu merancang program sekolah kedepannya. Dari beberapa alumni yang berhasil peneliti temui dan wawancarai pada tahap studi awal, terlihat bahwa mereka ada yang menyatakan diri tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Disamping ada juga yang menyatakan bahwa dirinya sering dilibatkan, tetapi hanya dalam kegiatan

pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum pernah dilibatkan karena bagi mereka itu merupakan urusan internal sekolah.

Setelah adanya tahap pengembangan, pemahaman alumni terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan lainnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Para alumni telah memahami apa dan bagaimana seharusnya berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Mereka juga bangga dan merasa dibutuhkan oleh sekolah karena pihak sekolah mengajak mereka dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, sehingga mereka sangat siap untuk terlibat atau berpartisipasi.

Secara lebih lengkap, hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.2
Perbandingan Pemahaman Alumni Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman alumni tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan	<ul style="list-style-type: none"> •Sebagian alumni ada yang belum memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan •Disamping ada juga 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemahaman para alumni jauh lebih baik setelah dikembangkan karena mereka telah memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dengan baik

perencanaan pendidikan	alumni yang sudah memahami	
	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan alumni dalam memutuskan aturan ataupun kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. •Sedangkan perencanaan pendidikan adalah keikutsertaan untuk membantu sekolah merancang dan merencanakan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan dalam membantu sekolah untuk turut serta memutuskan berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan sekolah •Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan alumni dalam membantu sekolah untuk merancang dan menyusun berbagai program perencanaan di sekolah sebagai bentuk terimakasih kepada sekolah yang telah mendidiknya
	<ul style="list-style-type: none"> •Para alumni mengaku keterlibatannya untuk berpartisipasi masih hanya dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka mengaku belum pernah dilibatkan secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> •Para alumni juga mengakui dan merasa bangga karena setelah pengembangan mereka telah banyak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi alumni dalam pengambilan keputusan sama seperti keterlibatan para rang tua siswa di atas 	<ul style="list-style-type: none"> •Partisipasi alumni dalam pengambilan keputusan sama seperti keterlibatan para rang tua siswa di atas •Partisipasi alumni dalam kegiatan perencanaan pendidikan sama seperti partisipasi orang tua siswa, tetapi dalam

		perencanaan kurikulum yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, alumni lebih ditekankan untuk selalu terlibat seperti dalam perencanaan kegiatan pramuka, lintas alam, tahfiz al-qur'an, pengajian, dan kegiatan lainnya.
--	--	---

c. Pemahaman Tokoh Masyarakat

Dari hasil studi awal dapat dijelaskan bahwa tokoh masyarakat sering mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Menurut para tokoh masyarakat bahwa partisipasi dalam pendidikan itu adalah bagaimana masyarakat mau membantu sekolah dengan menyarankan agar anaknya bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Selain itu memberi bantuan kepada sekolah baik berupa materil maupun non materil.

Namun partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat untuk membantu sekolah mengambil sebuah keputusan yang akan ditetapkan dan ikut membantu merencanakan perencanaan pendidikan. Akan tetapi keterlibatan tokoh masyarakat juga hanya dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum pernah dilibatkan. Setelah adanya tahap pengembangan pemahaman tokoh masyarakat menjadi

lebih baik dan telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan perbandingan pemahaman tokoh masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel. 4.3
Perbandingan Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	TAHAP STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman tokoh masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sering mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan, namun belum memahami sepenuhnya • Partisipasi dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat mau membantu sekolah untuk menyekolahkan anak mereka di MA Hidayatul Muhsinin dan memberikan bantuan lain baik berbentuk materil maupun non materil, tenaga dan pikiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memahami sepenuhnya apa dan bagaimana partisipasi dalam pendidikan • Partisipasi dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat mau membantu sekolah dalam berbagai bidang kegiatan sekolah dan meberikan bantuan lain baik berbentuk materil maupun non materil, tenaga dan pikiran. Dan bagaimana sekolah mau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana sekolah melibatkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan menurut pemahaman tokoh masyarakat adalah mengajak masyarakat untuk bermusyawarah menentukan semua

		permasalahan di sekolah sehingga masyarakat dapat memberikan kritikan, masukan dan saran agar mencapai hasil keputusan yang dirasa palaing tepat
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah bagaimana smasyarakat membantu sekolah untuk merencanakan program sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam membatu merancang program sekolah dan segala macam bentuk perencanaan di sekolah serta membatu untuk mengawasi dan mengontrol jalannya perencanaan yang telah disepakati.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sering dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan saja seperti kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua siswa dan alumni di atas, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak lagi hanya dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan • Contoh keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang pernah melibatkan tokoh masyarakat adalah sama seperti yang melibatkan orang tua siswa dan alumni di atas

d. Pemahaman Tokoh Agama

Dari hasil studi awal, terlihat bahwa tokoh agama memang sudah memahami istilah partisipasi dalam pendidikan, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Menurut tokoh agama partisipasi dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat mau memberikan dukungan kepada sekolah dan mebatu sekolah baik berupa dana, tenaga maupun pikiran demi kemajuan sekolah.

Menurt tokoh agama partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut memutuskan sebuah ketetapan yang akan diberlakukan sekolah seperti penetapan besarnya biaya semester, biaya ujian dan biaya sumbangan pembangunan maupun penetapan lainnya. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan di sekolah. Akan tetapi sama halnya dengan anggota masyarakat lainnya bahwa tokoh agama mengakui bahwa masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan sedangkan dalam kegiatan pengambilan keputusan memang selalu dilibatkan.

Setelah proses pengembangan berlangsung, tokoh agama menjadi lebih memahami apa dan bagaaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tingkat keefektifan dan kehadiran masyarakat juga semakin meningkat.

Keterlibatan masyarakat bukan hanya pada kegiatan pengambilan keputusan saja, akan tetapi juga sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan.

Selengkapnya, hasil perbandingan pemahaman tokoh agama dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 4.4
Perbandingan Pemahaman Tokoh Agama Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman tokoh agama tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Sering mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan, dan sudah bisa memahami • Partisipasi dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat mau membantu dan mendukung sekolah untuk lebih maju dan memberikan bantuan lain baik berbentuk materi, tenaga, maupun pikiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memahami sepenuhnya apa dan bagaimana partisipasi dalam pendidikan • Partisipasi dalam pendidikan adalah bagaimana masyarakat mau membantu sekolah dalam berbagai bidang kegiatan sekolah dan memberikan bantuan lain baik berbentuk materi maupun non materi, tenaga dan pikiran. Dan bagaimana sekolah mau melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana sekolah melibatkan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan agar hasil keputusan lebih tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam pengambilan keputusan menurut pemahaman tokoh agama adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan,

	karena adanya dukungan masyarakat	baik berkenaan dengan pembelajaran, kegiatan sekolah, program kerja sekolah, pembangunan, dan bidang perencanaan pendidikan
	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah bagaimana masyarakat membantu sekolah untuk menyukseskan program sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan masyarakat dalam membantu merencanakan perencanaan sekolah baik dalam bidang kurikulum, sarana prasarana, bidang kesiswaan, bidang pembangunan, bidang hubungan dengan masyarakat dan bidang-bidang lainnya.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sering dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan seperti kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan yang melibatkan orang tua siswa, alumni dan tokoh masyarakat di atas, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak lagi hanya dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, tetapi juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan • Tingkat kehadiran dan keefektifan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan semakin meningkat
		<ul style="list-style-type: none"> • Contoh keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang pernah melibatkan tokoh masyarakat adalah sama seperti yang melibatkan orang tua siswa, para alumni dan tokoh masyarakat di atas

e. Pemahaman Kepala Dusun

Dari hasil studi awal, dapat dikemukakan bahwa para kepala dusun ada yang belum pernah mendengar dan ada juga yang pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan tetapi belum memahami sepenuhnya. Bagi yang sudah mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan, yang mampu mereka jelaskan adalah berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam membantu sekolah untuk maju. Jika ditanya seputar partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, para kepala dusun ini belum bisa memahami sepenuhnya tentang hal tersebut. Akan tetapi mereka mengaku sering terlibat dalam rapat untuk memutuskan besarnya biaya ujian, biaya semester, biaya sumbangan pembangunan dan keputusan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekolah yang berkenaan dengan masyarakat. Sedangkan keterlibatan dalam perencanaan pendidikan sama sekali belum pernah mereka ikuti sehingga mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan mereka.

Namun setelah dilakukannya proses pengembangan dan tahap pengukuran akhir, semua kepala dusun ini telah mampu memahami dengan baik masalah partisipasi dalam pendidikan, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Keterlibatan mereka tidak lagi hanya pada kegiatan

pengambilan keputusan saja, akan tetapi dalam perencanaan pendidikan pun mereka telah dilibatkan oleh pihak sekolah.

Hasil perbandingan pemahaman kepala dusun dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel. 4.5
Perbandingan Pemahaman Kepala Dusun Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman kepala dusun tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada beberapa orang kepala dusun yang belum pernah mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan • Ada juga beberapa kepala dusun yang pernah mendengar dan memahami istilah partisipasi dalam pendidikan sehingga mereka menjelaskan bahwa partisipasi dalam pendidikan adalah bentuk keterlibatan anggota masyarakat untuk memajukan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah bisa memahami istilah partisipasi dalam pendidikan yang merupakan upaya membantu sekolah dalam memajukan sekolah demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum memahami sepenuhnya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Akan tetapi mereka mengaku sering 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah memahami sepenuhnya tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Bagi para kepala dusun partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan

	<p>terlibat dalam rapat untuk memutuskan besarnya biaya ujian, biaya semester, biaya sumbangan pembangunan dan keputusan untuk melaksanakan berbagai kegiatan sekolah yang berkenaan dengan masyarakat.</p>	<p>masyarakat dengan diundang oleh pihak sekolah untuk ikut serta terlibat dalam memutuskan berbagai kebijakan dan ketetapan sekolah dan memutuskan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah karena sekolah tidak berani mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perencanaan pendidikan adalah keterlibatan masyarakat untuk membantu sekolah dalam merencanakan berbagai bidang perencanaan seperti bidang kurikulum, sarana parasarana, humas, kesiswaan, bidang keuangan, pengawasan, pembanguan dan bidang lainnya
	<ul style="list-style-type: none"> • Mereka mengaku jika masalah terlibat dalam pengambilan keputusan sangat sering • Sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka sama sekali tidak pernah dilibatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala dusun mengakui telah banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan terutama dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sebelumnya sama sekali belum pernah dilibatkan
		<ul style="list-style-type: none"> • Contoh keterlibatan atau partisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang pernah melibatkan kepala dusun adalah sama seperti yang pernah melibatkan orang

		tua siswa, para alumni, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di atas
--	--	---

f. Pemahaman Guru

Berdasarkan hasil studi awal, sebenarnya telah nampak adanya pemahaman dari para guru tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Para guru memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam ikut memutuskan terkait kebijakan maupun aturan yang akan dibuat sekolah. Demikian juga dengan partisipasi dalam perencanaan pendidikan, bahwa merupakan keterlibatan masyarakat untuk membantu sekolah dalam menyusun programnya. Akan tetapi, pada realitanya bahwa pihak sekolah hanya melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum terlihat adanya keterlibatan masyarakat.

Setelah adanya tahap pengembangan, para guru semakin memahami bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting, dan memahami apa dan bagaimana seharusnya masyarakat terlibat di sekolah. Bukan hanya dalam pengambilan keputusan saja, tetapi dalam perencanaan pendidikan pun masyarakat seharusnya dilibatkan. Oleh karenanya para guru berusaha memberikan masukan kepada kepala sekolah agar selalu berupaya melibatkan masyarakat

dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan. Karena sekolah juga membutuhkan masukan, kritikan dan saran terhadap setiap keputusan yang akan ditetapkan dan setiap perencanaan yang akan dibuat. Sekolah berada dilingkungan masyarakat, sehingga sekolah harus menghargai keberadaan masyarakat sebagai bagian yang akan mendorong dan memajukan sekolah demi keberlanjutannya kedepannya nanti.

Untuk lebih jelasnya perbandingan pemahaman dewan guru antara sebelum dengan sesudah dilakukan pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.6
Perbandingan Pemahaman Dewan Guru Tentang Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
<p>mahaman dewan guru tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya telah memahami partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam ikut memutuskan kebijakan maupun aturan yang akan 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin memahami pentingnya keterlibatan masyarakat serta apa dan bagaimana seharusnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam membantu pihak sekolah untuk menyusun dan memutuskan berbagai

	dibuat sekolah	aturan dan kebijakan serta kegiatan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan oleh sekolah
	<ul style="list-style-type: none"> • Partiaipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan juga sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam menyusun program sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan upaya sekolah untuk melibtakan masyarakat dalam perencanaan di sekolah dengan memberikan saran dan masukan ataupun ide untuk program perencanaan yang akan diadakan dan dilaksanakan sekolah
	<ul style="list-style-type: none"> • Pada realitanya masyarakat hanya dilibatkan dalam kegiatan pengambilan keputusan dan belum pernah dilibatkan perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengakui bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah
	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada upaya guru untuk membuat masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pendidikan karena semuanya tergantung dari kepala sekolah sebagai pimpinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, maka dewan guru berupaya meberikan nasehat dan saran kepada kepala sekolah sebagai pimpinan untuk senantiasa melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut guna memperoleh hasil keputusan yang efektif dan perencanaan yang matang

	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh keterlibatan masyarakat kegiatan dalam pengambilan keputusan adalah sebagaimana yang telah dilakukan dan melibatkan orang tua siswa, lumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun di atas 	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan terutama dalam perencanaan pendidikan yang sudah melibatkan masyarakat adalah sebagaimana yang telah dilakukan dan melibatkan orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun di atas
--	---	---

g. Pemahaman Komite Sekolah

Dari hasil studi awal yang telah dilakukan peneliti, memperlihatkan bahwa komite sekolah juga pada dasarnya sama dengan dewan guru yang ada di MA Hidayatul Muhsinin Labulia. Mereka memahami tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan. Bagi komite sekolah partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu cukup luas, baik yang berkaitan dengan materi dan non materi. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bagi komite sekolah merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rapat pengambilan keputusan di sekolah. Dan masyarakat selalu diupayakan untuk dilibatkan demi kesempurnaan hasil rapat nantinya. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, meskipun menurut komite bahwa masyarakat tidak pernah dilibatkan, akan tetapi mereka

memahaminya sebagai keterlibatan masyarakat dalam membantu sekolah merencakana program kerja sekolah kedepannya.

Setelah proses pengembangan dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah, pemahaman komite sekolah menjadi jauh lebih baik. Bagi komite partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan upaya sekolah yang senantiasa harus melibatkan masyarakat dalam perihal memutuskan sebuah kebijakan dan aturan sekolah demi perbaikan pendidikan kedepannya dengan adanya kritikan dan saran dari masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan upaya sekolah yang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana, bidang kesiswaan, hubungan dengan masyarakat, bidang adat dan kebudayaan, sampai dengan perencanaan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya harus melibatkan masyarakat, biar masyarakat megetahui perkembangan sekolah serta ikut menyukseskan sekolah menjadi lebih maju. Pihak komite dan kepala sekolah terus berupaya agar masyarakat selalu dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan demi keberlangsungan dan kemajuan sekolah kedepannya.

Selengkapnya hasil perbandingan pemahaman komite sekolah antara sebelum dengan sesudah dilakukan pengembangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.7
Perbandingan Pemahaman Komite Sekolah Tentang Partisipasi
dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Pemahaman komite sekolah tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang cakupan cukup luas baik materi maupun non materi 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan baik yang berkaitan dengan materi maupun non materi demi kemajuan sekolah kedepannya
	<ul style="list-style-type: none"> Memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rapat pengambilan keputusan di sekolah dan masyarakat selalu dilibatkan 	<ul style="list-style-type: none"> Memahami partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan upaya sekolah yang senantiasa harus melibatkan masyarakat dalam perihal memutuskan sebuah kebijakan dan aturan sekolah demi perbaikan pendidikan kedepannya dengan adanya kritikan dan saran dari masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> Memahami partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam membantu sekolah merencanakan program kerja sekolah kedepannya tetapi masyarakat tidak pernah dilibatkan 	<ul style="list-style-type: none"> partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan upaya sekolah yang harus melibatkan masyarakat dalam perencanaan pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana, bidang kesiswaan, hubungan dengan masyarakat, bidang adat dan kebudayaan, sampai dengan perencanaan

		kegiatan-kegiatan sekolah lainnya harus melibatkan masyarakat, biara masyarakat megetahui perkembangan sekolah serta ikut menyukseskan sekolah menjadi lebih maju.
	<ul style="list-style-type: none"> • Belum pernah melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan • Senantiasa selalu berupaya melibatkan masyarakat bukan hanya dalam pengambilan keputusan saja, tetapi dalam perencanaan pendidikan juga harus melibatkan masyarakat
	<ul style="list-style-type: none"> • Contoh kegiatan pengambilan keputusan yang pernah melibatkan masyarakat adalah yang telah dilakukan dan melibatkan orang tua siswa, lumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun di atas 	Contoh keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah sebagaimana yang telah dilakukan dan melibatkan orang tua siswa, lumni, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kepala dusun di atas

2. Perbandingan Anggota Masyarakat yang Terlibat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Perbandingan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia dapat dilihat dari ada tidaknya keterlibatan masyarakat baik sebelum maupun sesudah dilakukannya tahap pengembangan. Berdasarkan hasil studi awal, terlihat bahwa anggota masyarakat hanya sering dilibatkan dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan masyarakat kecuali pihak internal sekolah dan yayasan saja.

Pengakuan dari semua informan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun pada tahap studi awal telah melibatkan masyarakat hanya dalam proses pengambilan keputusan, akan tetapi tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat untuk terlibat masih belum nampak maksimal. Hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat yang masih sangat minim sekali terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pendidikan, terutama dalam hal keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Namun, pada saat pengukuran akhir setelah dilakukannya sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat seputar partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, tingkat keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi cukup signifikan. Masyarakat juga mengakui bahwa sekolah telah berupaya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pendidikan yang semulanya belum

pernah melibatkan mereka. Sehingga terlihat bahwa adanya upaya dari pihak sekolah untuk selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam proses dan kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah.

Untuk memperjelas perbandingan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan baik sebelum maupun sesudah dilakukannya tahap pengembangan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.8
Perbandingan Anggota Masyarakat yang Terlibat dalam Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (PENGUKURAN AKHIR)
1	2	3
Anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala sekolah ✓ Orang tua siswa ✓ Alumni (masih jarang) ✓ Tokoh pemuda (jarang) ✓ Tokoh masyarakat ✓ Tokoh agama ✓ Kepala desa (masih jarang hadir dan berwakil) ✓ Kepala dusun ✓ Kepala ✓ Guru ✓ Tata usha ✓ Komite sekolah 	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala sekolah ✓ Orang tua siswa ✓ Alumni ✓ Tokoh pemuda ✓ Tokoh masyarakat ✓ Tokoh agama ✓ Kepala desa ✓ Kepala dusun ✓ Kepala ✓ Guru ✓ Tata usha ✓ Komite sekolah ✓ Pihak yayasan

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pihak yayasan • Tingkat keaktifan masih kurang • Tingkat kehadiran masih sering berwakil 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keaktifan cukup meningkat • Tingkat kehadiran sudah tidak berwakil lagi
	<p style="text-align: center;">PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Nampak adanya anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perencanaan pendidikan, karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam perencanaan pendidikan 	<p style="text-align: center;">PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat Yang Terlibat Dalam Perencanaan Pendidikan Di Sekolah <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kepala Sekolah ✓ Orang Tua Siswa ✓ Alumni ✓ Tokoh Pemuda ✓ Tokoh Masyarakat ✓ Tokoh Agama ✓ Kepala Desa ✓ Kepala Dusun ✓ Kepala ✓ Guru ✓ Tata Usha ✓ Pihak Yayasan ✓ Komite Sekolah • Terlibat secara langsung dan cukup aktif • Antusiasme kehadiran cukup tinggi

3. Perbandingan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Bentuk partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah yakni di MA Hidayatul Muhsini Labulia Lmbok Tengah. Dari

hasil studi awal yang diperoleh, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah dengan terlibat secara langsung dalam menghadiri undangan rapat dari pihak sekolah. Selanjutnya dalam penentuan keputusan dilaksanakan dengan voting atau berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Hasil kesepakatan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan diedarkan melalui surat yang dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan keputusan rapat yang dibuat dalam surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan bentuk partisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah, masih belum nampak karena masyarakat mengaku belum pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh pebeliti bersama kepala sekolah, terjadi peningkatan dan perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat sudah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah dilibatkan oleh sekolah. Dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, antusiasme masyarakat untuk hadir dan terlibat berpartisipasi cukup tinggi. Hal ini tentunya disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang sudah cukup baik terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Untuk selengkapnya, berikut ini ditampilkan tabel perbandingan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan baik sebelum maupun sesudah pengembangan.

Tabel. 4.9
Perbandingan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam
Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Perbandingan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan menghadiri rapat pengambilan keputusan • Pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau melihat suara terbanyak dari masyarakat yang hadir • Hasil keputusan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan diedarkan oleh pihak sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah • Keterlibatan masyarakat sudah cukup efektif dengan tingkat kehadiran masyarakat yang cukup tinggi meskipun berwakil bagi masyarakat yang tidak berkesempatan hadir 	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan menghadiri rapat pengambilan keputusan • Pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau melihat suara terbanyak dari masyarakat yang hadir • Masyarakat mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil keputusan yang telah disepakati bersama agar tidak ada permasalahan dan protes dari masyarakat dikemudian hari • Hasil keputusan disampaikan kembali kepada masyarakat dengan diedarkan oleh pihak sekolah melalui surat keputusan kepala sekolah • Keterlibatan masyarakat makin efektif dengan tingkat kehadiran masyarakat yang tinggi dan hanya sebagian kecil masyarakat yang berwakil jika tidak berkesempatan hadir.

	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah masih belum nampak karena masyarakat belum dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah 	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak sekolah telah berupaya dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah • Antusiasme masyarakat untuk hadir sangat tinggi guna membantu sekolah dalam kegiatan perencanaan dengan memberikan kritikan, masukan dan saran demi menghasilkan sebuah perencanaan yang matang untuk kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya. • Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan adalah dengan mengikuti rapat perencanaan di sekolah • Hasil perencanaan diputuskan bersama dengan masyarakat berdasarkan musyawarah • Anggota masyarakat yang hadir mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil perencanaan yang disepakati • Hasil kesepakatan dibuat dalam sebuah pernyataan tertulis berupa surat keputusan kepala sekolah yang selanjutnya diedarkan kembali dengan bersurat kepada
--	---	---

		<p>masyarakat baik yang hadir maupun yang tidak hadir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat secara langsung dalam kegiatan pengadaan hasil perencanaan pendidikan baik dalam bidang kurikulum, sarana prasarana, bidang kesiswaan, bidang keuangan dan pembangunan, bidang hubungan dengan masyarakat, maupun bidang lainnya dan dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pendidikan lainnya. • Ikut mengontrol dan mengawasi jalannya kegiatan perencanaan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah sebagai bukti kesanggupan dan pertanggungjawaban dari masyarakat yang terlibat untuk berpartisipasi
--	--	---

4. Perbandingan Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Ada banyak faktor penunjang yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah yakni di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil studi awal terlihat bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat tercatat sebanyak lima faktor yang dijelaskan oleh masyarakat dalam hasil wawancaranya

dengan peneliti terkait faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum diketahui faktor penunjang partisipasi masyarakatnya untuk berpartisipasi, karena berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa mereka belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Sehingga mereka tidak dapat memberikan informasi tentang apa yang menjadi faktor penunjang mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Namun ada anggapan dari masyarakat meskipun mereka dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan, bahwa faktor yang menunjang partisipasi mereka dalam perencanaan pendidikan dirasa sama dengan faktor yang menunjang partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, diperoleh peningkatan jumlah faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan menjadi dua puluh faktor penunjang. Hal ini menandakan bahwa adanya hasil pengembangan dalam penelitian ini sehingga masyarakat bisa memberikan data atau informasi yang lebih baik dan lebih akurat dari pada sebelum dilakukannya pengembangan. Sebab masyarakat sudah menjadi lebih memahami apa dan bagaimana seharusnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, hingga mudah bagi mereka untuk memberikan informasi

seputar faktor yang menunjang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Data perbandingan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan baik sebelum maupun sesudah tahap pengembangan dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.10
Perbandingan Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Perbandingan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan atau partisipasinya di sekolah khususnya dalam kegiatan pengambilan keputusan • Rasa memiliki dari masyarakat karena sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat • Rasa tanggung jawab masyarakat terutama orang tua siswa terhadap sekolah yang telah mendidika anak-anak 	<p>PARTISIPASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN</p> <p>Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan setelah pengembangan adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pribadi masyarakat untuk berpartisipasi • Rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah • Tanggung jawab bersama masyarakat terhadap sekolah • Rasa ingin tahu secara langsung masyarakat terhadap hasil keputusan dan perencanaan yang akan ditetapkan • Keberadaan lembaga atau sekolah yang berada ditengah-tengah masyarakat

	<p>mereka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat dengan selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan ditetapkan • Rasa ingin tahu masyarakat terhadap proses dan hasil dalam pengambilan keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepedulian masyarakat terhadap sekolah • Kewajiban masyarakat untuk membantu sekolah • Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi • Tingkat pemahaman masyarakat yang cukup baik terhadap partisipasi • Hasrat dan keinginan masyarakat untuk membuat sekolah menjadi lebih maju • Tingginya rasa kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Desa Labulia sehingga mudah untuk diajak berpartisipasi • Tingkat religuitas masyarakat yang tinggi sehingga memudahkannya untuk memahami pentingnya berpartisipasi terhadap sekolah yang memang berbentuk madrasah • Tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah yang cukup tinggi • Jarak tempuh masyarakat menuju sekolah yang tidak jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi • Proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang tidak menyulitkan masyarakat dan hasil keputusan dan perencanaan yang tidak memberatkan masyarakat
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Rasa terimakasih dari masyarakat dengan menghargai sekolah yang telah mendidik putra-putri Desa Labulia • Rasa segan dari masyarakat terhadap tokoh pendiri yayasan yang disegani oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat harus terlibat jika diajak oleh sekolah • Adanya upaya sekolah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi • Adanya kepedulian dari pihak sekolah terhadap masyarakat sehingga mengajak masyarakat untuk selalu terlibat • Adanya rasa saling membutuhkan antara sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah
	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan masih belum nampak karena masyarakat belum dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah sehingga masyarakat belum bisa memberikan informasi lengkap seputar faktor yang 	<p>PARTISIPASI DALAM PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <p>Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan sama halnya dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pribadi masyarakat untuk berpartisipasi • Rasa memiliki masyarakat

	<p>menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun ada pendapat dari masyarakat meskipun dilibatkan dalam perencanaan pendidikan, bahwa faktor yang menunjang partisipasi mereka dalam ikut merencanakan pendidikan sama halnya seperti faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 	<p>terhadap sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab bersama masyarakat terhadap sekolah • Rasa ingin tahu secara langsung masyarakat terhadap hasil keputusan dan perencanaan yang akan ditetapkan • Keberadaan lembaga atau sekolah yang berada ditengah-tengah masyarakat • Kepedulian masyarakat terhadap sekolah • Kewajiban masyarakat untuk membantu sekolah • Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi • Tingkat pemahaman masyarakat yang cukup baik terhadap partisipasi • Hasrat dan keinginan masyarakat untuk membuat sekolah menjadi lebih maju • Tingginya rasa kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat Desa Labulia sehingga mudah untuk diajak berpartisipasi • Tingkat religuitas masyarakat yang tinggi sehingga memudahkannya untuk memahami pentingnya berpartisipasi terhadap seklah yang memang berbentuk madrasah • Tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah yang cukup tinggi • Jarak tempuh masyarakat
--	---	---

		<p>menuju sekolah yang tidak jauh sehingga memudahkan masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses pelaksanaan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang tidak menyulitkan masyarakat dan hasil keputusan dan perencanaan yang tidak memberatkan masyarakat • Rasa terimakasih dari masyarakat dengan menghargai sekolah yang telah mendidik putra-putri Desa Labulia • Rasa segan dari masyarakat terhadap tokoh pendiri yayasan yang disegani oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat harus terlibat jika diajak oleh sekolah • Adanya upaya sekolah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi • Adanya kepedulian dari pihak sekolah terhadap masyarakat sehingga mengajak masyarakat untuk selalu terlibat • Adanya rasa saling membutuhkan antara sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah
--	--	---

5. Perbandingan Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Dalam penelitian ini, selain membandingkan hasil perbandingan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, dilakukan juga perbandingan terhadap faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah yakni di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah. Berdasarkan hasil studi awal, tercatat sebanyak tiga faktor yang dijelaskan oleh masyarakat dalam hasil wawancaranya dengan peneliti terkait faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan sama halnya dengan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat bahwa belum dapat diketahui faktor penghambat partisipasi masyarakatnya untuk berpartisipasi, karena berdasarkan hasil studi awal masyarakat mengaku belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Sehingga mereka tidak dapat memberikan informasi tentang apa yang menjadi faktor penghambat mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Namun ada anggapan dari masyarakat meskipun mereka dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan, bahwa faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam perencanaan pendidikan dirasa sama dengan faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.

Akan tetapi setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, diperoleh peningkatan jumlah faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, menjadi sebelas faktor penghambat partisipasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa adanya penambahan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini sehingga masyarakat bisa memberikan data atau informasi yang lebih dari pada sebelum dilakukannya pengembangan. Peningkatan jumlah faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan bukan karena gagalnya proses pengembangan, akan tetapi karena masyarakat sudah cukup memahami apa dan bagaimana seharusnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sehingga mereka bisa memberikan informasi tambahan seputar faktor yang menghambat partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah.

Data perbandingan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan dapat dilihat selengkapnya pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.11
Perbandingan Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

YANG DIUKUR	HASIL STUDI AWAL	HASIL PENGEMBANGAN (STUDI AKHIR)
1	2	3
Perbandingan Faktor yang menghambat	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	PENGAMBILAN KEPUTUSAN

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakhadiran masyarakat karena ada kesibukan lain atau kegiatan lain yang bertepatan dengan undangan pengambilan keputusan di sekolah • Ketidakhadiran masyarakat karena dalam keadaan sakit • Ketidakhadiran masyarakat karena tidak mendapatkan informasi atau undangan dari sekolah 	Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakhadiran masyarakat karena adanya kesibukan lain atau kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan di sekolah, seperti <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acara keluarga ✓ Acara di kampung ✓ Adanya kesibukan di kantor desa bagi kepala dan segenap perangkat desa ✓ Adanya tetangga yang meninggal ✓ Kesibukan orang tua siswa dan masyarakat lainnya dengan profesi mereka sehari-hari sebagai pedagang, petani, buruh dan peternak sehingga sulit meninggalkan pekerjaannya jika sedang pada aktifitas ✓ Kesibukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di desa ✓ Dan kegiatan lainnya • Karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir berpartisipasi • Karena faktor lupa dengan undangan dan ajakan pihak sekolah untuk berpartisipasi • Alasan karena tidak diundang atau tidak diinformasikan oleh sekolah • Undangan yang dikirim pihak sekolah tidak sampai kepada yang bersangkutan
---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tinggal di dusun pedalam dan tidak memiliki kendaraan karena wilayah Desa Labulia cukup luas • Tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi juga membuat masyarakat terhambat untuk berpartisipasi • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan partisipasi dalam pendidikan • Karena masyarakat melihat sekolah lain terutama sekolah negeri yang lebih maju dibandingkan sekolah MA Hidayatul Muhsinin membuat masyarakat malas untuk berpartisipasi • Adanya doktrin bahwa sekolah tidak bisa maju seperti sekolah negeri dan sekolah lainnya yang memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai sehingga masyarakat merasa ragu untuk berpartisipasi • Adanya doktrin bahwa sekolah tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan karena lulusannya banyak yang menganggur dan tidak melanjutkan kuliah
	<p>PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Nampak adanya faktor yang 	<p>PERENCANAAN PENDIDIKAN</p> <p>Sama halnya dengan faktor yang menghambat</p>

	<p>menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan karena masyarakat mengaku belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan sehingga tidak bisa memberikan informasi lengkap seputar faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun ada anggapan dari masyarakat bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pendidikan, bahwa faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam ikut merencanakan pendidikan sama halnya seperti faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 	<p>partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, bahwa yang faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan adalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakhadiran masyarakat karena adanya kesibukan lain atau kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan di sekolah, seperti <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acara keluarga ✓ Acara di kampung ✓ Adanya kesibukan di kantor desa bagi kepala dan segenap perangkat desa ✓ Adanya tetangga yang meninggal ✓ Kesibukan orang tua siswa dan masyarakat lainnya dengan profesi mereka sehari-hari sebagai pedagang, petani, buruh dan peternak sehingga sulit meninggalkan pekerjaannya jika sedang pada aktifitas ✓ Kesibukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di desa ✓ Dan kegiatan lainnya • Karena dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir berpartisipasi • Karena faktor lupa dengan undangan dan ajakan pihak sekolah untuk berpartisipasi • Alasan karena tidak diundang atau tidak diinformasikan oleh
--	--	--

		<p>sekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undangan yang dikirim pihak sekolah tidak sampai kepada yang bersangkutan • Jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tinggal di dusun pedalam dan tidak memiliki kendaraan karena wilayah Desa Labulia cukup luas • Tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi juga membuat masyarakat terhambat untuk berpartisipasi • Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan partisipasi dalam pendidikan • Karena masyarakat melihat sekolah lain terutama sekolah negeri yang lebih maju dibandingkan sekolah MA Hidayatul Muhsinin membuat masyarakat malas untuk berpartisipasi • Adanya doktrin bahwa sekolah tidak bisa maju seperti sekolah negeri dan sekolah lainnya yang memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai sehingga masyarakat merasa ragu untuk berpartisipasi • Adanya doktrin bahwa sekolah tidak berhasil menyelenggarakan pendidikan karena lulusannya banyak yang menganggur dan tidak melanjutkan kuliah
--	--	--

BAB V

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam bab IV sebelumnya telah dilakukan pemaparan data dan temuan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Temuan hasil penelitian tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam bab V ini, dengan maksud memperoleh hakikat dan makna yang mendasari pernyataan-pernyataan temuan penelitian yang dihasilkan. Dengan demikian, dalam pembahasan ini dilakukan analisis substantif teoritik dengan mengacu pada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang telah ada dalam bab II.

A. Pemahaman Masyarakat tentang Partisipasinya dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Dalam pengertian partisipasi masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Santoso dalam Dwiningrum (2011: 50) terkandung makna bahwa masyarakat diharapkan untuk terlibat aktif dalam suatu kegiatan pendidikan baik secara individual ataupun secara kelompok dan bisa diperluas menjadi kerjasama. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat yang dituju terfokus pada bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Sebagaimana pendapat Rohaety (2010 : 152) dan Salusu (1996 : 13) tentang apa dan bagaimana pengambilan keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan di sekolah. selain itu menurut Fattah (2001 : 93) dan Rodliyah (2013 : 101) tentang apa dan bagaimana perencanaan

pendidikan yang seharusnya ditetapkan oleh sekolah demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah.

Menurut temuan peneliti, pada awalnya orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, guru dan komite sekolah masih kurang memahami apa makna yang terkandung dalam partisipasi masyarakat di sekolah, terutama dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bahkan ada beberapa orang tua siswa, alumni, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang belum pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat, karena yang mereka pahami adalah keterlibatan dan sumbangsi mereka di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman sebgaiian masyarakat tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan masih kurang. Namun ada juga diantara kesemua komponen masyarakat yang berpartisipasi di sekolah sudah mampu memahami apa dan bagaimana berpartisipasi di sekolah baik dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pendidikan, atau dalam bidang-bidang partisipasi lainnya.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pembelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan, terutama dalam bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Labulia juga menjadi sebuah penghalang bagi masyarakat untuk bisa berfikir dan memahami pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak peka terhadap

pentingnya kehadiran mereka dalam membantu memajukan pendidikan di sekolah. Dengan kehadiran masyarakat tentunya pihak sekolah akan mendapatkan kritikan, masukan dan saran maupun ide-ide yang membangun bagi sekolah dalam memutuskan sebuah keputusan dan dalam menghasilkan sebuah perencanaan yang matang demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah atau lembaga pendidikan kedepannya.

Rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilann keputusan dan terutama dalam kegiatan perencanaan pendidikan, sangat tidak diharapkan oleh definisi partisipasi dalam pendidikan yang selalu dijelaskan oleh para pakar pendidikan . Sebab partisipasi masyarakat yang diharapkan sekolah bukan hanya dalam bentuk rapat, pembayaran iuran semester, biaya ujian dan sumbangan pembangunan saja, tetapi keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kebijakan sekolah.

Oleh karenanya pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan mutlak diperlukan, karena dalam masyarakat pendidikan, hubungan antara orang tua murid dan guru harus bersifat kooperatif. Masyarakat merupakan *stakeholders* pertama dan utama dari proses pendidikan. Hal ini berarti proses pendidikan, tujuan pendidikan, dan sarana pendidikan, termasuk pula mutu pendidikan merupakan tanggung jawab masyarakat juga (Tilaar, 2002 :179). Selanjutnya dipertegas oleh Pidarta (2005: 6) bahwa lembaga pendidikan tidak boleh mengabaikan keinginan masyarakat sekitar, sebab ia merupakan salah satu bagian dari masyarakat.

Lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat, ia harus toleran dengan masyarakat. Ini berarti lembaga pendidikan harus mengikuti perubahan-perubahan masyarakat.

Setelah dilakukannya tahap pengembangan terhadap komponen masyarakat, mereka sudah dapat memahami makna partisipasi dalam pendidikan, khususnya terkait masalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Masyarakat memahami bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan sebagai sebuah keterlibatan masyarakat untuk ikut memutuskan berbagai aturan dan kebijakan maupun kegiatan yang akan ditetapkan oleh sekolah. Sedangkan partisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat untuk ikut merancang dan merencanakan berbagai kegiatan perencanaan di sekolah, baik dalam bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan, bidang hubungan dengan masyarakat, bidang keuangan dan pembangunan, bidang program dan personalia, maupun bidang-bidang yang lainnya.

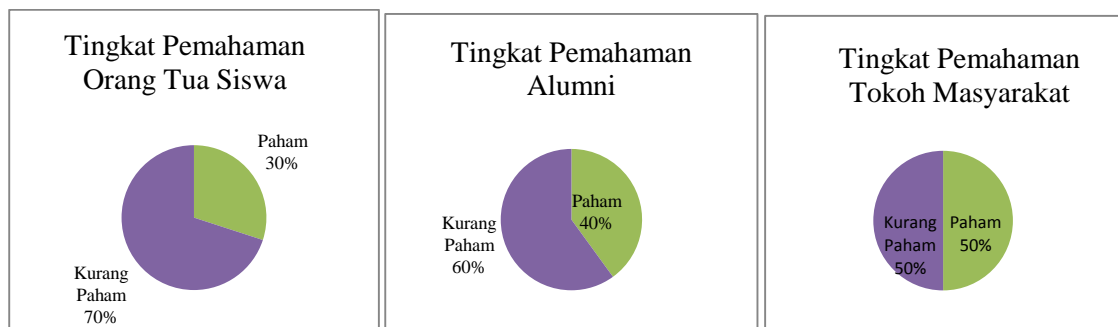
Keberhasilan penelitian yang dilakukan peneliti dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partisipasi dalam pendidikan selaras dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Fathurrohman Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemahaman masyarakat tahap studi awal masih rendah. Akan tetapi setelah dilakukan pengembangan menjadi jauh lebih baik. Sama halnya dengan penelitian ini juga memperlihatkan hasil pemahaman masyarakat yang masih

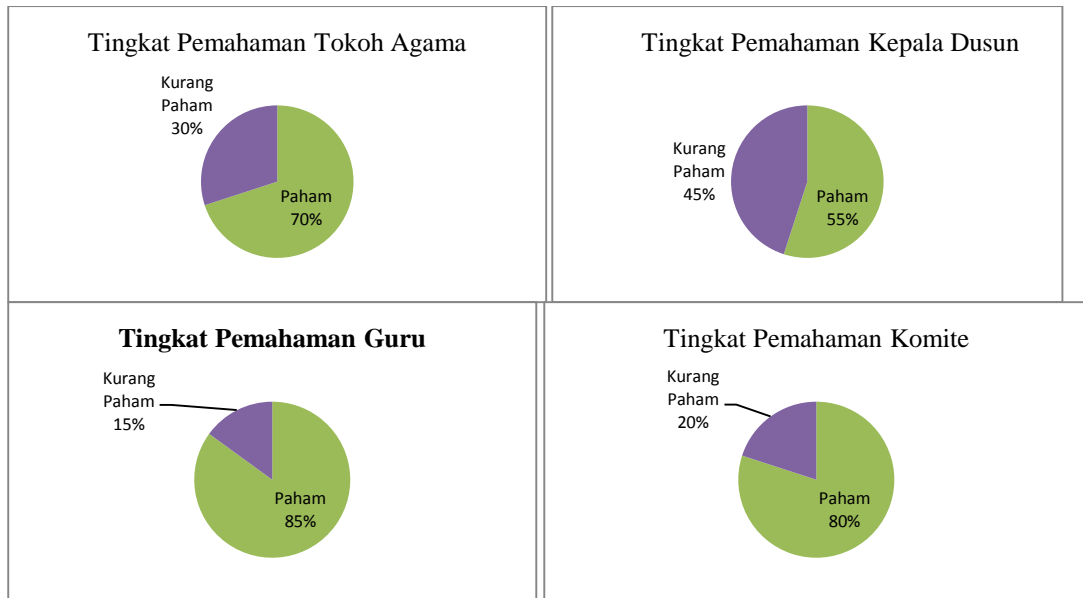
sangat rendah dan menjadi lebih baik setelah adanya pengembangan partisipasi masyarakatnya untuk terlibat didalamnya.

Dari kesadaran masyarakat yang tinggi setelah pengembangan dilakukan, maka tercipta hubungan yang harmonis dan terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan sekolah. Tugas sekolah selanjutnya hanya berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat berpartisipasi di sekolah. Oleh karenanya pihak sekolah harus mampu menciptakan hubungan, memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat untuk membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan turut berpartisipasi di dalamnya agar keberlangsungan sekolah tetap terjaga dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan sekolah berada di lingkungan masyarakat sehingga harus selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai proses dan kegiatannya.

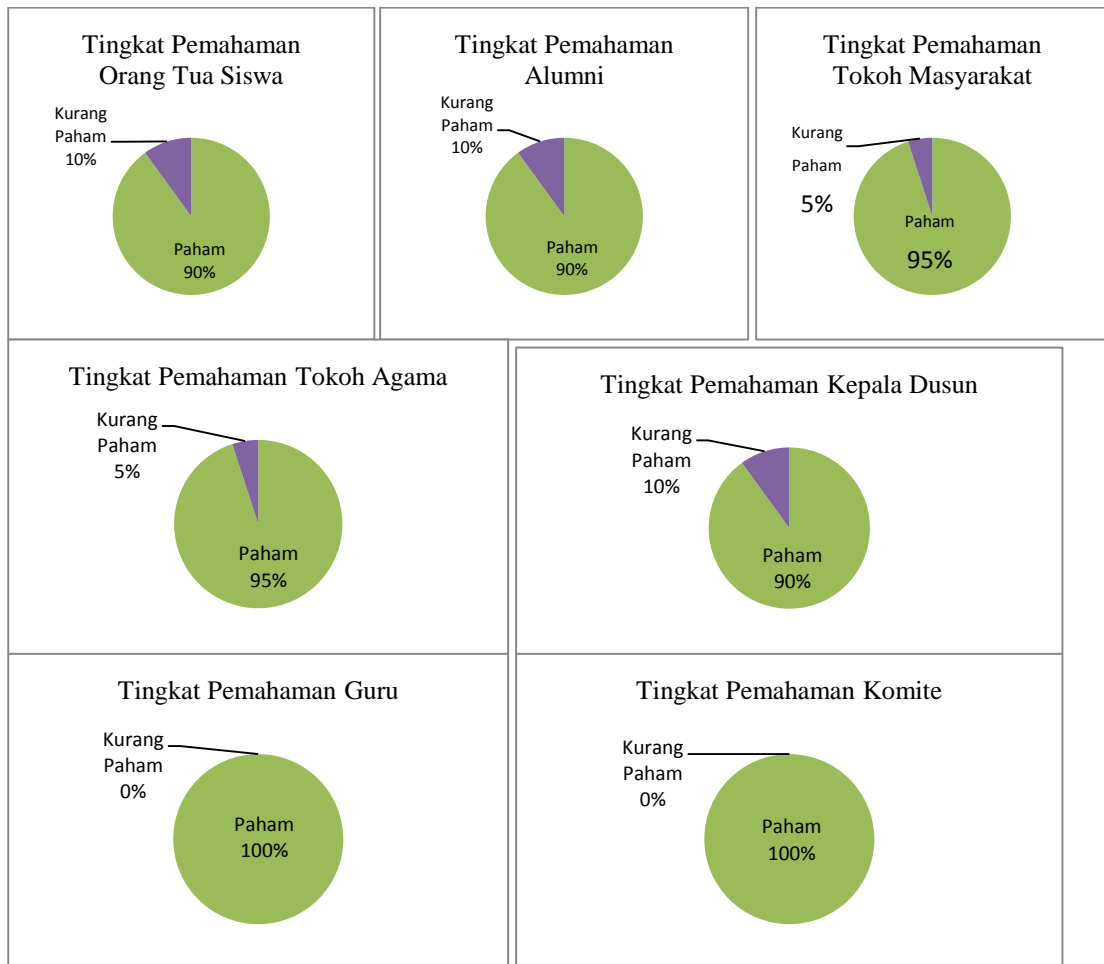
Peningkatan pemahaman masyarakat dari tahap studi awal sampai dengan tahap pengukuran akhir setelah pengembangan dapat dilihat pada gambar 5.1 dan 5.2 berikut ini.

Gambar 5.1
Tingkat pemahaman Masyarakat Tahap Studi Awal





Gambar 5.2
Tingkat pemahaman Masyarakat Tahap Pengukuran Akhir



Dari gambar di atas, terlihat jelas bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Dimana pemahaman orang tua siswa pada saat studi awal hanya 30 %, alumni 40 %, tokoh masyarakat 50 %, tokoh agama 70 %, kepala dusun 55 %, dewan guru dan staf 85 %, dan komite sekolah 80 %. Namun setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat pada saat dilakukannya tahap pengukuran akhir yang menunjukkan tingkat pemahaman orang tua siswa meningkat menjadi 90 %, alumni 90 %, tokoh masyarakat 95 %, tokoh agama 95 %, kepala dusun 90 %, dewan guru dan staf 100 %, dan komite sekolah 100 %.

B. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Temuan peneliti dalam tahap studi awal menunjukkan bahwa awalnya masyarakat terkait memang sering dilibatkan oleh pihak sekolah hanya dalam proses pengambilan keputusan saja seperti dalam pengambilan keputusan tentang besarnya biaya semester, besarnya biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan, keputusan tata tertib sekolah, besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, keputusan biaya wisuda dan lepas pisah kelas XII, dan pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan pendidikan. Tingkat keaktifan dan kehadiran masyarakat juga masih kurang dan banyak diwakili oleh sanak saudara ataupun keluarga lainnya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan masyarakat mengaku belum pernah dilibatkan sehingga belum nampak

anggota masyarakat mana saja yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Padahal dalam berbagai kegiatan di sekolah, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Setelah dilakukan tahap pengembangan dengan pemberian pembelajaran dan sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan oleh peneliti bersama kepala sekolah, masyarakat mengaku telah memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pendidikan. Semua unsur elemen dan kalangan masyarakat seperti komite sekolah, orang tua siswa, alumni, pengusaha, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan komponen masyarakat lainnya sudah terlihat aktif dan terjadi peningkatan dalam keterlibatannya di sekolah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

Keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi bukan hanya terlihat aktif dan meningkat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saja, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan pun sudah mulai nampak dan terlihat aktif sebagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hasil pengembangan ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa, karena telah berhasil melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan sangat diperlukan agar hasil perencanaan sekolah lebih matang dan menghasilkan kesesuaian dengan keinginan masyarakat sebagai mitra kerja sekolah.

Temuan peneliti terkait dengan anggota masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini tidak jauh berbeda dengan temuan-temuan peneliti sebelumnya yang diantaranya penelitian dari Fathurrohman Tahun 2004 dan penelitian dari Abdul Manaf Tahun 2008. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian kedua peneliti tersebut yang menyatakan bahwa hasil penelitian mereka menyatakan adanya berbagai komponen masyarakat yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan ataupun dalam berbagai kegiatan sekolah lainnya demi kemajuan proses dan program sekolah kedepannya .

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait dengan cara masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Merujuk pada temuan penelitian, berbagai komponen masyarakat sering menghadiri rapat di sekolah. Rapat tersebut dalam rangka mengambil keputusan dan merencanakan pendidikan serta program atau kegiatan yang akan dijalankan sekolah.

Menurut temuan penelitian dalam studi awalnya terlihat bahwa cara atau bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah adalah dengan menghadiri rapat pengambilan keputusan terkait dengan berbagai aturan, kebijakan maupun pembiayaan dan perencanaan program sekolah. Dalam memutuskan hasil rapat dilakukan dengan musyawarah dan diputuskan berdasarkan suara terbanyak masyarakat yang hadir. Hasil keputusan dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan pada

masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan masyarakat mengaku belum pernah dilibatkan sehingga tidak diperoleh informasi terkait cara masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan.

Namun setelah dikembangkan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi bukan hanya dalam kegiatan pengambilan keputusan saja. Akan tetapi juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Cara berpartisipasi masyarakatpun tetap sama melalui rapat pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan suara terbanyak. Hanya saja yang berbeda adalah bahwa masyarakat yang hadir mengisi lembar persetujuan dan pertanggungjawaban hasil keputusan yang telah diambil dan dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah yang kemudian diedarkan kepada masyarakat. Kehadiran masyarakat sangat penting, karena akan menentukan arah dan orientasi pembangunan kedepannya. Sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat dapat memberikan masukan, ide, gagasan, kritikan maupun saran agar tercapainya sebuah hasil keputusan yang bijak dan menguntungkan semua pihak. Sebagaimana yang dikatakan Dwiningrum (2011: 61) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Selain itu hasil pengembangan ini juga memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat juga telah nampak dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum terlihat dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk merancang dan merencanakan pendidikan agar

memperoleh hasil perencanaan yang matang dan efektif untuk dijalankan sekolah. Keterlibatan masyarakat sangat penting guna memberikan masukan dan saran dalam memutuskan perencanaan yang akan ditetapkan. Sebagaimana pendapat Fattah (2001: 93). Ini berarti bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan memberikan efek agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang dan sendi kehidupan.

Yang berbeda dari hasil pengembangan ini adalah bahwa hasil keputusan dalam rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah bahwa para pihak yang hadir dan terlibat harus mengisi lembar persetujuan dan pertanggungjawaban hasil keputusan yang telah diambil. Hasil keputusan dalam rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tersebut dimuat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali kepada masyarakat dengan bersurat. Dan yang terpenting adalah terjadinya peningkatan kehadiran dan keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi dengan antusiasme yang cukup tinggi. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan memberikan manfaat dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan demi kemajuan dan keberlangsungan sekolah kedepannya.

Hasil penelitian terkait dengan bentuk atau cara keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fathurrohman

Tahun 2004, penelitian Lalu Muhammad Syubki Tahun 2005, dan penelitian dari Abdul Manaf Tahun 2008 yang juga meneliti tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Hasil penelitiannya memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam berpartisipasi dan dilakukan dengan cara yang demokratis. Selain itu juga sejalan dengan penelitian dari Ariani Tahun 2006 yang mampu meningkatkan manajemen partisipasi di sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam bekerja sama dan berpartisipasi dalam pelaksanaan PSG.

D. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Berdasarkan temuan peneliti bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat pada awalnya hanya ditemukan lima faktor penunjang partisipasi masyarakat dan hanya nampak dalam pengambilan keputusan saja. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum terlihat karena masyarakat belum dilibatkan. Akan tetapi setelah dilakukan tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah dan pihak lainnya, ternyata hasil pengukuran akhir menunjukkan adanya 20 faktor yang menunjang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang telah melibatkan masyarakat.

Adanya peningkatan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tentunya memperlihatkan telah adanya pemahaman masyarakat yang baik akan pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan. Upaya sekolah dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi juga telah memperlihatkan perubahan cara berpartisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi lebih baik. Karena masyarakat menyadari bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangatlah penting sebagai faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan dan proses pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan.

Dengan demikian hasil penelitian terkait dengan faktor penunjang partisipasi masyarakat yang telah dilakukan peneliti sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lalu Muhammad Syubki Tahun 2005 yang juga memperlihatkan adanya peningkatan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Meskipun penelitian peneliti hanya pada bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan saja, namun berkaitan dengan hasil penelitian Lalu Muhammad Syubki karena penelitiannya meliputi berbagai bidang yang ada dalam pendidikan, termasuk bidang pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

E. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

Selain faktor penunjang partisipasi, dalam penelitian ini juga membahas tentang faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hanya tercatat sebanyak tiga faktor. Sedangkan

dalam perencanaan pendidikan belum nampak adanya faktor penghambat partisipasi masyarakat karena masyarakat belum pernah dilibatkan. Namun setelah adanya tahap pengembangan, ternyata faktor penghambat masyarakat meningkat menjadi sebelas faktor, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan.

Adanya peningkatan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini, bukan karena sikap masyarakat yang tidak peduli atau enggan untuk berpartisipasi maupun terjadi kemunduran tingkat partisipasi. Akan tetapi karena tingkat pemahaman masyarakat yang sudah jauh lebih baik membuat mereka mampu untuk menjelaskan faktor penghambat berpartisipasi yang belum dijelaskan pada tahap studi awal sebelumnya.

Peningkatan jumlah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Lalu Muhammad Syubki Tahun 2005 yang juga menyatakan bahwa terjadinya peningkatan jumlah faktor yang menghambat partisipasi masyarakat setelah dilakukannya tahap pengembangan. Sehingga dari hasil penelitian ini sudah seharusnya pihak sekolah untuk senantiasa berupaya mengurangi tingkat hambatan yang akan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakatnya di sekolah dalam berbagai bidang yang ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan peneliti tentang pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Sebagaimana masyarakat yang terdiri dari orang tua siswa, alumni, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, guru, dan komite sekolah pada awalnya masih banyak yang belum memahami partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, meskipun mereka menyadari bahwa mereka sering terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah. Tingkat pemahaman orang tua siswa hanya 30 %, alumni 40 %, tokoh masyarakat 50 %, tokoh agama 70 %, kepala dusun 55 %, dewan guru dan staf 85 %, dan komite sekolah 80 %. Namun setelah dilakukannya tahap pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah, data dan informasi yang diperoleh dalam tahap pengukuran akhir menunjukkan pemahaman masyarakat menjadi jauh lebih baik. Sebagaimana hasil pengukuran akhir menunjukkan tingkat pemahaman orang tua siswa meningkat menjadi 90 %, alumni 90 %, tokoh masyarakat 95 %, tokoh agama 95 %, kepala dusun 90 %, dewan guru dan staf 100 %, dan komite sekolah 100 %.

2. Pada tahap studi awal, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dilibatkan adalah orang tua siswa, alumni (jarang), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa (jarang), kepala dusun, guru, pihak yayasan dan komite) hanya dalam proses pengambilan keputusan saja, akan tetapi tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat untuk terlibat masih belum nampak maksimal dan kehadiran masyarakat sering diwakili oleh pihak lain. Namun pada saat pengukuran akhir setelah dilakukannya tahap pengembangan, masyarakat yang dilibatkan masih tetap sama dan tidak hanya dilibatkan dalam pengambilan keputusan saja, akan tetapi juga dalam perencanaan pendidikan dengan tingkat keaktifan dan keefektifan yang cukup tinggi.
3. Bentuk atau cara partisipasi masyarakat pada awalnya hanya melalui empat tahapan dan hanya dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum nampak adanya bentuk partisipasi masyarakat karena masyarakat belum pernah dilibatkan. Namun setelah dilakukan tahap pengembangan bentuk partisipasi masyarakat menunjukkan hasil yang sama baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan yang telah melibatkan masyarakat. Hanya saja terjadi penambahan satu tahapan bentuk partisipasi masyarakat sehingga pada tahap pengukuran akhir terdapat lima tahap bentuk partisipasi masyarakat.
4. Hasil studi awal terlihat bahwa faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tercatat sebanyak lima faktor.

Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum nampak adanya faktor penunjang partisipasi masyarakatnya karena masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Namun setelah dilakukannya pengembangan terjadi peningkatan faktor yang menunjang partisipasi masyarakat menjadi dua puluh faktor penunjang, baik dalam kegiatan pengambilan keputusan maupun dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sudah melibatkan masyarakat.

5. Berdasarkan hasil studi awal, tercatat sebanyak tiga faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan juga belum nampak adanya faktor penghambat partisipasi masyarakat sebagaimana faktor penunjang partisipasi masyarakat di atas karena masyarakat belum pernah dilibatkan. Setelah dilakukan tahap pengembangan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap faktor yang menghambat partisipasi meningkat menjadi sebelas faktor penghambat, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan, karena dalam perencanaan pendidikan pihak sekolah telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Sekolah MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah, maupun kepala sekolah pada lembaga pendidikan lainnya agar menjadikan temuan dalam penelitian ini sebagai pedoman, landasan, dan bahan masukan yang berharga bagi penyelenggaraan dan pengembangan sekolah kedepannya, sekaligus sebagai bahan evaluasi diri dalam menyelenggarakan pendidikan selama ini agar bisa terus berupaya memajukan sekolah dan mempertahankan keberlangsungan sekolah kedepannya dengan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalamnya. Sehingga apapun yang telah disepakati bersama dengan masyarakat dalam program sekolah hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keberhasilan sekolah. Jika tidak, tentu akan berdampak kepada lemahnya pelaksanaan manajemen sekolah dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sekitar sekolah.
2. Bagi Dewan Guru dan Staf Tata Usaha MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah, dan para guru di lembaga pendidikan lainnya harus mampu meningkatkan sumbangsi dan partisipasinya untuk membantu sekolah agar terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun berbagai kegiatan partisipasi lainnya agar sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat serta sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan.

3. Bagi Komite Sekolah MA Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah, dan komite sekolah di lembaga pendidikan lainnya, hasil penelitian ini memberikan gambaran sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta motivasi khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai *partner* sekolah dan sebagai wakil masyarakat di sekolah serta sebagai penyambung komunikasi antara sekolah dengan masyarakat. Sehingga komite sekolah harus berperan penting membantu sekolah dalam upaya meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah. bagaimanapun juga keberhasilan sekolah ditentukan oleh masyarakat sekitar dan kegagalan sekolah akan menjadi kegagalan masyarakat jika nantinya partisipasi masyarakat yang telah dikembangkan tidak dilaksanakan dengan baik kedepannya.
4. Bagi peneliti dan pemerhati pendidikan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan masukan untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat secara lebih optimal dan efektif, melalui proses evaluasi dan refleksi secara objektif dan maksimal sehingga peran pemerintah dan masyarakat saling memotivasi dan mendukung.
5. Bagi para peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam mengkaji dan mengembangkan partisipasi masyarakat secara lebih mendalam dengan objek dan variabel yang sama ataupun berbeda karena masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariani. 2006 . *Manajemen Partisipasi pada Pelaksanaan PSG di SMK Kabupaten Banjar* tahun 2006. Banjar. Tesis Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Amransyah, M.S. 2012. *Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli.*, (Online), (<http://child-island.blogspot.com/2012/03/teori-partisipasi-masyarakat-menurt.html>), diakses 28 Desember 2014.
- Bodgan, H.R. dan Biklen, S.K. 1998. *Kualitatif Reseach for education : An Intrudaction to Theory and Methodes*. Ed.5 London: Allyn and Bacon, inc.
- Borg and Gall (1983). *Educational Research, An Introduction*. New York and London. Longman Inc.
- Crane, Thomas G and Lerissa Patrick. 2002. *The Heart of Coaching : Using Tranformational Coaching to Create a High-Performance Culture*. Second edition. California : FTA Press.
- Depdiknas. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakrta: Ditjen Dikdasmen.
- . 2002. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kependidikan Tahun 2002*. CV. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
- Dermawan, Rizky. 2013. *Pengambilan Keputusan (Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Alfabeta.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pengantar : Prof. Zamroni, Ph.D. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fathurrohman. 2004. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan di SMA Negeri 1 Praya Tengah*. Tesis Universitas Negeri Surabaya.
- Fattah, Nanang. 2001. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Friedmann, Jhon. 1992. *Empowerment, the politic of Alternative Developmant*. USA: Black Well.

- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hardjosoedarmo, Soewarso. 2001. *Total Quality Management*. Yogyakarta : Andi.
- Harjanto. 2000. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jalal, F dan Supriadi, D. Ed. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kaho. Josoef Riwu. 1999. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 1987. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Manaf, Abdul. 2008 *Pengambilan Keputusan Partisipatif (Studi Kasus Pelaksanaan Pengambilan Keputusan di SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin) tahun 2008*. Banjarmasin. Tesis Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.
- Moleong, L.J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasutiona. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- _____ . 1997. *Landasan Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- _____ . 2005. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem (edisi Revisi)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Purwanto, Ngalm. 2006. *Administrasi dan Sepervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raojanna. 2008. *Meningkatkan Penggunaan Dana Bantuan Imbal Swadaya (BIS) Mutu Untuk Mengembangkan Peran Serta Komite Sekolah*. Mataram. Tesis Universitas Negeri Surabaya.
- Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Pengantar Buchari Alma. Bandung : Alfabeta.
- Riyanto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya : SIC.
- _____ . 2003. *Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Unesa.

- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya : Unesa.
- Rodliyah, Siti. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rohaety, Ety. 2010. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Sekolah*. Jakarta : Refika Aditama.
- Sallis, Edward. 2012. *Total Quality Management In Education (Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan) Cetakan V*. Jogjakarta : IRCiSoD.
- Sarbini dan Lina, N. 2011. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik : Untuk organisasi Non Profit*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Santyasa, W. 2009. *Metode Penelitian Pengembangan & Teori Pengembangan Modul*. Makalah Pelatihan Para Guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Tanggal 12-14 Januari 2009, Di Kec Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sa'ud, Udin S dan Makmun, Abin S. 2011. *Perencanaan Pendidikan : Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Seels, Barbara B. & Richey, Rita C. (1994). *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. Penerjemah Dewi S. Prawiradilaga dkk. Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.
- Setyosari, Punaji. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Siagian, S.P. 1999. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sindhunata. 2000. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta : Kanisius.
- Soenarto. 2008. *Penelitian Pengembangan Research & Development (R&D) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran*. Makalah disajikan dalam Sarasehan Metodologi Penelitian, di Program PascaSarjana UNY.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujadi. 2002. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumarno. 1995. *Peran Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua*. Yogyakarta : LPM IKIP Yogyakarta.
- Suryosubroto, B. 2001. *Humas Dalam Dunia Pendidikan : Suatu Pendekatan Praktis*. Yogyakarta : Mitra Gama Widya.
- Syubki, L Muhammad. 2005. Tesis. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan di SMAN 1 Jonggat*. Tesis Universitas Negeri Surabaya.
- Tilaar, H.A. 1997. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo.
- _____. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Depdiknas 2003.
- Usman, Husaini . 2010. *Manajemen*, Edisi 3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- _____. 2003. *Pendidikan Untuk Demokrasi, Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Muchlis Raisin

Nomor Mahasiswa : I2K013033

Judul Penelitian : Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Informan Penelitian dan Subjek Observasi : 1. Orang Tua Siswa
2. Alumni
3. Tokoh Masyarakat
4. Tokoh Agama
5. Kepala Dusun
6. Dewan Guru & Wakasek
7. Komite Sekolah

Petunjuk Bagi Pewawancara :

1. Wawancara ini bersifat terbuka (*open-ended*) dan tidak berstruktur. Dengan demikian pokok-pokok pertanyaan dapat dikembangkan untuk menggali informasi dari informan secara rinci dan mendalam.
2. Untuk membantu perekaman data atau informasi, pewawancara menggunakan *tape recorder* dan kamera photo.
3. Sebelum wawancara dilakukan pewawancara mengadakan kesepakatan dan menciptakan hubungan baik dengan subyek atau informan.

A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

1. Apakah saudara pernah mendengar istilah partisipasi dalam pendidikan ?
2. Apakah saudara pernah mendengar istilah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
3. Apakah saudara memahami istilah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
4. Apakah saudara pernah mendapat penjelasan/sosialisasi tentang partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
5. Apakah saudara pernah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah?
6. Kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan apa saja yang pernah saudara lakukan dalam berpartisipasi di sekolah ?

B. Anggota Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

1. Apakah saudara pernah terlibat aktif dalam kegiatan pendidikan, dan dalam kegiatan apa saja saudara berpartisipasi ?
2. Apakah saudara pernah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
3. Siapa saja yang saudara pernah lihat/ketahui berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
4. Apa saja yang dia/mereka lakukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ?
5. Apakah menurut saudara keterlibatan saudara dan yang lainnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu penting ?

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Pendidikan

1. Apakah saudara pernah ikut serta dan menghadiri rapat di sekolah ?

2. Apakah saudara pernah menyampaikan sesuatu kepada pihak sekolah dengan berkirim surat atau dengan telepon demi kemajuan sekolah?
3. Apakah saudara terlibat aktif untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan di sekolah ?
4. Apakah saudara pernah berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
5. Apakah pihak sekolah mengundang saudara dalam penyusunan program dan kegiatan sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
6. Bagaimana bentuk partisipasi saudara dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
7. Bagaimana pendapat saudara dengan keikutsertaan saudara dan masyarakat lainnya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?

D. Faktor yang Menunjang Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

1. Apakah menurut saudara berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan itu perlu ?
2. Apakah menurut saudara berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu penting ?
3. Apakah saudara setuju jika pihak sekolah mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
4. Faktor apa saja yang saudara rasakan sebagai penunjang atau pendukung saudara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah baik yang datang dari dalam maupun dari luar diri saudara sendiri ?
5. Faktor apa saja yang saudara rasakan sebagai penunjang atau pendukung saudara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan

perencanaan pendidikan di sekolah yang datang dari kebiasaan hidup masyarakat sekitar anda ?

E. Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan Pendidikan

1. Apakah saudara merasa kesulitan dalam berpartisipasi membantu sekolah dalam kegiatan pendidikan ?
2. Apakah saudara merasa kesulitan dalam berpartisipasi membantu sekolah untuk memutuskan dan menyusun kegiatan serta menjalankan programnya terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
3. Apakah saudara merasa kesulitan jika pihak sekolah mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah ?
4. Faktor apa saja yang saudara rasakan sebagai penghambat saudara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah yang datang dari dalam maupun dari luar diri saudara sendiri ?
5. Faktor apa saja yang saudara rasakan sebagai penghambat saudara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah yang datang dari kebiasaan hidup masyarakat sekitar anda ?

Lampiran 2 :

PEDOMAN OBSERVASI

No	Informasi yang Dicari	Sumber Data	Bentuk Data
1	Pemahaman masyarakat terhadap partisipasinya dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung
2	Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung
3	Bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung
4	Faktor yang menunjang partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah

	masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung
5	Faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung
6	Bentuk pengembangan dan hasil pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sekolah ➤ Wakil Kepala Sekolah ➤ Kepala tata usaha ➤ Guru-guru ➤ Kepala Dusun ➤ Tokoh Agama ➤ Tokoh masyarakat ➤ Orang tua siswa ➤ Komite sekolah ➤ Alumni 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program sekolah ➤ Program komite sekolah ➤ Hasil wawancara ➤ Dokumen-dokumen yang relevan ➤ Photo-photo pendukung

Lampiran 3 :

DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN

A. Orang Tua Siswa

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bapak Tamaf	Dusun Tomber Desa Labulia	Petani
2	Bapak Yani	Dusun Labulia Desa Labulia	Pedagang
3	Bapak Sam	Dusun Tandek Desa Labulia	Petani
4	Bapak Siba	Dusun Tomber Desa Labulia	Wiraswasta
5	Bapak Har	Dusun Tandek Desa Labulia	Tukang
6	Ibu Fatma	Dusun Labulia Desa Labulia	Ibu RT
7	Ibu Elah	Dusun Tandek Desa Labulia	TKI
8	Ibu Hani	Dusun Labulia Desa Labulia	Ibu RT
9	Ibu Munah	Dusun Olor Agung Labulia	Petani
10	Bapak Mal	Dusun Sulin Desa Labulia	Peternak

B. Alumni

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Saudara Masrah	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru M.Ts
2	Saudara Awan	Dusun Tomber Desa Labulia	Guru M.Ts
3	Saudara Roni	Dusun Tandek Desa Labulia	Karyawan
4	Saudara Toni	Dusun Sulin Desa Labulia	Guru MA
5	Saudari Ani	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru MA

C. Tokoh Agama

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bapak Neng	Dusun Labulia Desa Labulia	Fani & Dagang
2	Ust. Waiz, S.Pd.I	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru Yayasan

D. Tokoh Masyarakat

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd.I	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru MA & M.ts
2	Bapak H. Kemal	Dusun Tandek Desa Labulia	Petani

E. Kepala Dusun

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bapak Zuki	Dusun Olor Agung Labulia	Petani & Kadus
2	Bapak Yar	Dusun Tandek Desa Labulia	Petani & Kadus
3	Bapak Lalu Budin	Dusun Sulin Desa Labulia	Pedagang & Kadus
4	Bapak Sman	Dusun Sulin Desa Labulia	Pedagang & Kadus
5	Bapak Idi	Dusun Labulia Desa Labulia	Petani & Kadus

F. Guru

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bapak Herman	Dusun Olor Agung Labulia	Kepala TU
2	Bapak Lalu Artha, S.Pd	Desa Batu Tulis	Guru
3	Bapak Hardi, S.Pd	Wareng Kandel Labulia	Guru
4	H. Denan, S.Pd.I	Dusun Kubur Jaran	Guru
5	Ibu Icha, S.Pd	Dusun Labulia Desa Labulia	Guru
6	Ibu, Hamah, S.Pd	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru
7	Ibu Lale Aini, S.Pd.I	Dusun Sulin Desa Labulia	Guru
8	Bapak Yan, S.Pd	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru
9	Ibu Herma, S.Pd.I	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru

G. Komite Sekolah

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1	Bapak Awir, S.Pd	Dusun Tandek Desa Labulia	Guru
2	Ibu Lulu, S.Pd	Dusun Batu Beduk Sukarara	Guru

Lampiran 4:

HASIL WAWANCARA

A. Orang Tua Siswa

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman orang tua siswa tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Hasil Pengukuran Akhir	
1	Bapak Yani	Saya belum pernah mendengar dan tidak tahu istilah partisipasi masyarakat dalam pendidikan, apalagi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Tetapi saya sering ikut serta dalam rapat dan undangan-undangan berbagai kegiatan sekolah sebagaimana undangan yang saya terima. Meskipun saya tidak tahu tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tetapi saya menyadari kewajiban saya sebagai orang tua untuk membayar berbagai iuran sekolah dan sumbangan pembangunan yang diminta oleh pihak sekolah. Saya hanya bisa membantu pihak sekolah dengan membayar iuran yang diminta tersebut dan ikut mengontrol dan mengawasi kegiatan belajar anak saya dirumah.	Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya tau itu adalah bagaimana keterlibatan kami sebagai orang tua dalam ikut memutuskan berbagai kebijakan dan aturan yang akan ditetapkan sekolah. Karena berdasarkan sosialisasi dari peneliti dan kepala sekolah kemarin, seperti itu yang dapat saya beritahukan. Seperti keterlibatan saya dalam mengambil keputusan masalah biaya semester, sumbangan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk menetapkan denda bagi siswa yang menikah. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan yang saya ketahui adalah keterlibatan kami sebagai orang tua untuk ikut menentukan program kerja sekolah kedepannya. Sebelumnya kami hanya diberitahukan oleh pihak sekolah tentang	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Tamaf, bapak Siba, bapak Sam, bapak Har, Ibu Fatma, dan Ibu Munah.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Sam, bapak Siba, ibu Hani dan ibu Fatma</p>

			apa program kerja sekolah selama ini. Tapi sekarang Alhamdulillah kami sudah diajak untuk ikut dalam berbagai perencanaan di sekolah seperti perencanaan kurikulum kemarin, pengadaan sarana prasarana ketika acara wisuda siswa kelas XII. Dan perencanaan semester juga kami diundang pihak sekolah agar mempersiapkan dan membantu mengontrol belajar anak di rumah.	
2	Ibu Hani	Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah ikut serta dalam berbagai kegiatan di sekolah demi kemajuan sekolah. Kegiatan yang sering diikuti adalah seperti kegiatan rapat wali murid, kegiatan gotong royong disekolah, dan kegiatan lainnya. Sedangkan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya pahami adalah proses mengambil keputusan terhadap sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah, dan saya sering terlibat dalam pengambilan keputusan ketika rapat penentuan biaya semester, sumbangan pembangunan dan biaya ujian sekolah siswa-siswi. Namun partisipasi dalam perencanaan pendidikan belum pernah	Menurut saya partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah ikut mendukung dan melaksanakan pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan sekolah seperti pengambilan keputusan besarnya biaya semester, biaya ujian kelas XII seperti yang saya ikuti dua bulan yang lalu, besarnya sumbangan pembangunan dan denda siswa yang menikah semasih sekolah. Selama ini saya memang sering terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi saya belum memahami sepenuhnya bahwa keterlibatan saya itu merupakan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Setelah adanya sosialisasi oleh kepala sekolah, sekarang saya sudah tahu bahwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Mal dan ibu Elah 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yani, bapak Mal, bapak Siba, bapak Sam dan ibu Fatma.

		saya dengar dan saya tidak tahu apa itu partisipasi dalam perencanaan pendidikan, karena memang pihak sekolah dan kepala sekolah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan dan juga masyarakat tidak pernah diajak dalam kegiatan perencanaan pendidikan.	keterlibatan saya itu merupakan bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan menurut saya merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pendidikan seperti perencanaan kurikulum, perencanaan bidang kesiswaan dan perencanaan program sekolah. Sebelumnya memang saya belum pernah dilibatkan dalam perencanaan di sekolah, tetapi sekarang saya sudah dilibatkan dalam perencanaan kurikulum dan pengadaan sarana prasarana sekolah, sehingga saya sudah paham bagaimana rasanya ikut terlibat dalam perencanaan pendidikan di sekolah.	
3	Ibu Elah	Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah keikutsertaan orang tua dan masyarakat lainnya dalam pembelajaran di sekolah dan dalam berbagai kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun saya pribadi jarang sekali terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah seperti rapat wali murid, gotong royong dan pembagian raport siswa karena saya tidak ada di rumah dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Selama ini	Menurut saya partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah keikutsertaan kita sebagai orang tua untuk ikut mengambil keputusan bersama sekolah dalam rangka kemajuan pendidikan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan yang saya pernah dilibatkan setelah sosialisasi oleh pihak sekolah dan peneliti adalah pengambilan keputusan dalam memutuskan besarnya biaya semester yang bertepatan dengan acara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Elah sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Mal dan Ibu Hani 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan ibu Elah sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Tamaf, bapak Har,

	baru beberapa kali saja saya ikut menghadiri rapat dan kegiatan sekolah ketika saya pulang mudik saja. Tapi saya memahami partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Terkait dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses mengambil kesimpulan seperti masalah biaya semester, sumbangan pembangunan, dan sumbangan-sumbangan lainnya sehingga masyarakat sering diikutsertakan dalam proses itu. Akan tetapi dalam hal perencanaan pendidikan setahu saya masyarakat tidak pernah diikutsertakan. Dan saya juga tidak paham tentang hal itu karena tidak pernah dilibatkan.	sosialisasi dari kepala sekolah dan peneliti. Selain itu, pengambilan keputusan terkait dengan masalah sumbangan pembangunan. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan dan ikut serta merencanakan kegiatan pendidikan seperti perencanaan kurikulum, perencanaan bidang kesiswaan, dan perencanaan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang pernah saya ikuti kemarin bersama pihak sekolah dan masyarakat lainnya dalam rapat perencanaan kegiatan itu.	dan ibu Munah
--	--	--	---------------

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ibu Hani	Selama saya mengikuti berbagai kegiatan di sekolah terutama dalam kegiatan rapat masalah biaya semester, biaya ujian anak saya, dan besarnya sumbangan pembangunan, yang saya sering lihat	Yang saya lihat selama ini yang selalu diundang untuk hadir dan dilibatkan dalam rapat pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah orang tua siswa pastinya, tokoh agama,	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yani, Bapak Sam,

	hadir dan terlibat selain orang tua siswa adalah komite sekolah jika berkaitan dengan masalah keuangan, para tokoh masyarakat dan kepala dusun serta tokoh agama juga jika berkaitan dengan masalah sumbangan pembangunan. Karena dalam proses pengambilan keputusan soal pembangunan tidak bisa hanya diputuskan oleh orang tua siswa saja, tetapi para tokoh-tokoh dalam masyarakat juga harus terlibat.	tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, dan komite bersama pihak sekolah dan yayasan. Itu yang sering saya temukan untuk berpartisipasi di sekolah. Setelah kegiatan pengembangan juga yang hadir ya...mereka-mereka itu. Sekolah sudah mengupayakan adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang semulanya belum pernah dilibatkan.	bapak Har, bapak Siba, Bapak Mal, ibu Elah, ibu Munah, dan ibu Fatma. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan para orang tua lainnya seperti dalam tahap studi awal.
--	--	--	---

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Yani	Dalam pengambilan keputusan, saya sering diajak untuk memutuskan besarnya biaya semester yang harus dibayarkan oleh anak saya. Selain itu juga saya pernah diajak untuk memutuskan besarnya sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa pada saat sekolah melakukan pembangunan gedung baru. Dan biasanya caranya dilakukan dengan mengajak rapat dan memutuskan	Selama saya berpartisipasi di sekolah dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, saya sedikit heran karena ternyata ada sedikit perubahan dalam prosesnya. Biasanya selama ini kita hanya diajak rapat pengambilan keputusan dengan memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Kemudian hasilnya dibuatkan surat keputusan oleh kepala sekolah dan diinformasikan kepada masyarakat. Tetapi	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Har, bapak Tamaf, bapak Mal dan Ibu Elah. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak tamaf, bapak Sam,

		berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Hasil keputusan disampaikan lagi pada masyarakat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, saya tidak pernah dilibatkan. Jadi saya tidak tahu apa yang harus kita kerjakan.	sekarang kita disuruh mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil keputusan dan perencanaan yang telah kita sepakati. Baru kemudian dibuatkan bukti tertulis hasil kesepakatan dan di buat surat keputusan kepala sekolah.	bapak Har, ibu Elah dan ibu Fatma.
2	Ibu Hani	Para orang tua siswa sering diundang dalam rapat-rapat di sekolah. Dan kami selalu hadir untuk mengikuti rapat tersebut. Dalam rapat pengambilan keputusan, orang tua siswa selalu dilibatkan untuk mengambil keputusan terkait dengan biaya semester anak, biaya ujian, dan juga sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan orang tua siswa. Semua kegiatan itu selalu mengundang orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, komite sekolah dan masyarakat lainnya untuk memutuskan besarnya biaya yang harus dikeluarkan terutama masalah sumbangan pembangunan. Sehingga sekolah tidak menentukan sendiri besarnya biaya itu, melainkan memutuskan bersama-sama dengan masyarakat. Hasil keputusan	Kalau sekarang setelah pengembangan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah dengan hadir dalam rapat dan memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya meminta anggota masyarakat yang hadir untuk mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah agar tidak ada protes lagi dari masyarakat. Dan diinformasikan lagi kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Sam, bapak Siba, dan ibu Munah. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Sam, bapak Siba, ibu Fatma, dan bapak Mal.

		disampaikan lagi pada masyarakat berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, kami tidak pernah dilibatkan selama ini, jadi kami tidak tahu bagaimana cara terlibat dalam kegiatan itu karena kami tidak pernah diajak.		
--	--	--	--	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Yani	Saya sebagai orang tua berusaha agar anak-anak Saya bisa bersekolah, agar tidak seperti saya yang tidak tamat SMP karena tidak bersekolah. Saya juga tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anak saya ke sekolah negeri, karena pasti bayarannya lebih mahal. Tapi di sekolah ini anak-anak kami tidak membayar iuran komite, cukup membayar uang semester saja dan sumbangan pembangunan. Itu yang membuat kami bersyukur karena ada keringanan biaya sehingga anak-anak saya tetap bisa bersekolah. Selain itu jarak sekolah ini juga dekat dengan rumah, sehingga bisa	Faktor yang membuat saya mau berpartisipasi di sekolah baik dalam kegiatan pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan adalah karena saya ingin mengetahui langsung bagaimana jika terlibat secara langsung, sehingga hasil kegiatannya tidak perlu saya tanyakan kepada orang lain karena belum tentu lengkap informasi yang saya dapatkan dari orang lain. Selain itu juga adalah karena rasa memiliki terhadap sekolah yang ada dilingkungan kita sehingga kita juga harus membantu sekolah dalam berbagai kegiatannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Tamaf, bapak Sam, bapak Har, bapak Siba, bapak Mal, ibu Fatma, ibu Munah, dan ibu Hani 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan orang tua siswa

		memudahkan saya sebagai orang tua untuk ikut mengawasi proses belajar anak saya.		lainnya sebagaimana dalam tahap studi awal.
2	Ibu Elah	Menurut saya faktor yang menunjang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan seperti menetapkan biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, acara wisuda, denda bagi siswa yang menikah adalah karena ingin mengetahui secara langsung hasil keputusan itu agar jelas dan tidak menunggu dari orang lain. Selain itu karena memang sekolah selalu mengajak masyarakat untuk ikut mengambil keputusan di sekolah, adanya rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sekolah, dan karena sekolah berada disekitar lingkungan masyarakat sehingga mau tidak mau harus ikut membantu memajukan sekolah. Sedangkan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan tidak dapat saya jelaskan karena saya tidak pernah terlibat. Tapi jikalau terlibat pun saya rasa faktor penunjangnya tidak jauh berbeda dengan faktor prnunjang dalam	Sebelumnya pada pertemuan pertama pentingnya saya hadir untuk berpartisipasi di sekolah adalah untuk mengetahui perkembangan dan informasi sekolah dan bagaimana anak saya selama bersekolah. Tapi jikalau sekarang menurut saya yang menjadi faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah kesadaran pribadi tentang pentingnya keterlibatan dalam pendidikan, rasa memiliki terhadap sekolah, dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua siswa juga.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Elah sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Tamaf, bapak Sam, bapak Har, bapak Siba, bapak Mal, ibu Fatma, ibu Munah, dan ibu Hani 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan ibu Elah sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Har, bapak Sam, ibu Munah dan ibu Fatma.

		kegiatan pengambilan keputusan.		
--	--	---------------------------------	--	--

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ibu Hani	Saya tidak pernah tidak hadir untuk berbagai kegiatan di sekolah jika saya diundang. Saya selalu berusaha untuk ikut terlibat dan hadir dalam berbagai kegiatan untuk mengetahui informasi di sekolah secara langsung. Termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan seperti rapat penentuan biaya semester, rapat biaya ujian, dan rapat sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan. Selama ini saya sebagai orang tua sering diundang untuk kegiatan-kegiatan sekolah, dan saya tetap hadir kecuali kalau memang ada kesibukan lain yang membuat saya tidak bisa ikut dan jika tidak menerima undangan dari sekolah. Dalam perencanaan pendidikan saya tidak pernah diundang jadi saya tidak tahu mau memberikan informasi apa.	Selain faktor kesibukan lain, faktor sakit dan tidak mendapatkan undangan seperti yang sudah saya sebutkan dalam wawancara kita yang pertama kemarin, sekarang saya menambahkan bahwa ada juga faktor lain sebagai penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, seperti faktor lupa dan juga faktor tidak menerima undangan karena undangan yang dikirim tidak sampai kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pihak sekolah suka menitipkan undangan pada siswa sehingga kadang siswa lupa untuk menyampaikannya kepada yang dituju.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Hani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yani, bapak, Tamaf, bapak, Sam, bapak Siba, bapak Mal, bapak Har, ibu Elah, ibu Munah dan ibu Fatma. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir sejalan dengan hasil wawancara dengan para orang tua lainnya dalam tahap studi awal.

2	Bapak Yani	<p>Selama ini jika pihak sekolah mengundang saya dalam berbagai kegiatan, saya selalu hadir. Meskipun terkadang tidak sempat, pasti istri saya yang menggantikan. Jadi faktor yang kemungkinan membuat saya tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan adalah karena sakit, karena ada acara atau kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dan karena memang tidak mendapatkan undangan dari pihak sekolah. Saya rasa itu faktor penghambatnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan saya juga tidak tahu sebagaimana dalam faktor penunjang tadi, karena memang belum pernah ikut terlibat dalam perencanaan pendidikan.</p>	<p>Saya rasa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan masih tetap sama jawabannya seperti penjelasan saya yang lalu pada pertemuan kita yang pertama (tahap studi awal), bahwa yang menjadi faktor penghambatnya adalah karena ada kegiatan lain atau kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan yang bertepatan dengan undangan di sekolah sehingga saya tidak bisa hadir. Dan juga karena tidak diundang oleh pihak sekolah dan karena sedang sakit yang membuat saya tidak hadir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yani, bapak, Tamaf, bapak, Sam, bapak Siba, bapak Mal, bapak Har, ibu Elah, ibu Hani, ibu Munah dan ibu Fatma. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Yani sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Siba, bapak Har, bapak Tamaf, bapak Mal, bapak Sam, ibu Elah, ibu Fatma, ibu Hani dan ibu Munah
---	------------	--	---	---

B. Alumni

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Saudara Roni	Saya tidak tahu apa itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan karena saya tidak pernah mendengar istilah tersebut. Tetapi jika ditanya tentang keterlibatan masyarakat di sekolah, saya bisa menjawab bahwa keterlibatan masyarakat di sekolah itu merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah dan ikut membantu menjaga lingkungan sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan saja saya baru dengar sekarang, apalagi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sama sekali saya tidak pernah mendengar dan tidak saya tahu karena saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut.	Meskipun sebelumnya saya belum pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah. tapi sekarang setelah sosialisasi kepala sekolah bersama peneliti kemarin membuat saya sudah bisa menjelaskan apa itu partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keikutsertaan masyarakat termasuk saya sebagai alumni dalam memutuskan berbagai keputusan dari berbagai kebijakan yang akan ditetapkan sekolah seperti memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, besarnya sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan masyarakat, dan memutuskan tata tertib yang akan dibuat sekolah. Karena semua itu membutuhkan kesepakatan dari masyarakat, sehingga harus dirapatkan dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Roni sejalan dengan hasil wawancara dengan saudari Ani, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Rni sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd, Toni, S.Pd dan saudari Ani, S.Pd.</p>

			<p>masyarakat. Sedangkan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan berbagai kegiatan dan program sekolah kedepannya seperti perencanaan kurikulum, perencanaan sarana prasarana, perencanaan program kerja sekolah, dan perencanaan kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII. Itu yang dapat saya jelaskan.</p>	
2	Saudara Masrah, S.Pd	<p>Partisipasi masyarakat adalah bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam mengembangkan pendidikan di sekolah dan ikut serta dalam berbagai kegiatan di sekolah. Salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah dengan menggerakkan para orang tua agar mengarahkan anak-anak mereka untuk bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berarti partisipasi dalam bentuk ikut serta mengambil sebuah keputusan terkait dengan kebijakan yang ingin ditetapkan oleh sekolah. Dan keterlibatan kami selama ini hanya ikut dalam rapat bersama komite tentang</p>	<p>Menurut saya baik sebagai alumni atau sebagai masyarakat umum bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan seperti biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan dan juga masalah yang berkaitan dengan denda nikah bagi siswa yang menikah di saat masih sekolah. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada suara terbanyak dari masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan itu adalah bagaimana masyarakat harus dilibatkan dalam merencanakan berbagai perencanaan di sekolah karena kunci kemajuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Masrah, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni, dan saudari Ani, S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Masrah, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan para alumni lainnya

	<p>sumbangan pembangunan gedung baru. Akan tetapi kalau partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menentukan program-program sekolah. Namun selama ini keterlibatan masyarakat hanya dalam proses pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat belum pernah diikutsertakan, terlebih-lebih kami sebagai alumni tidak pernah dilibatkan karena perencanaan pendidikan hanya dilakukan oleh internal sekolah saja.</p>	<p>pendidikan adalah dengan terlibatnya masyarakat. Selain itu, partisipasi dalam perencanaan pendidikan juga merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program tambahan sekolah seperti masalah kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah.</p>	<p>yaitu saudara Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni, dan saudari Ani, S.Pd.</p>
--	--	---	---

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Saudara Masrah, S.Pd.I	Setahu kami selama kami bersekolah di sini sampai dengan sekarang setelah kami menjadi guru di sini, masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah terlebih dalam kegiatan pengambilan keputusan itu adalah para wali siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun dan	Saya sebagai alumni memang sering dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan di sekolah seperti yang berkaitan dengan besarnya sumbangan pembangunan, pengambilan keputusan tentang pelaksanaan ujian dan semester, keputusan tentang proses pembelajaran, dan pengambilan keputusan tentang	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Masrah, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan alumni yang lainnya atas nama saudara

		<p>kepala desa meskipun jarang sempat untuk hadir. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan mereka semua ini mungkin tidak dilibatkan karena itu hanya berkaitan dengan internal sekolah sehingga masyarakat tidak dilibatkan oleh pihak sekolah.</p>	<p>pelaksanaan kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII maupun kegiatan yang berkaitan dengan ijin pemondokan siswa menjelang ujian. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan, Alhamdulillah setelah kegiatan pengembangan yang dilakukan peneliti bersama kepala sekolah telah banyak memberikan pemahaman dan melibatkan kami sebagai alumni dan masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang sebelumnya jarang sekali melibatkan masyarakat. Seperti yang telah dilakukan dalam berbagai kegiatan perencanaan bidang kurikulum, pembangunan, bidang keuangan, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana. Semua itu telah banyak mengaktifkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Baik kami sebagai alumni, orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, kepala dusun, pihak sekolah beserta kepala sekolah dan anggota yayasan.</p>	<p>Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni, dan saudari Ani, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Masrah, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan alumni lainnya yaitu saudara Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni, dan saudari Ani, S.Pd.</p>
--	--	---	--	--

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Saudara Awan, S.Pd	<p>Sebagaimana penjelasan yang diperoleh dari saudara Masrah, cara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah dengan mengadakan rapat dan memutuskan hasilnya dengan voting atau suara terbanyak dari masyarakat yang hadir, sehingga keputusan diserahkan pada masyarakat bukan kepada sekolah. Hasil rapat di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan kami sama sekali tidak pernah dilibatkan, sehingga saya tidak tahu apa dan bagaimana cara berpartisipasi dalam merencanakan pendidikan.</p>	<p>Sama seperti rekan-rekan lainnya dan masyarakat lainnya bahwa sekarang cara terlibatnya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam perencanaan pendidikan sudah mengalami penambahan cara tapi pada intinya sama saja. Semulanya hanya diajak rapat dengan memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Hasilnya dibuatkan surat keputusan oleh kepala sekolah dan diinformasikan kepada masyarakat. Sedangkan sekarang prosesnya tetap sama akan tetapi sekarang ada pengisian lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas hasil keputusan dan perencanaan yang telah disepakati. Kemudian dibuatkan surat keputusan kepala sekolah sebagai bukti hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati yang tidak bisa diganggu gugat.</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Awan, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Masrah, S.Pd.I, Toni, S.Pd, Roni dan saudari Ani, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Awan, S.Pd sejalan dengan para alumni lainnya sebagaimana dalam tahap studi awal.</p>

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Saudara Masrah, S.Pd.I	Faktor yang membuat masyarakat mau terlibat dan berpartisipasi di sekolah adalah karena memang sekolah ini berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat pasti merasa memiliki sekolah tersebut dan siap untuk ikut berperan di sekolah. Dalam pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena untuk memutuskan besarnya biaya pendidikan anak harus diputuskan bersama dengan masyarakat agar masyarakat juga tahu informasi dan kondisi pembiayaan sekolah. Dalam setiap kegiatan yang akan ditetapkan juga harus atas persetujuan masyarakat. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di bidang-bidang lainnya adalah demi menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat demi kemaslahatan kita bersama. Sedangkan faktor penunjang partisipasi dalam perencanaan pendidikan saya kurang tau karena tidak	Jadi faktor yang menunjang partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan selain yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya adalah karena dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan sekarang ini, kegiatan dan prosesnya dimudahkan oleh sekolah sehingga pelaksanaan dari kesepakatan yang dicapai tidak rumit. Dan juga tingkat religuitas masyarakat yang tinggi karena sekolah kita berbentuk madrasah dan yang sangat mendukung adalah karena adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Masrah, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Awan, S.Pd, Toni, S.Pd, Roni dan saudari Ani, S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Masrah, S.Pd sejalan dengan para alumni lainnya sebagaimana dalam tahap studi awal.

		pernah terlibat. Akan tetapi kalau masyarakat dilibatkan, saya rasa faktor yang menunjang partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan tidak jauh berbeda dengan faktor penunjang kegiatan pengambilan keputusan.		
--	--	--	--	--

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Saudara Toni, S.Pd.	Kalau yang saya lihat selama ini, masyarakat memang selalu diundang dalam berbagai kegiatan termasuk dalam pengambilan keputusan. Dan masyarakat selalu berkesempatan untuk hadir kecuali penghambat masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah hanya karena sakit, karena ada kesibukan lain dan mungkin karena lupa juga menjadi faktor ketidakbisaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kegiatan lainnya. Selama ini juga masyarakat yang tidak bisa hadir selalu digantikan oleh pihak keluarga lainnya. Mungkin itu yang dapat saya	Masyarakat biasanya terhalang atau terhambat untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah itu adalah karena mereka sakit, kemudian karena lupa, undangan tidak sampai atau karena lupa diundang oleh pihak sekolah, ada kesibukan lain yang lebih penting, dan jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan, karena Desa Labulia ini cukup luas sampai ke pelosok-pelosok terdalam. Inilah yang terkadang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah kita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan saudara Toni, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan saudara Masrah, S.Pd.I, Awan, S.Pd, Roni dan saudari Ani, S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan saudara Toni, S.Pd sejalan dengan para alumni

	<p>sampaikan sebagai faktor penghambatnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan saya rasa faktor penghambatnya adalah sama kalau masyarakat dikutsertakan, karena memang selama ini masyarakat belum pernah dilibatkan.</p>	<p>lainnya sebagaimana dalam tahap studi awal.</p>
--	---	--

C. Tokoh Agama

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Neng	<p>Partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah bagaimana mereka (masyarakat) mau menyekolahkan anaknya pada MA Hidayatul Muhsinin. Selain itu juga masyarakat mau memberikan sumbangsi kepada sekolah baik berupa pemikiran, moril, materil dan tenaga. Partisipasi juga merupakan dukungan masyarakat untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada dasarnya masyarakat sering diikutsertakan dalam</p>	<p>Dari hasil sosialisasi yang saya dapatkan dari peneliti dan kepala sekolah, dapat saya katakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan yang terkait dengan aturan, kebijakan dan kebutuhan sekolah. Termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan di sekolah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan itu</p>	<p>Hasil wawancara dengan bapak Neng dibenarkan juga oleh bapak Ust. Waiz, S.Pd.I.</p>

		<p>pengambilan keputusan di bidang agama, adat istiadat, dan pembangunan karena memang hal itu harus diputuskan bersama-sama dengan masyarakat. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan masyarakat masih belum banyak yang tau bagaimana seharusnya ikut serta dalam perencanaan pendidikan karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.</p>	<p>merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikut merencanakan berbagai perencanaan di sekolah, seperti perencanaan pengadaan sarana prasarana, perencanaan di bidang kesiswaan, bidang hubungan dengan masyarakat, dan perencanaan pembiayaan sekolah dan lainnya.</p>	
2	Ust. Waiz, S.Pd.I	<p>Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut saya adalah bagaimana tingkat kepedulian masyarakat terhadap sekolah. Bagaimana masyarakat ikut merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap sekolah, baik dalam proses kegiatan belajar mengajar anak di sekolah maupun di rumah ataupun dalam hal pengadaan sarana prasarana penunjang pembelajaran. Namun, jika masalah partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan memang sering melibatkan masyarakat terutama dalam hal membahas soal pembangunan gedung baru dan membuat tata tertib sekolah. Misalnya dalam hal pembangunan, masyarakat harus tahu berapa jumlah</p>	<p>Pemahaman saya terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berembuk dan bermusyawarah untuk menentukan dan memutuskan permasalahan-permasalahan dalam madrasah yang terkait dengan aturan dan kebijakan yang akan dibuat oleh madrasah. Dalam pengambilan keputusan itu melibatkan masyarakat guna memberikan saran dan masukan demi kemajuan sekolah, sehingga masyarakat sebagai penentu keputusan tidak bertanya lagi dan membatah hasil keputusan yang telah mereka buat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan</p>	<p>Hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd sejalan juga dengan hasil wawancara dengan bapak Neng.</p>

		<p>dana yang harus disediakan sekolah untuk membangun gedung kelas baru sehingga masyarakat bisa memutuskan besarnya sumbangan yang harus dikeluarkan guna membantu kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu dalam membauat tata tertib sekolah juga masyarakat harus dilibatkan karena aturan ini berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh penentuan awig-awig sekolah. Jika ada siswa yang menikah di usia sekolah maka bagaimana bentuk sanksi dan hukuman yang harus diberikan harus diputuskan bersama masyarakat dan tidak boleh ditentukan sendiri oleh pihak sekolah. Sedangkan terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan, saya rasa masyarakat masih belum sering dilibatkan.</p>	<p>masyarakat dalam ikut merencanakan bagaimana pendidikan kedepannya. Dibutuhkan kritikan, masukan dan saran dari masyarakat juga agar mereka tahu bagaimana program-program yang akan dijalankan sekolah dengan terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan tersebut. Dan kita telah upayakan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan pendidikan dan juga dalam proses pengambilan keputusan di sekolah.</p>	
--	--	--	--	--

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Neng	Jikalau saya lihat selama ini masyarakat yang sering dilibatkan dalam berbagai rapat dan kegiatan sekolah selain dari kami sebagai tokoh masyarakat ada dari pihak orang tua wali, tokoh agama, kepala desa dan kepala dusun, pihak sekolah dan komite sekolah. Terutama dalam hal mengambil keputusan terkait dengan aturan dan kebijakan sekolah. Tetapi dalam perencanaan pendidikan saya belum tau karena saya juga belum pernah dilibatkan.	Sekarang ini Alhamdulillah semua elemen masyarakat sudah mulai dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah dilibatkan sebelum adanya sosialisasi kepala sekolah dan peneliti tentang pentingnya partisipasi dalam pendidikan. Seperti dalam proses pengambilan keputusan masalah biaya semester, biaya ujian dan biaya lepas pisah atau wisuda siswa-siswi, maka masyarakat yang sering diajak adalah orang tua siswa, pihak sekolah, komite sekolah dan internal sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, kepala desa dan anggota yayasan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan pihak yang terlibat sama seperti masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan pengambilan keputusan.	Hasil wawancara dengan bapak Neng dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I baik tahap studi awal maupun tahap pengukuran akhir.

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Neng	Masyarakat selama ini hanya sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan saja, sedangkan dalam perencanaan pendidikan sama sekali belum pernah dilibatkan. Sehingga saya pribadi belum mengetahui bagaimana cara berpartisipasi dalam perencanaan pendidikan. Namun dalam hal pengambilan keputusan, jika berkaitan dengan masyarakat, kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dusunnya. Kemudian jika berkaitan dengan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah juga kita libatkan masyarakat tersebut untuk menentukan besarnya denda. Dan semua hasil keputusan bersama itu di buat surat keputusan kepala sekolah, sehingga tidak ada yang menolak hasil keputusan itu. Bidang partisipasi masyarakat lainnya juga di bidang agama, adat, dan bidang pembangunan. Kesemuanya mengajak masyarakat untuk memutuskan secara bersama-sama berdasarkan suara	Sekarang sekolah sudah banyak melibatkan masyarakat yang kita anggap berpotensi untuk dilibatkan, biar para anggota masyarakat ini ikut merasa bertanggung jawab terhadap sekolah. Dan biasanya bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah dengan terlibat langsung dalam rapat dan ikut memutuskan dan merencanakan pendidikan berdasarkan suara terbanyak. Hasil keputusan dibuat tertulis dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui surat. Disamping itu anggota masyarakat yang hadir harus mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari hasil keputusan dan perencanaan. Kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah biar tidak ada masyarakat yang protes kembali dari hasil keputusan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Surat keputusan dan lembar pertanggungjawaban ini sebagai bukti bahwa keputusan dan perencanaan	Hasil wawancara dengan bapak Neng dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I baik tahap studi awal maupun tahap pengukuran akhir.

		terbanyak dari hasil rapat.	yang telah ditetapkan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun kecuali ada perubahan sesuai kesepakatan bersama.	
--	--	-----------------------------	---	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Neng	Menurut saya faktor pendukung masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pengambilan keputusan adalah karena adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah ini, kepedulian sekolah terhadap masyarakat karena membutuhkan dukungan masyarakat agar sekolah tetap maju demi keberlangsungannya, dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui secara langsung terkait dengan kebijakan ataupun aturan serta kegiatan yang hendak ditetapkan sekolah. Namun dalam perencanaan pendidikan masih belum nampak faktor yang menunjangnya karena masyarakat masih belum dilibatkan dalam kegiatan tersebut.	Kalau sekarang setelah banyak mendapatkan sosialisasi tentang partisipasi dalam pendidikan, menurut saya bahwa faktor yang menunjang masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah karena masyarakat peduli terhadap sekolah, mereka ingin melihat sekolah atau madrasah kita maju, dan kegiatan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Seiring adanya tahap pengembangan yang dilakukan kepala sekolah dengan peneliti yang telah membuat sekolah mau berusaha dan berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Inilah yang membuat masyarakat merasa	Hasil wawancara dengan bapak Neng dibenarkan juga oleh bapak Ust. Waiz, S.Pd.I.

			memiliki sekolah yang berada dilingkungan masyarakat.	
2	Ust. Waiz. S.Pd.I.	Faktor pendukung masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan baik dalam kegiatan pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan adalah karena adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah ini yang memang satu-satunya sekolah yang dianggap berperan penting di Desa Labulia dan Desa sekitarnya. Dalam pengambilan keputusan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan guna memutuskan suatu kebijakan yang harus ditetapkan sekolah agar mendapatkan hasil keputusan yang efektif, karena walau bagaimanapun masyarakat ini merupakan mitra kerja sekolah yang harus dilibatkan. Tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi terhadap sekolah. Salah satu contoh pada saat sekolah harus memutuskan besarnya denda bagi siswa kita yang menikah di usia sekolah membutuhkan keputusan dari masyarakat juga, karena ini urusannya berkaitan dengan masalah adat	Ada beberapa faktor yang menunjang masyarakat mau terlibat di sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, yakni karena jarak tempuh masyarakat yang dekat dengan sekolah sehingga memudahkan untuk hadir. Adanya rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan masyarakat Desa Labulia yang masih sangat erat. Adanya rasa peduli dan memiliki masyarakat terhadap sekolah. Dan kepedulian sekolah dengan selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut.	Hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Neng.

		yang ada dimasyarakat yang harus disesuaikan oleh sekolah. Begitu juga dengan pengambilan keputusan-keputusan lainnya harus melibatkan masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut belum ada, sehingga faktor penunjangnya belum bisa saya sampaikan.		
--	--	---	--	--

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Neng	Kalau saya lihat, selama proses pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan sekolah tentunya ada saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, seperti karena ada kesibukan tertentu dan karena tidak mendapat undangan dari pihak sekolah ataupun karena sakit. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan meskipun selama ini belum pernah melibatkan masyarakat, tetapi faktor penghambatnya sepertinya tidak akan jauh berbeda apabila sekolah melibatkan masyarakat	Menurut pemahaman saya sekarang yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah MA Hidayatul Muhsinin ini adalah masih kurang pahamiannya masyarakat terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pendidikan, tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi, dan juga adanya doktrin bahwa tidak berhasilnya sekolah karena siswanya banyak menganggur setelah lulus. Kemudian juga karena hal-hal diluar keinginan kita seperti karena dalam	Hasil wawancara dengan bapak Neng dibenarkan juga oleh bapak Ust. Waiz, S.Pd.I.

		nantinya. Jadi untuk saat ini belum bisa dipastikan 100% sama meskipun menurut saya sama. Semoga saja nantinya dalam perencanaan pendidikan melibatkan masyarakat, agar kita dapat mengetahui apa saja faktor penghambatnya.	keadaan sakit maupun karena lupa yang tidak kita inginkan. Jadi inilah faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak bisa untuk berpartisipasi. Hal ini tentunya membutuhkan upaya yang terus menerus dan berkepanjangan dari sekolah dengan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya berpartisipasi di sekolah agar mengurangi tingkat hambatan yang dapat menjadi penghambat partisipasi masyarakat di sekolah kita ini.	
2	Ust. Waiz, S.Pd.I.	Dalam pengambilan keputusan selalu kita mengundang masyarakat. Terutama pengambilan keputusan yang sifatnya berkaitan dengan masyarakat, maka pasti masyarakat kita undang karena segala sesuatu berupa kebijakan yang akan ditetapkan sekolah harus melibatkan dan diputuskan bersama masyarakat. Begitu juga dengan bidang-bidang partisipasi yang lainnya seperti bidang agama, budaya dan adat. Sebagai contoh penetapan besarnya denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah harus diputuskan dengan masyarakat karena berkaitan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Dan hasil	Jadi kalau saya lihat bahwa yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan itu adalah karena ada kesibukan lain seperti bertani karena memang masyarakat kita dominan sebagai petani, atau mungkin berdagang, dan bekerja sebagai buruh dan juga sebagai peternak. Selain itu juga karena ada acara keluarga atau karena ada keluarga dan tetangga yang meninggal atau menggelar syukuran lainnya yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kemudian karena tidak mendapatkan informasi atau undangan, dan selanjutnya mungkin karena dalam keadaan sakit	Hasil wawancara dengan Ust. Waiz, S.Pd.I sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Neng.

		<p>keputusan itu di SK-kan oleh kepala sekolah sehingga tidak ada yang membantah hasil keputusan tersebut. Selama proses pengambilan keputusan dalam berbagai kegiatan dan kebijakan sekolah selama ini memang ada saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut, seperti ketidakhadiran dengan alasan tertentu dan karena tidak mendapat undangan dari pihak sekolah ataupun karena sakit. Karena tidak mungkin semua masyarakat kita undang, kecuali yang ada hubungannya dengan sekolah seperti orang tua siswa, komite, guru-guru, staf TU, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan kepala dusun setempat. Sedangkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan memang belum pernah melibatkan masyarakat, tetapi melihat partisipasi masyarakat selama ini dalam proses pengambilan keputusan, maka faktor penghambatnya sepertinya tidak akan jauh berbeda dalam kegiatan perencanaan pendidikan apabila sekolah melibatkan masyarakat.</p>	<p>sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi. Saya rasa itulah yang menjadi faktor penghambat ketidakhadiran masyarakat untuk berpartisipasi.</p>	
--	--	--	---	--

D. Tokoh Masyarakat

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd	Yang saya ketahui tentang partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu adalah bagaimana masyarakat mau terlibat di sekolah dengan menyarankan anaknya untuk bersekolah di MA Hidayatul Muhsinin. Selain itu juga masyarakat mau memberikan sumbangsi kepada sekolah baik berupa pemikiran, moril, materil dan tenaga. Partisipasi juga merupakan dukungan masyarakat untuk memajukan sekolah secara bersama-sama. Terkait dengan masalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pada dasarnya masyarakat sering diikutsertakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembiayaan dan keuangan di sekolah, masalah sumbangan dan kegiatan pembangunan, rapat wali murid terkait masalah biaya semester dan ujian, dan pembuatan tata tertib atau awig-awig di sekolah karena memang hal itu harus diputuskan	Pemahaman saya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan upaya sekolah dengan bagaimana caranya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam berbagai bidang pengambilan keputusan seperti bidang sarana parsarana, bidang kurikulum, bidang pembangunan, bidang kesiswaan dan bidang hubungan dengan masyarakat. Selain itu partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan materi seperti biaya ujian, biaya semester, denda siswa yang menikah dan besarnya sumbangan pembangunan. Dan yang berkaitan dengan non materil seperti kegiatan pengajian dan gotong royong, semua itu harus diputuskan bersama dengan masyarakat. Sedangkan pemahaman saya terhadap partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan adalah mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan Ust. Al-Hakimi S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal</p>

	bersama-sama dengan masyarakat. Sebagai contoh, apabila ada siswa yang menikah di usia sekolah maka sanksi dan hukuman tidak bisa langsung diberikan oleh sekolah tanpa ada persetujuan dari masyarakat karena sekolah adalah milik masyarakat dan berada di lingkungan masyarakat. Sedangkan dalam proses perencanaan pendidikan masyarakat masih belum banyak yang tau bagaimana seharusnya ikut serta dalam perencanaan pendidikan karena masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.	seperti perencanaan kurikulum masyarakat ikut dilibatkan, perencanaan sarana prasarana masyarakat ikut mendukung pendanaan, perencanaan bidang kesiswaan melibatkan orang tua untuk ikut mengawasi dan mengontrol pembelajaran anak baik di sekolah maupun di rumah, dan perencanaan bidang hubungan dengan masyarakat mereka terlibat dalam berbagai kegiatan seperti dalam kegiatan PHBI dan Karnaval hari besar agama islam. Semua masyarakat kita upayakan untuk terlibat secara langsung sehingga mereka tahu apa dan bagaimana yang dilakukan sekolah dan mereka tidak bertanya kepada orang lain terkait informasi itu karena sudah mengetahuinya langsung dan bahkan langsung dilibatkan oleh sekolah.	
--	--	--	--

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd	Dalam proses pengambilan keputusan masyarakat selalu diikutsertakan karena sekolah membutuhkan masukan dan keputusan dari masyarakat. Contohnya	Menurut saya selama ini yang selalu diundang oleh pihak sekolah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd

		<p>dalam menentukan masalah keuangan, baik masalah biaya semester, biaya ujian dan biaya lepas pisah atau wisuda siswa-siswi, maka masyarakat yang sering diajak adalah orang tua siswa, komite sekolah dan internal sekolah. Dalam memutuskan besarnya sumbangan pembangunan, masalah agama, masalah adat dan tata tertib sekolah, selain orang tua siswa dan komite, ditambah juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, kepala desa, serta perangkat desa lainnya dan anggota yayasan dengan pihak internal sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan pihak yang terlibat hanya internal sekolah saja karena masyarakat belum pernah diikutsertakan baik dalam perencanaan kurikulum, perencanaan sarana prasarana, perencanaan program-program sekolah dan perencanaan pembelajaran.</p>	<p>dan perencanaan pendidikan adalah orang tua siswa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alumni, kepala desa, kepala dusun dan komite sebagai penyambung lidah antara sekolah dengan masyarakat. Disamping itu juga menghadirkan beberapa anggota yayasan dengan semua dewan guru dan staf tata usaha. Semua masyarakat ini kita upayakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ataupun dalam berbagai kegiatan lainnya karena memang sekolah membutuhkan masyarakat untuk membantunya dalam mengambil sebuah keputusan yang akan ditetapkan dan perencanaan yang akan dijalankan. Karena sekolah berada di lingkungan masyarakat, sehingga mau tidak mau sekolah harus melibatkan masyarakat demi keberlangsungannya.</p>	<p>dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan Ust. Al-Hakimi S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal</p>
--	--	--	--	---

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd	Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sering dilibatkan. Jika pengambilan keputusan yang urusannya berkaitan dengan masyarakat, kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala dusunnya. Kemudian jika berkaitan dengan denda bagi siswa yang menikah di usia sekolah, MTR dan KUA juga kita libatkan untuk menentukan besarnya denda, disamping tokoh adat, agama, tokoh masyarakat dan kepala dusun dimana sumber murid kita berasal. Dan semua hasil keputusan bersama itu kita SK-kan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak hasil keputusan itu. Bidang partisipasi masyarakat lainnya juga di bidang agama, adat, dan bidang pembangunan. Kesemuanya mengajak masyarakat untuk memutuskan secara bersama-sama berdasarkan suara terbanyak dari hasil rapat. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan untuk menentukan program sekolah, bidang kurikulum, sarana	Sekarang ini kita akan benar-benar mengupayakan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Biar masyarakat tahu bagaimana yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan oleh pihak sekolah dalam mensukseskan pendidikan di sekolah. Dan alhamdulillah sekarang ini kita sudah banyak melibatkan masyarakat yang kita anggap berpotensi untuk dilibatkan, biar para anggota masyarakat ini ikut merasa bertanggung jawab terhadap sekolah. Karena sekolah berada dilingkungan masyarakat sehingga membutuhkan partisipasi dari masyarakat berupa ide-ide, masukan, kritikan dan saran untuk kemajuan sekolah kedepannya. Dan biasanya bentuk partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah dengan terlibat langsung dalam rapat dan ikut memutuskan dan merencanakan pendidikan berdasarkan	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan Ust. Al-Hakimi S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal</p>

		<p>prasarana dan program lainnya, sekolah hanya melibatkan komite, tokoh pengurus, dan tokoh agama yang bisa memberikan andil di madrasah. Sedangkan wali murid dan masyarakat lainnya hanya cukup kita sosialisasikan saja hasil perencanaan pendidikan yang telah dibuat.</p>	<p>suara terbanyak. Hasil keputusan dibuat tertulis dan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui surat. Disamping itu anggota masyarakat yang hadir harus mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari hasil keputusan dan perencanaan. Kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah biar tidak ada masyarakat yang protes kembali dari hasil keputusan dan perencanaan bersama yang telah ditetapkan.</p>	
--	--	---	---	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd	<p>Faktor yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi di sekolah baik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun bidang yang lain adalah lebih kepada kesadaran masyarakat untuk terlibat di sekolah. Sebagai contoh, orang tua menyekolahkan anaknya di MA Hidayatul Muhsinin, berarti mereka merasa ikut bertanggung jawab terhadap</p>	<p>Jadi menurut saya bahwa faktor yang menunjang masyarakat itu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah kita adalah karena mereka ingin melihat sekolah atau madrasah kita maju, kemudian mereka juga paham akan pentingnya pendidikan dan partisipasi dalam pendidikan sebagaimana yang telah disosialisasi kemarin oleh peneliti dengan</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal. 2. Hasil wawancara tahap</p>

		<p>anak-anak mereka dan ikut mengawasi jalannya proses pembelajaran di sekolah. Dalam pengambilan keputusan memang pihak sekolah selalu mengikutsertakan masyarakat dalam mengambil keputusan, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat seperti keputusan besarnya denda bagi anak yang menikah di usia sekolah. Itu harus diputuskan dengan masyarakat sehingga tidak ada penolakan lagi dari hasil keputusan itu. Dan itu semua kita SK-kan sebagai hasil keputusan bersama dengan masyarakat. Begitu juga dalam bidang pengambilan keputusan lainnya seperti bidang agama, adat, kebudayaan, keuangan dan lainnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting sekali. Dalam perencanaan pendidikan juga faktor penunjangnya tidak jauh berbeda dengan proses pengambilan keputusan, hanya saja selama ini memang sekolah belum pernah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pendidikan di sekolah kecuali komite dan internal sekolah saja. akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor penunjang</p>	<p>kepala sekolah, dan kegiatan pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi itu menurut saya faktor penunjangnya. Dan alhamdulillah semua faktor penunjang ini dapat nampak terlihat seiring adanya tahap pengembangan yang telah membuat sekolah berupaya untuk selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.</p>	<p>pengukuran akhir dengan Ust. Al-Hakimi S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal</p>
--	--	---	--	--

	partisipasi dalam pengambilan keputusan juga sebagai faktor-faktor penunjang partisipasi dalam perencanaan pendidikan bila melibatkan masyarakat.		
--	---	--	--

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ust. Al-Hakimi, S.Pd	Jika berbicara tentang faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, baik dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan pendidikan, dapat dikatakan bahwa faktor penghambatnya tentu saja sangat banyak. Baik di sekolah kita ini maupun di sekolah lainnya. Tapi yang saya lihat selama ini jika melibatkan masyarakat dalam berbagai hal, terutama dalam pengambilan keputusan, biasanya yang menjadi faktor penghambat mereka hanya karena ada kesibukan lainnya sehingga tidak bisa menyempatkan diri untuk hadir. Akan tetapi biasanya diwakili oleh pihak lainnya yang menggantikan. Selain itu, karena memang tidak mendapatkan undangan.	Menurut saya faktor penghambat yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena tingkat ekonomi masyarakat yang bervariasi, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, disamping juga karena ada kesibukan lain saat diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi. Kemudian juga karena undangan tidak sampai karena biasanya untuk memudahkan pihak sekolah, undangan dititipkan kepada siswa. Dan undangan tersebut lupa disampaikan sehingga masyarakat tidak tahu dirinya diundang. Jadi hal-hal inilah yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan Ust. Al-Hakimi, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan Ust. Al-Hakimi S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Kemal

		<p>Karena terkadang kita mengundang mereka tapi undangan terkadang tidak sampai, sehingga mereka tidak tahu dan tidak datang. Kemudian juga karena sakit tentunya menghalangi masyarakat untuk datang, dan ini merupakan penghambat juga. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan selama ini belum pernah melibatkan masyarakat, sehingga saya belum bisa berkomentar banyak sebagai bukti pendukung ucapan saya. Namun tentunya bisa saja faktor penghambat dalam pengambilan keputusan itu juga bisa menjadi faktor penghambat dalam perencanaan pendidikan apabila melibatkan masyarakat nantinya.</p>		
--	--	--	--	--

E. Kepala Dusun

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Sman	Saya belum pernah mendengar istilah partisipasi masyarakat di sekolah. Apalagi masalah partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan	Meskipun saya masih sangat jarang dilibatkan di sekolah, tetapi jika ditanya seputar yang saya pahami tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Sman sejalan dengan hasil

		<p>pendidikan, karena saya tidak pernah terlibat di sekolah MA Hidayatul Muhsinin. Saya tidak pernah diundang dalam rapat, kegiatan pembangunan, maupun berbagai kegiatan-kegiatan lain di sekolah, sehingga saya tidak tahu tentang bagaimana berpartisipasi di sekolah tersebut. Anak-anak kami di Dusun Sulin juga jarang ada yang bersekolah ke MA Hidayatul Muhsinin, mereka hanya beberapa orang saja yang bersekolah disana dan selebihnya mereka bersekolah di Kuripan. Karena jarak tempuh ke Kuripan lebih dekat dari pada ke Labulia.</p>	<p>keputusan, maka yang dapat saya jelaskan adalah merupakan keikutsertaan masyarakat dalam memutuskan berbagai keputusan dari berbagai kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. Contohnya seperti memutuskan besarnya biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan, dan memutuskan tata tertib yang akan dibuat sekolah. Sedangkan perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan berbagai kegiatan dan program sekolah kedepannya seperti perencanaan kurikulum, perencanaan sarana prasarana, perencanaan kegiatan kerja sekolah, dan perencanaan bidang-bidang lainnya.</p>	<p>wawancara dengan bapak Lalu budin dan bapak Idi.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Sman sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Lalu Budin dan bapak Idi.</p>
2	Bapak Zuki	<p>Keterlibatan saya di sekolah sebagai bentuk partisipasi di sekolah banyak dan sering sekali. Tidak hanya dalam undangan rapat wali murid saja, tetapi juga dalam acara pembagian raport, rapat sumbangan pembangunan, rapat biaya semester dan ujian ketika anak saya sekolah di sana, dan ketika ada acara lepas pisah dan wisuda kelas XII di sekolah, bahkan setiap tahun selalu</p>	<p>Menurut pemahaman saya sebagaimana sosialisasi dan kegiatan yang pernah saya ikuti di sekolah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu merupakan keterlibatan masyarakat dengan diundang untuk ikut terlibat dalam memutuskan berbagai macam kegiatan dan kebijakan yang akan ditetapkan sekolah. Contohnya seperti yang kemarin-kemarin saya diundang seperti</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Zuki sejalan dengan dengan hasil wawancara dengan bapak Yar.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Zuki sejalan dengan dengan</p>

		<p>diundang. Keterlibatan lain juga pada saat ada kegiatan gotong royong untuk pembangunan gedung baru di sekolah. Dalam proses pengambilan keputusan saya juga sering berpartisipasi karena sering diundang untuk hadir. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam hal menentukan besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan orang tua dan masyarakat seperti biaya semester, ujian dan sumbangan pembangunan. Terkait dengan masalah perencanaan pendidikan, saya sering terlibat dalam perencanaan program sekolah dan perencanaan pembangunan, tetapi jika perencanaan pembelajaran, kurikulum, dan lainnya saya sepertinya tidak pernah terlibat.</p>	<p>pengambilan keputusan untuk pengadaan lokasi pembangunan gedung baru, kemudian masalah biaya semester dan biaya ujian serta biaya lepas pisah dan wisuda kemarin. Kalau partisipasi dalam perencanaan pendidikan setahu saya merupakan keterlibatan masyarakat dalam ikut terlibat untuk merencanakan berbagai program kegiatan perencanaan sekolah seperti perencanaan kurikulum, pengadaan sarana prasarana, perencanaan bidang kesiswaan dan perencanaan program kerja sekolah maupun perencanaan lainnya. Semua itu selalu melibatkan masyarakat dengan diundang untuk ikut terlibat memutuskan dan menentukan semuanya biar masyarakat tahu apa yang dijalankan sekolah kedepannya.</p>	<p>hasil wawancara dengan bapak Yar.</p>
--	--	--	---	--

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Zuki	<p>Kegiatan yang sering mengikutsertakan masyarakat adalah kegiatan rapat baik rapat wali murid, rapat pembangunan, dan rapat sosialisasi ujian nasional. Selain itu juga,</p>	<p>Saya sebagai kepala dusun sangat sering diajak oleh pihak sekolah untuk ikut membantu dalam berbagai kegiatan di sekolah. Termasuk dalam pengambilan keputusan dan</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Zuki sejalan dengan hasil</p>

	<p>dalam berbagai kegiatan-kegiatan sekolah seperti pembagian raport, kegiatan pembangunan, dan kegiatan lepas pisah kelas XII yang dirangkai dengan prosesi wisudanya. Kemudian pihak yang sering dilibatkan adalah, orang tua siswa, alumni, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru beserta staf, anggota yayasan dan dewan komite sekolah. dalam pengambilan keputusan mereka-mereka inilah yang juga dilibatkan, tetapi dalam perencanaan pendidikan belum pernah melibatkan masyarakat.</p>	<p>perencanaan pendidikan. Sebagai contoh dalam kegiatan pembangunan kita bersama pihak sekolah mengambil keputusan tentang dimana akan dilakukan lokasi pembangunan dan berapa biaya yang dibutuhkan. Sehingga kita bisa mematok berapa besarnya sumbanagn pembangunan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membantu pihak sekolah. dalam perencanaan juga saya sering diundang terutama yang berkaitan dengan perencanaan program sekolah, keuangan, bidang kesiswaan dan ekstrakurikuler, maupun bidang sarana prasarana. Selain saya sebagai kepala dusun juga dalam kegiatan tersebut di sekolah juga melibatkan orang tua siswa pastinya, kemudian komite, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alumni, kepala desa dan staf desa, dan juga para pihak dan warga sekolah tentunya.</p>	<p>wawancara dengan bapak Yar, bapak Sman, bapak, Lalu Budin dan bapak Idi.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Zuki sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yar, bapak Sman, bapak, Lalu Budin dan bapak Idi.</p>
--	--	--	--

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Yar	Biasnya dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dari masyarakat yang hadir, sehingga yang memutuskan adalah masyarakat bukan sekolah. Hasil rapat	Setelah adanya tahap pengembangan tingkat partisipasi masyarakat menjadi meningkat dan lebih aktif. Terkait dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yar sejalan dengan hasil wawancara dengan

	<p>di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Kalau dalam perencanaan pendidikan saya belum pernah terlibat, dan masyarakat lainnya juga sepertinya belum pernah ada yang dilibatkan dalam perencanaan pendidikan.</p>	<p>pendidikan tentunya dengan menghadiri rapat sesuai undangan dari pihak sekolah. Dalam rapat itu kita bersama masyarakat memutuskan sebuah kesepakatan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Kemudian selesai itu kami mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban dari kesepakatan yang ditetapkan terkait dengan sebuah keputusan dan perencanaan pendidikan yang akan dijalankan. Kemudian kami menerima hasil tertulis dari hasil rapat, terutama kami sebagai kepala dusun diberikan itu untuk diinformasikan kepada masyarakat. Ada juga bentuk surat keputusan kepala sekolah dari hasil pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang telah disepakati.</p>	<p>bapak Zuki, bapak Sman, Bapak Lalu Budi dan bapak Idi.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Yar sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Zuki, bapak Sman, Bapak Lalu Budi dan bapak Idi.</p>
--	---	--	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Idi	Kalau menurut saya faktor yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pendidikan, terutama dalam hal pengambilan	Sepemahaman saya dan sepengetahuan saya bahwa yang selalu menjadi faktor penunjang bagi masyarakat untuk mau terlibat turut serta dalam kegiatan	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Idi sejalan dengan hasil

	<p>keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena masyarakat menyadari bahwa keterlibatannya di sekolah sangat dibutuhkan. Pihak sekolah juga sering menyampaikan dalam berbagai kegiatan di sekolah bahwa masyarakat terutama orang tua merupakan mitra kerja sekolah, sehingga kehadiran, sumbangsi dan keikutsertaan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah. Oleh karena itu, para masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan guna meyakinkan masyarakat akan rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat karena masyarakat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan sekolah.</p>	<p>pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah adalah untuk mengetahui hasil keputusan yang disepakati, untuk mengetahui program perencanaan yang ditetapkan sekolah, karena kepedulian dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah dan adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap sekolah. Saya rasa itu yang menunjang partisipasi masyarakat disamping faktor-faktor lainnya.</p>	<p>wawancara dengan bapak Zuki, bapak Yar, bapak Sman dan bapak Lalu budin.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Idi sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Zuki, bapak Yar, bapak Sman dan bapak Lalu budin.</p>
--	---	---	---

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Zuki	Saya sangat sering diundang oleh sekolah untuk hadir dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan pengambilan	Sebenarnya selama ini terutama setelah dilakukannya sosialisasi oleh peneliti bersama kepala sekolah, masyarakat	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Zuki

		<p>keputusan dan perencanaan pendidikan juga saya sering diminta untuk hadir, dan saya selalu siap untuk hadir kecuali memang ada kegiatan yang yang jadwalnya samaan dengan kegiatan atau undangan di sekolah yang tidak bisa saya tinggalkan yang membuat saya tidak hadir. Tapi selama saya bisa untuk hadir, saya tetap hadir untuk memenuhi undangan dari sekolah. Jadi itu saja alasan yang membuat saya tidak bisa ikut hadir disekolah sehingga kadang mengirimkan wakil.</p>	<p>jarang tidak hadir untuk berpartisipasi atau terlibat dalam berbagai kegiatan kecuali karena memang kepepet dan benar-benar tidak bisa hadir karena acara lain yang lebih penting dan mendesak sekali. Saya sendiripun tidak pernah tidak hadir selama saya diundang. Dan selama ini seingat saya hanya satu kali saja saya tidak sempat hadir karena ada permasalahan di desa sehingga semua kepala dusun disuruh hadir ke kantor desa. Walaupun masyarakat tidak bisa hadir biasanya mereka diwakili oleh sanak saudara dan keluarga. Nah.... kalau alasan lain yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi mungkin karena sakit atau lupa, karena itu hal yang lumrah dan sebenarnya tidak pernah kita inginkan. Tapi jika itu terjadi maka itulah yang dikatakan sebagai hal yang lumrah dan tak bisa kita persalahkan.</p>	<p>sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yar, bapak Sman, bapak Lalu Budin dan bapak Idi.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Zuki sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yar, bapak Sman, bapak Lalu Budin dan bapak Idi.</p>
--	--	---	--	---

F. Guru

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Lalu Artha, S.Pd	Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, khususnya di madrasah kita ini merupakan keaktifan dan peran serta masyarakat dengan mengikuti berbagai kegiatan di sekolah. Turut serta orang tua siswa di sekolah dan dirumah untuk mengawasi dan membantu pembelajaran anak juga merupakan partisipasi masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur seperti gotong royong dan pembangunan juga merupakan partisipasi masyarakat. Masyarakat juga mempunyai wadah berupa komite sebagai wakil masyarakat untuk mewakili partisipasi mereka di sekolah. Saya memang domisili saya bukan di Desa Labulia, tapi saya asli orang Batu Tulis. Akan tetapi saya juga tahu sebagaimana partisipasi masyarakat di sekolah kita karena saya memang menjadi staf mengajar di sini sehingga saya telah berpartisipasi juga di sekolah	Yaa.... menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang akan ditetapkan bersama sekolah. Conthnya, pengambilan keputusan masalah kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII harus diputuskan bersama dengan masyarakat, masalah Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus diputuskan bersama masyarakat jika ada pemotongan untuk keperluan siswa di sekolah, memutuskan masalah besarnya sumbangan pembangunan, besarnya biaya ujian dan biaya semester serta penetapan denda bagi siswa-siswi kita yang menikah di usia sekolah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan di semua bidang perencanaan baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Herman dan bapak Yan, S.Pd dan ibu Lale Aini, S.Pd.I</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Herman, bapak Yar dan bapak Hardi.</p>

		<p>ini. Dalam kegiatan pengambilan keputusan juga masyarakat sering dilibatkan seperti kegiatan pembagian raport, kegiatan pemondokan siswa sebelum ujian, masalah kegiatan pembangunan, dan kegiatan lepas pisah atau wisuda kelas XII masyarakat sering dilibatkan dalam penentuan kegiatan tersebut. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat juga sering dilibatkan tapi melalui wadahnya tadi yaitu melalui komite sekolah sebagai wakil masyarakat di sekolah.</p>	<p>prasarana, bidang hubungan dengan masyarakat, bidang keuangan maupun bidang-bidang lainnya termasuk dalam perencanaan dan penyusunan program kerja sekolah. Dan dalam perencanaan pendidikan sekarang ini sudah melibatkan berbagai komponen masyarakat jika dibandingkan sebelumnya yang tidak pernah melibatkan masyarakat.</p>	
2	Ibu Icha, S.Pd	<p>Setahu saya partisipasi masyarakat di sekolah itu adalah ikut mendukung dan mensosialisasikan sekolah kita yaitu Hidayatul Muhsinin ini ke masyarakat Labulia. Karena yang kita serap tentunya masyarakat Labulia, sehingga kalau siswa-siswi sekitar Labulia ini bisa kita serap maka jumlah murid kita akan banyak dan mempermudah kita untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan setahu saya sering dilibatkan terutama masalah keuangan dan masalah semua yang</p>	<p>Menurut saya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama sekolah. Misanya keputusan yang berkaitan dengan kegiatan lepas pisah dan wisuda kelas XII harus diputuskan bersama dengan masyarakat. Selain itu tentang penerimaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) harus diputuskan bersama masyarakat jika ada pemotongan untuk keperluan siswa di sekolah agar tidak menimbulkan berbagai tanggapan buruk dari masyarakat terutama wali murid. Dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Icha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Hardi, S.Pd, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan ibu Icha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan

	berkaitan dengan wali murid maka akan mengajak masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga ketika ada kegiatan pemondokan sebelum ujian, masyarakat ikut untuk penentuan atau pengambilan keputusan sebelum pelaksanaan kegiatan pemondokan tersebut. Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan untuk membahas program sekolah, kurikulum, dan lainnya saya rasa masyarakat tidak pernah dilibatkan karena memang guru saja jarang diundang kecuali dalam rapat pembagian tugas dan rapat kurikulum baru atau K13 kemaren yang membutuhkan pembahasan bersama dengan dewan guru.	juga dalam memutuskan masalah besarnya sumbangan pembangunan dan biaya semester anak juga harus diputuskan dengan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan baik bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, maupun bidang yang lainnya termasuk dalam perencanaan dan penyusunan program kerja sekolah harus melibatkan masyarakat biar mereka tahu dan memberikan masukan serta ikut mengontrol dan mengawasi kegiatan sekolah tersebut.	bapak Lalu Artha, S.Pd bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Hardi, S.Pd, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I dan Ibu Lale Aini, S.Pd.I.
--	---	--	---

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Lalu Artha, S.Pd	Dalam kegiatan pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat. Tetapi dalam perencanaan pendidikan, masyarakat memang belum pernah dilibatkan. Akan tetapi masyarakat yang	Sekarang jawabannya singkat saja, karena masyarakat sudah dilibatkan juga dalam perencanaan pendidikan yang sebelumnya belum pernah dilibatkan. Namun berkat adanya sosialisasi dalam proses	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil

		<p>selalu dilibatkan adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sebagian alumni, kepala desa, kepala dusun, dewan guru dan staf, komite sekolah dan pihak yayasan. Dalam perencanaan pendidikan belum ada masyarakat yang terlibat karena itu merupakan urusan internal sekolah saja. Namun kita akan upayakan agar ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pendidikan karena itu penting demi kemajuan sekolah nantinya.</p>	<p>pengembangan peneliti akhirnya sekarang masyarakat sudah aktif dilibatkan bukan hanya dalam kegiatan pengambilan keputusan saja, akan tetapi juga dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Biasanya pihak sekolah selalu melibatkan orang tua siswa, alumni, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komite dan pihak yayasan disamping kita sebagai guru dan staf disekolah memang sudah sangat harus dilibatkan.</p>	<p>wawancara dengan bapak H. Denan, S.Pd.I, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, ibu Icha, S.Pd, Ibu lale Aini, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, bapak Herman, Ibu Herma, S.Pd.I, ibu Icha, S.Pd, Ibu lale Aini, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.</p>
2	Bapak Hardi, S.Pd	<p>Sama halnya dengan para guru lainnya bahwa di sekolah kita masyarakat masih hanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan saja, baik menyangkut masalah biaya semester, ujian, sumbangan pembangunan, denda</p>	<p>Selama ini sekolah selalu mengupayakan dan mengusahakan untuk melibatkan berbagai anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Bahkan dalam berbagai kegiatan sekolah</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Hardi, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Herman</p>

		<p>bagi siswa yang menikah, terkait ijin pemndokan, dan masalah wisuda ataupun pengambilan keputusan lainnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan belum pernah melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan bidang kurikulum, keuangan, sarana prasarana, bidang humas, maupun bidang kesiswaan dan lainnya. Kemudian masyarakat yang sering dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu biasanya wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama, alumni, para tokoh pemuda, kepala desa dan kepala dusun, komite sekolah, dan internal sekolah serta pihak yayasan.</p>	<p>pun pihak sekolah selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dari awal pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, sampai dengan tahap pelaksanaannya. Seperti yang kemarin kita laksanakan adalah kegiatan hari besar islam (HBI) terkait dengan isra mi'raj dan acara kelulusan maupun lepas pisah dan wisuda kelas XII, kita melibatkan masyarakat untuk terlibat dari awal pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, sampai dengan tahap pelaksanaannya. Dan anggota masyarakat yang sering dilibatkan adalah seperti orang tua siswa tentunya, para anggota yayasan, komite sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alumni, kepala desa, kepala dusun, dan warga lainnya yang dianggap memiliki potensi untuk terlibat. Disamping dewan guru, staf TU dan pihak yayasan beserta kepala sekolah. Karena pihak sekolah tidak mungkin bisa melaksanakan itu semua tanpa adanya bantuan dari berbagai kalangan dari masyarakat.</p>	<p>dan bapak Yan, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Hardi, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Lalu Artha, S.Pd, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, bapak Herman, ibu Herma, S.Pd.I, ibu Icha, S.Pd, Ibu lale Aini, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.</p>
--	--	---	--	--

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Ibu Icha, S.Pd	Masyarakat yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan biasanya mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari masyarakat yang hadir. Keputusan yang telah ditetapkan di SK-kan oleh kepala sekolah kemudian diedarkan kembali kepada masyarakat. Namun dalam kegiatan perencanaan pendidikan belum pernah melibatkan masyarakat, sehingga cara berpartisipasinya belum dapat saya jelaskan.	Setahu saya berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini setelah dilakukannya tahap pengembangan, bahwa cara masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah ketika mereka sudah diundang oleh pihak sekolah untuk terlibat, maka mereka akan hadir dalam rapat. Keputusan rapat dalam memutuskan sebuah aturan ataupun kebijakan serta perencanaan yang akan ditetapkan diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Setelah itu para anggota yang hadir mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah diputuskan dan direncanakan. Kemudian dibuatkan hasil kesepakatan dalam bentuk pernyataan tertulis yang dibagikan kembali kepada masyarakat dengan bersurat agar mereka mengetahui apa yang telah disepakati dan diputuskan maupun direncanakan bersama. Disamping itu juga kepala sekolah menetapkannya dalam sebuah	1. Hasil wawancara dengan ibu Icha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Lalu Artha, S.Pd, bapak Hardi, S.Pd, bapak Herman, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, ibu Herman, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I baik dalam tahap studi awal maupun dalam tahap pengukuran akhir.

			surat keputusan kepala sekolah.	
--	--	--	---------------------------------	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Lalu Artha, S.Pd	Kalau menurut saya faktor yang membuat masyarakat mau untuk berpartisipasi dalam pendidikan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan adalah karena masyarakat menyadari bahwa keterlibatannya di sekolah sangat dibutuhkan. Pihak sekolah juga sering menyampaikan dalam berbagai kegiatan di sekolah bahwa masyarakat terutama orang tua merupakan mitra kerja sekolah, sehingga kehadiran, sumbangsi dan keikutsertaan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah. Oleh karena itu, para masyarakat memiliki pemahaman akan pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan guna meyakinkan masyarakat akan rasa kepedulian sekolah terhadap masyarakat karena masyarakat diikutsertakan dalam berbagai kegiatan	Kalau kita berbicara tentang faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan dalam kegiatan perencanaan pendidikan tentunya sangat banyak sekali yang dimana adanya kesadaran masyarakat, rasa memiliki, kepedulian masyarakat, kemauan masyarakat, sikap menghargai dan menghormati masyarakat terhadap sekolah. Selain itu juga adanya kesadaran dan kepedulian sekolah untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatannya terutama dalam kegiatan perencanaan pendidikan yang belum pernah melibatkan masyarakat sebelumnya. Tapi kini sudah sangat sukses dan maju dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi setelah adanya kegiatan pengembangan oleh peneliti bersama kepala sekolah akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Herman, bapak Yan, S.Pd, dan Ibu Lale Aini, S.Pd.I. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Hardi, S.Pd, bapak Herman, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, ibu Icha, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, Ibu

		sekolah.	khususnya di sekolah kita ini.	Lale Aini, S.Pd.I, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.
2	Ibu Icha, S.Pd	Saya rasa faktor yang menunjang masyarakat mau untuk berpartisipasi itu cukup banyak baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Dalam pengambilan keputusan misalnya dalam hal menentukan masalah keuangan, baik masalah biaya semester, biaya ujian dan biaya lepas pisah atau wisuda siswasiswi, maupun dalam kegiatan lainnya, biasanya masyarakat mau untuk ikut serta agar mengetahui secara langsung hasil keputusan yang ditetapkan tanpa mendengar dari orang lain. Kemudian karena rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah yang ada ditengah-tengah mereka. Rasa tanggung jawab juga bagi sekolah untuk selalu melibatkan masyarakat agar hasil keputusan yang di ambil tidak dianggap kurang baik oleh masyarakat. Akan tetapi dalam hal perencanaan pendidikan faktor apa saja yang nampak belum terlihat karena masyarakat belum pernah terlibat. Namun tidak menutup kemungkinan	Berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini setiap kali masyarakat hadir untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, masyarakat terlihat aktif dan persentase kehadiran mereka meningkat setelah adanya sosialisasi terkait masalah partisipasi di sekolah kemaren. Dan yang membuat masyarakat itu mau untuk terlibat atau faktor yang menunjang keterlibatan mereka adalah karena kepedulian masyarakat untuk mendukung sekolah dalam mengambil keputusan dan perencanaan pendidikan, dan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Selain itu juga, mereka akan mendapatkan info secara langsung dari hasil keputusan dan perencanaan yang dihasilkan dengan ikut terlibat langsung di sekolah dalam kegiatan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan ibu Icha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Hardi, S.Pd, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir ibu Icha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Lalu Artha, S.Pd, bapak Hardi, S.Pd, bapak Herman, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, ibu Herma,

	faktor penunjangnya sama dan tidak jauh berbeda anatar pengambilan keputusan dengan perencanaan pendidikan.		S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.
--	---	--	-------------------------------

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Lalu Artha, S.Pd	Kalau masalah pengambilan keputusan, pihak sekolah selalu mengupayakan agar masyarakat dilibatkan karena keputusan dari masyarakat tentunya akan mempengaruhi laju pertumbuhan sekolah. Karena masyarakat sebagai konsumen yang harus diberikan kepuasan dalam pelayanan putra putri mereka di desa labulia ini. Sehingga masyarakat juga jarang ada yang tidak turut berpartisipasi selama diajak oleh pihak sekolah kecualai karena memang sakit, tidak sempat hadir dan tidak mendapat undangan. Tapi biasanya jika mereka tidak bisa hadir baik karena sakit atau ada kesibukan, itu selalu digantikan oleh pihak keluarga yang lain. Dan masyarakat juga terkadang tidak dapat undangan jika undangan itu di titip pada	Sebenarnya yang membuat masyarakat terhalang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan itu adalah karena mereka sakit, lupa, undangan tidak sampai atau karena lupa diundang oleh pihak sekolah, ada kesibukan lain yang lebih penting, dan jarak tempuh yang jauh bagi masyarakat yang tidak punya kendaraan, karena Desa Labulia ini cukup luas sampai ke pelosok-pelosok terdalam. Kemudian juga masyarakat merasa bahwa sekolah kita tidak bisa maju meskipun dikembangkan dan didukung masyarakat, karena banyak doktri-doktrin yang berkata seperti itu. Kemudian adanya anggapan sekolah tidak mampu membuat lulusannya diterima didunia kerja sehingga banyak yang menganggur. Padahal itu semua	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak H. Denan, S.Pd.I, ibu Icha, S.Pd, ibu Herma, S.Pd, dan ibu Hamah, S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Lalu Artha, S.Pd sejalan dengan hasil wawnacara dengan bapak Lalu Artha, S.Pd, bapak Hardi,

		<p>siswa karena terkadang siswa suka lupa memberikan undangan itu. Jadi hanya sebatas ini saja faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan juga saya rasa sama saja faktor penghambatnya. Tapi selama ini memang masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Namun jika dilibatkan pasti faktor penghambatnya seperti itu juga.</p>	<p>tergantung kepada siswanya setelah lulus mau jadi apa. Mau kuliah atau bekerja itu terserah mereka bukan urusan sekolah lagi karena mereka sudah tamat. Kita di sekolah kan hanya mendidik dan memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada mereka sampai mereka lulus, bukan sampai mereka bekerja atau kuliah sehingga kita tidak bisa menjamin apakah mereka dapat bekerja setelah lulus atau tidak karena nantinya tergantung kepada pribadi mereka masing-masing. Tapi jika ada masalah yang bisa dibantu pihak sekolah maka akan dibantu. Jadi hal-hal inilah yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah.</p>	<p>S.Pd, bapak Herman, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.</p>
2	Bapak Hardi, S.Pd	<p>Dalam kegiatan apapun termasuk dalam pengambilan keputusan masyarakat jarang tidak hadir kecuali karena sibuk sekali, karena sakit dan undangan yang kita kirim terkadang tidak sampai, karena biasanya undangan dikirim lewat siswa juga sebagiannya. Itu saja yang saya rasa menjadi faktor penghambat masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi dalam kegiatan perencanaan pendidikan masyarakat belum pernah</p>	<p>Menurut saya selama ini dan juga setelah adanya tahap pengembangan oleh peneliti, bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan lainnya di sekolah adalah karena tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah dan bervariasi sehingga masih banyak yang belum memahami pentingnya berpartisipasi di sekolah, tingkat ekonomi</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Hardi, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Yan, S.Pd, bapak Herman dan ibu Lale Aini, S.Pd.I.</p>

		<p>dilibatkan jadi belum bisa kita pastikan faktor penghambatnya. Tapi saya rasa tidak akan jauh berbeda jika masyarakat dilibatkan.</p>	<p>juga membuat masyarakat ragu untuk hadir jika berkaitan dengan masalah keuangan. Disamping juga karena ada kesibukan lain saat diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi. Kemudian juga karena undangan tidak sampai karena biasanya untuk memudahkan pihak sekolah, undangan dititipkan kepada siswa. Dan undangan tersebut lupa disampaikan sehingga masyarakat tidak tahu dirinya diundang. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah. Semoga saja kedepannya hal-hal seperti ini tidak banyak muncul lagi setelah adanya penelitian ini yang sudah banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar sekolah mampu menjadi lebih baik dan lebih maju.</p>	<p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Hardi, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Lalu Artha, S.Pd, bapak Herman, bapak H. Denan, S.Pd.I, bapak Yan, S.Pd, Ibu Herma, S.Pd.I, Ibu Lale Aini, S.Pd.I, ibu Herma, S.Pd.I dan ibu Hamah, S.Pd.I.</p>
--	--	--	---	---

G. Komite Sekolah

1. Fokus masalah 1 : Tingkat pemahaman alumni tentang partisipasinya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Awir, S.Pd.	Partisipasi masyarakat di sekolah dapat mengandung arti yang luas. Bisa berupa partisipasi dalam bentuk materi dan non materi. Partisipasi dalam bentuk materi adalah seperti pembayaran iuran komite sekolah berupa biaya semester sebesar Rp. 20.000 per semester, biaya ujian sampai dengan penebusan ijazah siswa sebesar Rp. 400.000 dan sumbangan pembangunan jika sekolah akan melakukan pembangunan. Sedangkan partisipasi dalam bentuk non materi bisa berupa kehadiran masyarakat dalam rapat, kegiatan-kegiatan sekolah dan juga bisa berupa sumbangsi dalam bentuk kritikan, saran dan masukan yang membangun bagi sekolah. Jika ditanya seputar partisipasi dalam pengambilan keputusan, tentunya masyarakat selalu dilibatkan terutama dalam membahas masalah keuangan dan komite maka kami selaku komite selalu mengajak	Menurut pemahaman saya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat untuk perbaikan sekolah kedepannya dengan melibatkan masyarakat untuk meminta kritikan, masukan ataupun saran dari masyarakat dalam memutuskan sebuah ketetapan yang akan dijalankan sekolah. Contohnya seperti keputusan dalam bekerjasama antara komite, sekolah dan masyarakat. Selain itu juga dalam menetapkan biaya semester, biaya ujian dan ijin pemondokan, semuanya kita upayakan untuk meminta masyarakat teribat agar hasil keputusan yang kita peroleh lebih efektif karena keputusan bersama dengan masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam perencanaan pendidikan merupakan pelibatan masyarakat dalam memutuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan kegiatan dan program perencanaan sekolah karena sekolah	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Awir, S.Pd dibenarkan oleh ibu Lulu, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Awir, S.Pd juga dibenarkan oleh ibu Lulu, S.Pd.</p>

		<p>masyarakat untuk membahasnya dalam rapat guna menemukan sebuah keputusan yang baik. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan, saya kurang tahu keterlibatan masyarakat karena keterlibatan masyarakat dalam prosesnya belum nampak.</p>	<p>berada di lingkungan masyarakat sehingga harus melibatkan masyarakat. Dan kita selalu mengupayakan agar masyarakat tetap terlibat. Apalagi setelah pengembangan ini kan masyarakat sudah mampu memahami apa dan bagaimana berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan, sehingga mereka mudah untuk diajak untuk terlibat dalam hal tersebut. Meskipun ada saja yang tidak bisa hadir karena berbagai alasan dan kesibukan lainnya.</p>	
2	Ibu Lulu, S.Pd	<p>Partisipasi masyarakat itu merupakan keterlibatan orang tua siswa dan juga masyarakat lainnya dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Terutama keterlibatan orang tua siswa, karena yang lebih banyak terlibat di sekolah untuk membayar segala bentuk pembiayaan di sekolah adalah orang tua siswa. Sedangkan masyarakat lainnya hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sering diadakan sekolah seperti pembagian raport, karnaval dan acara lepas pisah sekaligus wisuda siswa-siswi kelas XII yang lulus. Selain itu</p>	<p>Pemahaman saya tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana pihak sekolah mengajak dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan di sekolah. Terutama kami sebagai wakil masyarakat di sekolah harus mampu mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam banyak hal di sekolah, termasuk dalam pengambilan keputusan seperti membahas denda siswa yang menikah, biaya semester, biaya ujian, sumbangan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan berbagai kegiatan di</p>	<p>Hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Awir, S.Pd.</p>

		<p>keterlibatan komite juga yang paling berperan karena komite ini merupakan wakil dari orang tua siswa yang akan mengurus masalah keuangan dan memberikan informasi kepada orang tua siswa terkait dengan kebutuhan dana sekolah. Dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan tentunya masyarakat harus selalu diundang, tapi masalah perencanaan pendidikan masyarakat tidak pernah diundang karena itu urusan internal sekolah. Namun dalam perencanaan pembangunan sih masyarakat terutama tokoh-tokoh dalam masyarakat selalu diikutsertakan.</p>	<p>sekolah. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan langkah dan arah kegiatan sekeolah kedepannya, baik dalam bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang keuangan, bidang pembangunan, bidang sarana prasarana, dan perencanaan-perencanaan lain terkait dengan program yang akan dijalankan sekolah. Dan kami sebagai komite telah berupaya lebih mengaktifkan lagi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut demi kemajuan sekolah kedepannya dengan keterlibatan masyarakat tersebut.</p>	
--	--	---	--	--

2. Fokus masalah 2 : Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Awir, S.Pd.	<p>Pihak-pihak yang sering dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan yakni orang tua siswa semuanya baik kelas X, XI, maupun XII guna membahas masalah biaya semester. Jika masalah</p>	<p>Saya selaku komite sekolah bersama sekolah selalu mengupayakan untuk melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan</p>	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Awir, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu,</p>

		<p>biaya ujian tentunya hanya orang tua siswa kelas XII saja. Namun, jika berkaitan dengan pengambilan keputusan masalah sumbangan pembangunan dan perencanaan pembangunan, maka yang diundang selain orang tua siswa adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota yayasan, kepala desa, kepala dusun, dan kami selaku komite sekolah tentunya beserta pihak sekolah. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan setahu saya yang biasa terlibat yaaa... hanya dewan guru, komite sekolah, ketua yayasan dan kepala sekolah saja, masyarakat saya rasa tidak pernah dilibatkan.</p>	<p>keputusan dan perencanaan pendidikan. Semua itu kita selalu terus dan terus berupaya melibatkan masyarakat untuk terlibat. Alhamdulillah anggota masyarakat yang selalu kami libatkan adalah orang tua siswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, perangkat desa seperti kepala desa dan kepala dusun, dan anggota masyarakat lainnya yang kita anggap mampu dan memiliki potensi untuk kami libatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah itu. Kalau dewan guru beserta staf tata usaha memang sudah jelas bahwa mereka harus selalu terlibat bersama dengan anggota yayasan dan kepala sekolah. Dan saya sebagai komite terus mengupayakan agar masyarakat dilibatkan dalam semua hal yang berkaitan dengan sekolah terutama yang menyangkut perencanaan pendidikan yang sebelumnya jarang melibatkan masyarakat secara langsung tetapi hanya disampaikan hasil dari perencanaan itu saja. Kini kami upayakan untuk terlibat langsung. Alhamdulillah hasilnya dapat kita lihat dari berbagai kegiatan yang kita laksanakan kemarin setelah tahap pengembangan bahwa masyarakat menjadi</p>	<p>S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Awir, S.Pd sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd.</p>
--	--	--	--	--

			lebih aktif dan antusias untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan di sekolah. termasuk dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan tadi.	
--	--	--	---	--

3. Fokus masalah 3 : Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Awir, S.Pd.	Selama saya menjabat sebagai ketua komite di sekolah ini, keterlibatan masyarakat di sekolah banyak sekali bentuknya. Namun dalam hal pengambilan keputusan terkait masalah keuangan, masyarakat yang terlibat tergantung pada konteks rapat yang dibahas. Cara masyarakat berpartisipasi juga hanya melalui kegiatan rapat atau pertemuan saja. Dan hasil rapat di buat dalam surat keputusan kepala sekolah dan diedarkan kembali pada masyarakat. Contohnya, dalam rapat masalah pengambilan keputusan untuk menentukan besarnya biaya semester, maka yang diundang hanya orang tua siswa saja dari kelas X sampai kelas XI beserta komite dan kepala sekolah.	Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah itu berupa kerjasama menurut saya. Karena dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ini kami dan pihak sekolah mengupayakan agar masyarakat selalu terlibat dengan memberikan kritikan, masukan dan saran agar hasil keputusan dan perencanaan yang ditetapkan adalah hasil yang terbaik berdasarkan suara terbanyak masyarakat yang hadir dalam rapat. Selanjutnya kami meminta anggota masyarakat yang hadir untuk mengisi lembar pernyataan kesanggupan dan pertanggungjawaban atas kesepakatan yang telah ditetapkan baik dalam pengambilan keputusan	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Awir sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd. 2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Awir sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd.

	<p>Dalam penentuan besarnya biaya ujian, juga hanya mengundang orang tua siswa kelas XII saja. Rapat komite dengan orang tua siswa hanya memnahas seputar masalah biaya semester dan biaya ujian saja, karena biaya SPP tidak dipungut setelah sekolah mendapatkan BOS. Kemudian, dalam menentuka besarnya sumbangan pembangunan dan kegiatan pengambilan keputusan lainnya, selain orang tua siswa juga diundang, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat lainnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan setahu saya masyarakat belum pernah dilibatkan, sehingga saya tidak bisa memberikan informasi terkait cara masyarakat berpartisipasi dalam hal tersebut.</p>	<p>maupun perencanaan pendidikan. Lalu kemudian diterbitkan surat keputusan kepala sekolah agar tidak ada protes lagi dari masyarakat. Dan yang terakhir hasil keputusan dan perencanaan kami buat dalam sebuah pernyataan tertulis yang kami bagikan kembali kepda masyarakat agar mereka tetap mengingat dan mengetahui hasil keputusan dan perencanaan yang telah mereka sepakati.</p>	
--	--	---	--

4. Fokus masalah 4 : Faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Awir, S.Pd.	Faktor yang membuat masyarakat mau untuk terlibat dan berpartisipasi di sekolah adalah karena memang sekolah	Dalam berbagai kegiatan di sekolah, terutama dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan yang	1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Awir,

		<p>ini berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat pasti merasa memiliki sekolah tersebut dan siap untuk ikut berperan di sekolah. Dalam kegiatan pengambilan keputusan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena untuk memutuskan segala sesuatunya harus melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja sekolah yang bisa memajukan sekolah demi keberlangsungannya. Selain itu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dibidang-bidang lainnya adalah demi menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat demi kemaslahatan kita bersama. Faktor lain juga karena masyarakat menyadari pentingnya keterlibatan mereka di sekolah Sedangkan faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pendidikan saya kurang tau karena selama ini saya lihat bahwa dalam perencanaan pendidikan keterlibatan masyarakat hamper tidak ada.</p>	<p>berkaitan dengan penelitian ini, sejauh ini setelah adanya tahap pengembangan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan semakin meningkat. Kerjasama antara masyarakat dengan sekolah juga semakin aktif. Nah... terkait faktor yang menunjang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan maupun kegiatan yang lain, menurut saya yang membuat mereka mau berpartisipasi adalah karena keberadaan lembaga atau sekolah yang dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terkendala dengan masalah transportasi. Kemudian kami dengan sekolah juga selalu mengupayakan agar masyarakat diajak untuk berpartisipasi di sekolah, sehingga masyarakat mau untuk hadir karena merasa dibutuhkan oleh sekolah. Dan yang terakhir adalah hasil keputusan dan perencanaan yang disepakati tidak memberatkan masyarakat, terutama jika berkaitan dengan masalah keuangan.</p>	<p>S.Pd dibenarkan oleh ibu Lulu, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukuran akhir dengan bapak Awir, S.Pd dibenarkan oleh ibu Lulu, S.Pd.</p>
2	Ibu Lulu, S.Pd	Tidak jauh berbeda dengan pendapat teman-teman lainnya, bahwa yang	Kalau menurut pandangan saya, mungkin tak jauh berbeda dengan teman-teman	Hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd

		<p>menjadi faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sering melibatkan masyarakat adalah karena adanya kesadaran pribadi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Kemudian karena memang masyarakat selalu diajak untuk terlibat oleh pihak sekolah sebagai wujud kepedulian sekolah kepada masyarakat. Selain itu juga karena sekolah akan bisa berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari masyarakat sebagai wujud milik bersama yang harus dikembangkan. Inilah yang dapat saya jelaskan sebagai faktor penunjang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun dalam perencanaan pendidikan belum pernah melibatkan masyarakat sehingga faktor penunjangnya pun masih belum nampak.</p>	<p>guru dan anggota komite lainnya bahwa yang menjadi faktor penunjang bagi masyarakat untuk mau berpartisipasi di sekolah adalah karena adanya kesadaran masyarakat untuk mau terlibat, adanya rasa persatuan dan kepedulian dari mereka sehingga mau berpartisipasi. Kemudian adanya rasa memiliki terhadap sekolah karena anak-anak masyarakat kita rata-rata sekolah di sekolah kita sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sekolah. Selain itu juga sekolah dekat dengan lingkungan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk datang membantu berbagai kegiatan di sekolah. Selama ini juga sekolah selalu mengupayakan dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatannya, termasuk dalam pengambilan keputusan dan dalam perencanaan pendidikan yang kini sudah melibatkan masyarakat setelah adanya sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dilakukan oleh peneliti bersama kepala sekolah.</p>	<p>tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Awir, S.Pd baik tahap studi awal maupun tahap pengukuran akhir.</p>
--	--	---	--	---

5. Fokus masalah 5 : Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan

No	Nama Informan	Hasil Wawancara		Keterangan
		Tahap Studi Awal	Tahap Pengukuran Akhir	
1	Bapak Awir, S.Pd.	Dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang pengambilan keputusan, pihak sekolah selalu melibatkan dan mengupayakan agar masyarakat dilibatkan karena masyarakat tentunya memiliki peran penting sebagai konsumen. Dan selama ini saya juga jarang melihat adanya masyarakat yang tidak turut berpartisipasi selama diajak oleh pihak sekolah. ketidakhadiran mereka biasanya karena memang sakit, tidak sempat hadir dan tidak mendapat undangan. Kemudian juga karena sibuk di sawah, sibuk berdagang maupun berternak karena mata pencaharian masyarakat kita seperti itu sehari-harinya. Sekalipun tidak hadir biasanya mereka selalu digantikan oleh pihak keluarga yang lain. Inilah faktor-faktor penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan juga saya rasa sama saja faktor penghambatnya. Tapi	Kalau saya ditanya seputar faktor yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan ataupun kegiatan lainnya, yang dapat saya jelaskan adalah masyarakat tidak bisa berpartisipasi karena terhambat oleh adanya kesibukan atau kegiatan lain saat diajak berpartisipasi. Selain itu masyarakat tidak mau hadir jika melihat kondisi sekolah lain yang lebih maju dari segi sarana dan prasarana seperti sekolah negeri yang memiliki fasilitas yang lengkap, karena sekolah kita tidak mementingkan sarana prasarana tetapi kualitas dan output yang dihasilkan. Ini yang membuat masyarakat berfikir bahwa sekolah kita kurang lengkap. Dan terakhir karena adanya doktrin-doktrin bahwa sekolah kita tidak akan bisa maju, sehingga masyarakat ragu untuk mau berpartisipasi jadinya. Jadi itu yang dapat saya katakana sebagai faktor penghambat partisipasi masyarakat tersebut. Apalagi kami bersama pihak	<p>1. Hasil wawancara tahap studi awal dengan bapak Awir, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd.</p> <p>2. Hasil wawancara tahap pengukjuran akhir dengan bapak Awir, S.Pd dibenarkan dan sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd.</p>

		<p>selama ini memang masyarakat belum pernah dilibatkan dalam kegiatan perencanaan pendidikan. Namun jika dilibatkan pasti faktor penghambatnya sama seperti dalam pengambilan keputusan. Dan kita akan upayakan agar nantinya masyarakat bisa dilibatkan dalam berbagai bidang dan kegiatan perencanaan pendidikan di sekolah kita.</p>	<p>sekolah selalu berupaya mengajak masyarakat untuk terlibat terutama dalam hal perencanaan pendidikan yang sebelumnya jarang melibatkan masyarakat secara langsung, agar mereka tau situasi dan kondisi sekolah yang meskipun tidak mewah tetapi berkualitas dan menghasilkan output yang bisa dibanggakan.</p>	
2	Ibu Lulu, S.Pd	<p>Masyarakat saya rasa tidak pernah tidak hadir untuk berbagai kegiatan di sekolah. Termasuk dalam kegiatan pengambilan keputusan seperti rapat penentuan biaya semester, rapat biaya ujian, dan rapat sumbangan pembangunan yang harus dikeluarkan. Selama ini saya perhatikan masyarakat meskipun tidak hadir biasanya diwakili oleh penggantinya. Dan biasanya masyarakat tidak bisa hadir karena tidak menerima undangan dari sekolah, sibuk dalam berbagai macam bentuk dan jenis kesibukan masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan, dan arena memang lagi kurang sehat. Ini semua yang menjadi faktor penghambatnya. Sedangkan dalam perencanaan pendidikan masyarakat tidak pernah</p>	<p>Sebagai anggota komite saya memang selalu mengupayakan agar tetap sempat hadir dalam berbagai kegiatan di sekolah. Selama ini juga saya selalu memperhatikan masyarakat kita yang mau berpartisipasi apakah semakin meningkat atau tidak. Masalah faktor penghambatnya tentunya banyak sekali yang bisa menjadi penghambat partisipasi masyarakat di sekolah terutama dalam hal pengambilan keputusan dan juga dalam hal perencanaan pendidikan. Biasanya yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat itu adalah karena memang masyarakat lupa akan undangannya karena kesibukan mereka sebagai petani, buruh, peternak dan pedagang yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat kita.</p>	<p>Hasil wawancara dengan ibu Lulu, S.Pd tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan bapak Awir, S.Pd baik tahap studi awal maupun tahap pengukuran akhir.</p>

		<p>terlibat jadi faktor penghambatnya belum pasti. Dan jika dilibatkan, saya rasa faktor penghambatnya sama atau tidak akan jauh berbeda.</p>	<p>Kemudian karena keadaan yang sedang sakit, itu juga merupakan hal yang lumrah terjadi karena diluar keinginan kita. Terkadang juga undangan yang dikirim sekolah tidak nyampe ke tujuan atau penerimanya. Selain faktor tadi, faktor yang memang krusial juga karena masyarakat kita banyak yang mudah terhasut dengan adanya doktrin seperti lulusan sekolah kita banyak yang menganggur, kemudian fasilitas sekolah swasta itu tidak sebanding dengan sekolah negeri sehingga lulusannya nantinya kurang berpotensi dan karena doktrin sekolah swasta tidak bisa sejajar dengan sekolah negeri karena tidak mampu bersaing. Hal ini tentunya membuat masyarakat kita ragu untuk terlibat berpartisipasi di sekolah. Sehingga ini juga menjadi penghambat masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara efektif di sekolah.</p>	
--	--	---	---	--

TAHAP STUDI AWAL

Gambar 01

Kegiatan wawancara dengan Bapak Har selaku orang tua dari Diko kelas X.C dan wawancara dengan Saudara Roni selaku Alumni MA Hidayatul Muhsinin



Labulia

Gambar 02

Kegiatan wawancara dengan Bapak Yani selaku orang tua dari Yulikelas XI.IPA



Gambar 03

Kegiatan wawancara dengan Bapak Sam selaku orang tua dari Uyun kelas XII.IPA



Gambar 04

Kegiatan wawancara dengan Bapak Siba dan istri selaku orang tua dari Aris kelas XII.IPS



Gambar 05

Kegiatan wawancara dengan Bapak
Tamaf selaku orang tua dari Ida
kelas XI.IPS 1



Gambar 06

Kegiatan wawancara dengan Ibu
Fatma selaku orang tua dari Lia
kelas XII.IPA



Gambar 07

Kegiatan wawancara dengan Ibu
Elah selaku orang tua dari Nisa
kelas X.C



Gambar 08

Kegiatan wawancara dengan Ibu
Hani selaku orang tua dari Topik
kelas XII.IPA



Gambar 09

Kegiatan wawancara dengan
Saudara Masrah, S.Pd.I dan
Saudara Awan S.Pd selaku
Alumni MA Hidayatul Muhsinin



Labulia

Gambar 10

Kegiatan wawancara dengan Saudar
Ani, S.Pd. selaku Alumni MA
Hidayatul Muhsinin Labulia



Gambar 11

Kegiatan wawancara dengan Ust.
Wais S.Pd.I. selaku Tokoh
Masyarakat Desa Labulia



Gambar 12

Kegiatan wawancara dengan Ust.
Al-Hakimi S.Pd.I. selaku Tokoh
Agama Desa Labulia



Gambar 13
Kegiatan wawancara dengan Bapak
Yar selaku Kepala Dusun
Tandek Desa Labulia



Gambar 14
Kegiatan wawancara dengan Bapak
Idi selaku Kepala Dusun Labulia
Desa Labulia



Gambar 15
Kegiatan wawancara dengan Bapak
Yan, S.Pd selaku guru penjaskes
sekaligus sebagai wakil kepala
sekolah bidang kesiswaan MA
Hidayatul Muhsinin Labulia



Gambar 16
Kegiatan wawancara dengan Bapak
Hardi, S.Pd selaku guru bahasa
inggris dan bahasa asing
sekaligus sebagai bendahara dan
alumni MA Hidayatul Muhsinin
Labulia



Gambar 17

Kegiatan wawancara dengan Ibu
Lale Aini, S.Pd.I selaku guru
Aqidah Akhlak dan SKI MA
Hidayatul Muhsinin Labulia



Gambar 18

Kegiatan wawancara dengan Ibu
Icha, S.Pd selaku guru biologi
MA Hidayatul Muhsinin
Labulia



TAHAP PENGEMBANGAN



Gambar 1

Kegiatan Pengembangan Saat Rapat Penetapan Biaya Ujian Kelas XII Anatra Pihak Sekolah, Komite sekolah dan Wali Murid



Gambar 2

Kegiatan Pengembangan Pada Saat Kegiatan Rapat Penentuan Biaya Semester Antara Pihak Sekolah, Komite, Pihak Yayasan, Wali Murid dan Anggota Masyarakat lainnya



Gambar 3

Kegiatan Pengembangan Saat Acara Pengumuman Kelulusan Kelas XII Sekaligus Rapat Penentuan Acara Biaya dan Kegiatan Lepas Pisah dan Wisuda Kelas XII yang Dihadiri Pihak Sekolah, Pihak Yayasan, Komite dan Wali Murid Kelas XII



Gambar 4

Kegiatan Pengembangan Saat Penetapan Panitia Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah dan Komite Sekolah



Gambar 5

Kegiatan Pengembangan Saat Rapat Evaluasi Pembelajaran Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah (Kepala Sekolah, Para Waka, Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha)



Gambar 6

Kegiatan Pengembangan Saat Rapat Kenaikan Kelas dan Sekaligus Kegiatan Rapat Pembagian Tugas yang Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Staf Tata Usaha)



Gambar 7

Kegiatan Pengembangan Saat Acara Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah dan Semua Komponen Masyarakat (Wali Murid, Alumni, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Komite Sekolah)



Gambar 8

Kegiatan Pengembangan Saat Acara Pengajian Umum MA Hidayatul Muhsinin dan Rapat Pembangunan Gedung Baru Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah dan Semua Komponen Masyarakat (Wali Murid, Alumni, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Komite Sekolah)



Gambar 9

Kegiatan Pengembangan Saat Acara Permohonan Ijin Pemandokan Bagi Siswa Kelas XII Menjelang Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang Dihadiri Oleh Semua Pihak

Sekolah dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Alumni, Wali Murid dan Komite Sekolah)



Gambar 10

Kegiatan Pengembangan Saat Acara Lepas Pisah dan Wisuda Siswa-Siswi Kelas XII MA Hidayatul Muhsinin yang Dihadiri Oleh Semua Pihak Sekolah dan Semua Komponen Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Alumni, Wali Murid, Komite Sekolah, dan Seluruh Kalangan Pejabat Pemerintah)

TAHAP PENGUKURAN

Gambar 01

Kegiatan wawancara dengan Bapak Sam
selaku orang tua dari Uyun kelas
XII.IPA



Gambar 02

Kegiatan wawancara dengan Ibu Elah
selaku orang tua dari Nisa kelas X.C



Gambar 03

Kegiatan wawancara dengan Ibu Hani
selaku orang tua dari Topik kelas XII.
IPA



Gambar 04

Kegiatan wawancara dengan Bapak Tamaf
selaku orang tua dari Ida kelas XI.IPS



Gambar 05

Kegiatan wawancara dengan Ibu Munah
selaku orang tua dari Dayah kelas

XI.IPS 2



Gambar 06

Kegiatan wawancara dengan Saudara

Masrah, S.Pd.I selaku Alumni MA

Hidayatul Muhsinin Labulia



Gambar 07

Kegiatan wawancara dengan Ust. Wais

S.Pd.I. selaku Tokoh Masyarakat Desa

Labulia



Gambar 08

Kegiatan wawancara dengan Ust. Al-

Hakimi S.Pd.I. selaku Tokoh Agama

Desa Labulia



Gambar 09

Kegiatan wawancara dengan Bapak Hardi,
S.Pd selaku guru bahasa Inggris dan
bahasa asing sekaligus sebagai
bendahara dan alumni MA Hidayatul

Muhsinin Labulia



Gambar 10

Kegiatan wawancara dengan Saudari Ani,
S.Pd selaku alumni MA Hidayatul

Muhsinin Labulia



Gambar 11

Kegiatan wawancara dengan Zuki selaku
Kepala Dusun Olor Agung Desa

Labulia



Gambar 12

Kegiatan wawancara dengan Bapak Lalu
Budini selaku Kepala Dusun Tomber

Desa Labulia



Gambar 13

Kegiatan wawancara dengan Ibu Lale Aini,
S.Pd.I selaku guru Aqidah Akhlak dan
SKI MA Hidayatul Muhsinin Labulia



Gambar 14

Kegiatan wawancara dengan Ibu Icha, S.Pd
selaku guru biologi MA Hidayatul
Muhsinin Labulia



Gambar 15

Kegiatan wawancara dengan Bapak Awir,
S.Pd selaku ketua komite MA
Hidayatul Muhsinin Labulia



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muchlis Raisin, S.Pd lahir di Ubung Lombok Tengah tanggal 29 oktober 1990 dan merupakan putra ke tiga dari pasangan Bapak M. Luthfi Landa, S.Pd dengan Ibu Mahani, S.Pd. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Lombok, SD Negeri 8 Kediri Lombok Barat pada tahun 2002, SMP Negeri 2 Kuripan Lombok Barat pada tahun 2005. Pendidikan Sekolah Menengah diselesaikan pada SMA Negeri 1 Jonggat Lombok Tengahan tahun 2008. Sedangkan Pendidikan Tinggi guna memperoleh gelar sarjana diselesaikan pada tahun 2012 di Universitas Muhammadiyah Mataram pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan IPS Program Studi PPKn. Lulus dengan predikat Coumlaude dan menjadi wisudawan terbaik pada program studi PPKn dengan IPK : 3,74.

Mengawali karir sebagai seorang guru yang dimulai sejak tahun 2009 semasih di bangku kuliah semester tiga pada SMP Islam As-Shofi Montong Are Kediri Lombok Barat. Setelah menyelesaikan sarjana S1, kini telah mengabdikan diri pada beberapa sekolah. Hingga saat ini masih mengajar pada Madrasah Aliyah Hidayatul Muhsinin Labulia Lombok Tengah, Madrasah Aliyah Hidayatul Arifin Kuripan Timur Lombok Barat, Madrasah Aliyah Putra Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat, SMK Kesehatan Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat, SMK Islam Nurul Mujahidin Montong Are Kediri Lombok Barat, SMK Negeri 1 Narmada Lombok Barat, dan MTs Taufiqul Hidayah Kumbang Kuripan Utara Lombok Barat. Jabatan yang pernah dipegang selama ini adalah sebagai pembina wali kelas binaan untuk kelas X, Wakil Kepala Sekolah bidang hubungan dengan masyarakat, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dan menjadi Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Kautsar Kediri Lombok Barat (2012-2014). Mata pelajaran yang pernah diajarkan selama meniti karir sebagai seorang guru pada sekolah-sekolah tersebut adalah : Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu, Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah dan Sejarah Indonesia, dan Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan.